

REFORMASI MANAJEMEN PERBATASAN

Di Negara-Negara Transisi Demokrasi

Reformasi Manajemen Perbatasan Di Negara-Negara Transisi Demokrasi

Editor

Aditya Batara G
Beni Sukadis

Kontributor

Dr. Pierre Aepli
Kolonel Rudito
A.A. Banyu Perwita, PhD
Zoltan Nagy
Letkol. Hegedus Janos

Edisi Pertama, Juni 2007

Tata Letak

Arief P. Susanto

Sampul Muka

Perbatasan Lebanon-Israel

Diunduh dari www.michaelcotten.com

Desain : Arief P. Susanto

Hak Cipta

DCAF & LESPERSI, 2007

ISBN

978-979-1290-01-2



The Geneva Centre for the
Democratic Control of Armed Forces



LESPERSI
Lembaga Studi Pertahanan dan
Studi Strategis Indonesia

KATA PENGANTAR

**Suripto, S.H.,
Wakil Ketua Komisi III DPR RI
dan
Ketua Dewan Pendiri LESPERSI**

Permasalahan perbatasan hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Indonesia. Setelah berdiri sebagai sebuah negara berdaulat selama 61 tahun, Indonesia masih menghadapi serangkaian permasalahan terkait dengan wilayah perbatasannya. Hingga kini masih dicapai kesepakatan dengan negara-negara tetangga terkait demarkasi dan delimitasi perbatasan negara serta tidak adanya otoritas yang jelas dalam mengelola garis perbatasan memberikan implikasi serius bagi dimensi kedaulatan (*sovereignty*) negara dan keamanan warga negara.

Wilayah perbatasan Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada permasalahan kejahatan perbatasan seputar pelanggaran batas wilayah, penyelundupan barang dan orang, infiltrasi terorisme, penangkapan ikan ilegal, *illegal logging*, dan kejahatan HAM.

Berbagai bentuk pelanggaran ini kemudian memberikan dampak serius terhadap dimensi kedaulatan negara dan keamanan warga negara. Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki wilayah laut yang 'mengambang' statusnya jika dilihat dari perspektif hak berdaulat (Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen) sehingga seringkali memicu konflik antara petugas yang berwenang menjaga wilayah perairan laut di Indonesia dengan patroli kapal asing atau nelayan asing dari negara yang berbatasan.

Salah satu permasalahan di perbatasan yang paling fenomenal adalah sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia yang telah dimulai sejak tahun 1969. Pada 17 Desember 2002, Bangsa Indonesia dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Internasional mengenai hak kepemilikan Malaysia yang sah atas Pulau Sipadan-Ligitan. Ada dua faktor yang menjadi penyebab gagalnya Indonesia mempertahankan Pulau Sipadan-Ligitan sebagai wilayah kedaulatannya. *Pertama*, Indonesia tidak mencantumkan nama kedua pulau tersebut dalam Perpu No.4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, pemerintah melandaskan klaimnya secara historis berdasarkan Konvensi 1891 antara Belanda dan Inggris.

Kedua, Indonesia kalah jauh dari Malaysia yang sudah terlebih dahulu melakukan tindakan administratif secara terus menerus terhadap Pulau Sipadan-Ligitan antara lain, pengoperasian mercusuar sejak awal tahun 1960-an dan kegiatan pariwisata sejak tahun 1980-an. Dengan demikian Malaysia menggunakan argumentasi doktrin penguasaan efektif dalam mengklaim kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan.

Berkaca pada peristiwa tersebut, maka setidaknya ada dua permasalahan utama di perbatasan Indonesia yang harus segera diatasi. *Pertama*, belum adanya penetapan dan peraturan yang jelas mengenai batas wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah laut. Apalagi negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat tidak tunduk pada Konvensi UNCLOS (*United Nation Convention on Law of The Sea*) 1982 sehingga batas perairan yang kita tentukan berpotensi untuk dilanggar oleh negara lain. *Kedua*, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini berada dalam tahap kritis, terutama dari sisi stabilitas keamanan.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah minimnya keterlibatan publik terkait dengan isu-isu di perbatasan. Untuk itulah, LESPERSSI (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia) merasa perlu melakukan serangkaian kegiatan terkait dengan isu-isu perbatasan. Fokus utama LESPERSSI terkait isu-isu di perbatasan mencakup aspek keamanan (*security*) di perbatasan itu sendiri. Perbatasan harus dilihat sebagai bagian dari sistem keamanan secara nasional mengingat posisi strategis perbatasan sebagai pintu masuk/keluar (*exit/entry point*) orang dan barang dari negara lain yang berpotensi mengancam keamanan warga negara secara keseluruhan.

Pada 21 Maret 2007, LESPERSSI bekerja sama dengan DCAF Swiss (*The Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces*) melaksanakan sebuah Seminar dengan tema "Good Practices in Border Management and Border Security: Lessons Learned in New Democracies" di Hotel Grand Preanger Bandung. Dalam acara tersebut LESPERSSI mencoba untuk menampung beragam isu terkait keamanan di perbatasan dan beberapa solusi terhadap hal tersebut. Pemaparan dan hasil-hasil diskusi dalam seminar tersebut kemudian dirangkum dalam buku ini yang diharapkan bisa memberikan informasi bagi para *stakeholders* untuk segera melakukan reformasi manajemen perbatasan negara.

Buku ini sendiri akan memaparkan mengenai arti penting reformasi manajemen perbatasan negara dalam perspektif reformasi sektor keamanan, pengalaman dari negara lain (kasus reformasi penjaga perbatasan Hongaria), kondisi perbatasan Indonesia dan isu-isu yang berkembang didalamnya, beserta wacana pembentukan penjaga perbatasan (*border guard*) Indonesia di masa mendatang. Buku ini juga akan melampirkan gambaran program keamanan perbatasan DCAF di negara-negara Eropa Timur yang mungkin dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam melakukan reformasi manajemen perbatasan negara.

Sebagai penutup, LESPERSSI ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan DCAF dan dukungan Kementerian Luar Negeri Jerman dalam penerbitan buku ini.

Jakarta, Juni 2007

KATA PENGANTAR

Deputi DCAF

Mengapa Negara-Negara Demokratis Membentuk Badan Manajemen Perbatasan-Kebutuhan akan Penjaga Perbatasan yang Terlatih Secara Khusus dan Profesional

Philipp H. Fluri, Deputi Direktur, DCAF
Alison Buchanan, Koordinator Proyek, DCAF

Perbatasan secara tradisional menentukan batasan geografis dari entitas politik atau wilayah yurisdiksi hukum, seperti pemerintah, negara bagian atau pembagian pemerintahan sub-nasional. Pada abad ke 20, yang diikuti dengan jatuh dan hancurnya sebuah kekuasaan kekaisaran yang berkuasa dalam jangka panjang, telah diikuti dengan kemunculan negara-negara bagian yang memiliki nasionalisme kuat, yang kemudian menjadikannya sebuah masa penentuan dan demarkasi. Hal ini kemudian diperluas dan diperumit lagi dengan jatuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, kasus yang paling mencuat adalah Yugoslavia; tetapi secara paradoks saat ini Perang Dingin berakhir, perubahan yang muncul kemudian telah menjadikan kondisi keamanan kita secara ekstrem menjadi tidak stabil dan dunia menjadi lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, sebuah permasalahan mendesak yang dihadapi dunia saat ini adalah keamanan perbatasan.

Perbatasan muncul karena alasan yang beragam; untuk mengatur imigrasi, baik itu yang legal maupun illegal; untuk mengontrol pergerakan orang, mengumpulkan pajak kepabeanan, mencegah penyelundupan senjata, narkoba, material dan spesies berbahaya, dan mengontrol penyebaran penyakit. Ada sebuah peningkatan dalam semua bentuk perdagangan gelap, termasuk perdagangan manusia, dan bahkan senjata pemusnah massal. Pada kondisi dunia saat ini, dimana perjalanan mengelilingi belahan bumi manapun menjadi sangat mudah dan memiliki frekuensi yang tinggi, maka bandara dan pelabuhan juga dapat dikatakan sebagai perbatasan, dan mengelola kedua tempat tersebut di abad ke 21 ini adalah sebuah tugas yang lebih kompleks dan menantang dibandingkan sebelumnya. Berbagai ancaman saat ini bersifat lebih subversif, menekan, dan menakutkan-lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya.

Ada banyak alasan untuk hal tersebut. Pertama, kehadiran fenomena baru globalisasi, dengan keuntungannya, telah menciptakan sebuah dunia yang lebih tak terbatas, bahkan hilangnya batas negara, dengan pergerakan barang dan jasa secara bebas diseluruh dunia dan mengubah pola hubungan di dunia. Sayangnya hal ini juga memungkinkan bagi tindak kejahatan untuk bergerak bebas diseluruh dunia dan para pelaku kejahatan dengan beragam keahlian untuk bekerja sama; dengan mengutip pernyataan Duta Besar

Carlos Pais, "Penegakkan Hukum yang lemah adalah lahan-pertumbuhan bagi mereka (kejahatan); mencuci uang haram mereka; jalur utama mereka adalah perbatasan yang keropos; teknologi-teknologi baru, seperti 'telepon dan internet, menjadi peralatan yang mereka pilih."¹ Sehingga dapat dikatakan disini bahwa elemen kedua yang membentuk lingkungan keamanan kita adalah kemajuan teknologi yang telah bergerak seperti kecepatan cahaya dan menjadi bantuan serta kaki tangan globalisasi. Teknologi harus digunakan untuk mengatasi, bukan untuk meningkatkan kejahatan dan menghasilkan cara bekerja sama yang lebih baik dan efisien.

Aspek ketiga, ancaman yang terbaru dan mungkin paling menakutkan adalah terorisme, yang digambarkan sebagai sebuah fenomena yang berada diantara kejahatan dan perang, rasa takut akan tindakan kasar dan destruktif dari teroris muncul di setiap bandara, gedung-gedung perkantoran, stasiun bawah tanah dan bahkan jalanan yang sepi-sebuah mimpi buruk yang dapat menimpa siapa saja. Dengan ancaman baru ini, peran dari penjaga perbatasan telah berubah secara dramatis.

Ketiga sumber ancaman ini berbeda dari ancaman terdahulu di lintas batas, karena ancaman ini tidak lagi dapat didefinisikan berdasarkan wilayah. Perbedaan sebelumnya yang jelas antara ancaman domestik dan internasional menjadi kabur saat ini. Dalam menjamin keamanan setiap negara tidak hanya sebatas sistem keamanan perbatasan yang efisien, tetapi lebih kepada kerjasama yang baik antar semua badan dan organisasi yang dilibatkan, tidak hanya pada tingkatan nasional tetapi juga pada tingkatan regional dan internasional.

Manajemen perbatasan yang efisien dan efektif yang menghargai hak asasi manusia dan peraturan hukum seperti yang terlihat dalam demokrasi kemudian menjadi tugas esensial bagi setiap negara, yang secara luas dipengaruhi oleh fasilitas keamanan dan perdagangan nasional dan internasional. Manajemen perbatasan yang efisien dan efektif akan memungkinkan warga negara untuk hidup di sebuah wilayah yang bebas dan aman, dimana mereka dapat berkeliling secara bebas dan dimana aktifitas bisnis dapat beroperasi lebih efektif melintasi batas, yang merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Saat ini, aliran orang dan barang secara terus menerus melintasi batas negara kita mungkin dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi kita, akan tetapi hal ini juga dapat berperan sebagai saluran bagi teroris, senjata pemusnah massal, imigran ilegal, barang selundupan, dan komoditas ilegal lainnya. Ancaman baru dan peluang-peluang dari Abad 21 kemudian melahirkan permintaan akan pendekatan baru dalam manajemen perbatasan, yang mencakup dua prinsip utama dibawah ini:

¹ Pernyataan Duta Besar Carlos Pais-Kepala OSCE Spillover Monitor Mission untuk Skopje-pada Konferensi Evaluasi Kementerian Kedua di Skopje, Bulan Februari 2005.

-
- Pertama, sebuah perbatasan udara, darat, dan laut dari sebuah negara harus dilengkapi dengan pertahanan yang kuat bagi warga negaranya terhadap semua bentuk ancaman eksternal, terutama teroris internasional dan juga narkoba, penyakit menular, dan hal-hal berbahaya lainnya.
 - Kedua, kontrol perbatasan negara harus efisien, dengan sedikit atau tidak adanya halangan untuk melegitimasi perdagangan dan perjalanan.

Hal tersebut, bagaimanapun juga, menampilkan otoritas yang terlibat dengan tugas yang terpisah dan kompleks, dimana mereka diharapkan dapat mencapai sebuah keseimbangan yang baik antara menjamin 'kontrol ketat' terkait dengan aktifitas kejahatan, dan menjamin pergerakan bebas ide-ide, orang, dan barang. Kemudian, muncul sebuah pertanyaan disini, apa solusi bagi beragam permasalahan dan ancaman baru tersebut.? Tentu saja ini adalah sebuah proses panjang yang mengharuskan pemahaman mendalam dari semua tingkatan otoritas dan dengan persetujuan warga negara. Keamanan saat ini tidak hanya dapat dikaitkan dengan garis perbatasan semata. Keamanan perbatasan tidak dapat lagi berdiri sendiri, karena efek globalisasi yang telah disebutkan di awal tulisan, kejahatan lintas-batas, dan terorisme. Pengawasan perbatasan saat ini mengandung makna sebuah manajemen perbatasan, yang harus terdiri dari semua prinsip-prinsip modern kepemimpinan dan manajemen personel dan standar peralatan teknis yang digunakan. Manajemen perbatasan modern adalah pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan yang membutuhkan kerjasama lintas-batas lebih banyak dan saling berbagi beban.

Secara umum sangat banyak faktor yang terlibat-sejarah, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Penjaga perbatasan dimanapun harus bekerjasama untuk menyatukan standar mereka dan bekerja sama dalam mengatasi ancaman tersembunyi dan meluas untuk mendapatkan dunia yang lebih stabil dan aman. Warga negara mengharapkan pemerintah mereka menempatkan personel berkualitas di perbatasan, yang mampu merespon ketidakpastian dan ancaman dari kondisi keamanan saat ini.

Oleh karena itu, harus ada sebuah keinginan untuk mempelajari hal-hal baru untuk mencapai tujuan kita, sembari berpikir, merencanakan, dan bertindak diseluruh wilayah mandat tanggung jawab. Semua hal ini membutuhkan pembentukan ulang dari badan keamanan perbatasan-di seluruh bagian organisasinya. Struktur, strategi, komando operasional dan prosedur kontrol mereka, logistik mereka, peralatan khusus mereka, dan yang terpenting adalah pendidikan dan pelatihan mereka.

Seiring persepsi dari permasalahan mendasar supranasional, pembiayaan yang besar, keinginan untuk bekerja sama dan menyatukan wilayah otoritas yang berbeda-hukum, polisi, militer, dsb, kontrol perbatasan harus mengambil bentuk sebagai profesionalisme baru, menjadi sebuah kekuatan khusus yang berbeda kedalam sebuah sistem kepolisian dan bukan menjadi bagian dari polisi atau militer biasa. Para personel yang dilibatkan

dalam mengelola perbatasan haruslah seorang profesional spesialis, karena pekerjaan mereka membutuhkan kualifikasi dan keahlian khusus. Hal ini terutama bagi staf terlatih khusus yang dapat menggunakan dan mempraktekkan sistem terintegrasi ini yang terdiri dari elem seperti patroli perbatasan 'hijau' (darat) dan 'biru' (laut), pemeriksaan paspor, jaringan pengamatan visual dan teknis, kapal dan pesawat patroli perbatasan, kapasitas analisis resiko, intelijen dan investigasi kejahatan, dsb.

Dengan demikian jelas bahwa saat ini Penjaga Perbatasan perlu berkembang dalam menghadapi tantangan baru yang ada didepan mereka. Seiring perubahan lingkungan keamanan, peran penjaga perbatasan memainkan sebuah peran yang meningkat menjadi signifikan dalam perlindungan keamanan warga negara. Keberhasilan dalam menjaga perbatasan bergantung pada aspek yang lebih besar dalam kemampuan orang-orangnya, yang terlatih dengan cukup, termotivasi dan dilengkapi dengan peralatan yang layak, yang terfokus dan diorganisir untuk mencapai tujuan, dan dipimpin oleh pemimpin yang terbaik melalui rantai komando keseluruhan. Hal ini tentunya menimbulkan kebutuhan untuk berkembang, beradaptasi, dan mengimplementasikan konsep baru bagi pelatihan keahlian. Otoritas yang bertanggung jawab harus mampu beradaptasi secara proaktif terhadap pelatihan yang dijalankan, dan menghasilkan peningkatan kinerja serta perkembangan individu di organisasinya. Aspek pendidikan dan pelatihan kemudian menjadi lebih penting dibanding sebelumnya, dan otoritas yang ada tidak hanya harus mendefinisikan pengetahuan, kemampuan, dan sikap apa yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas penjagaan perbatasan khusus, tetapi juga mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan menentukan kompetensi yang dibutuhkan.

Sebuah faktor yang tidak kalah penting adalah manajemen sumber daya manusia dengan pelatihan yang rutin dan memenuhi syarat. Merekrut orang-orang yang mampu saja mungkin tidak akan cukup. Mereka haruslah orang-orang yang berdedikasi, dengan sebuah pemahaman yang jelas akan tujuan dan signifikansi dari tugas mereka. Tanpa personel yang terlatih secara profesional, harmonisasi dari standar dan kerjasama antar negara, maka kejahatan terorganisir akan terus memanfaatkan kekeroposan perbatasan dan staf perbatasan yang termotivasi dengan buruk dan tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Jenewa, Juni 2007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar , Suropto, S.H.,	iii
Kata Pengantar , Deputi DCAF	v
Daftar Isi	ix

Bagian Pertama

Manajemen Perbatasan di Negara Transisi Demokrasi

<i>Manajemen Perbatasan di Negara Transisi Demokrasi</i> Dr. Pierre Aepli	1
--	---

Bagian Kedua

Manajemen Perbatasan di Indonesia: Status dan Kebutuhan

<i>Isu-Isu Seputar Keamanan Perbatasan</i> Kolonel Rudito	9
<i>Manajemen Perbatasan Nasional dan Permasalahan Keamanan di Indonesia</i> Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D.....	13

Bagian Ketiga

Pelajaran Dari Negara Lain:

Studi Kasus Reformasi Manajemen Perbatasan Hongaria

<i>Tiga Faktor Reformasi: Proses Reformasi Penegakkan Hukum di Hongaria Dengan Studi Kasus Pelatihan Schengen</i> Zoltan Nagy	20
<i>Pengalaman Reformasi Manajemen Perbatasan Hongaria Sejak Tahun 1989 hingga 2007: Pelajaran dari Demilitarisasi Pembentukan Sistem Manajemen Perbatasan</i> Hegedus Janos	32

Bagian Keempat	
Reformasi Manajemen Perbatasan di Indonesia	
Manajemen Garis Perbatasan Indonesia: <i>Sebuah Usaha Menjamin Keamanan Warga Negara</i> Aditya Batara G.....	49
<i>Border Issues Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum</i> Beni Sukadis	62
 Bagian Kelima	
Program Keamanan Perbatasan DCAF di Uni Eropa	
<i>Pelajaran yang Diperoleh dari Pembentukan Sistem Keamanan Perbatasan : Informasi Masa Lalu, Sekarang, dan Aktifitas di Masa Mendatang</i> Dewan Penasehat Internasional untuk Keamanan Perbatasan DCAF	68
 Lampiran	
Catatan dari Ruang Diskusi (Ringkasan)	118

Profil Institusi

**MANAJEMEN PERBATASAN
DI NEGARA TRANSISI DEMOKRASI****I**

Dr. Pierre Aepi¹

PENGANTAR

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengamati perubahan yang mempengaruhi penjagaan perbatasan dan menggambarkan konsekuensinya di negara-negara yang berada dalam proses transisi menuju demokrasi. Untuk itu, maka saya akan menempatkan penjaga perbatasan dalam sistem keamanan global dan menunjukkan pengaruh evolusi terbaru dalam peran, organisasi, dan relasi penjaga perbatasan dengan aktor-aktor lainnya dalam sistem keamanan. Pengalaman yang telah dialami oleh negara-negara Eropa Selatan-timur menjadi landasan dalam tulisan ini.

Dapat dinyatakan disini bahwa kondisi Indonesia berbeda seluruhnya dengan apa yang muncul di Eropa Timur atas dasar sejarah, geografi, dan politik. Tetapi jika kita melihat dibalik perbedaan yang ada, maka kita dapat menemukan aspek-aspek yang sama antar kedua kondisi tersebut, apa yang sedang terjadi di kedua wilayah tersebut, adalah keduanya sedang menjalankan proses perubahan.

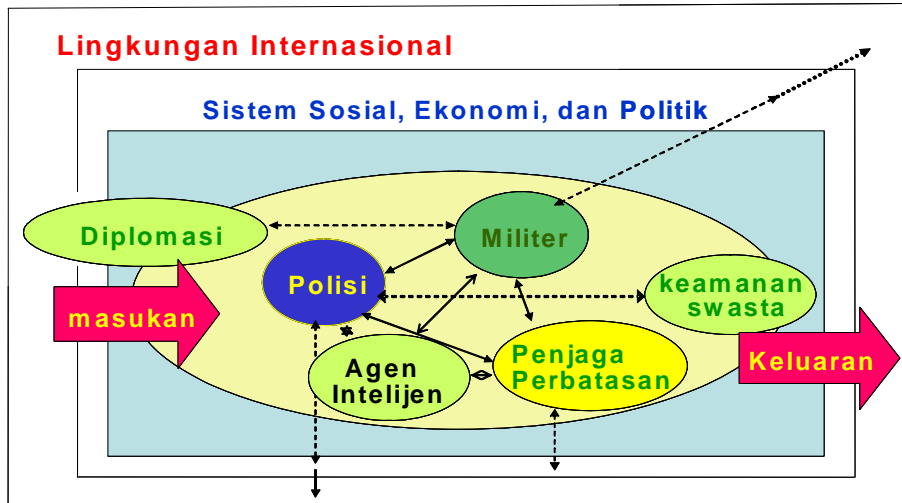
Dalam studi sederhana ini, saya akan memulainya dengan mengevaluasi sistem keamanan dan evolusi yang terjadi, sebelum melihat lebih lanjut pada proses reformasi yang terjadi dalam organisasi penjaga perbatasan di Eropa Timur. Saya kemudian akan mempertimbangkan proses perubahan dan faktor-faktor kunci dalam keberhasilan proses tersebut sebelum mengambil kesimpulan secara keseluruhan.

PENJAGA PERBATASAN SEBAGAI SEBUAH AKTOR DARI SISTEM KEAMANAN

Keamanan dapat dilihat sebagai produk dari sebuah sistem dimana tujuannya adalah untuk menjamin perlindungan negara, masyarakat, dan warga negara. Aktor yang berbeda dalam sistem ini akan berkontribusi, baik itu secara independen atau berkolaborasi, untuk mencapai tujuan tersebut. Gambar berikut ini mendeskripsikan sistem keamanan dan beberapa aktor didalamnya. Sekilas dapat dilihat bahwa sistem keamanan pada kenyataan adalah sub sistem dari sistem yang lebih besar yang akan mempengaruhi proses evolusinya.

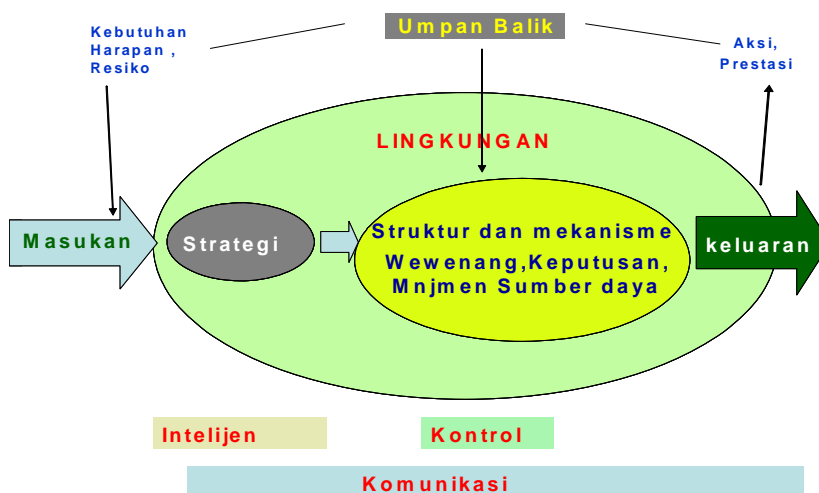
¹ Konsultan Senior DCAF (The Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces) untuk Program Keamanan Perbatasan.

Gambar 1.1. Sistem Keamanan



Aktor utama dari sistem tersebut adalah militer, yang bertugas dalam keamanan negara eksternal dan dapat-berdasarkan situasi tertentu-memainkan peran dalam keamanan internal negara, yang secara tradisional berkaitan dengan perlindungan institusi negara, masyarakat, dan aset mereka; penjaga perbatasan, yang melindungi perbatasan dan badan intelijen. Aktor lainnya juga dapat dilibatkan disini misalnya jasa keamanan swasta yang tengah berkembang di kebanyakan negara dan dalam beberapa kasus, warga negara dapat memainkan sebuah peran dalam perlindungan mereka sendiri seperti yang dicontohkan oleh pengembangan *community policing*.

Gambar 1.2. Mekanisme Sistem Keamanan Nasional

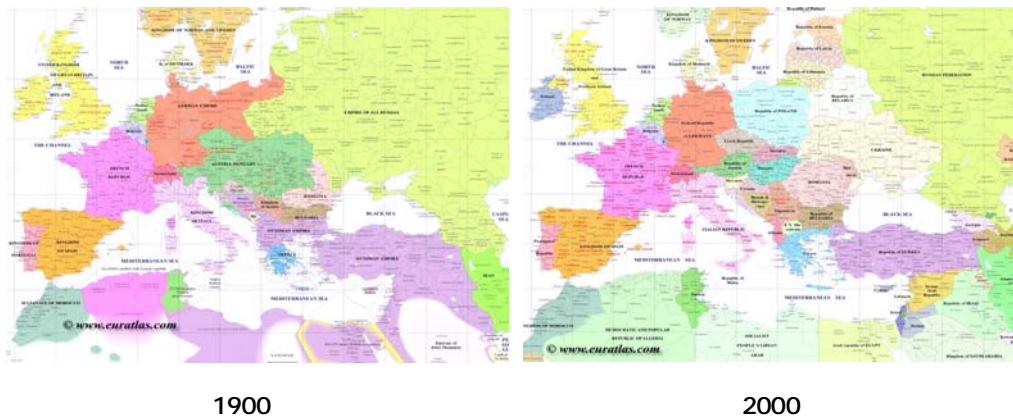


Gambar 2 mendeskripsikan bagaimana sistem tersebut berjalan; input/masukan dalam hal ini termasuk ancaman terhadap negara dan masyarakat sipil, dan kebutuhan serta pengharapan masyarakat akan keamanan. Untuk memenuhi hal ini, maka keluaran (output) dari kebutuhan ini harus diproduksi oleh aktor yang berbeda. Keluaran sendiri akan diukur dengan kebutuhan dan mekanisme korektif yang dilaksanakan jika dibutuhkan. Sistem informasi yang terdiri dari intelijen, kontrol, dan komunikasi harus berkontribusi terhadap identifikasi kebutuhan, pembagian informasi, umpan balik/respon dan pengaturan yang dibutuhkan.

Perubahan lingkungan dan konsekuensi bagi sistem keamanan

Perubahan besar telah terjadi dalam lingkungan keamanan. Disintegrasi Uni Soviet dan Yugoslavia, serta konflik lokal dan regional di berbagai belahan dunia tidak hanya menimbulkan sebuah konfrontasi religius dan etnis yang mendasar, tetapi juga menimbulkan jenis ancaman yang berubah-ubah, bentuk konflik serta peta geografis.

Gambar I.3. Perbatasan Eropa Setelah 100 Tahun

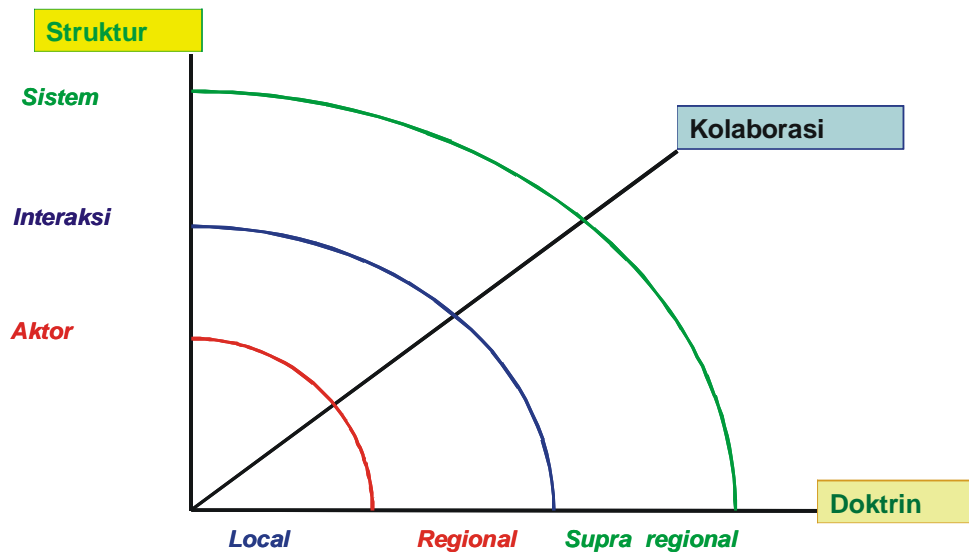


Perkembangan kejahatan terorganisir: imigrasi ilegal, perdagangan narkoba dan lainnya menimbulkan tantangan bagi keamanan negara dan perbedaan yang kabur antara keamanan internal dan eksternal negara. Evolusi tersebut memiliki konsekuensi bagi sistem keamanan dan tingkat perbedaannya:

- Modifikasi dari resiko dan ancaman yang dapat mendorong prioritas baru dan kemudian perubahan tujuan. Sebagai contoh, peningkatan resiko kriminal dan reduksi ancaman militer klasik mengarah ke pengaturan ulang prioritas dan alokasi dana antar aktor yang berbeda dalam sistem tersebut.
- Akibatnya, misi, peran, doktrin dan bentuk organisasional dari sub sistem (aktor) harus dipikirkan ulang dan diadaptasikan. Setiap orang harus melaksanakan sebuah proses perubahan yang tidak mudah.

- Interaksi antara mereka juga akan berubah sebagai bentuk perlawanan terhadap jenis ancaman baru yang membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi.

Gambar 1.4. Ilustrasi Tingkatan Berbeda Terkait Kebutuhan Akan Perubahan



REFORMASI DI NEGARA-NEGARA EROPA DEMOKRASI BARU

Jika situasi yang ditemukan di Indonesia dan Eropa Timur-Selatan (SEE) berbeda, satu hal yang berkaitan dapat ditemukan pada proses perubahan yang mereka telah jalani. Saya harus menampilkan modifikasi dalam organisasi penjaga perbatasan di SEE dan mengidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan dalam manajemen perubahan. Adalah hak Indonesia untuk belajar dari pengalaman yang dialami negara lain yang memberikan manfaat baginya. Saya tidak akan berusaha untuk memberikan nasehat disini, tetapi saya hanya akan menggambarkan beberapa pengalaman yang dialami oleh negara-negara lain yang dapat atau tidak dapat bermanfaat.

Reformasi organisasi penjaga perbatasan

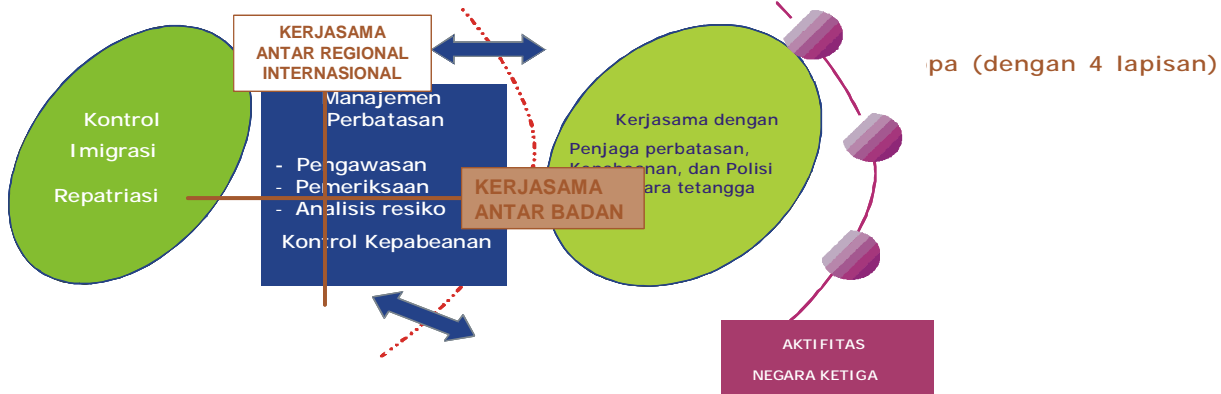
Modifikasi dalam organisasi penjaga perbatasan terjadi dalam konteks umum dari reformasi sektor keamanan. Ada 5 aspek dari reformasi ini yang perlu ditekankan:

- Demokratisasi secara khusus melibatkan instalasi dari institusi pengawasan demokratis.
- Demilitarisasi melibatkan secara utama mentransfer laporan badan keamanan ke Kementerian Pertahanan, dan selain Angkatan Bersenjata melapor kepada Kementerian Dalam Negeri.

- Desentralisasi: kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan kekuasaan kebijakan ke tingkatan yang lebih rendah untuk meningkatkan kecepatan reaksi dan sebuah fleksibilitas yang lebih besar akan kepercayaan penuh secara keseluruhan organisasi dalam mengevaluasi strukturnya.
- Profesionalisme: tantangan baru sama halnya dengan penggantian wajib militer dengan personel kontrak yang membutuhkan akuisisi dari kemampuan dan kompetensi baru.

Aspek-aspek ini diterapkan ke penjaga perbatasan dan mempengaruhi reformasi mereka.

Sebuah elemen tambahan memainkan sebuah peran penting dalam proses reformasi dari penjaga perbatasan: kebutuhan akan negara-negara demokrasi baru menjadikan mereka menginginkan untuk bergabung dengan Uni Eropa untuk mengharmonisasikan organisasi mereka dengan kebutuhan Uni Eropa. Dalam konteks ini, sistem manajemen perbatasan Schengen terintegrasi menjelaskan bagaimana cara melaksanakan kontrol perbatasan (pemeriksaan pada titik lintas batas) dan pengawasan perbatasan (antar pos perbatasan) berdasarkan pada analisis resiko. Untuk menghadapi tantangan baru, pemberantasan terhadap kejahatan terorganisir dan imigrasi ilegal, perdagangan narkoba dan manusia hanya dapat dibatasi melalui kontrol perbatasan. Oleh karena itu, struktur Schengen dibuat sebanyak 4 lapis yang menempatkan perbatasan dalam aspek yang luas. Gambar 5 mendeskripsikan keempat lapisan tersebut:



Secara jelas terlihat bahwa ada dua dimensi dalam pendekatan ini.

Sebagai akibatnya, salah satu kunci utama keberhasilan dalam perlawanan terhadap kejahatan terorganisir bergantung pada pengembangan kerjasama yang tidak hanya antar dalam negara, atau antar badan dari negara yang sama tetapi juga dengan negara yang berbeda. Dalam konteks ini, penandatanganan kesepakatan, pertukaran petugas lapangan atau pembentukan pusat regional memainkan sebuah peran penting. Pembagian informasi, menciptakan kapabilitas analisis resiko yang sama, membentuk patroli bersama, dan meningkatkan operasi kerjasama harus berkontribusi ke kontrol perbatasan yang efisien.

Terkait dengan kerjasama antar badan, adalah penting untuk mengembangkannya antara polisi dan penjaga perbatasan. Keduanya adalah mitra dalam pemberantasan kejahatan terorganisir dan jika terjadi sebuah kejahatan lintas batas, mereka juga dapat terkait dalam bentuk kejahatan lainnya. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang penting ketika polisi dan penjaga perbatasan bekerja sama. Sama halnya juga akan kolaborasi mereka dengan badan kepabeanan dan keimigrasian. Keberhasilan dari kolaborasi semacam ini berada pada definisi yang jelas akan misi dan kompetensi, pembagian informasi dan pengaturan mekanisme koordinasi. Dalam beberapa kasus, untuk menghasilkan kolaborasi yang lebih efektif, maka organisasi penjaga perbatasan, seperti di Hongaria dan Slovenia, telah disatukan dibawah kepolisian.

Demiliterisasi

Dalam proses transisi kearah demokrasi, penjaga perbatasan secara umum telah dipindahkan dari Kementerian Pertahanan ke Kementerian Dalam Negeri dan wajib militer secara bertahap telah digantikan oleh personel kontrak. Perubahan ini memiliki banyak konsekuensi bagi organisasi, peralatan serta doktrinnya. Sumber daya manusia yang lebih sedikit jumlahnya mengandung arti bahwa pendekatan garis depan, dimana setiap bagian dari perbatasan dikontrol oleh patroli, harus digantikan dengan pendekatan manajemen wilayah dimana sumber daya yang terbatas ditempatkan secara mendalam dan dibuat lebih fleksibel. Pengawasan perbatasan harus tetap dilakukan oleh patroli tetapi bagian terbesar dari hal ini akan dilaksanakan oleh pengawasan teknis. Analisis resiko dikembangkan dengan tujuan mempercepat penempatan kekuatan mobil, diposisikan di wilayahnya, sesuai kebutuhan operasional dari situasi yang ada.

Desentralisasi

Penyebaran ulang dari sumber daya manusia ini dan mobilitas operasional mereka yang besar harus disertai tidak hanya oleh pengembangan kapabilitas analisis resiko tetapi juga perubahan dalam kepemimpinan. Rantai piramidal komando harus dilonggarkan dan kebebasan tindakan operasional yang lebih harus diberikan pada tingkatan lebih rendah. Keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan kejadian. Oleh karena itu komandan lokal

harus diperkuat untuk bertindak dan untuk itu mereka harus mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan.

Profesionalisme

Personel kontrak dibandingkan wajib militer, penyebaran sumber daya yang lebih baik, lebih banyak teknologi, pengembangan kapabilitas analisis resiko, dan penguatan pemimpin operasional pada tingkat rendah, hanya dapat berhasil jika usaha yang dilakukan untuk mencapai profesionalisme. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan ulasan komprehensif akan kurikulum dan metode pelatihan. Tanpa menjelaskan secara lebih detil, mari kita tekankan beberapa kebutuhan kunci bagi pelatihan kategori personel yang berbeda.

Tujuan dari pelatihan harus untuk:

- *Petugas Senior*: untuk memperbesar pemahaman mereka akan lingkungan keamanan, peran para aktornya, dan kebutuhan untuk mengembangkan kerjasama mereka. Manajemen perubahan juga harus menjadi isu yang penting.
- *Manajer menengah*: untuk mengembangkan otonomi dan inisiatif mereka dengan tujuan menjadi pemimpin operasional yang efisien.
- *Penjaga perbatasan* untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan baru.

Demokratisasi

Manajemen perbatasan yang demokratis bukan hanya sebatas akuntabilitas birokrasi, tetapi juga termasuk nilai dan standar profesional. Oleh karena itu, tidak hanya penting mengembangkan mekanisme pengawasan yang sesuai tetapi juga penting untuk membangun kepercayaan diantara penjaga perbatasan dan masyarakat. Untuk tujuan ini, korupsi harus diberantas dan transparansi harus dijamin oleh sebuah kebijakan keterbukaan informasi.

KUNCI KEBERHASILAN DALAM PROSES REFORMASI

Hal ini dapat dilihat dari 7 faktor, yaitu:

- Adanya pemahaman mendesak yang akan membantu penyusunan tenaga yang mendukung proses reformasi
- Pengembangan sebuah pandangan yang menentukan apa yang harus dicapai
- Sebuah strategi yang menunjukkan bagaimana tujuan dipenuhi
- Sebuah pendekatan terintegrasi yang memasukkan aktor-aktor kunci dan menjelaskan dengan tegas relasi mereka
- Sebuah dukungan yang jelas dari tingkat politis dan manajemen
- Sebuah kebijakan komunikasi yang transparan baik itu internal maupun eksternal
- Menguasai manajemen perubahan

KESIMPULAN

Kondisi reformasi yang terjadi di Eropa Selatan berbeda dibandingkan yang terjadi di Indonesia. Kebutuhan, ancaman, dan harapan, sama halnya juga dengan faktor politik, geografis, dan geostrategis tidaklah sama. Bagaimanapun juga, kebanyakan karakteristik dari tantangan yang harus dihadapi adalah sama dan harus dikelola dalam konteks perubahan yang sama. Oleh karena solusi dan metode yang dikembangkan untuk melaksanakan proses reformasi di negara lain dapat menjadi menarik bagi Indonesia. Dapat dinyatakan bahwa bagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia, reformasi harus dibuat oleh Indonesia sendiri dan masukkan atau bantuan dari negara lain hanya dapat dilihat sebagai sebuah dukungan bagi sebuah proses reformasi yang diarahkan secara keseluruhan oleh masyarakat Indonesia.

**Manajemen Perbatasan di Indonesia :
Status dan Kebutuhan****II****Isu-Isu Seputar Keamanan Perbatasan***Kolonel Rudito²***Pengantar**

Indonesia termasuk dalam lima negara terbesar di dunia yang memiliki perbatasan laut dengan 10 negara dan perbatasan darat dengan 3 negara. Kawasan perbatasan yang ada tersebar secara luas dengan tipologi yang bermacam-macam mulai dari daerah pedalaman hingga pulau-pulau terluar. Kondisi ini memberikan tantangan yang besar yang mempengaruhi kerangka kontrol dalam mengamankan perbatasan Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Indonesia di kawasan perbatasan memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda dengan kawasan lainnya. Permasalahan yang muncul di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bervariasi, seperti geografi, ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sosial-ekonomi, politik, dan kondisi kultural serta tingkat kesejahteraan dari masyarakat di negara yang berbatasan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh semua kawasan perbatasan di Indonesia adalah kemiskinan dan kurangnya struktur dan infrastruktur dasar sosial.

Isu-isu keamanan di kawasan perbatasan

- Manajemen dari perbatasan negara adalah isu strategis yang mendesak yang berhubungan dengan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Salah satu hal yang berkontribusi dalam kurang optimalnya hasil dari penanganan isu-isu perbatasan adalah ketiadaan institusi yang secara khusus mengelola semua aspek manajemen perbatasan, baik itu di tingkat nasional maupun regional.
- Pengelolaan keamanan memerlukan kerjasama yang erat antar negara di wilayah yang sama. Kerjasama tersebut harus melibatkan sebuah koordinasi antar institusi seperti militer angkatan laut, badan penegakkan hukum lainnya, operator kapal, dan otoritas pelabuhan.
- Isu dan permasalahan yang seringkali muncul dan terjadi dengan negara yang berbatasan secara bilateral didominasi oleh permasalahan dalam menetapkan garis perbatasan antar negara, baik di darat maupun di lautan.

² Paban V Kerjasama Keamanan Perbatasan SOPS MABES TNI

Berikut ini beberapa isu seputar keamanan perbatasan saat ini :

Garis perbatasan negara

Dalam beberapa kawasan perbatasan, baik itu di laut maupun di darat, belum dicapai kesepakatan dalam garis perbatasan. Disamping itu, beberapa batas maritim juga belum disepakati antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan. Permasalahan ini seringkali memicu kesalahpahaman di lapangan antara petugas yang berwenang dengan nelayan dari Indonesia dan sebaliknya.

Penangkapan ikan ilegal

Perbatasan maritim Indonesia dengan 10 negara yang berbatasan memberikan peluang akan bentuk pelanggaran perbatasan apapun, baik itu oleh kapal asing atau nelayan lokal yang tidak mengetahui lokasi pasti dari perbatasan maritim Indonesia. Usaha untuk mengontrol nelayan melintasi garis perbatasan adalah penting untuk diimplementasikan secara komprehensif oleh otoritas keamanan dan pemerintah daerah. Dialog bilateral untuk mengatasi masalah ini juga penting untuk dilakukan oleh otoritas keamanan dan pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kuantitas sumber daya laut negara yang dicuri oleh nelayan asing hingga saat ini yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Pelanggaran perbatasan tradisional

Kesamaan budaya, adat istiadat dan tradisi serta tempat asal di beberapa kawasan perbatasan telah menyebabkan aktifitas pelanggaran perbatasan ilegal yang rutin terjadi. Kesamaan dari budaya dan tradisi serta pelanggar perbatasan adalah isu perbatasan yang muncul sejak dahulu dan muncul kembali seiring dengan pengelolaan area perbatasan darat di beberapa wilayah seperti di Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.

Perampokan bersenjata terhadap kapal dan perompak laut

Menurut pasal 100 dari UNCLOS 1982, perompakan adalah tindakan ilegal "pada lautan luas atau di wilayah manapun diluar yurisdiksi negara manapun". Jadi, tindakan yang terjadi di wilayah perairan dibawah yurisdiksi nasional bukanlah sebuah tindakan "perompakan" tetapi tindakan "perampokan bersenjata" atau "perampokan di laut". Istilah ini harus didefinisikan secara jelas untuk menghindari pemahaman yang salah antara "perampokan di laut" dan "perompakan".

Perompakan, perampokan bersenjata terhadap kapal dan serangan teroris di lautan ini telah memberikan ancaman serius bagi keamanan perbatasan di kawasan asia pasifik yang juga mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Isu ini menjadi dominan dan perdagangan maritim telah menjadi faktor penting dalam mengelola kesejahteraan negara-negara di wilayah tersebut, khususnya di wilayah selatan dan timur.

Perdagangan Narkotika

Telah diketahui bahwa aliran perdagangan jenis ini menggunakan transportasi udara dan laut. Ramuan dasar dari narkotika ini dibawa oleh kargo barang dan datang dari negara lain. Meskipun embargo dan pemeriksaan laut dapat dilakukan di laut, inspeksi pelabuhan harus diterapkan juga untuk memperoleh efektifitas operasi.

Kejahatan jenis ini biasanya memanfaatkan transportasi laut. Biasanya tersangka (yang juga merupakan korban) dalam kejahatan ini dijanjikan kehidupan yang lebih baik di daerah tujuan oleh tersangka utama tetapi kemudian dijatuhi hukuman sebagai tersangka secara individual.

Penyelundupan senjata

Kejahatan jenis ini berasal dari pasar gelap yang kemudian masuk ke Indonesia dengan menggunakan kapal nelayan atau transportasi laut tradisional lainnya. Tindakan ini diperkirakan terjadi di seputar perbatasan Indonesia-Malaysia-Thailand.

Terorisme laut

Ada sebuah persepsi bahwa teroris dapat bekerja secara bersamaan dengan perampokan di Selat Malaka dan menyerang/menghancurkan salah satu lalu lintas perdagangan terbesar di dunia tersebut. Hal yang paling penting adalah kesiapan dan kesiagaan untuk mengatasi semua kemungkinan yang mungkin terjadi terhadap Indonesia yang sebelumnya telah menjadi korban teroris. Bagaimanapun juga, jika kita mengamati secara teliti maka kita akan menemukan fakta bahwa terorisme di lautan masih jarang dan efek yang ditimbulkannya secara psikologis tidak seburuk terorisme di daratan. Secara umum, target utama terorisme adalah memberikan rasa takut yang mendalam bagi masyarakat.

Penebangan kayu ilegal

Kebanyakan kawasan perbatasan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dengan ekosistem yang bervariasi. Hal ini semakin mendorong para pelaku kejahatan untuk melakukan penebangan kayu ilegal. Selain itu, hal ini didukung juga oleh regulasi di Malaysia dan Singapura yang mengizinkan barang asing masuk ke negaranya tanpa prosedur apapun untuk menyelidiki asal muasal barang tersebut. Selama barang yang masuk membayar bea cukai, maka ia dianggap barang legal.

Usaha-usaha mengamankan perbatasan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menghadapi isu-isu di kawasan perbatasan masih bersifat parsial dan *ad hoc* yang dibedakan kedalam beberapa komite, antar lain:

- a. Komite Perbatasan Utama (GBC) RI-MAL, dikoordinatori oleh Menteri Pertahanan RI.

- b. Komite Perbatasan Bersama (JBC) RI-PNG, dikoordinatori oleh Menteri Dalam Negeri RI.
- c. Komite Perbatasan Bersama (JBC) RI-RDTL, dikoordinatori oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Depdagri.
- d. Pertemuan Laporan Tahunan Bersama RI-SING, dikoordinatori oleh Panglima TNI.

Penjagaan keamanan di wilayah perbatasan juga dilakukan dalam beberapa aktifitas operasional, antara lain:

- a. Patroli terkoordinasi dan patroli bersama dengan negara berbatasan, dalam konteks kerjasama bilateral atau trilateral.
- b. Pendirian pos perbatasan bersama.
- c. Pembelian peralatan pengawasan di area perbatasan, seperti Pengawasan Laut Maritim Terintegrasi di sepanjang Selat Malaka.
- d. Penempatan personel TNI di sebagian kecil pulau terluar.

Kesimpulan

- a. Lokasi yang strategis memberikan peluang bagi aktifitas ilegal apapun di kawasan perbatasan.
- b. Sepanjang tahun ini, usaha untuk mengatasi isu-isu di perbatasan dilakukan melalui kerjasama bilateral dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
- c. Penjagaan keamanan dilakukan oleh TNI dengan mengadakan sebuah operasi keamanan perbatasan bersama atau terkoordinasi dengan beberapa negara tetangga. Institusi negara lainnya juga melakukan beberapa usaha dalam diplomasi melalui komite bersama.
- d. Diharapkan, melalui usaha yang komprehensif dari semua elemen bangsa dan niat baik dari negara tetangga, permasalahan di perbatasan akan dapat diatasi dan kondisi keamanan serta kesejahteraan di kawasan perbatasan dapat dicapai dan dikelola dengan baik.

Manajemen Perbatasan Nasional dan Permasalahan Keamanan di Indonesia

*Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D*³

*Kondisi buruk di kawasan perbatasan kita belum mampu menarik perhatian pemerintah untuk memfokuskan kembali kebijakannya. Bahkan pemerintah memiliki sebuah kecenderungan untuk membatasi isu perbatasan hanya diseputar pulau-pulau terluar.*⁴

Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir, lihat, Harian KOMPAS, Edisi 13 February 2006.

Pengantar

Seperti yang dinyatakan dalam kutipan pernyataan diatas, Indonesia saat ini menghadapi beberapa permasalahan perbatasan. Manajemen yang buruk dari pembangunan di kawasan perbatasan kita, yang hingga sekarang masih belum optimal, adalah isu penting saat ini di Indonesia. Permasalahan internal tersebut dan kemungkinan negara tetangga mengklaim bagian dari wilayah negara kita telah menjadikan isu perbatasan menjadi sebuah prioritas bagi pemerintah Indonesia. Hingga saat ini pemerintah belum menganggap serius isu perbatasan sebagai masalah utama dan bahkan tidak melihat mendesaknya pengelolaan integritas teritorial negara dan kedaulatan sebagai sebuah negara kesatuan dalam era globalisasi sekarang ini.

Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2003, Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan seputar perbatasan dengan 10 negara tetangga. Permasalahan tersebut diantaranya dengan, Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste, dan Republik Palau. Sejumlah permasalahan perbatasan ini dapat, dan tentunya memberikan konsekuensi bagi beragam aspek dari keamanan nasional negara kita, termasuk aspek militer, politik, ekonomi, dan sosial.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: bagaimana seharusnya perbatasan negara memainkan peranan esensialnya dalam keamanan di tingkat nasional dan internasional? Bagaimana negara, khususnya TNI, memainkan perannya dalam mengelola perbatasan Indonesia? Tulisan ini melihat pada signifikansi dari isu perbatasan nasional sebagai salah satu aspek penting dari permasalahan keamanan nasional dan terfokus pada sejumlah isu (dimensi militer dan non-militer) sebagai bagian dari solusi komprehensif dalam mengelola isu perbatasan nasional negara kita.

³ Staf Pengajar di Departemen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung, saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor UNPAR.

⁴ Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir, lihat, Harian KOMPAS, Edisi 13 February 2006.

Isu perbatasan dan relevansinya terhadap keamanan nasional

*Perbatasan diibaratkan sebagai agen dari kedaulatan dan keamanan nasional, dan sebuah rekaman fisik dari relasi negara dengan negara tertangga sejak dahulu dan hingga saat ini.*⁵

Seperti yang diindikasikan oleh pernyataan di atas, perbatasan negara sesungguhnya memainkan sebuah peran penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional dan bahkan perbatasan negara memiliki posisi penting dalam membentuk interaksi antar negara dalam sebuah wilayah tertentu. Meskipun demikian, fenomena dari globalisasi telah mengubah hubungan internasional kontemporer, bagaimanapun juga, kondisi ini masih didominasi oleh isu-isu tradisional seperti perbatasan negara. Hal ini tentu saja secara erat berkaitan dengan kedaulatan teritorial dan keamanan nasional negara manapun.

Pada sisi lain, fenomena globalisasi dengan semua aspeknya terlihat mengesampingkan batasan tradisional dari relasi antar negara dan menghapuskan jarak fisik dari negara-bangsa. Perkembangan cepat akan informasi, teknologi, komunikasi, dan persenjataan juga menunjukkan bagaimana garis perbatasan antar negara menjadi irelevan dalam hubungan internasional di era globalisasi ini. Globalisasi, menurut Anthony Mc Grew, tidak hanya menjadikan aspek teritorial di kebanyakan negara menjadi kurang relevan, tetapi juga mempertanyakan eksistensi kedaulatan dari teritorial negara-bangsa.⁶

Perbatasan negara sebagai identitas negara

Dalam kebanyakan negara berkembang, permasalahan perbatasan negara yang belum dapat dikelola dengan komprehensif juga dapat menjadi salah satu indikator sebuah negara berubah menjadi sebuah negara lemah atau bahkan negara gagal.⁷ Hal ini, contohnya, ditandai dengan ketidakmampuan negara dalam mengelola kawasan perbatasannya. Selain itu, kurangnya pemerintahan yang efektif dalam pengelolaan perbatasan nasional juga telah menjadi sebuah permasalahan terpisah yang menambahkan permasalahan serius akan perbatasan tradisional negara.

Dalam konteks Indonesia, sebagai contoh, fenomena dari pembentukan propinsi dan kabupaten baru juga dapat dilihat sebagai munculnya etnonasionalisme baru yang didasarkan pada batasan/perbatasan tradisional tersebut. Sebagai hasilnya, beberapa pemerintahan dari propinsi baru dan kabupaten baru saat ini mencoba untuk menjamin perbatasan regionalnya.

⁵ Lihat, Kari Laitinen (2004). *Reflecting the Security Border in the Post-Cold War Context*, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol6_2/Laitinen.htm, diakses pada 25 Januari 2006.

⁶ Lihat, Anthony McGrew (2000). *Power Shift: From National Government to Global Governance*, dalam David Held ed. *A Globalizing World?: Culture, Economics and Politics*. London: Routledge, pp.127-168.

⁷ Lihat, Stewart Patrick (2006). *Weak States and Global Threats: Fact or Fiction*, dalam *The Washington Quarterly*, Vol.29, No.2, pp.27-53.

Salah satu contoh dari hal ini adalah permintaan DPRD dan pemerintahan propinsi Banten yang baru terbentuk kepada DPRD dan Pemda DKI Jakarta untuk menjamin batasan Kepulauan Seribu.⁸ Jika permasalahan ini tidak diatasi secara komprehensif, ia akan mempengaruhi integritas negara. Konsekuensi negatif dari kegagalan negara untuk mengelola integritas teritorial nasionalnya secara komprehensif akan menghasilkan kecemburuan sosial, ekonomik, dan politik intra-sub-nasional dan bahkan konflik (kekerasan) yang kemudian menciptakan perpecahan dan disintegrasi nasional.⁹

Kapasitas negara yang rendah dan terbatas dalam mengelola dan melindungi setiap perbatasan negara akan memberikan dampak nyata baik itu secara internal maupun secara eksternal. Kompleksitas permasalahan perbatasan tidak hanya akan mendorong konflik/perang intra-negara tetapi juga dapat memicu konflik/perang antar negara. Hal ini pada dasarnya terkait dengan fakta bahwa isu perbatasan secara erat terkait dengan prinsip integritas nasional dan prinsip kedaulatan. Secara tradisional, setiap negara-bangsa akan siap untuk melakukan apapun, termasuk perang untuk mempertahankan kedaulatannya.¹⁰

Selain itu, seperti yang dinyatakan Karl Laitinen bahwa isu perbatasan tidak hanya memasukkan isu teritorial secara fisik, tetapi juga meliputi aspek-aspek lainnya seperti sumber daya (alam) dan harga diri identitas yang dalam konteks tertentu menjadi faktor utama bagi martabat nasional dan lokal.¹¹

Dalam pandangan ini, isu perbatasan adalah sebuah bagian signifikan dari agenda keamanan nasional. Oleh karena itu, sistem pengelolaan dari perbatasan nasional akan memainkan sebuah peran penting dalam agenda pembangunan nasional.

Sementara itu, dalam konteks hubungan internasional, ada banyak kasus yang dapat disebutkan untuk mengilustrasikan konflik antar negara dimana isu perbatasan menjadi faktor pemicunya. Dengan kata lain, perkembangan yang variatif dari hubungan internasional kontemporer telah membawa kontradiksi dalam relasi antar aktor (baik itu negara maupun bukan negara). Disisi lain, isu perbatasan telah memperkuat sentimen dari (etno) nasionalisme dan bentuk identitas (nasional dan lokal) lainnya yang bervariasi dan keinginan untuk mengelola sumber daya (alam). Kasus sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia adalah salah satu kasus yang dapat digunakan untuk menjelaskan signifikansi dari permasalahan perbatasan antar negara-bangsa.

⁸ Harian KOMPAS, Edisi 28 Maret 2006.

⁹ Julian Saurin, (1995) *The End of International Relations ? The State and International Theory In The Age of Globalization*, dalam John MacMillan, Andrew Linklater. *Boundaries In Question: New Directions In International Relations*. London: Pinter Publishers. .hlm 244-261.

¹⁰ Lihat, Daniel Philpott (2001). *Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations*. New Jersey: Princeton University Press, hlm.5-10.

¹¹ Kari Laitinen (2004). *Reflecting the Security Border in the Post-Cold War Context*, In http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol6_2/Laitinen.htm, diakses 25 Januari 2006.

Secara tradisional, hubungan internasional memfokuskan perhatiannya pada studi mengenai pola hubungan antar negara-bangsa. Aspek teritorial dari negara-bangsa kemudian akan menentukan kedaulatannya, kekuasaan, bahkan keamanan. Oleh karena itu, perbatasan nasional akan memainkan sebuah peran signifikan dalam menentukan eksistensi dari sebuah negara-bangsa. Dalam usahanya melindungi dan mengontrol teritorialnya secara efektif dari segala kemungkinan ancaman militer eksternal, setiap negara-bangsa akan membutuhkan kekuatan militer yang sesuai. Ide untuk melindungi keamanan dan keselamatan teritorial nasionalnya didasarkan pada pemikiran realisme klasik yang mempengaruhi sistem swadaya. Dengan kata lain, konsep keamanan di perbatasan akan memberikan konsekuensi terhadap kemampuan untuk pencegahan, kebutuhan untuk memiliki kekuatan militer dan dilema keamanan dalam interaksinya dengan aktor negara lainnya.

Bahkan bagi seorang realis klasik seperti Hans Morgenthau, kepentingan keamanan nasional yang paling penting adalah "untuk melindungi identitas (nya) fisik, politik, dan identitas kultural menghadapi invasi oleh negara lain".¹² Bagaimanapun juga, permasalahan dari perbatasan nasional negara dan keamanan telah melahirkan banyak bentuk di kebanyakan negara berkembang. Studi yang dilakukan oleh Robert I. Rotberg secara eksplisit mengindikasikan bahwa salah satu karakteristik penting dari negara gagal adalah ketidakmampuannya dalam mengelola perbatasan negara yang kemudian mendorong kearah perang intra-negara dan antar negara.¹³ Manajemen efektif dari perbatasan negara, kemudian, menjadi syarat utama untuk menciptakan sebuah negara yang kuat.

Pada sisi lain, seperti yang dinyatakan oleh Georg Sorensen, permasalahan terbesar untuk menciptakan sebuah keamanan nasional dan sebuah negara yang kuat berasal dari kapasitas terbatas dari negara.¹⁴ Hal ini secara umum disebabkan karena agenda negara didominasi oleh permasalahan domestik yang bervariasi, seperti mempertahankan rezim, dan kapasitas terbatas dalam mengelola kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan.

Keamanan militer dan non-militer dari kawasan perbatasan

Bagi kebanyakan negara berkembang, seperti Indonesia contohnya, isu seputar perbatasan nasional seringkali melahirkan sebuah permasalahan dilematis. Aspek pertahanan yang berarti sebagai kemampuan untuk menghadapi ancaman militer bervariasi dari lingkungan eksternal direlasikan dengan ancaman non militer. Tidak seperti di negara-bangsa berkembang lainnya, negara

¹² Dikutip dari Jutta Welds (1996). *Constructing National Interests*, dalam *European Journal of International Relations*. Vol.2. No.3, hlm.275-318.

¹³ Robert I. Rotberg (2004). *The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair*, dalam Robert I. Rotberg ed. *When States Fail: Causes and Consequences*. New Jersey: Princeton University Press, hlm.1-50.

¹⁴ Georg Sorensen (1996) *Individual Security and National Security: The State Remains the Principal Problem*, dalam *Jurnal Security Dialogue*. Vol27. No.4. hlm.375-390.

berkembang harus menghadapi beragam permasalahan dalam perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan politik di negaranya yang sangatlah rumit serta secara erat berhubungan dengan stabilitas dan kemampuan dari aspek pertahanan untuk melindungi negara dari ancaman militer apapun yang berasal dari lingkungan eksternal.

Dipandang dari eksplorasi literatur akademik, beragam permasalahan diatas telah menunjukkan isu non militer yang signifikan terhadap kapasitas untuk melindungi keamanan nasional.¹⁵ Sebuah negara yang gagal untuk melindungi perbatasan nasionalnya akan, kemudian menghadapi beragam permasalahan ketidakamanan dari aktor-aktor non negara, misalnya kejahatan transnasional yang terorganisir dan kelompok-kelompok teroris yang seringkali mengeksploitasi perbatasan wilayah dalam merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan aktifitas teroris mereka.

Salah satu kasus yang dapat menjelaskan dengan baik mengenai bagaimana organisasi kejahatan transnasional dan kelompok teroris melaksanakan aktifitas mereka adalah pemanfaatan wilayah perbatasan antara Thailand, Malaysia, dan Singapura oleh kelompok teroris dalam menyusun, merencanakan, dan melaksanakan aktifitas terorisme mereka di Indonesia beberapa tahun yang lalu.¹⁶ Perbatasan Thailand Selatan hingga propinsi Satun hingga Sumatra (Kepulauan Riau) melalui wilayah perairan Malaysia disekitar Langkawi-Penang adalah sebuah rute darat dan rute laut yang disukai untuk mengalirkan dana, distribusi senjata, dan peledak dari para tersangka teroris untuk mendesain aktifitas terorisme. Selain itu, area perbatasan dari Filipina Selatan dari Zamboanga dan Davao (Mindanao), kearah Sulu dan Sarawak serta Nunukan di Kalimantan dan Kepulauan Sangihe Talaud di Sulawesi Utara ke Maluku dan Sulawesi Tengah diketahui sebagai rute dari senjata untuk aktifitas terorisme di bagian timur Indonesia.¹⁷ Dari contoh diatas, maka tidaklah berlebihan jika surat kabar The New York Times menyatakan bahwa,

*Negara gagal yang tidak dapat menyediakan pekerjaan dan makanan bagi rakyatnya, yang telah kehilangan wilayahnya kepada pemenang perang, dan yang tidak mampu lagi menentukan atau mengontrol perbatasan mereka, telah mengirimkan undangan kepada teroris.*¹⁸

¹⁵ Untuk pembahasan lebih mendalam atas isu ini, lihat Richard Ullman (1983). *Redefining Security*. Dalam *International Security*. Vol.8.No.1, Ole Waeber (1989). *European Security-Problems of Research on Non-Military Aspects*. Copenhagen Papers No.1. Copenhagen: University of Copenhagen, , Barry Buzan (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, Helga Haftendorn (1991). *The Security Puzzle: Theory Building and Discipline in International Security*. In *International Studies Quarterly*. Vol. 35. No.1, Muthiah Alagappa (1998). *Asian Security Practice: Material and Ideational Practices*. California: Stanford University Press, Benjamin Miller (2001). *The Concept of Security: Should it Be Redefined*. In *The Journal of Strategic Studies*. Vol.24.No.2, Sean Kay (2004). *Globalization, Power and Security*. In *Security Dialogue*. Vol.35. No.1.

¹⁶ *Harian KOMPAS*, Edisi 1 April 2006.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *New York Times*, July 2005. Dikutip dari Stewart Patrick (2006), hlm.34.

Seperti yang dialami oleh kebanyakan negara berkembang, kompleksitas dari aktor, isu militer dan non militer, seperti pembangunan yang tidak setara atau tidak adil dalam kawasan perbatasan, populasi berlebih, kejahatan transnasional, degradasi lingkungan, dan permasalahan sosial dan budaya, adalah akar dari ketidakamanan nasional. Seperti yang dinyatakan Caroline Thomas,

Keamanan (nasional) dalam konteks dunia ketiga tidak secara sederhana mengarah kepada dimensi militer, seperti yang diasumsikan oleh diskusi konseptual barat, tetapi ke seluruh dimensi dari sebuah eksistensi negara yang telah diatasi oleh negara yang lebih maju, khususnya negara barat.¹⁹

Kasus sederhana terkait dengan pernyataan diatas, sebagai contoh, dapat diilustrasikan dari dua laporan berbeda yang dibuat oleh Harian KOMPAS (edisi 10 Maret 2006). Dilaporkan dalam sebuah artikel yang berjudul "Keamanan RI jadi Isu Utama". Artikel tersebut menulis mengenai penurunan investor asal Jepang untuk menanamkan modalnya terkait dengan rendahnya tingkat keamanan dan stabilitas sosial di Indonesia. Sementara dalam berita lainnya pada terbitan dan tanggal yang sama, ada sebuah pemberitaan yang berjudul "Pos TNI di Pulau Terluar Papua" yang melaporkan usaha Kodam Trikora untuk membangun pos militer untuk melindungi pulau terluar dari kemungkinan klaim negara/pihak lain. Selain itu, dalam berita itu dinyatakan bahwa wilayah perbatasan tersebut dicurigai telah menjadi jalur laut utama untuk penyelundupan, penebangan kayu ilegal, dan pencurian ikan.

Istilah 'keamanan" seperti yang dinyatakan dalam dua artikel diatas membawa dua makna berbeda. Pemberitaan pertama melihat kondisi nyata dari isu non militer pada tingkatan domestik yang secara substansial mempengaruhi investor asing. Dalam usaha mengundang investasi asing, pemerintah seharusnya memiliki kebijakan yang lebih komprehensif di area isu non militer seperti ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Sementara pemberitaan kedua mengacu pada aspek perlindungan terhadap area perbatasan dan kemungkinan ancaman militer eksternal apapun.

Tingkat kerentanan akan serangan di kebanyakan negara berkembang meningkat lebih tinggi ketika permasalahan yang beragam diatas bercampur dengan permasalahan lain seperti keterbatasan sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan ketidakmampuan institusional (termasuk kekuatan militer). Untuk itu, dalam isu perbatasan negara dan keamanan nasional, ancaman militer dan non militer yang tidak dapat dibedakan. Sebagai hasilnya, pengelolaan dari perbatasan nasional akan melibatkan dimensi yang beragam akan militer, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan politik.

¹⁹ Dikutip dari Caroline Thomas (1991). *New Directions in Thinking about Security in the Third World.*, dalam Ken Booth ed. *New Thinking about Strategy and International Security*. London: Harper Collins Academic, hlm.269.

Kesimpulan

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, isu perbatasan nasional yang rumit yang berhubungan dengan jenis ancaman, objek keamanan nasional yang lebih luas, keterbatasan sumber daya, dan persepsi ancaman akan selalu mendorong kearah kebijakan yang lebih komprehensif. Secara internal, manajemen efektif perbatasan teritorial nasional tidak hanya akan memperkuat pembentukan negara-bangsa tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan keamanan regional. Hal ini dapat dicapai dengan membentuk kerjasama dengan negara tetangga. Akan tetapi, kita harus mampu mengatasi dimensi yang beragam seperti ekonomi, sosial, hukum, dan diplomasi dalam mengelola perbatasan kita.

Dengan meminjam pernyataan Rizal Sukma, dalam usaha untuk secara komprehensif mengelola perbatasan nasional, maka kita harus setidaknya memiliki empat dimensi yang terintegrasi dalam kerangka kebijakan nasional kita, yaitu: Pembangunan, Demokrasi, Diplomasi, dan Pertahanan.²⁰ Kegagalan untuk mengkombinasikan dimensi diatas akan hanya menciptakan Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang baru gagal lainnya dalam era globalisasi ini.

²⁰ Rizal Sukma (2005) *War will never solve our problem*, Harian The Jakarta Post, Edisi 21 Maret 2005.

**Pelajaran dari Negara Lain : Studi Kasus
Reformasi Manajemen Perbatasan Hongaria****Tiga Faktor Reformasi
Proses Reformasi Penegakkan Hukum di Hongaria Dengan Studi
Kasus Pelatihan Schengen****Zoltan Nagy²¹****Pengantar**

Dalam kurun waktu 18 tahun terakhir setelah perubahan sistem politik di Hongaria, penjaga perbatasan telah berhasil menyelesaikan beberapa elemen penting reformasi, tetapi kami harus menyatakan bahwa proses reformasi masih berjalan di seluruh sektor penegakkan hukum di Hongaria. Tulisan ini memiliki 3 bagian, bagian pertama akan membahas mengenai reformasi penegakkan hukum di Hongaria dalam sebuah konteks yang luas mengenai kebijakan keamanan di Hongaria; proses ini sendiri bersifat kompleks, global, regional, dan pada saat yang bersama di seluruh Eropa. Hal ini berarti bahwa disamping sebuah aktifitas penegakkan hukum nasional yang berhasil, Hongaria harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya di Uni Eropa, sama halnya dalam kesepakatan internasional lainnya.

Oleh karena itu, semua organisasi penegakkan hukum-termasuk penjaga perbatasan Hongaria-harus menghadapi tantangan untuk turut serta dalam sebuah aktifitas penegakkan hukum yang terintegrasi seperti dalam strategi/kebijakan yang disebutkan diatas. Secara praktis, hal ini berarti bahwa organisasi penjaga perbatasan dan kepolisian harus terintegrasi dalam satu organisasi di sebuah badan pemerintah. Hal ini adalah langkah signifikan dalam tindakan pengintegrasian tersebut, tulisan ini akan memberikan informasi lebih rinci mengenai faktor yang membuat hal seperti itu menjadi penting-tidak hanya untuk Hongaria saat ini tetapi juga setahun yang lalu bagi negara-negara anggota Uni Eropa, misalnya Jerman.

Setelah integrasi, tugas keamanan perbatasan akan berada didalam organisasi kepolisian sebagai sebuah tugas penegakkan hukum yang bersifat khusus, oleh karena itu proses integrasi tidak berarti bahwa peran penjaga perbatasan dihapuskan di masa depan, tetapi dalam sebuah organisasi yang dirasionalkan, tugas yang sebagian baru ini harus di reorganisir dengan tujuan menjawab tantangan baru dari kondisi nasional dan internasional.

Penegakkan hukum dalam masyarakat demokratis telah melahirkan beberapa kriteria, yang didasarkan evaluasi legalitas dan teknikalitas dari penggunaan kekuatan. Berdasarkan pandangan ini, sebuah penggunaan kekuatan (kekerasan) fisik yang sah adalah:

²¹ Kepala Departemen, Direktorat Jenderal Pelatihan, Kementerian Penegakkan Hukum dan Kehakiman, Budapest, Hongaria.

- *Instrumental*, karena fungsi dari penegakkan hukum bukan untuk menghukum orang yang bertindak ilegal dan bukan untuk aksi balas dendam, tetapi untuk mencegah atau menghentikan situasi ilegal dan menjamin kepastian hukum dimasa depan.
- *Kekuatan signifikan*, karena kekuatan fisik hanya dapat digunakan jika aspek bahaya tidak dapat diatasi dengan metode lainnya.
- *Kekuatan minimal*, karena kekuatan fisik dilaksanakan dengan menyebabkan kemungkinan kerugian yang kecil dan berhadapan dengan orang yang tidak bersalah serta material disekelilingnya.
- *Kekuatan proporsional*, karena kekuatan fisik tidak diperbolehkan menyebabkan kerugian yang lebih besar dibandingkan tingkat bahaya yang harus dihadapi.
- *Kekuatan reaktif*, karena jika seorang petugas menghadapi sebuah serangan ilegal, reaksi yang harus dilakukan harus sesuai dengan ruang dan waktu, dimana reaksi ini hanya akan bersifat legal pada tempat tindakan pada saat dan hingga waktu tertentu dimana tindakan ilegal muncul.
- *Kekuatan profesional*, karena cara penggunaan kekuatan fisik ditentukan oleh pengalaman profesional, keahlian dan kompetensi serta kekuatan fisik signifikan yang diperoleh melalui pelatihan.

Terkait dengan kompleksitas dari tugas dan kebutuhan global terbaru akan organisasi penegakkan hukum, maka penegakkan hukum menjadi sangat signifikan, sehingga sangatlah penting untuk menentukan dan membedakan antara koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi.

Salah satu cara untuk membedakan definisi dari kerjasama

- **Koordinasi:** Organisasi dari usaha dari kelompok berbeda untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Isu tingkat tinggi seringkali tidak dilibatkan, dan setiap kelompok tidak harus berhubungan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan. Tujuannya bersifat statis.
- **Kerjasama:** Sebuah cara untuk mencapai tujuan yang melibatkan keuntungan dan kerugian dari setiap partisipan. Hal ini seringkali dihadapkan pada situasi kompetitif, dan masing-masing kelompok tidak harus berhubungan untuk menyelesaikan tugasnya. Tujuannya bersifat statis.
- **Kolaborasi:** Semua kelompok bekerjasama dan membangun konsensus untuk mencapai sebuah keputusan atau menciptakan sebuah produk, hasil yang menguntungkan semua kelompok. Kompetisi adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin bagi kolaborasi, dan hubungan antar kelompok harus tetap berlanjut dalam penyelesaian tugasnya dengan tujuan untuk menjamin kapabilitas. Tujuannya bersifat dinamis.

Kemudian, muncul pertanyaan, dimana tim, kemitraan, kelompok pemikir, akses-terbuka, dan proyek kerjasama diletakkan dalam skema ini.? Definisi umum dari sebuah tim adalah kelompok interdependensi, yang kemudian menjadikan kelompok kolaboratif sebagai tim, kelompok koordinasi bukan tim, dan kelompok kerjasama bisa menjadi tim atau tidak sama sekali. Kemitraan dan kelompok

bisnis secara utama adalah pengertian kerjasama, yang tujuannya berubah setiap waktu. Perkembangan akses-terbuka dapat menjalankan ketiga jenis kerjasama diatas. Sama halnya kelompok pemikir secara teoritis, meskipun dalam kenyataannya banyak kelompok pemikir yang bekerja sendiri dan tidak sama sekali bersifat kolaboratif. Bahkan pekerjaan dari ilmuwan dalam proyek internasional utama secara substansial adalah individual, dengan sedikit lebih banyak koordinasi dan kerja sama dibandingkan kolaborasi sesungguhnya.

Khusus bagi organisasi penegakkan hukum, reformasi di Hongaria saat ini berada pada tingkatan kerjasama, tetapi usaha yang kuat masih berjalan untuk mencapai tingkatan berikutnya yaitu kolaborasi. Bagaimanapun juga, kita dapat menyimpulkan bahwa adalah sesuatu yang mendesak untuk memiliki sebuah strategi dalam aktifitas penegakkan hukum yang terintegrasi dengan tujuan untuk mendapatkan tindakan kolektif yang efektif di masa mendatang.

Sebagai konsekuensi dari pernyataan diatas adalah sebuah organisasi penjaga perbatasan yang terpisah tidak akan bertahan lama di masa depan, dan kolaborasi bukanlah merupakan tugas sebuah organisasi tetapi ia harus diintegrasikan di semua bidang aktifitas.

Pada bagian pertama dari makalah ini, tiga bagian utama dari proses reformasi penegakkan hukum di Hongaria akan dijelaskan termasuk organisasi dari Penjaga Perbatasan Hongaria.

Pada bagian kedua, sebuah studi kasus akan ditampilkan termasuk pentingnya aktifitas pelatihan dalam proses reformasi tersebut. Tulisan ini akan mencantumkan bagian mengenai pelajaran yang diperoleh sebagai akhir tulisan yang juga merupakan bagian kesimpulan.

1. Tiga Faktor Reformasi (Perubahan)

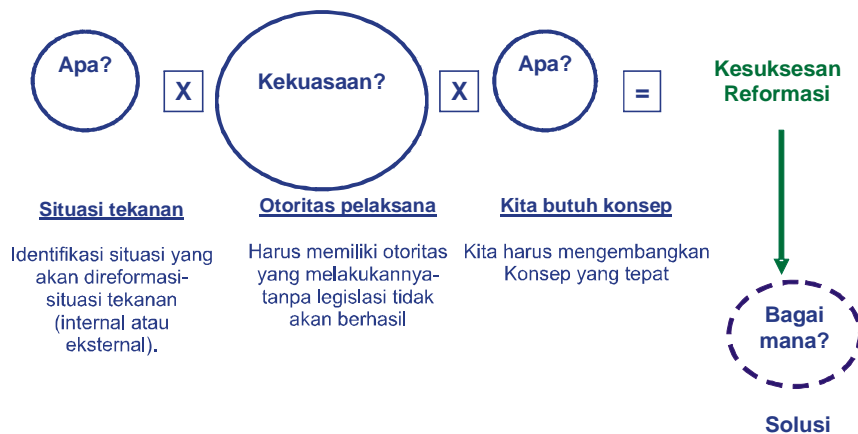
Dapat dinyatakan disini bahwa sebuah reformasi atau proses ke arah perubahan memiliki tiga faktor utama: sebuah kondisi yang menekan; kekuasaan untuk mengimplementasikan reformasi; dan sebuah konsep bagi implementasi reformasi (Gambar 1):

1. Pertama, kita harus mengidentifikasi situasi dimana kita membutuhkan reformasi-ini adalah sebuah situasi yang menekan.
2. Kedua, kita harus menciptakan dan mengklarifikasi wewenang, kekuasaan, dan hak untuk menjalankan proses reformasi.
3. Ketiga, kita harus mengembangkan konsep yang benar untuk mengimplementasikan reformasi.

Setelah memiliki sebuah konsep, kita dapat memulai proses elaborasi dan implementasi reformasi. Kita harus mempertimbangkan sumber daya yang ada (sumber daya manusia dan finansial) dan menganalisa serta mengetahui perbedaan antara situasi saat ini dan situasi yang yang diharapkan pada saat akhir dari proses tersebut.

Sebelum menjelaskan konsep reformasi penegakkan hukum di Hongaria serta implementasi dari ketiga faktor dalam skema tersebut, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai dua pengalaman kami sejak dulu hingga saat ini dalam proses integrasi ini: pengalaman kami menunjukkan bahwa

Gambar III.1. Tiga Faktor Reformasi



Salah satu dari komponen diatas tidak ada = tidak ada reformasi

individu kunci dari perubahan adalah orang-orang itu sendiri, para kolega yang bekerja dalam organisasi penegakkan hukum. Apabila ingin mengimplementasikan perubahan dengan sukses maka transfer pengetahuan memiliki peran utama. Kami harus menyakinkan para kolega ini mengenai reformasi dan melatih serta mempersiapkan mereka untuk aktifitas baru.

Menurut pendapat saya, hal ini adalah faktor kunci dalam keberhasilan, dan hal ini sama pentingnya dengan memiliki sebuah konsep yang baik. Ada ratusan contoh dari seluruh dunia mengenai konsep-konsep yang baik yang semuanya pada akhirnya tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk berbicara mengenai transfer pengetahuan dan dalam tulisan ini akan direpresentasikan oleh sebuah contoh praktis.

1.1 Kondisi Tekanan yang Memfasilitasi Proses Reformasi di Hongaria

Faktor pertama dari skema sebelumnya adalah situasi/kondisi tekanan yang memfasilitasi reformasi yang menggambarkan mengapa sebuah reformasi menjadi penting.

Dalam hal ini adalah perubahan sistem politik pada tahun 1989 di Hongaria dari sosialisme ke republik. Pada tahun tersebut, Hongaria berubah bentuk dari sebuah negara sosialis menjadi sebuah republik, dan pada tahun 1990 sebuah pemilihan umum yang bebas dilaksanakan yang menghasilkan parlemen baru. Dengan demikian, Hongaria menjadi sebuah negara yang bebas dan demokratis.

Perubahan ini menimbulkan tekanan bagi struktur yang berfungsi dalam sistem lama, yang dikarakteristikan sebagai berikut:

Militerisasi dan Sentralisasi

- Sistem militer yang sentralistik pada masa sebelum 1989, organisasi penegakkan hukum tidak memiliki regulasi hukum hingga tahun 1990. Militerisasi adalah sesuatu yang problematik dalam konstitusi dan hal ini berlawanan dengan konsep pemisahan kekuasaan.

- Sentralisasi memiliki efek negatif pada tingkat implementasi; ia memperlambat implementasi tugas karena hanya ada beberapa kemungkinan untuk mendelegasikan kekuasaan dan kompetensi ke tingkat yang lebih rendah.

Politisasi

- Kekuatan politik dan profesional tidak dipisahkan satu sama lain dan politik memiliki pengaruh yang besar pada aktifitas dari organisasi profesional.

Terkait dengan situasi baru setelah 1990 dan perubahan dalam lingkungan internasional seperti globalisasi, lonjakan teknologi dan teknis, tugas dan tantangan baru kemudian muncul dalam aktifitas organisasi penegakkan hukum, seperti:

- Kejahatan internasional terorganisir
- Terorisme
- Imigrasi ilegal
- Kejahatan 'kerah putih' dan kejahatan intelektual (keduanya memberikan ruang dan kesempatan yang besar ke arah kriminalitas)
- Peningkatan resiko akan bencana alam sebagai konsekuensi dari pemanasan global
- Pengurangan kontrol kepabeanaan pada perbatasan internal dari Uni Eropa.

Fenomena baru ini menjadikan kebutuhan untuk merestrukturisasi organisasi lama atau membentuk organisasi baru menjadi signifikan sehingga dapat berhadapan dengan masalah-masalah tersebut dan menjawab tantangan baru.

Hal ini berarti bahwa secara praktis, individu yang bekerja pada organisasi penegakkan hukum harus dihadapkan pada pengetahuan baru, dan pengetahuan ini harus ditransfer kepada mereka. Globalisasi dan kejahatan internasional hanya dapat ditangani dengan kerjasama didalam organisasi penegakkan hukum, antar mereka dan melalui kerjasama dengan organisasi luar lainnya. Perkembangan teknologi yang pesat juga memperluas kemungkinan dari kejahatan, semisal informasi teknologi yang melahirkan terorisme informasi teknologi atau kejahatan intelektual, yang keduanya menyebar dengan cepat. Untuk mengatasi kejahatan seperti ini, adalah mutlak untuk memiliki peralatan teknis dan teknologi informasi yang memadai.

1.2. Kekuasaan Untuk Mengimplementasikan Reformasi

Faktor yang kedua dari proses reformasi adalah untuk menciptakan dan mengklarifikasikan kekuasaan, wewenang, dan hak untuk mengimplementasikan reformasi.

Dalam sebuah negara demokratis, landasan normatif harus diciptakan bagi implementasi dari reformasi. Kesepakatan internasional yang mengatur bantuan pengadilan kriminal, kerjasama pemberantasan terorisme, telah menjadi bagian dari legislasi Hongaria.

Hongaria sebagai anggota dari Uni Eropa secara berkelanjutan melakukan harmonisasi hukum dalam bidang penegakkan hukum dan juga di bidang lainnya.

Secara nyata, organisasi penegakkan hukum Hongaria juga bergabung dengan kerjasama internasional dalam bidang penegakkan hukum. Selain itu, Hongaria adalah anggota dari sejumlah organisasi internasional.

1.3. Menyusun Sebuah Konsep Bagi Implementasi Reformasi

Dengan tujuan untuk melakukan proses reformasi di struktur sebuah negara maka harus disediakan sebuah landasan teoritis. Adalah tidak mungkin untuk melakukan reorganisasi satu unit dari struktur dan membiarkan unit lainnya. Hal ini bahkan menjadi lebih wajib dalam kasus aktifitas organisasi penegakkan hukum yang membutuhkan kerjasama erat dari lingkungannya. Isi, tampilan dan kepentingan keamanan telah memperoleh dimensi baru, oleh karena itu implementasi dari tugas baru dalam bidang penegakkan hukum berujung dalam sebuah tekanan untuk mengubah keseluruhan dari pendekatan, filosofi, dan metodologi yang digunakan.

Faktor ketiga dari skema reformasi penegakkan hukum adalah penyusunan dan implementasi dari konsep yang menjawab kebutuhan dari lingkungan baru. Hal ini berarti bahwa sistem lama harus direformasi berdasarkan hal sebagai berikut:

- Depolitisasi, yang berarti sebuah pemisahan dari kontrol politik dan profesional, akan tetapi dibalik ini, pembentukan aktivitas penegakkan hukum, sama halnya dengan menjaga/menjauhkan kekuatan politik tertentu dari aktifitas penegakkan hukum. Reformasi memiliki sebuah prakondisi untuk memisahkan dan membedakan kepemimpinan politik dan profesional.
- Demilitarisasi adalah penting dalam kondisi dimana ia menjadi permasalahan terkait dengan konstitusi karena ia membahayakan prinsip pemisahan kekuasaan. Sebagai contoh, dalam keadaan peristiwa kriminalisme, maka penempatan komando militer yang lebih tinggi dibandingkan penegak hukum adalah sesuatu yang tidak dapat diterima.
- Desentralisasi yang berarti bahwa organisasi kepolisian diorganisir menurut pemerintah lokal dan sistem pemerintahan Hongaria, kerjasama antara direktorat kepolisian didukung penuh dan oleh karenanya beberapa aktifitas harus secara rasional berada dibawah kontrol pusat. Organisasi dari penjaga perbatasan juga diorganisir secara desentralisasi, akan tetapi berbeda dengan 19 direktorat dalam kepolisian, penjaga perbatasan memiliki 10 direktorat di Hongaria dan satu organisasi pusat di ibukota.

Penerimaan akan reformasi adalah salah satu kunci utama akan keberhasilan reformasi. Memenangkan dukungan bagi manajemen reformasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sangat penting. Akan tetapi, sangat penting untuk melibatkan kolega-kolega dari organisasi kedalam proses reformasi. Sebuah contoh yang baik untuk hal ini adalah solidaritas dari petugas penjaga perbatasan dan pengaruh positifnya terhadap proses reformasi.

Dalam konteks menstabilkan keamanan internal dan eksternal, kami membangun sebuah kemitraan strategis internal antar organisasi penegakkan

hukum dengan sejumlah besar perjanjian internasional, yang mana kami berharap untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan stabil. Aktifitas dari organisasi penegakkan hukum nasional dikarakteristikan oleh koordinasi dan kerjasama serta struktur koordinasi yang ada telah diciptakan secara mapan.

Ide akan kepolisian komunitas mencakup pertanyaan dan aspek-aspek kolaborasi antara organisasi penegakkan hukum dan masyarakat yang diharapkan dapat merealisasikan kolaborasi di semua tingkatan struktur dari organisasi. Sebuah organisasi penegakkan hukum tidak dapat bertindak dengan baik tanpa masukkan yang berguna, kritik tetapi juga penghargaan dari masyarakat. Disamping program pencegahan kejahatan sosial pada akhir tahun, penguatan kemampuan perlindungan swadaya dari masyarakat/komunitas telah dimulai dan jenis hubungan baru antara mereka yang terlibat dalam pencegahan kejahatan telah terbentuk di Hongaria.

Untuk memiliki organisasi yang lebih baik berarti bahwa peningkatan orang-orang yang bekerja di kepolisian, penjaga perbatasan, dsb. Dalam usaha mencapai tujuan ini di Hongaria, sistem pelatihan penegakkan hukum telah dibentuk. Para pemimpin, petugas, dan deputi petugas dilatih dalam institusi negara dalam sekolah pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Penegakkan Hukum dan Kehakiman sebagai supervisi profesional.

Di Hongaria pelatihan khusus penegakkan hukum, ujian penegakkan hukum dan pelatihan manajemen penegakkan hukum telah dibentuk. Sistem pelatihan ini dalam beberapa aspek berkaitan dengan sistem pendidikan sipil dalam konteks pendidikan tinggi, pendidikan dasar, pelatihan lanjutan, dan pendidikan tinggi. Pada sisi lain, institusi pelatihan penegakkan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan organisasi penegakkan hukum dari kepolisian dan penjaga perbatasan, hal ini berarti bahwa kurikulum dari sekolah dipisahkan menjadi aspek teoritis dan aspek praktikal, yang harus dipenuhi seorang praktisi pada salah satu organisasi penegakkan hukum.

Aktifitas pelatihan ini memberikan sebuah dasar untuk mendapatkan sumber daya personel yang memenuhi persyaratan, sikap dan perilaku petugas menjadi bertanggung jawab, dan penerimaan sosial dari mereka semakin meningkat. Oleh karena itu, pekerjaan ini menjadi semakin atraktif bagi orang-orang yang lebih muda; hal ini dibuktikan dengan jumlah pelajar yang melamar ke sekolah penegakkan hukum berjumlah 5 hingga 10 kali dari kapasitas normal.

2. Studi Kasus: Sebuah Batu Loncatan Dalam Proses Reformasi-Bergabung Dengan Schengen

Hongaria saat ini masih berada dalam periode transisi; ia merupakan anggota dari persatuan kepabeanan tetapi belum menjadi anggota penuh dari komunitas Schengen. Hongaria sendiri direncanakan akan bergabung secara penuh dengan komunitas Schengen pada tanggal 1 Januari 2008.

Pembangunan adalah penting bagi perbatasan eksternal Hongaria, sama halnya dengan perbatasan Ukraina, Rumania, Serbia, dan Kroasia seperti infrastruktur, peningkatan staf penjaga perbatasan, pengembangan berlanjut

dari tingkatan teknis peralatan, menjamin akses ke pusat data yang harus diharmonisasikan dan dikembangkan, dan juga halnya dengan pelatihan lanjutan terhadap staf yang melindungi perbatasan luar dari Uni Eropa. Berhubungan langsung dengan tugas ini, kondisi kerjasama dan teknis dari kontrol yang ketat harus juga menjadi mekanisme perkembangan dan koordinasi untuk berfungsi dengan lancar meliputi seluruh area Hongaria. Aktifitas kriminal dalam dunia internasional juga secara langsung muncul di perbatasan dan membutuhkan kerjasama erat antar negara, yang juga memiliki dampak besar dalam konteks efek keamanan Uni Eropa.

Area diatas adalah area prioritas yang harus dihadapi dengan pembangunan Hongaria yang dibiayai dengan bantuan dari fasilitas Schengen.

Hongaria tidak hanya menerapkan obligasi legal yang muncul dari Konvensi Schengen dan aturan pelaksanaannya, tetapi juga dipersiapkan untuk mengatur infrastruktur, institusi, dan prosedur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan efektif dari kesepakatan Schengen dalam prakteknya di lapangan. Usaha khusus didedikasikan kepada semua sumber daya manusia, pembangunan teknis, infrastruktur, dan teknologi informasi dengan tujuan memenuhi persyaratan Schengen.

Proyek Pelatihan Schengen sebagai sebuah studi kasus dapat digambarkan juga berdasarkan model-reformasi berikut ini.

Pertama, alasan yang mendorong hal tersebut menjadi mungkin adalah sebagai berikut:

- Sebuah prinsip dasar dari Uni Eropa adalah pergerakan bebas dari orang dalam Uni Eropa, hal ini berarti bahwa semua warga negara Uni Eropa memiliki hak untuk bergerak bebas dalam negara-negara anggota Uni Eropa.
- Tujuan dari pembangunan juga merupakan untuk mengembangkan sistem-filtrasi Hongaria dan Schengen yang sesuai dan efektif pada perbatasan luar untuk menciptakan pencegahan dan investigasi dari migrasi ilegal dan meningkatkan kesiapan untuk menghadapi kejahatan lintas-batas yang terorganisir disepanjang perbatasan. Pembangunan tersebut juga ditujukan untuk lebih memprofesionalkan otoritas Hongaria dengan pembelian peralatan yang dibutuhkan serta pelatihan dengan pembagian kerja yang jelas untuk dilaksanakan pada perbatasan eksternal dan area dalam negeri dimasa depan.

Kedua, kerangka legal

- Kesepakatan Schengen telah menghilangkan kontrol perbatasan internal dalam wilayah Schengen dan telah menempatkannya kedalam perbatasan eksternal dari Uni Eropa, dimana kontrol dari orang dan migrasi dilakukan berdasarkan aturan bersama. Dalam usaha menjamin pergerakan bebas orang ada beberapa aturan umum bagi kontrol perbatasan luar, kebijakan visa, migrasi, dan kerjasama dalam konteks kriminalitas, kepolisian, dan kerjasama kepabeanan. Pra-kondisi yang paling penting dari pergerakan bebas orang adalah kerjasama dalam bidang kepolisian, penjaga perbatasan, dan hukum.

- Ketiga, konsep mengenai bagaimana melaksanakan Proyek Pelatihan Schengen
- Sebuah rencana aksi dielaborasi mengenai bagaimana cara menerapkan peraturan bersama. Dalam rencana aksi ini, tugas-tugas dibagi kedalam bidang berikut ini: kontrol perbatasan internal dan eskternal, kebijakan visa, migrasi, kerjasama kepolisian, kerjasama legal dalam hukum sipil dan kriminal, pemberantasan narkoba dan senjata api, perlindungan data dan Sistem Informasi Schengen.
 - Dalam usaha untuk merealisasikan perwakilan negara anggota yang lebih modern dan efektif untuk memfasilitasi kerjasama penegakkan hukum lintas-batas maka dibutuhkan penanganan terhadap petugas dalam bidang pengetahuan bahasa, pengetahuan akan EZ dan Schengen, sama halnya dengan pengetahuan praktikal mengenai hal tersebut.

2.1. Kelompok Target dari Proyek Pelatihan Schengen

Proyek Pelatihan Schengen ditujukan untuk melaksanakan pelatihan pada institusi penjaga perbatasan, polisi, dan petugas Kantor Keimigrasian dan Kewarganegaraan, deputi petugas dan pegawai negeri sipil dari institusi ini. Institusi pelatihan yang mengimplementasikan pelatihan adalah 4 sekolah kejuruan penegakkan hukum, akademi kepolisian, pusat pelatihan manajemen penegakkan hukum dan institut pelatihan lainnya dari petugas perbatasan dan polisi.

Terkait dengan pengetahuan khusus yang dibutuhkan, pelatihan ini diimplementasikan pada institusi pelatihan penegakkan hukum. Hanya dalam kursus bahasa ada pihak lain yang terlibat, akan tetapi dalam persiapan materialnya, pengajar dari sekolah penegakkan hukum juga dilibatkan. Para peserta memiliki kebutuhan berbeda tergantung pada di wilayah mana mereka bekerja dan jenis pengetahuan dasar apa yang mereka miliki, sehingga pelatihan harus diorganisir dan dilakukan menurut kebutuhan spesifik ini dalam cara tertentu. Dalam pelatihan, para kolega dari organisasi berbeda secara bersama-sama berpartisipasi yang kemudian dapat memberikan dampak positif dalam kerjasama lanjutan di masa depan.

2.2. Isi

Tujuan dari proyek tersebut adalah untuk mengimplementasikan kesepakatan legal Schengen, Teknologi Informasi, pelatihan bahasa dan persiapan para petugas penjaga perbatasan, polisi, Kantor Keimigrasian dan Kewarganegaraan, dan untuk mendukung implementasi dan penggunaan prosedur umum dan Sistem Informasi yang diterapkan di Uni Eropa. Berdasarkan 4 tujuan utama dari Fasilitas Schengen, pelatihan tersebut juga dipisahkan dalam 4 kelompok:

Pelatihan profesional dapat dipisahkan berdasarkan aspek berikut ini, **Memperkuat kontrol perbatasan luar**

Memperkuat kontrol perbatasan luar adalah fokus utama dalam persiapan bagi penerapan kesepakatan Schengen. Tujuan yang diatur dalam hal ini

direncanakan akan dicapai melalui beberapa cara. Latar belakang teknis khusus dari kontrol lalu lintas perbatasan dan pengawasan perbatasan harus diperkuat dan dikembangkan melalui sebuah pendekatan kebijakan perbatasan yang terintegrasi, dimana merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya dari pengembangan. Hal ini termasuk pembelian dan pengembangan peralatan khusus, latar belakang infrastruktur, teknologi informasi dan peralatan telekomunikasi, kendaraan khusus, termasuk juga peralatan keamanan dan kelengkapannya. Pelatihan dari pejabat penegakkan hukum juga muncul dan bagian terpenting dari cara ini serta pengembangan staf dari penjaga perbatasan yang bekerja di perbatasan luar juga dilibatkan.

Pengelolaan kemampuan kontrol dengan meningkatkan kapasitas dari kebutuhan data dan akses data

Fokus utama dari evaluasi berdasarkan tujuan ini adalah keberlanjutan pengembangan dengan tujuan mempersiapkan pusat data nasional yang memiliki data terkait Schengen. Pusat data ini harus menyediakan data yang dibutuhkan dan informasi bagi petugas penegakkan hukum dengan mudah. Sebuah kunci evaluasi di masa mendatang adalah pengembangan aplikasi bersama Schengen dan peralatan teknologi informasi dengan tujuan mengelola dan memfasilitasi pertukaran data baik itu di tingkat nasional maupun internasional.

Peningkatan efektifitas kontrol mendalam

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas pemeriksaan mendalam dan mencapai sebuah pencegahan dan perlawanan yang lebih efisien dalam menghadapi imigrasi ilegal dan kejahatan lintas-batas terorganisir. Untuk itu, kapasitas dari wewenang penegakkan hukum Hongaria untuk bekerjasama dengan setiap mitra organisasi dari negara-negara anggota Uni Eropa harus ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan ini, sebuah Pusat Manajemen Terintegrasi akan dibentuk.

Pengembangan kapasitas kerjasama internasional dalam bidang kriminal

Tujuannya berfokus pada pengembangan kapasitas badan penegakkan hukum di Hongaria dalam konteks investigasi kriminal (pengumpulan data intelijen), dalam tingkat kerjasama internasional, untuk mengambil sebuah langkah menentukan menghadapi aktivitas kejahatan lintas batas. Hal ini termasuk pengembangan jaringan petugas kontak untuk mengelola kerjasama kepolisian dan juga penguatan teknis, infrastruktur dari unit yang kompeten dalam kerjasama kepolisian internasional.

Selama 2 tahun pelatihan, sekitar 10.000 orang telah berpartisipasi dalam 40 program berbeda. Untuk beberapa topik, yang disebut pelatihan-multiplikator juga telah diorganisir, dimana multiplikator memiliki tugas untuk mentransfer pengetahuan ke organisasi mereka. Disamping material pelatihan yang dipersiapkan untuk program, sebuah petunjuk praktis Schengen telah dipersiapkan dengan tujuan untuk mendukung implementasi praktikal dari aturan

baru dan aktifitas baru, sama halnya dengan sebuah *Compact Disc* (CD) Schengen yang membantu pekerjaan harian kolega dari Proyek Kembar Jerman-Hongaria yang dilaksanakan di Kementerian Penegakkan Hukum dan Kehakiman. Material pembelajaran jarak jauh ini berdasarkan prinsip pembagian pengetahuan, tersedia untuk tujuan lainnya juga, dan merupakan aset Direktorat Jenderal Pelatihan.

Pelatihan Bahasa

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung kemampuan komunikasi aktif, baik itu secara lisan dan tertulis dalam bahasa asing, sama halnya penegakkan hukum yang terkait dengan bahasa profesional Uni Eropa. Tujuan kedua adalah untuk mengembangkan dan menguji sebuah program bahasa dengan terminologi yang sama dan merata dalam konteks penegakkan hukum. Kebanyakan dari program bahasa disusun dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Perancis tetapi bahasa dari negara tetangga menjadi aspek yang tidak kalah pentingnya, karena pengetahuan bahasa juga berkontribusi terhadap kerjasama internasional. Kami telah memulai sebanyak 163 program dengan partisipasi 2000 orang dalam 9 bahasa. Material pelatihan khusus dipersiapkan dalam bahasa-bahasa tersebut yang dapat digunakan di masa mendatang atau di program-program lainnya.

3. Pelajaran yang Diperoleh

3.1. Proses reformasi penegakkan hukum

- Untuk mendapatkan implementasi dari reformasi, maka semua tiga faktor yang digambarkan sebelumnya menjadi sangat penting, hal ini berarti bahwa, identifikasi dari kebutuhan untuk perubahan, menciptakan dan mengklarifikasi kekuasaan serta wewenang untuk bertindak dan mengelaborasi serta mengimplementasikan sebuah konsep sesuai bagi proses reformasi. Dalam proses ini, pertimbangan lingkungan, finansial, sumber daya individu dan instrumental adalah prioritas utama. Identifikasi kebutuhan untuk perubahan adalah dasar bagi definisi aktifitas selanjutnya.
- Analisa dan pertimbangan akan perbedaan antara situasi lama dan situasi yang akan dicapai setelah proses reformasi.
- Hukum nasional dan perjanjian internasional menciptakan kerangka kerja legal dan wewenang untuk melaksanakan aktifitas penegakkan hukum.
- Disamping pengembangan konsep yang sesuai, adalah penting untuk mampu melaksanakannya.

3.2. Transfer pengetahuan dari Proyek Pelatihan Schengen

- Sangatlah penting untuk mengharmonisasikan materi pelatihan dengan konsep reformasi.
- Pelatihan harus dilakukan sebelum pengenalan reformasi dan proses pengembangan.

- Melakukan metode proyek dalam struktur hierarkis dari organisasi penegakkan hukum dan dalam pemerintahan umum menjadi praksis dan akan memperoleh lebih banyak tempat.
- Pelatihan bersama bagi organisasi penegakkan hukum yang berbeda dapat mendukung kerjasama di lapangan.
- Bagaimanapun juga, dengan melakukan pelatihan dalam waktu singkat, partisipasi dari kolega yang aktif dalam organisasi akan menjadi sebuah permasalahan.
- Dengan melakukan pelatihan sejumlah besar peserta pada waktu yang bersamaan, instrumen baru dan inovatif adalah penting untuk diperkenalkan, seperti *E-Learning*.

Referensi

Finszter, G. (2005) *Az alkotmányos rendvédelem és a Határőrség* (Constitutional law enforcement and the Border Guard), Pécs (Hungary): Scientific bulletin of the newspaper *Határőr Pécs* - Border Guard Pécs, 37-61 p.

Finszter, G. (2000) *A rendszerváltás és a Rendőrség* (Change of the political system and the Police), <http://www.helsinki.hu/docs/magyar.pdf>
"Schengen Facility" (Art 35 Accession Act 2003) *Indicative Programme 2004*, Hungary

**Pengalaman Reformasi Manajemen Perbatasan Hongaria
Sejak Tahun 1989 hingga 2007
*Pelajaran dari Demiliterisasi Pembentukan Sistem Manajemen
Perbatasan***

Hegedus Janos²²

Pengantar

Dalam beberapa tahun terakhir dari abad ke 20 dan di tahun pertama abad ke 21-dari tahun 1989 hingga saat ini-era perubahan telah terjadi pada Penjaga Perbatasan Hongaria. Tujuan dan metode dari penjagaan perbatasan dimodifikasi secara mendasar dan keseluruhan organisasi penjaga perbatasan telah berubah secara drastis. Tugas penjaga perbatasan saat ini tidak untuk menjaga masyarakat Hongaria didalam perbatasan tetapi untuk menghadapi "orang asing yang tidak diinginkan" masuk kedalam Hongaria dalam konteks kenyamanan warga negara dan keamanan Hongaria-dan sejak 1 Mei 2004, untuk Uni Eropa-serta untuk melawan penyelundupan manusia dan bentuk kejahatan internasional lainnya.

Imigrasi ilegal yang dimulai dari kawasan timur dan barat disebabkan oleh kejadian-kejadian di Eropa Timur, regional, dan seluruh dunia dan Hongaria berada di tengah-tengah jalur besar ini. Sebuah kantor Kepolisian Perbatasan yang mulai bertugas di tahun 2006 dengan tujuan utama imigrasi ilegal, telah berhadapan dengan banyak imigran ilegal seperti yang dihadapi oleh penjaga perbatasan Hongaria pada dekade 70-an dan 80-an.

Dengan pengalaman selama 18 tahun, hari ini kami dapat melaporkan bahwa Penjaga Perbatasan Hongaria dapat menjawab tantangan baru dan menjaga perbatasan negara secara terpercaya untuk sepanjang waktu. Pada intinya hal ini berpusat pada Penjaga Perbatasan Hongaria yang dengan cepat memperoleh pengetahuan baru, metode baru dan menerapkannya dalam pekerjaan secara efisien. Kondisi teknis bagi pekerjaan kami secara signifikan meningkat dengan bantuan dari pemerintah Hongaria dan Uni Eropa. Sebagai hasil dari peningkatan mutu tersebut, Penjaga Perbatasan Hongaria telah memenuhi kebutuhan penjagaan perbatasan dari Uni Eropa dan di akhir tahun ini akan menunjukkan keinginan yang kuat serta komitmen kedalam petunjuk perjanjian Konvensi Schengen. Penjaga Perbatasan Hongaria adalah bagian organik dari masyarakat sipil Hongaria dan tengah menikmati dukungan penuh dari masyarakat. Pada tahun 2006, kami merayakan berdirinya organisasi kami. Selama 18 tahun perubahan dan pelajaran yang diperoleh, kami telah belajar banyak dari periode kehidupan kami.

1. Hongaria

Negara kami secara geografis terletak di bagian tengah Benua Eropa, di Lembah Sungai Carpathian. Luas wilayahnya adalah 93.030 km² dan jumlah

²² Anggota Penjaga Perbatasan Hongaria

Gambar III.2. Peta Lokasi Hongaria



populasinya adalah 10.152.000 jiwa. Ibu kotanya adalah Budapest yang berada di muara sungai Danube. Hongaria berbatasan dengan 7 negara. Negara tetangga tersebut antara lain, Slovakia, Austria, Slovenia, Kroasia, Serbia, Rumania, dan Ukraina. Hongaria adalah negara yang didominasi daratan tanpa lautan tetapi memiliki beberapa aliran sungai penting-sebagai contoh Danube, Tisza dan Drava-dan danau Eropa Tengah terbesar, yakni Danau Balaton.

Sejarah bangsa kami dimulai lebih dari 1100 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 896 dimana 7 suku berpindah datang dari Asia Tengah dan menetap di jantung daratan negara kami. Bentuk negara kami adalah republik dengan konstitusi tertulis tahun 1949 yang secara signifikan dimodifikasi setelah jatuhnya partai sosialis pada tahun 1989. Negara kami memiliki parlemen nasional, terdiri dari 386 wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh warga negara Hongaria setiap 4 tahun sekali. Ini adalah forum legislasi tertinggi yang diketuai oleh seorang presiden parlemen. Hongaria adalah anggota penting dari beberapa organisasi internasional-sebagai contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa, *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), Uni Eropa, dan Organisasi Kerjasama dan Keamanan di Eropa-dan memainkan peran yang relevan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya di wilayahnya.

Garis perbatasan Hongaria adalah sepanjang 2245,5 km. Perbatasan utama adalah dengan Slovakia, yaitu 678,5 km, dengan Austria 356 km, dengan Slovenia 102 km, dengan Kroasia 355,4 km, dengan Rumania 453,1 km, dengan Serbia 163,8 km, dan dengan Ukraina sepanjang 136,7 km. Dari sisi lain, perbatasan internal Uni Eropa adalah 1.589,5 km sementara perbatasan luar sepanjang 655,9 km.

2. Penjaga Perbatasan Hongaria

Sebelumnya kita harus melihat kembali ke tahun 1903 dimana Parlemen Hongaria mengesahkan hukum mengenai penjagaan perbatasan dan hukum ke-8 memutuskan mengenai pembentukan polisi-perbatasan, yang merupakan institusi dasar dari organisasi kami saat ini. Polisi-perbatasan yang baru terbentuk tersebut bekerja dengan baik hingga akhir Perang Dunia I dan mulai menyadari kesatuan antara penjagaan perbatasan, kontrol lalu lintas perbatasan serta kebijakan orang asing yang kontemporer. A n t a r a Perang Dunia I dan Perang Dunia II, penjagaan perbatasan di Hongaria menentukan kemungkinan kesepakatan damai dari Trianon. Pemerintah Hongaria mendapatkan izin untuk menggunakan penjaga khusus Kerajaan Hongaria bagi pertahanan di perbatasan. Penjaga khusus tersebut adalah bagian yang semu dari kekuatan militer, dengan organisasi militer dan tugas seperti menjaga perbatasan negara, menjamin pertahanan-perbatasan, dan kontrol lalu lintas batas dalam skala kecil, serta melakukan beberapa tugas khusus lainnya. Organisasi ini kemudian direorganisir kedalam Penjaga Perbatasan Kerajaan Hongaria dari tahun 1932 dan pada tahun 1938 digabungkan dalam kekuatan militer untuk perbatasan.

Setelah Perang Dunia II, penjagaan batas negara dan kontrol lalu lintas batas dilakukan oleh Penjaga Perbatasan Militer dan Polisi Perbatasan yang merupakan bagian dari Polisi Negara dan bekerja sebagai sebuah cabang khusus. Penjaga perbatasan kemudian digabungkan kedalam Otoritas Keamanan Nasional sejak 1 Januari 1950. Mereka memperluas sistem penjagaan perbatasan di selatan (Yugoslavia) dan barat (Austria) pada masa ini. Pada tahun 1950 di daerah selatan dan tahun 1952 di daerah barat dibentuk sebuah garis batas sepanjang 15 km. Didalam ini mereka membangun sebuah zona perbatasan seluas 50-500 m yang dapat dimasuki hanya dengan izin polisi atau penjaga perbatasan. Hanya penjaga perbatasan yang diijinkan memasuki zona perbatasan seluas 50 meter. Di daerah perbatasan barat mereka membangun sebuah blokade teknis sistem terlentang yang terbuat dari kawat besi. Disepanjang batas negara di selatan dan barat, sepanjang 318 km, pos infanteri juga didirikan. Pada tahun 1956, pos di selatan dihilangkan tetapi pada tahun 1957 dibangun kembali di area perbatasan barat. Pada akhirnya, area perbatasan selatan di tahun 1965 dan area perbatasan darat di tahun 1969 diputuskan. Pembangunan pos diselesaikan pada tahun 1971. Selain pos, sebuah pagar SZ-100 jenis tegangan rendah sepanjang 248 km dengan sistem sinyal elektrik telah dibangun, yang mana juga digunakan dalam negara-negara pecahan Uni Soviet.

Dalam dekade ini, Petugas Perbatasan Hongaria adalah sebuah organisasi militer yang besar yang menggunakan ribuan wajib militer dan secara umum latar belakang legal aktifitasnya adalah lemah atau sedikit. Ia adalah sebuah bagian penting dari pemerintah, atau dengan kata lain kaki tangan dari bekas kekuasaan negara sebelumnya. Total staf didalamnya berjumlah 19.000 orang.

Dalam sejarah penjaga perbatasan, sejak tahun 1989, perubahan-perubahan penting telah terjadi. Di kawasan selatan dan barat, garis perbatasan dan jalurnya telah dihilangkan, sistem sinyal elektrik juga telah ditarik kembali. Pada tahun 1989, Hongaria bergabung dalam Pakta Jenewa tahun 1951 mengenai situasi migrasi. Dengan pengaruh dari para masyarakat Hongaria, banyak warga Jerman Timur yang masuk ke Hongaria, berharap untuk dapat masuk ke Jerman Barat. Berdasarkan keputusan pemerintah Hongaria, Petugas Perbatasan Hongaria membuka jalur lintas bagi imigran tersebut di kawasan barat pada tanggal 11 September 1989 dan mereka bebas untuk bermigrasi ke Austria. Sebagai akibatnya, hingga 9 November 1989 saat penghancuran tembok Berlin, sekitar 60.000 warga negara Jerman Timur bermigrasi ke Jerman Barat lewat Hongaria.

Sejak tahun 1990, penjagaan perbatasan Hongaria telah diperluas dan perubahan radikal yang dilakukan adalah reorganisasi penjaga perbatasan. Jenis penjagaan perbatasan distrik yang militeristik direorganisasi menjadi direktorat, dua diantaranya dihilangkan sama sekali dan akademi pelatihan penjaga perbatasan didirikan untuk para penjaga perbatasan yang baru. Pada bulan April 1989, para wajib militer yang tersisa dinonaktifkan dari penjaga perbatasan. Ruang lingkup tugas penjaga perbatasan ditingkatkan dan aturan penjagaan perbatasan serta tugas berdasarkan hukum lainnya masuk kedalam organisasi ini secara terus menerus. Undang-undang 32 tahun 1997 mengenai penjagaan perbatasan dan penjaga perbatasan semakin melengkapi latar belakang legal yang mengatur penjaga perbatasan.

Selama 10 tahun terakhir, Hongaria telah mereorganisir struktur penjaga perbatasannya, mengubahnya dari organisasi militer dimana staf militer dilibatkan, menjadi sebuah organisasi kepolisian dengan hanya staf profesional. Kehadiran Undang-Undang Penjaga Perbatasan berarti bahwa aturan legal telah dimodifikasi. Sejalan dengan pembentukan sebuah struktur organisasi yang memenuhi kebutuhan saat ini, Hongaria mendirikan sebuah sistem pengawasan perbatasan yang merefleksikan prinsip penjagaan perbatasan abad 21 dan akan memenuhi kebutuhan keamanan sekarang dan masa depan.

Gambar III.3. Migrasi Warga Jerman Timur ke Jerman Barat Melalui Hongaria



3. Latar Belakang Legal Penjaga Perbatasan Hongaria

Latar belakang legal dari penjaga perbatasan didasarkan pada Konstitusi Republik Hongaria (pasal 40/A) yang merupakan Undang-Undang no. 20 sejak tahun 1949. Menurut konstitusi, status hukum dari penjaga perbatasan dibedakan menjadi dua, yakni dalam status legal khusus dan bertindak sebagai angkatan bersenjata. Penjaga perbatasan melaksanakan tugas militernya berdasarkan Undang-Undang Pertahanan Militer dan melaksanakan tugas penjagaan perbatasannya berdasarkan Undang-Undang Penjaga Perbatasan dan aturan hukum lainnya. Dalam kondisi serangan militer atau kelompok militer yang tidak diharapkan terhadap negara, penjaga perbatasan dapat ikut berperan dalam pertahanan Republik Hongaria sebagai sebuah angkatan bersenjata. Ia menjaga integritas teritorial Republik Hongaria, melindungi aset-asetnya dan melaksanakan tugas lainnya seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Pertahanan Sipil.

Selama aktifitas penegakkan hukum, penjaga perbatasan melindungi batas negara, mengontrol lalu lintas barang, mengamankan kondisi keamanan di batas negara, dan melakukan investigasi kriminal, menangani kejahatan ringan, kontrol orang asing, tugas pemerintahan umum dan juga beberapa tugas yang terkait dengan pengungsi.

Gambar III.4. Beberapa Aktifitas Penjaga Perbatasan Hongaria



Pada tahun 2004, ada perubahan terhadap konstitusi Hongaria dan salah satu hasilnya adalah penempatan penjaga perbatasan secara jelas sebagai organisasi penegakkan hukum dan terhitung mulai 1 Januari 2005 terpisah dari angkatan bersenjata. Sejak saat itu, Hongaria hanya memiliki satu angkatan bersenjata yakni Angkatan Bersenjata Hongaria. Adalah penting untuk memahami bahwa penjaga perbatasan secara legal dan kompetensi yang luas sebagai otoritas berjenis kepolisian tetapi bukan bagian dari kepolisian Hongaria. Ia adalah organisasi independen dengan staf tersendiri dibawah Kementerian Penegakkan Hukum dan Kehakiman. Sejak 1 Januari 2005, konstitusi memutuskan bahwa penjaga perbatasan melindungi batas negara dan mengelola kondisi keamanan dari batas negara.

Sejak 1 November 1997, petugas perbatasan memiliki hak untuk melakukan investigasi terkait 5 bentuk kejahatan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pidana No. 4 Tahun 1978, seperti: pemalsuan dokumen perjalanan, penyelundupan manusia, pengrusakan tanda batas negara, ijin tinggal ilegal di Hongaria, dan pelintasan batas negara dengan senjata. Sejak 1 Juli 2006, hak investigasi penjaga perbatasan telah diperluas dan saat ini penjaga perbatasan memiliki wewenang dalam 10 jenis kejahatan: pelanggaran kebebasan individual, perdagangan manusia, kekerasan pelanggaran masuk, fasilitasi ijin tinggal ilegal di Hongaria, penyelundupan manusia, pengrusakan tanda batas negara, penyelundupan senjata, keterlibatan dalam organisasi kriminal, dan pemalsuan dokumen perjalanan serta penyalahgunaan dokumen publik.

Bidang lainnya yang relevan dengan pekerjaan penjaga perbatasan Hongaria adalah kebijakan orang asing. Kantor kebijakan perbatasan dan penjaga perbatasan memiliki wewenang untuk mengontrol orang asing pada wilayah tanggung jawab mereka. Ada beberapa aturan ketat dalam pekerjaan ini yang tertuang dalam Undang-Undang khusus, yakni, Undang-Undang No.39 Tahun 2001 mengenai Jalur Masuk dan Ijin Tinggal Orang Asing. Penjaga perbatasan berada dibawah kontrol parlemen, pemerintah dan Kementerian Penegakkan Hukum dan Kehakiman. Mewakili pemerintah, Kementerian Penegakkan Hukum dan Kehakiman menyediakan supervisi profesional dalam aktifitas penjaga perbatasan. Kementerian Penegakkan Hukum dan Kehakiman melakukan setiap wewenang yang tidak didelegasikan kepada organisasi atau orang lain oleh konstitusi, Undang-Undang Penjagaan Perbatasan atau aturan lainnya.

4. Tugas Penjaga Perbatasan Hongaria

Tugas utama dari penjaga perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan batas negara, pencegahan, deteksi, dan interupsi dari pelintasan batas ilegal;
2. Sehubungan dengan kesepakatan internasional dan kerjasama dengan wewenang lainnya, kontrol individu, kendaraan, dan lalu lintas barang yang melintasi perbatasan, otorisasi keluar-masuk individu berdasarkan aturan relevan, dan penjagaan aturan pelintasan batas;
3. Eksekusi kebijakan orang asing yang diartikan dalam tindakan masuk dan domisili dari orang asing dan dalam pengesahan pelaksanaannya;
4. Interaksi dalam eksekusi tugas tanggung jawab otoritas bagi kasus pengungsian, seperti dalam tindakan separatis;
5. Eksekusi obligasi yang ditentukan dalam kesepakatan internasional, mengarahkan aktifitas warga negara Hongaria dalam mengevaluasi kejadian di perbatasan, mengawasi keamanan perbatasan, dan bekerja dalam mensurvei, menandai, dan mendirikan tanda batas;

6. Berwenang menangani tindakan kekerasan yang membahayakan ketertiban di perbatasan dan fasilitas yang berada dibawah perlindungannya;
7. Implementasi evaluasi yang dibutuhkan untuk mengatasi konflik yang membahayakan secara langsung perbatasan dan bahaya yang ditimbulkan oleh massa pengunjung;
8. Mendeteksi aktifitas bersenjata yang membahayakan ketertiban perbatasan dan menghentikan distribusi senjata tersebut;
9. Menjaga ketertiban di perbatasan, dan bertindak sebagai otoritas profesional dalam proses administrasi publik tertentu;
10. Eksekusi tugas penegakkan hukum tertentu dalam kondisi darurat negara, seperti yang diatur UU;
11. Melatih kompetensi tertentu dalam sejumlah kasus serangan ringan, seperti yang diatur UU;
12. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang dibutuhkan bagi implementasi tugasnya.

Selama beberapa tahun, Hongaria telah ditempatkan pada salah satu persinggungan utama jalur imigran ilegal timur ke barat. Pada tingkat perbatasan negara dan area kompetensi dari penjaga perbatasan, kami telah berhasil melakukan pengelolaan untuk mencegah, menemukan, membuktikan, dan memaksa mundur tindakan ilegal yang muncul. Hal ini dikarenakan migrasi, pelintasan batas ilegal, dan kejahatan internasional terorganisir secara signifikan meningkatkan penyelundupan barang, narkoba, dan kendaraan. Penjaga perbatasan telah menangani migrasi ilegal secara sukses dan yang terkait dengan kejahatan internasional selama bertahun-tahun.

Gambar III.5. Rute Imigrasi Ilegal Melalui Hongaria



Migrasi ilegal didukung oleh organisasi penyelundupan manusia yang terorganisir dengan baik, dengan pengetahuan yang memadai dengan situasi dan peralatan teknis. Penyelundup manusia mencoba untuk memigrasikan sejumlah besar kelompok orang dengan sukses melintasi perbatasan.

Diantara tindakan migrasi, tindakan ilegal pelintasan batas negara dan usahanya adalah yang paling sering terjadi. Tindakan kedua dan ketiga yang paling sering adalah kejahatan ringan dan pemalsuan dokumen perjalanan. Dalam mencegah tindakan ini, petugas perbatasan dapat mencapai tingkat keberhasilan hingga 75-80%. Penjaga perbatasan bekerja sama dengan aktor lainnya dari pemerintahan dalam kepentingan utama negara dan dalam pencegahan tindakan ilegal.

Organisasi ini antara lain: Kepabeanan, Kepolisian, Kantor Keimigrasian dan Kewarganegaraan, Intelijen Negara, Angkatan Bersenjata Hongaria, Badan Bandara dan Kargo, Agen Perjalanan, dan pemerintah lokal serta masyarakat lokal.

Hongaria, telah menjadi sebuah negara transit, telah menjadi arus utama imigrasi ilegal selama bertahun-tahun. Imigran ilegal datang dari Ukraina, Rumania, dan Serbia, yang berpindah melalui Slovakia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, dan Italia, berusaha melakukan pelintasan batas secara ilegal, terutama melalui Budapest. Selama beberapa tahun yang lalu, ada peningkatan dalam jumlah pelanggaran perbatasan. Jumlah pelintasan batas ilegal dan perdagangan manusia telah meningkat dua kali selama tahun-tahun terakhir ini, dengan pelintasan ilegal signifikan yang dilakukan dalam kelompok besar.

Kontrol paspor dari penjaga perbatasan memeriksa hampir 100 juta pelintas dari titik lintas batas setiap tahunnya. Sebagai hasil dari pengembangan beberapa tahun terakhir, kondisi lintas batas telah meningkat mutunya secara berkala di kebanyakan titik lintas batas tersibuk dalam lalu lintas batas. Penjaga perbatasan memasang sebuah sistem pembaca dokumen terkomputerisasi pada titik lintas batas, yang mampu mengidentifikasi sebuah paspor secara otomatis dan mampu menunjukkan jika data pribadi yang bersangkutan terdaftar.

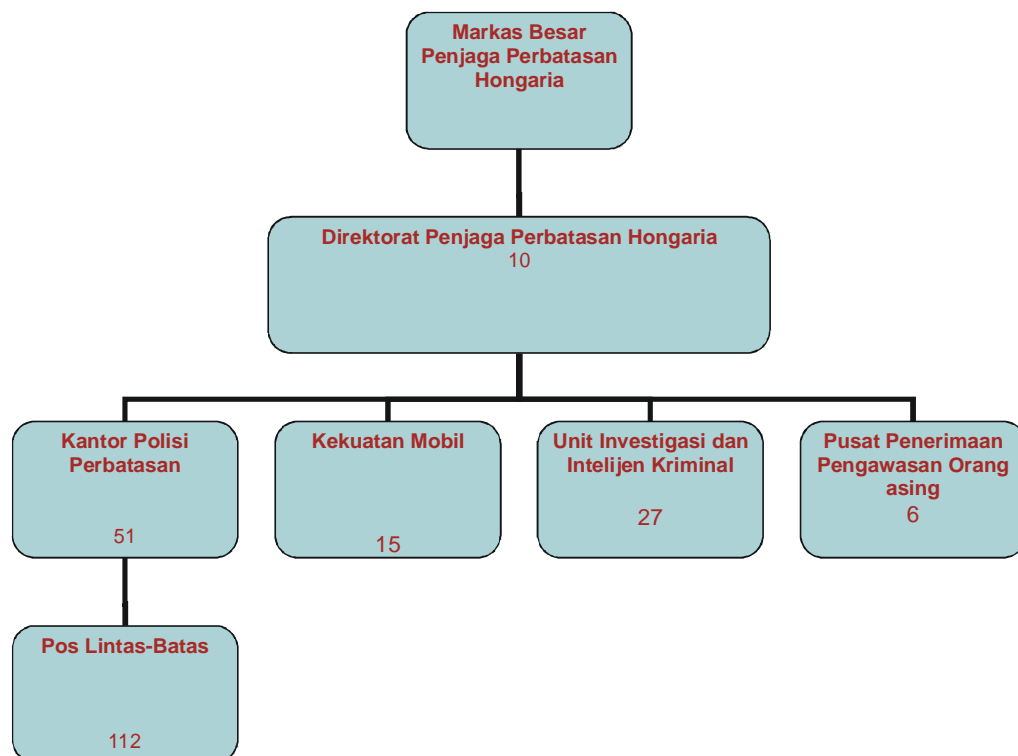
5. Struktur dan Penyebaran dari Penjaga Perbatasan

Organisasi dari penjaga perbatasan terdiri dari tingkat pusat, regional, dan lokal serta organ operasional lainnya. Organ pusatnya adalah Markas Besar Nasional Penjaga Perbatasan, di Budapest. Pemimpin dari penjaga perbatasan adalah Komandan Nasional yang ditunjuk oleh Presiden Republik Hongaria berdasarkan masukan dari Menteri Penegakkan Hukum dan Keadilan. Wilayah penjaga perbatasan (regional) adalah: Direktorat Penjaga Perbatasan (10) dan cabang lokalnya adalah: kantor kebijakan perbatasan (51). Ia juga memiliki cabang operasional seperti kekuatan mobil (15), Kantor Investigasi Kriminal dan Intelijen (27) dan Pusat Kebijakan Penerimaan Orang Asing (6) bagi orang asing yang ditangkap di Hongaria selama aktifitas ilegal. Hongaria memiliki 112 titik lintas batas, 70 jalan, 26 jalur kereta api, 10 bandara, dan 6 titik lintas batas perairan diantaranya.

Gambar III.6. Penyebaran Penjaga Perbatasan Hongaria



Gambar III.7. Struktur Penjaga Perbatasan Hongaria



Pada tingkat pusat, perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pada tingkat tertentu, implementasi dari aktifitas profesional penjaga perbatasan (seperti penjagaan perbatasan, kontrol lalu lintas perbatasan, pengelolaan ketertiban umum di batas negara, intelijen dan investigasi kriminal, kontrol kejahatan ringan dan orang asing, pelayanan tugas dan pelatihan) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Operasional dan pada tingkat regional oleh struktur deputy direktorat operasional. Semua pelayanan teknis, secara esensial penting bagi manajemen dan penugasan seperti sumber daya manusia (SDM), perawatan kesehatan, pelayanan kejiwaan, kontrol, hubungan legal, hubungan masyarakat, administrasi dan hubungan internasional, berada dibawah otoritas langsung komandan nasional dan para direktur. Saat ini jumlah keseluruhan staf adalah 10.500 orang.

Dalam usaha untuk secara efektif melakukan obligasi yang diatur oleh hukum, struktur organisasional dari penjaga perbatasan dipisahkan kedalam bidang profesional, pelayanan fungsional, dan pelayanan logistik yang mendukung penugasan yang sesuai bagi organisasi.

Bidang profesional:

1. Bidang kebijakan perbatasan, yang terdiri dari pengawasan batas negara Republik Hongaria; pengelolaan ketertiban di perbatasan; pencegahan, deteksi dan interupsi dari pelintasan batas ilegal; kontrol individu, kendaraan, dan lalu lintas barang yang melintasi perbatasan; dan pencegahan keluar-masuk bagi orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk melintasi batas negara.
2. Dalam bidang intelijen dan investigasi kriminal, yang menjamin pencegahan, deteksi, dan interupsi dari tindakan kriminal terkait dengan kompetensi penjaga perbatasan menurut hukum mengenai prosedur kriminal, sama halnya juga dalam melakukan aktifitas intelijen.
3. Bidang kebijakan orang asing dan kejahatan ringan, yang menjamin pelaksanaan tugas yang didelegasikan pada kompetensi penjaga perbatasan oleh aturan hukum mengenai kebijakan orang asing, kejahatan ringan dan pengungsi.

Pelayanan fungsional

1. Pelayanan operasi menjamin fokus kekuatan yang sesuai dan kemampuan bermanuver yang dibutuhkan bagi pelaksanaan sesuai dari tugas penjaga perbatasan, sama halnya dalam implementasi dan koordinasi dari tugas yang kompleks dalam area dalam dari negara yang signifikan bagi kontrol migrasi ilegal dan tindakan ilegal yang berhubungan dengannya. Ia juga berperan sebagai kekuatan tambahan untuk mengatasi situasi yang tidak diharapkan;
2. Pelayanan penempatan menjamin keberlanjutan pelaksanaan tugas penjaga perbatasan dan manajemen serta kepemimpinan organisasi, dan menjamin tugas dan laporan tugas, penghargaan, evaluasi dan analisis, pelayanan pengolahan data, dan keamanan data.

Pelayanan logistik:

1. Finansial (ekonomi, teknis, suplai dan perawatan, Teknologi Informasi);
2. Pelatihan dan metodologi;
3. Manusia (SDM, kedisiplinan, perawatan kesehatan dan kejiwaan);
4. Kontrol dan supervisi
5. Manajemen (sekretariat, legal, internasional, komunikasi, perlindungan data, perencanaan strategis dan manajemen kualitas).

Pada tahun evaluasi 2006, sekitar 109 juta orang melintasi perbatasan Hongaria dan 38 juta kendaraan berpindah melalui titik lintas batas. Pada periode yang sama, penjaga perbatasan telah mulai menangani 82.816 kasus secara keseluruhan. Sekitar 16.508 kasus berkaitan erat dengan migrasi ilegal, 23.159 orang dikembalikan lagi dari batas negara ke negara asalnya karena kurang memenuhi persyaratan untuk memasuki Hongaria, Sekitar 3.036 buronan telah ditangkap selama aktifitas resmi penjaga perbatasan. Dalam 2.757 kasus, penjaga perbatasan menemukan bahwa pemalsuan dokumen dilakukan oleh orang asing yang ingin melintasi ke negara Eropa Barat melalui Hongaria. Dalam 40.113 kasus lainnya penjaga perbatasan telah mencatat sejumlah penanganan terhadap orang-orang dalam kasus yang beragam. Individu yang berperan dalam tindakan ilegal dan kejahatan selama tinggal di Hongaria atau terlibat dalam kasus kejahatan dan ditangani oleh petugas perbatasan didominasi oleh warga Rumania (8.939), kemudian warga Ukraina (3.530), dan warga Serbia (977). Penjaga perbatasan juga merupakan agen ekonomi independen. Pada tingkat pusat, dukungan material, sumber daya material, bantuan teknis, dan dukungan teknologi informasi disediakan oleh direktorat jenderal ekonomi dan pada tingkat regional oleh deputi direktorat ekonomi.

6. Pencapaian bagi Uni Eropa (UE) dan Pengalaman Selama 3 Tahun.

Selama persiapan untuk pencapaian Uni Eropa, tahun 2000 adalah titik balik bagi penjaga perbatasan. Setelah 3 tahun perencanaan dan persiapan, program pengembangan memasuki tahapan realisasi dari wilayah mobilitas, teknologi-informasi, pengintaian dan kontrol lalu lintas batas. Sejak bulan Januari 2001, sebuah peraturan pemerintah memasukkan pengembangan terintegrasi dari penjaga perbatasan dan juga tugas dalam menciptakan sistem kontrol lalu lintas perbatasan yang harmonis dengan Schengen. Struktur, otoritas operasional dan kondisi kerja dari penjaga perbatasan diawasi oleh ahli-ahli dari Uni Eropa sehingga semua regulasi legal Schengen dan prakteknya dapat diproses. Pada tahun 2000, sebanyak 14 program yang merupakan pengembangan penjaga perbatasan, terkonsentrasi pada area yang paling penting dengan sebuah persepsi pada proses pencapaian Uni Eropa. Ini adalah harmonisasi legal, sumber daya manusia, pengembangan teknis, infrastruktur dan modernisasi dari organisasi. Program mengenai penjaga perbatasan pada harmonisasi legal telah menemui kesuksesan. Undang-Undang orang asing yang terbaru, kerangka penjagaan perbatasan dan Undang-Undang pengungsi, telah dikerjakan dengan mengacu pada regulasi dan praktek legal Uni Eropa.

Sehingga, kemungkinan dari regulasi yang lebih detil selanjutnya telah dibentuk. Pengembangan SDM terkonsentrasi pada dua area, yakni, pada kebutuhan staf dan pelatihan yang mencukupi. Bersama dengan ahli-ahli luar negeri, kami menciptakan jumlah staf yang dibutuhkan untuk mengontrol perbatasan internal Uni Eropa dan eksternal dan jenis serta metode pelatihan yang cocok.

Pada bidang keamanan teknis, pembentukan sistem registrasi perbatasan, pengembangan jaringan teknologi informasi, akuisisi peralatan kontrol lalu lintas perbatasan, peralatan pengintaian sedang untuk perbatasan dan sebuah peningkatan kapasitas untuk mobilitas, telah diberikan prioritas selama beberapa tahun terakhir. Sistem registrasi perbatasan telah dibangun pada jalan titik lintas batas dan titik lintas batas udara. Sistem ini juga diperkenalkan pada titik lintas batas kereta api dan perairan. Pengembangan kapasitas penjaga perbatasan untuk dinamis di daratan, di perairan, dan udara juga direncanakan. Selama mobilitas daratan dipertimbangkan, maka perlu diperhatikan juga tugas dari patroli mobil. Pada tahun 2001, pengembangan telah dikonsentrasikan pada minibus, yang menggunakan daftar pengawasan sama halnya pada pusat penempatan mobil. Dalam usaha meningkatkan mutu kapasitas kontrol perbatasan perairan, kapal-kapal baru telah dikerahkan.

7. Pelajaran yang Diperoleh Berdasarkan Pengalaman Penjaga Perbatasan Hongaria.

Awalnya kita harus mengetahui efek utama apa yang terjadi di lingkungan penjaga perbatasan selama 18 tahun terakhir. Salah satu perubahan yang paling relevan adalah pada tahun 1989 dimana Hongaria mengubah bentuk negaranya dari negara sosialis menjadi republik dan pada tahun 1990 sebuah pemilihan umum yang bebas dilaksanakan dan sebuah parlemen baru dipilih. Hongaria menjadi sebuah negara yang bebas dan demokratis dimana hak asasi manusia dihormati, masyarakat memiliki hak dan kesempatan sama untuk mengekspresikan opini secara bebas dan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa batas.

Pemerintah Hongaria yang baru mendeklarasikan bahwa Hongaria tidak memiliki musuh dan berharap dapat bekerja sama dengan negara tetangganya pada posisi yang setara dalam konteks kepentingan yang menguntungkan dalam relasi politik, ekonomi, dan budaya. Bersatu bersama komunitas internasional dalam menentang salah satu perang terbesar di abad 20 yang terjadi di negara tetangga Hongaria sebelah selatan. Antara tahun 1991-1998, negara bekas Yugoslavia telah pecah dan terlibat dalam perang saudara serta menimbulkan gangguan keamanan yang tinggi di wilayah tersebut. Ribuan pengungsi melarikan diri dari lokasi tempat tinggal mereka dan mencari tempat perlindungan di Hongaria serta area damai lainnya di Eropa. Kejadian lainnya adalah pada tahun 1999, dimana Hongaria bergabung dengan NATO yang merupakan organisasi pertahanan kolektif terkuat di kawasan Atlantik Utara-Eropa dan memainkan peran relevan khususnya dalam kebijakan keamanan.

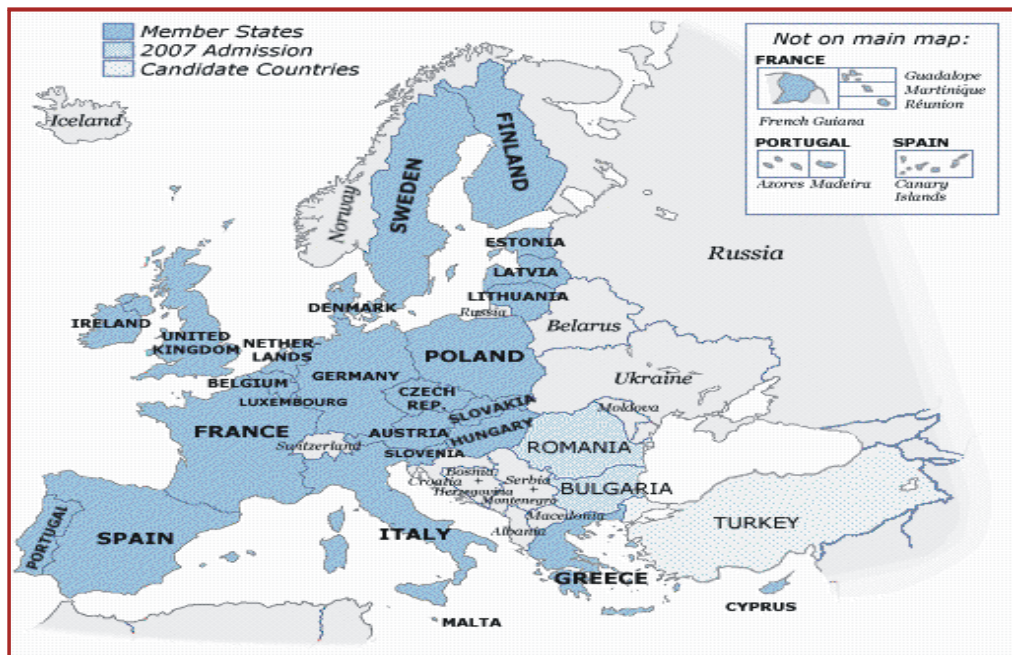
Dari sudut pandang penjaga perbatasan Hongaria, tanggal 1 Mei 2005 adalah hari bersejarah dimana batas bersama negara dengan Slovakia, Austria,

dan Slovenia menjadi perbatasan internal Uni Eropa dan pada hari yang sama perbatasan dengan Kroasia, Serbia, Rumania, dan Ukraina berubah menjadi perbatasan eksternal Uni Eropa.

Bergabungnya Hongaria ke Uni Eropa membuat perubahan sejarah dalam teknologi penjagaan perbatasan. Penjaga Perbatasan Hongaria mengkonsentrasikan kekuatan personel dan teknisnya pada perbatasan eksternal sementara itu Hongaria menerapkan sesuatu yang lebih ringan pada perbatasan internal.

Pada awal tahun 2007, Bulgaria dan Rumania menjadi anggota Uni Eropa dan memberikan tantangan baru bagi penjaga perbatasan. Perbatasan Hongaria-Rumania juga menjadi bagian dari perbatasan internal sejak 1 Januari 2007.

Gambar III.8.
Negara-Negara Anggota, Calon, dan Kandidat Konvensi Schengen



Telah direncanakan oleh para pengambil keputusan di Uni Eropa bahwa pada 1 Januari 2008 beberapa negara baru akan menjadi anggota Konvensi Schengen dan Hongaria akan menjadi salah satu diantaranya. Hal ini berarti bahwa pengawasan perbatasan yang konstan dan kontrol-perbatasan tidak lagi diaplikasikan pada perbatasan internal Uni Eropa kecuali untuk beberapa kasus khusus.

7.1. Penjelasan berikut ini mengenai efisiensi penjagaan perbatasan:

1. Keputusan profesional yang dibuat selama ini
2. Latar belakang hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas dengan sukses
3. Penjaga perbatasan yang profesional dan terorganisir dengan baik
4. Jaminan dukungan finansial dan teknis
5. Motivasi moral-finansial bagi petugas dan pengelolaan disiplin yang ketat
6. Jaminan mobilitas
7. Pengaturan ulang organisasi yang dimungkinkan
8. Kerjasama aktif dengan negara tetangga dan negara lainnya
9. Pelatihan dan pendidikan yang cukup
10. Inisiatif dan aktifitas dalam kerjasama regional

7.2. Keputusan paling penting yang berkontribusi pada keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Melupakan 'penjagaan perbatasan militeristik' digantikan dengan: manajemen perbatasan berbasis penegakkan hukum.
Artinya: tidak ada wajib militer dalam staf, hanyalah kru profesional yang sudah terlatih dengan baik. Aktifitas harus berdasarkan pada landasan hukum yang luas dari semangat konstitusi negara.
2. Berpartisipasi dalam pembentukan UU mengenai Penjaga Perbatasan
Artinya: menjelaskan opini para penjaga perbatasan selama periode total legislasi (hal ini merupakan tugas manajemen tertinggi dari penjaga perbatasan)
3. Berpartisipasi dalam negosiasi sistem keamanan perbatasan yang baru
Artinya: partai politik relevan memiliki rencana mengenai keamanan nasional dan salah satu bagian pentingnya adalah keamanan perbatasan. Ikut berperan dalam diskusi pemerintah mengenai reformasi dan pembentukan keamanan perbatasan.
4. Mempelajari model pengembangan tingkat tinggi dan mengadopsi praktek-praktek yang diminati
Artinya: Selalu belajar. Mempelajari model berbeda yang dilakukan oleh negara lain dan tidak ragu untuk menggunakan contoh yang bermanfaat. Mengunjungi organisasi penjaga perbatasan diluar negeri dan menjalin relasi dengan mereka.
5. Berkonsultasi dengan organisasi masyarakat sipil dan asosiasi sipil.
Artinya: organisasi masyarakat sipil dan asosiasi sipil memiliki hak untuk menyampaikan suara mereka terkait dengan keamanan. Pemerintah menggunakan uang dari para pembayar pajak dan dari pendekatan ini maka tidak akan sesuatu yang ditutup-tutupi.

7.3. Faktor-faktor yang dapat mengarah kepada kegagalan dan berhasil diatasi oleh penjaga perbatasan Hongaria:

1. Ide penyebaran penjagaan batas negara antar institusi/otoritas yang berbeda
2. Menyerahkan elemen tertentu dari penjagaan perbatasan kepada otoritas lainnya (misalnya elemen batas hijau atau titik lintas batas kepada polisi, penjagaan kepabeanan kepada polisi)
3. Pembiayaan yang tidak mencukupi bagi penjaga perbatasan
4. Ide berbeda dari partai politik berbeda terkait manajemen penjaga perbatasan
5. Penjaga Perbatasan Hongaria telah mengelola antisipasi efek negatif yang muncul sepanjang waktu, dengan menjadikan posisi finansial penjagaan perbatasan disukai dan dengan sikap non-politis penjaga perbatasan.

7.4. Elemen-elemen Model Hongaria yang dianggap masih lemah

1. Dalam sejumlah area petugas, struktur finansial, dan teknis
2. Dalam beberapa jenis pelatihan

8. Rekomendasi bagi negara yang merencanakan reformasi sistem keamanan perbatasan

1. Hindari pengaruh langsung partai politik terhadap organisasi penjaga perbatasan
2. Manfaatkan efek yang menguntungkan dari pengaruh politik (misalnya: demiliterisasi)
3. Sebuah evaluasi objektif dan kritis dari organisasi harus menimbang keputusan apapun dari struktur organisasi
4. Organisasi harus dibangun atas dasar aturan hukum
5. Organisasi legal dan yang seragam harus distrukturkan untuk berhadapan dengan tugas penjagaan perbatasan khusus (pelayanan tanpa wajib militer)
6. Jika memungkinkan, hanya satu organisasi yang dapat memenuhi tugas tersebut
7. Organisasi tersebut harus merupakan subordinasi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Penegakkan Hukum dan Kehakiman
8. Struktur organisasi harus ditentukan berdasarkan tugas
9. Aktivitas sukarela, motivasi dan patriotisme harus dipertimbangkan ketika mempekerjakan petugas.
10. Pendidikan dan pelatihan petugas harus dilakukan secara hati-hati, pengalaman internasional juga dipertimbangkan
11. Laksanakan dialog terbuka dengan pemerintah lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bentuk sebuah hubungan penjaga perbatasan-masyarakat sipil yang berguna dan libatkan mereka dalam lingkaran
12. Kerjasama aktif dengan negara tetangga dan organisasi polisi perbatasan lainnya harus dikembangkan.

9. Pandangan Umum Mengenai Negara-Negara Eropa bagian Timur-Tenggara Terkait Dengan Reformasi Keamanan Perbatasan Mereka

Keamanan dan demokratisasi memiliki saling keterkaitan dan ada relasi yang erat diantara mereka. Untuk alasan apapun, masyarakat dapat merasa tidak aman, mulai dari dihadapkan pada serangan eksternal maupun ancaman internal, dan sangatlah sulit untuk mempromosikan dan bergerak lebih jauh lagi dengan proses demokratisasi. Kawasan Eropa bagian timur dan tenggara adalah contoh terbaik untuk kasus ini, karena negara-negara tersebut terhubung dalam sebuah proses paralel dalam membangun kapasitas institusionalnya sendiri, sama halnya dengan memenuhi kebutuhan dasar keamanan. Negara-negara Eropa bagian timur dan tenggara, terkait perubahan tahun 1989, melakukan reformasi yang memasukkan pembentukan institusi baru, struktur administratif negara, dan rantai tanggung jawab bagi sektor keamanan, struktur yang sesuai bagi kontrol demokratis dari aktor sektor keamanan dan depolitisasi mereka.

Reformasi melibatkan pembentukan prinsip dan struktur bagi pengawasan dan transparansi isu sektor keamanan; penguatan parlemen atau dewan nasional untuk mengawasi dan menyetujui anggaran sektor keamanan; pembentukan sistem komisi parlementer untuk menguji kebijakan sektor keamanan; sipilisasi birokrasi sektor keamanan perbatasan, dan depolitisasi aktor sektor keamanan. Termasuk juga, sebuah kunci penting dari reformasi sektor keamanan adalah menyediakan dasar hukum bagi reformasi dan profesionalisasi pembentukan sektor keamanan.

Hal ini menjadikan pendefinisian misi, tugas, dan struktur dari aktor sektor keamanan perbatasan sejalan dengan prioritas yang digaris bawahi dalam dokumen legal nasional seperti konsep keamanan nasional. Penjagaan perbatasan adalah sebuah misi nasional yang harus dilakukan oleh kekuatan kepolisian khusus yang terlatih.

Implementasi efisien, pengembangan berlanjut, dan kebutuhan untuk sebuah reaksi yang meningkat terhadap perubahan bentuk kejahatan lintas batas membutuhkan satu otoritas pemimpin yang bertanggung jawab bagi keamanan nasional di perbatasan. Wewenang ini harus terdiri dari satu organisasi nasional khusus yang non-militer yang bertanggung jawab bagi keamanan perbatasan. Organisasi ini harus dioperasikan dibawah patronasi baik itu Menteri Dalam Negeri atau Menteri Kehakiman.

Eropa Timur dan Tenggara. Selama 15 tahun terakhir, negara-negara Eropa Timur dan Tenggara telah secara bertahap melakukan reformasi dalam reorganisasi struktur penjaga perbatasan mereka, mengubahnya dari sebuah organisasi militer dengan staf wajib militer menjadi sebuah organisasi polisi dengan staf profesional murni.

Penjagaan perbatasan memerlukan profesionalisme, dan berada dibalik kemampuan dari militer yang terdiri dari wajib militer. Saat ini, kontrol perbatasan adalah aspek penegakkan hukum, dibandingkan pertahanan nasional. Definisi militer dari keamanan perbatasan-dengan karakteristik era perang dingin-tidak relevan lagi dalam perubahan lingkungan keamanan yang terjadi. Negara-negara ini telah membangun relasi yang erat dengan aktor berbeda dari institusi

dan organisasi internasional. Salah satu kapasitas terkuat diantara mereka adalah tawaran proyek Uni Eropa yang beragam ke wilayah tersebut.

Kesimpulan

Selama 18 tahun terakhir ini telah terjadi banyak perubahan di Hongaria dibandingkan 40 tahun sebelumnya. Model penjaga perbatasan yang militeristik telah berubah total menjadi sebuah organisasi penegakkan hukum yang fleksibel, profesional, dan terbuka dengan tugas yang jelas dan dasar hukum yang kuat sesuai kepentingan warga negara dan negara Hongaria secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan bersama Hongaria, maka penjaga perbatasan Hongaria telah mengambil beragam cara dan penjaga perbatasan Hongaria harus bertindak sebagai satu komunitas yang nyata.

**Manajemen Garis Perbatasan Indonesia
*Sebuah Usaha Menjamin Keamanan Warga Negara*****Aditya Batara G²³****I. Pengantar**

Arus reformasi sektor keamanan di Indonesia sudah memasuki usia sewindu, namun masih ada beberapa hal yang ternyata luput dari perhatian. Reformasi sektor keamanan secara umum mengandung makna sebagai "aturan/ketetapan keamanan di sebuah negara dalam kondisi efektif dan efisien, dan dalam kerangka kerja pengawasan demokratis."²⁴ Istilah reformasi sektor keamanan sendiri menurut UNDP Human Development Report 2002 mencakup lima kelompok besar, yakni organisasi yang memiliki wewenang penggunaan kekerasan, manajemen sipil dan badan pengawasan, institusi hukum dan penegakkan hukum, kekuatan keamanan bukan-negara, dan kelompok masyarakat sipil bukan-negara.²⁵ Setiap kelompok ini dapat terdiri dari sejumlah institusi, aktor, badan, dan kekuatan tergantung negara masing-masing. Dengan demikian, ruang lingkup reformasi sektor keamanan tidak hanya sebatas pada reformasi institusi militer, polisi, dan intelijen semata, akan tetapi melibatkan semua institusi yang terkait dengan proses penjaminan keamanan warga negara secara keseluruhan.

Dalam kasus Indonesia, pola reformasi sektor keamanan yang terbentuk masih sebatas reformasi institusi TNI (Tentara Nasional Indonesia), POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), dan BIN (Badan Intelijen Negara). Hal ini dapat dimaklumi, mengingat Indonesia masih berada pada usia transisi demokrasi yang relatif muda. Akan tetapi, adalah sesuatu yang paradoks ketika Indonesia telah merayakan kemerdekaannya selama 61 tahun dan masih berada dalam sebuah kondisi krisis kedaulatan negara atas wilayahnya. Indonesia hingga saat ini masih memiliki segudang permasalahan dalam demarkasi, delimitasi, dan pengelolaan perbatasannya. Padahal, perbatasan pada hakikatnya adalah sebuah batas fisik yang mencirikan kedaulatan suatu negara sekaligus memberikan ciri khas sosial, budaya, politik, dan hukum yang berbeda dengan negara lainnya. Globalisasi dan arus orang, informasi, dan barang yang melonjak tajam menjadikan kawasan perbatasan sebagai media filtrasi terhadap potensi-potensi ancaman keamanan warga negara.²⁶ Terkait

²³ Peneliti LESPERSI (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia)

²⁴ Dikutip dari Andrzej Karkoszka, *The Concept of Security Sector Reform, dalam Security Sector Reform: Its Relevance for Conflict Prevention, Peace Building, and Development*, Geneva: UN & DCAF, 2003. hlm 10

²⁵ *Ibid.*, hlm 10

²⁶ Dalam tulisan ini, istilah 'perbatasan' dilihat secara luas yang mencakup kawasan bandar udara, pelabuhan, jalan umum, dan bentuk-bentuk sarana transportasi lainnya yang melibatkan arus informasi, orang, dan barang lintas negara.

dengan cakupan reformasi sektor keamanan, maka para aktor di garis perbatasan negara dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk penjaminan keamanan warga negara tanpa terkecuali.

II. Mendefinisikan Ulang Keamanan Perbatasan

Perbatasan (*border*) mengandung pengertian sebagai batas geografis dari sebuah entitas politik atau yurisdiksi hukum, seperti negara, negara bagian, atau pemerintah daerah. Perbatasan sendiri dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yakni perbatasan darat, laut, dan udara.

Sebagai bagian dari entitas politik (negara), perbatasan tentunya tidak luput dari isu-isu seputar keamanan. Kawasan perbatasan kemudian menjadi salah satu wilayah pengelolaan keamanan negara yang juga memerlukan perhatian serius. Pola ancaman keamanan global saat ini telah mengalami transisi dari isu-isu konvensional (perang, konflik antar negara, dsb) ke arah isu-isu non-konvensional seperti terorisme, senjata pemusnah massal dan kejahatan transnasional yang terorganisir. Selain itu, ancaman keamanan global saat ini lebih banyak dimainkan oleh aktor-aktor non-negara yang memiliki mobilitas tinggi untuk bermigrasi antar negara.

Dengan demikian, kawasan perbatasan menjadi wilayah yang strategis dalam mengatasi ancaman keamanan global tersebut. Keberadaan kontrol perbatasan sebagai sebuah mekanisme pengaturan dan pengawasan lalu lintas orang dan barang menjadi sangat signifikan bagi penjaminan keamanan warga negara secara keseluruhan. Kontrol perbatasan sendiri meliputi pos-pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) serta pos pemeriksaan orang dan kargo asing di bandara atau di pelabuhan. Pintu masuk perbatasan baik itu di pos perbatasan, bandara, dan pelabuhan menjadi lingkaran pertama untuk melakukan pencegahan masuknya orang atau barang yang dapat membahayakan keselamatan warga negara maupun mengganggu stabilitas keamanan negara. Selain itu, perbatasan juga dapat menjadi kontrol terhadap migrasi orang atau barang yang terkait dengan aspek kriminal domestik (misalnya, koruptor) ke negara lain.

Ada beberapa bentuk tindak kriminal di kawasan perbatasan yakni, penyelundupan barang-barang komersial, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan narkoba, terorisme, pencurian ikan, serta penyelundupan kayu ilegal.

III. Perbatasan Indonesia dan Kompleksitas Permasalahannya

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km², serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900 km. Dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut, implikasinya, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara diantaranya Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia,

Papua Nugini, dan Timor Leste dengan panjang garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km.

Gambar IV.1. Peta Perbatasan Indonesia



Sumber: Bakosurtanal, 2003

Luasnya wilayah perbatasan Indonesia memberikan konsekuensi nyata mengenai arti strategis kawasan perbatasan bagi dinamika kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Kawasan perbatasan kemudian menjadi sebuah akses utama bagi masuknya beragam nilai, pengaruh, bahkan ancaman yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, secara kontekstual pemerintah Indonesia belum melihat signifikansi perbatasan sebagai sesuatu yang mendesak. Wilayah perbatasan yang sangat luas tersebut dilihat sebagai "pintu belakang" bukan "pintu depan" negara. Hal ini dapat dimaklumi selama masa pemerintahan Orde Baru yang mengedepankan paradigma sentralistik dalam sistem pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa paradigma sentralisasi masih diterapkan untuk kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kawasan perbatasan meskipun paradigma desentralisasi telah diterapkan melalui konsep otonomi daerah di seluruh Indonesia. Secara umum, dapat dikatakan bahwa wilayah perbatasan hingga saat ini masih belum tersentuh oleh kebijakan-khususnya dalam konteks pengelolaannya-yang memberikan pengaruh positif baik itu secara sosial, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Berdasarkan hasil pengamatan LESPERSSI, ada dua hal yang menjadi permasalahan mendasar terkait dengan kawasan perbatasan yaitu, *Pertama*, delimitasi dan demarkasi perbatasan Indonesia masih kabur. Dalam konteks ini, Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan dalam menentukan kapasitas haknya, terutama di perbatasan darat dan laut.

Permasalahan yang *kedua* terkait dengan sistem pengelolaan/ manajemen kawasan perbatasan baik itu ditinjau dari sisi paradigma, SDM, dan mekanisme kontrol yang diterapkan. Sebagai catatan awal, pemerintah saat ini masih menggunakan pola koordinasi antar lembaga untuk mengelola perbatasannya.

Kedua permasalahan mendasar diatas akan dianalisa secara lebih mendalam dalam pembahasan dibawah ini.

III.1. Delimitasi dan Demarkasi Perbatasan Indonesia

Hingga saat ini Indonesia masih memiliki sengketa perbatasan dengan negara lain. Untuk perbatasan darat, garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan sepanjang 2000 kilometer sampai saat ini belum tuntas dimana masih terdapat 10 permasalahan utama yang belum diselesaikan. Untuk perbatasan laut, kawasan perairan yang menjadi sengketa dengan negara lain mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (dengan Malaysia, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Timor Leste, India, Singapura, dan Thailand) Batas Laut Teritorial (Timor Leste dan Malaysia-Singapura), dan Batas Landas Kontinen (Vietnam, Filipina, Republik Palau, dan Timor Leste).²⁷

Secara teoritis ada sembilan aspek yang sering menjadi alasan klaim suatu wilayah oleh sebuah negara yakni,²⁸

1. Perjanjian (*treaties*), merupakan klaim paling umum yang didasarkan oleh perjanjian internasional dan cenderung melahirkkan minimalisasi konflik dan lebih persuasif.
2. Geografi (*geography*), merupakan Klaim klasik berdasarkan batas alam
3. Ekonomi (*economy*), merupakan klaim berdasarkan "kepastian untuk kelangsungan hidup atau pembangunan negara".
4. Kebudayaan (*culture*), merupakan klaim berdasarkan batasan "etnik bangsa" yang mencakup bahasa, keturunan, atau karakteristik budaya lainnya.
5. Kontrol efektif (*effective control*), merupakan klaim berdasarkan eksistensi administrasi wilayah dan populasi penduduk. Seringkali disebut klaim wilayah yang terkuat dibawah hukum internasional.
6. Sejarah (*history*), merupakan klaim berdasarkan penentuan sejarah (pemilikan pertama) atau durasi (lamanya kepemilikan).
7. *Utis possidetis*, klaim wilayah yang didasarkan pada doktrin *Utis possidetis*, artinya negara yang baru merdeka mewarisi batas administratif yang dibentuk oleh penguasa kolonial.
8. Elitisme (*elitism*), merupakan klaim berdasarkan kemampuan teknologi.
9. Ideologi (*Ideology*), merupakan klaim yang didasarkan pada "identifikasi unik dengan wilayah" atau dengan kata lain ekspansi ideologi.

²⁷ Buku Utama Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara: Prinsip Dasar, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan. Bappenas, 2006. hlm 31-34

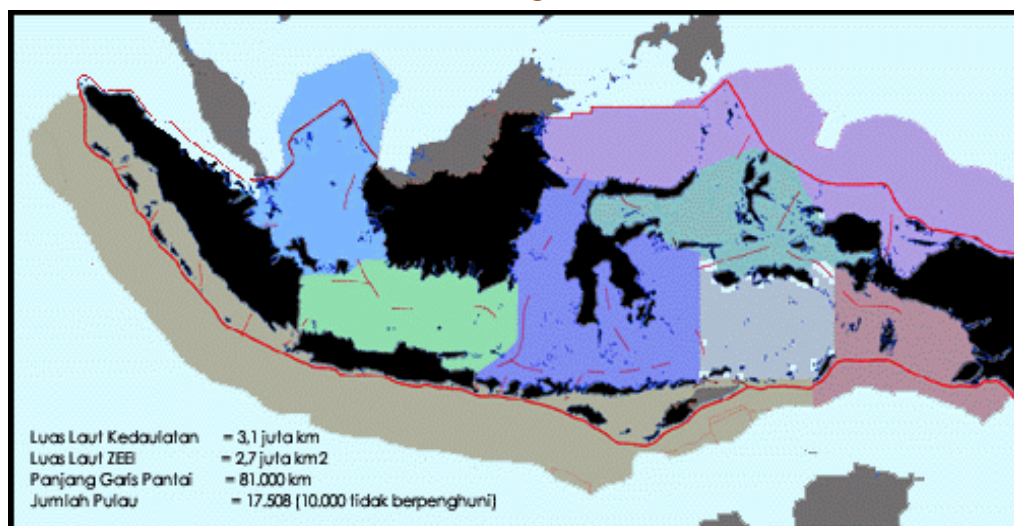
²⁸ Brian Taylor Summer, *Territorial Disputes at The Internasional Court of Justice*, Duke Law Jurnal, hlm 1.

Indonesia selama ini cenderung menggunakan klaim *utis possidetis*, perjanjian, sejarah, dan kebudayaan dalam mengklaim wilayah-wilayah perbatasannya yang masih 'mengambang' ketika menghadapi sengketa wilayah perbatasan dengan negara lain. Apabila dibiarkan secara terus menerus, asumsi ini akan sangat membahayakan bagi Indonesia, mengingat masih lemahnya argumentasi yang mendasari klaim-klaim Indonesia terhadap wilayah-wilayah perbatasan 'mengambang' tersebut.

III.1.1. Delimitasi Wilayah Laut Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² (lihat Gbr.III.2.). Dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut, implikasinya, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Dengan demikian, wilayah laut menjadi aspek yang sangat strategis baik itu dari sisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan.

Gambar IV.2. Peta Geografis Laut Indonesia



Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2003

Bentuk negara kepulauan yang disandang oleh Indonesia kemudian memberikan implikasi nyata dalam konseptualisasi geopolitik Indonesia, seperti yang tertuang dalam konsep Wawasan Nusantara yang juga merupakan doktrin dasar pembangunan, isinya adalah sebagai berikut,

Wujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu negara kepulauan (archipelagic state), yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan atau kesatuan pertahanan keamanan Negara, demi untuk mencapai cita-cita

perjuangan bangsa Indonesia melalui pembangunan segenap potensi darat, laut dan angkasa secara terpadu.²⁹

Dari komitmen geopolitik Indonesia dalam wawasan nusantara tersebut jelas terlihat bahwa seharusnya pemerintah yang sedang melaksanakan proses pembangunan dalam skala nasional wajib menyadari posisi strategis Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan konsekuensinya terhadap pembangunan (sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan-keamanan) yang dijalankan sebagai sebuah geostrategi. Sejauh ini masih sedikit komitmen politik pemerintah terhadap persoalan perbatasan negara, terutama di laut. Selama ini pemerintah hanya terfokus pada program-program pembangunan di wilayah darat, dan itupun masih sebatas pada pemusatan pembangunan tanpa sedikitpun memberikan dampak yang signifikan bagi wilayah perbatasan darat. Permasalahan terbesar dalam delimitasi wilayah laut Indonesia dapat dilihat dari kompleksnya permasalahan yang dialami oleh pulau-pulau terdepan Indonesia.³⁰ Pulau-pulau terdepan dalam konteks delimitasi menjadi dasar bagi penarikan garis pangkal perairan nusantara yang memberikan legitimasi hak dan wewenang Indonesia di wilayah perairan lautnya.

Data tahun 2004 menunjukkan bahwa 12 dari 92 pulau terdepan yang menjadi titik batas negara Indonesia rawan terhadap konflik perbatasan.³¹ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78/2005 disebutkan bahwa pulau kecil terdepan di Indonesia mencapai 92 Pulau yang berbatasan dengan beberapa negara yakni, Malaysia (22 pulau), Vietnam (2 pulau), Filipina (11 pulau), Singapura (4 pulau), Australia (23 Pulau), Timor Leste (10 pulau) dan India (12 pulau).

Sayangnya, pengakuan internasional atas perbatasan laut Indonesia belum didapatkan secara maksimal. Penentuan garis pangkal perairan nusantara memang sudah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1960 dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Akan tetapi, peraturan pemerintah tersebut belum didepositkan ke PBB, padahal, langkah awal untuk mendapatkan pengakuan internasional adalah dengan mendepositkan peraturan pemerintah tersebut.

Pulau-pulau rawan sengketa perbatasan tersebut pada awalnya tidak berpenghuni dan seringkali dimanfaatkan oleh nelayan asing sebagai tempat berlindung, tempat mencari ikan, bahkan eksplorasi sumber daya kelautan. Dalam perkembangannya, separuh dari pulau-pulau terluar tersebut telah berpenghuni. Sebagian besar dihuni oleh warga negara Indonesia yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Meskipun demikian, keterbatasan infrastruktur

²⁹ Abdul Rival Rais, *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik: Sudut Pandang Indonesia*, Jakarta: APSINDO, 2001. hlm 23

³⁰ Penulis lebih memilih penggunaan kata 'pulau terdepan' dibandingkan 'pulau terluar' mengingat pulau-pulau tersebut adalah bagian terdepan-bukan terluar-Indonesia yang berbatasan dengan negara lain.

³¹ *Sebanyak 12 Pulau Terluar Indonesia Rawan Konflik*, KOMPAS, Edisi 9 September 2004, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0409/09/ekonomi/1258816.htm>, diakses pada Jumat, 28 Desember 2006, Pukul 14:56 WIB.

sosial, ekonomi, dan budaya menjadikan warga negara Indonesia di pulau-pulau tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan dilematis.³² Eksistensi pulau terdepan Indonesia tersebut sangatlah strategis sebagai gerbang terdepan interaksi Indonesia dengan negara tetangganya dalam konteks sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hankam. Interaksi yang terjadi di kawasan pulau-pulau terdepan ini dapat bersifat positif, seperti perdagangan, atau dapat bersifat negatif seperti penyelundupan, pencurian ikan, bahkan sengketa perairan.

Secara umum, ada beberapa wilayah di pulau-pulau terdepan Indonesia yang berpotensi akan terjadinya konflik dengan negara tetangga, yakni perairan Natuna, Kepulauan Sangihe Talaud, dan wilayah Celah Timor.

Gambar IV.3. Lokasi Potensi Konflik di Perairan Indonesia



Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2003.

Untuk daerah perairan Natuna, pulau yang perlu mendapatkan perhatian adalah Pulau Sekatung (Riau) yang berbatasan dengan Vietnam dan seringkali dijadikan tempat persinggahan nelayan asing. Untuk wilayah perairan Sipadan-Ligitan, Pulau yang harus diberikan perhatian khusus adalah Pulau Sebatik (yang dimiliki Indonesia dan Malaysia). Untuk wilayah Kepulauan Sangihe Talaud, yang harus diperhatikan adalah Pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina secara langsung.³³ Dan untuk wilayah Celah Timor, pulau yang harus diwaspadai

³² Lihat Laporan Akhir Tahun LESPERSI: Evaluasi Sektor Keamanan 2006 dan Prioritas Reformasi Sektor Keamanan tahun 2007.

³³ Menurut penulis, Pulau Miangas perlu mendapatkan perhatian dini, mengingat sebagian besar penduduk di pulau tersebut saat ini telah menunjukkan keinginan yang besar untuk bergabung dengan Filipina karena alasan ekonomi.

adalah Pulau Dana dan Pulau Batek, yang rawan akan penyelundupan dan imigran ilegal.³⁴

Ketiadaan batasan yang jelas menurut hukum internasional telah menjadikan sebagian besar wilayah laut Indonesia berada dalam kondisi kritis dan rawan akan kejahatan dan ekspansi wilayah laut negara tetangga.³⁵

III.1.2. Demarkasi Daratan Indonesia

Kondisi perbatasan darat Indonesia sedikit lebih beruntung dibandingkan perbatasan laut Indonesia. Meskipun demikian, kawasan perbatasan darat Indonesia belum bebas sepenuhnya dari kompleksitas permasalahan yang dialami kawasan perbatasan Indonesia secara keseluruhan. Satu-satunya perbedaan tingkat permasalahan antara perbatasan darat dan perbatasan laut di Indonesia adalah kondisi demarkasi yang lebih baik di perbatasan darat Indonesia.

Indonesia memiliki perbatasan darat dengan 3 negara yang tersebar di tiga pulau, empat propinsi, dan 15 kabupaten dan kota, yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste (Lihat Gbr. III.3, a, b, dan c).

Gambar IV.4. Perbatasan Darat Indonesia
a. Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan



Sumber: Bappenas, 2006

³⁴ Diolah dari berbagai sumber

³⁵ Berdasarkan laporan *International Maritime Bureau* (BMI) wilayah laut Indonesia paling berbahaya di dunia. Menurut BMI, selama tiga bulan pertama 2007 tercatat sembilan dari 41 serangan dan perampokan di seluruh dunia terjadi di perairan Indonesia. Al Busyra Basnur, *Laut Kita, Aman Tak Aman*, <http://www.seputar-indonesia.com/edisetak/opini/laut-kita-aman-tak-aman-3.html>, diakses pada 1 Juni 2007, pukul 13:24 WIB.

b. Perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Papua



Sumber: www.papuaweb.org

c. Perbatasan Indonesia-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur



Sumber: www.bakosurtanal.go.id, 2006

Meskipun kondisi demarkasi perbatasan darat Indonesia lebih baik dibandingkan perbatasan laut, permasalahan *illegal crossing* (khususnya pelintas tradisional), *illegal logging*, TKI ilegal, dan penyelundupan barang masih menjadi permasalahan utama di perbatasan darat. Minimnya sosialisasi dan prasarana (tapal batas dan pos lintas batas yang memadai) di sepanjang garis perbatasan

darat menjadi problematika tersendiri yang patut diberikan perhatian serius oleh pemerintah.

III.2. Otoritas Pengelolaan Perbatasan di Indonesia

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki otoritas yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan perbatasan. Pemerintah Indonesia cenderung menerapkan sistem pengelolaan yang bersifat koordinatif (misalnya *joint border committee*) dan bahkan tidak terintegrasi-pemisahan otoritas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan-tentunya akan menjadi solusi utama untuk mengurangi tingkat ancaman sehingga terjadi tumpang tindih wewenang dalam pengelolaan garis perbatasan negara.³⁶

Dalam konteks ini, dapat diasumsikan bahwa respon pemerintah terhadap dinamika permasalahan di garis perbatasan masih terbilang buruk. Pada bagian awal tulisan ini, telah dijelaskan bahwa kawasan perbatasan negara merupakan bagian integral dari sebuah negara yang juga rawan-atau bahkan lebih rawan-akan potensi ancaman keamanan dan pertahanan bagi negara yang bersangkutan. Eksistensi otoritas pengelolaan garis perbatasan yang terintegrasi-kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan-tentunya akan menjadi solusi utama untuk mengurangi tingkat ancaman keamanan dan pertahanan di perbatasan negara. Pengelolaan garis perbatasan negara yang terintegrasi akan memberikan kondisi kawasan perbatasan yang lebih baik dan memberikan jaminan akan penegakkan kedaulatan negara yang lebih permanen di wilayah-wilayah terdepan negara tersebut.

Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia dikelola melalui pendekatan keamanan (*security*) yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai aktor utamanya. Hal ini dapat dimaklumi, karena berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 7 ayat 2 (b) poin (4) disebutkan bahwa TNI ditugaskan mengamankan wilayah perbatasan. Akan tetapi, pendekatan keamanan yang digunakan dalam mengelola kawasan perbatasan sudah tidak sesuai untuk diterapkan pada kondisi saat ini. Hal ini dikarenakan, *pertama*, TNI adalah kekuatan keamanan dan pertahanan negara yang tidak dibekali dengan keahlian dalam bidang pengelolaan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik di perbatasan.³⁷ Mereka hanya dibekali kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman negara lain. *Kedua*, membiarkan TNI sebagai satu-satunya pihak yang berwenang dalam pengelolaan kawasan perbatasan (yang jauh dari kontrol pusat dan akses pengawasan masyarakat sipil) akan menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh beberapa oknum TNI di lapangan. Misalnya, kasus keterlibatan beberapa anggota TNI dalam tindak kriminal di perbatasan seperti *illegal logging*, penyelundupan barang,

³⁶ Penulis melihat bahwa sebuah sistem pengelolaan garis perbatasan negara yang terintegrasi akan mengoptimalkan kaidah CIQS (*Custom, Immigration, Quarantine, and Security*)-atau kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan-dalam satu badan/institusi sehingga menjadikan proses pengawasan dan kontrol terhadap garis perbatasan negara lebih efektif dan efisien.

³⁷ Aditya Batara G, *Perbatasan Sebagai Identitas Bangsa*, JURNAL NASIONAL, edisi Selasa, 3 April 2007.

dan pelanggaran HAM. Faktor *ketiga* adalah proses penguatan jadi diri kebangsaan di masyarakat perbatasan akan lebih efektif jika dilakukan melalui cara-cara non-koersif yang persuasif dan akomodatif.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Wilayah Negara yang diajukan oleh DPR RI pada bulan Februari 2007, dinyatakan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah badan khusus pengelola perbatasan yang bertugas melaksanakan wewenang sebagai berikut,³⁸

1. Melakukan perundingan perbatasan dan membangun/membuat tanda batas;
2. Melakukan pembangunan di wilayah perbatasan;
3. Menetapkan pembiayaan pembangunan di wilayah perbatasan;
4. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
5. Menjaga wilayah perbatasan;
6. Membuat dan memperbaharui peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali dan mendepositkannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Secara umum, dari beberapa wewenang diatas, poin (2) dan (3) memberikan indikasi akan ketimpangan wewenang. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah, tanggung jawab pembangunan kawasan perbatasan berada ditangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Menyerahkan urusan pembangunan kawasan perbatasan kepada badan pengelola perbatasan yang akan dibentuk tersebut hanya akan menegasikan tanggung jawab serupa yang telah didelegasikan pada pemerintah daerah. Seharusnya, badan pengelola perbatasan tersebut hanya bertanggung jawab dalam kontrol arus orang dan barang serta pengelolaan keamanan di garis perbatasan tanpa berperan aktif dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Idealnya, pemerintah hanya melimpahkan wewenang pengelolaan garis perbatasan dengan orientasi melindungi keamanan warga negaranya dari arus orang dan barang yang membahayakan kepada badan yang akan dibentuk tersebut. Penulis melihat bahwa sebaiknya badan yang akan dibentuk untuk perbatasan tersebut dapat memenuhi tiga unsur utama agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien, yakni:

1. Pengelolaan garis perbatasan negara secara terintegrasi yang meliputi aspek kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan dalam satu badan.
2. Pengawasan dan kontrol terhadap arus orang dan barang secara ketat yang didasarkan hukum yang berlaku dan ditujukan semata-mata pada perlindungan terhadap keamanan warga negara.
3. Adanya transparansi dan akuntabilitas dari badan yang bersangkutan terhadap masyarakat terkait dengan aktifitasnya.

Secara garis besar, kontrol arus barang dan orang biasanya dilakukan oleh otoritas kepabeanan, imigrasi, dan bea cukai. Sedangkan untuk keamanan,

³⁸ Lihat, Naskah RUU Wilayah Negara Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, 14 Februari 2007, pasal 29-30.

otoritas yang berwenang adalah penjaga perbatasan (*border guard*) atau penjaga pantai (*coast guard*).

IV. Penutup

Selama ini, wacana reformasi sektor keamanan seringkali ditujukan hanya pada reformasi aktor-aktor keamanan nasional yakni militer, polisi, dan intelijen. Padahal hakikat dari reformasi sektor keamanan adalah menciptakan sebuah arsitektur keamanan yang memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia secara keseluruhan dalam sebuah kerangka pengawasan yang demokratis. Jika kita berbicara mengenai arsitektur keamanan Indonesia, maka tentunya kita harus mempertimbangkan kondisi keamanan global saat ini. Melakukan reformasi sektor keamanan bukan hanya berarti mereformasi peran, fungsi, status, dan kontrol terhadap aktor-aktor sektor keamanan, tetapi juga mensinergiskan kapabilitas sistem pertahanan dan keamanan nasional yang ada dengan ancaman-ancaman keamanan yang ada secara global.

Salah satu bentuk dari proses mensinergiskan sistem pertahanan dan keamanan nasional dengan situasi ancaman secara global adalah melalui reformasi manajemen perbatasan negara. Perbatasan (*border*) seringkali diabaikan dalam wacana reformasi sektor keamanan. Isu-isu di perbatasan dianggap sebagai isu-isu yang tidak populis, tidak memberikan arti strategis bagi perkembangan reformasi sektor keamanan secara signifikan. Padahal perbatasan sejatinya adalah salah satu media untuk menjamin keamanan warga negara dan bagian dari sistem keamanan nasional. Adalah sesuatu yang paradoks ketika Indonesia telah diakui oleh seluruh dunia sebagai sebuah negara selama hampir 62 tahun akan tetapi masih mengalami permasalahan kedaulatan, baik itu dari sisi hukum internasional maupun dari sisi pengelolaan (manajemen). Perbatasan adalah bentuk kedaulatan fisik sebuah negara yang paling nyata dan merupakan simbol yang memberikan ciri khas sosial, budaya, politik, dan hukum yang berbeda dengan negara lainnya.

Secara garis besar ada dua permasalahan utama terkait perbatasan di Indonesia yakni delimitasi dan demarkasi perbatasan Indonesia dan otoritas pengelolaan perbatasan di Indonesia. Untuk permasalahan delimitasi dan demarkasi perbatasan Indonesia, pemerintah harus segera melakukan serangkaian kebijakan yang mempercepat penetapan batas wilayah perbatasan Indonesia. Mengingat masih tingginya potensi perubahan batas wilayah kedaulatan Indonesia, maka pemerintah perlu memperhatikan sembilan aspek yang menjadi alasan bagi klaim kepemilikan negara terhadap suatu wilayah yakni, perjanjian (*treaties*), geografi, ekonomi, kebudayaan, kontrol efektif, sejarah, doktrin *utis possidetis*, elitisme, dan ideologi dalam menetapkan strategi dan kebijakan penetapan batas wilayah negara Indonesia.³⁹

³⁹ Pemerintah Indonesia kiranya perlu memahami kesembilan aspek tersebut dalam menetapkan batas wilayah negara agar kasus sengketa Sipadan-Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia lewat klausul kontrol efektif di Mahkamah Internasional tidak terulang kembali. Untuk penjelasan mengenai kasus sengketa Sipadan-Ligitan, lihat, Mustafa Abubakar, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006. Hlm 83-91

Kemudian, untuk permasalahan otoritas pengelolaan perbatasan di Indonesia, pemerintah harus segera mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Wilayah Negara agar dapat segera dibentuk sebuah badan yang secara khusus memiliki wewenang mengelola garis perbatasan secara terintegrasi (kepabeanan, imigrasi, Karantina, dan Keamanan). Selain itu, dalam pembentukannya, badan ini diharapkan akan dapat memenuhi kaidah kontrol sipil yang demokratis terhadap sektor keamanan sehingga penggunaan kekuatan koersif dapat diminimalisir dengan cara-cara yang lebih persuasif dan akomodatif terhadap dinamika permasalahan di perbatasan. Sebagai tambahan, pemerintah daerah perlu disadarkan kembali mengenai tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan negara.

Referensi

- Abubakar, Mustafa. *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Buku Utama Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara: Prinsip Dasar, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan. Bappenas, 2006.
- Laporan Akhir Tahun LESPERSI: Evaluasi Sektor Keamanan 2006 dan Prioritas Reformasi Sektor Keamanan tahun 2007.
- Rais, Abdul Rival. *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik: Sudut Pandang Indonesia*. Jakarta: APSINDO, 2001.
- _____. *Security Sector Reform: Its Relevance for Conflict Prevention, Peace Building, and Development*, Geneva: UN & DCAF, 2003
- Majalah TNI, *PATRIOT*, Edisi : Mei 2007

Border Issues Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum**Beni Sukadis⁴⁰****Pendahuluan**

Dalam rapat dengar pendapat antara menteri-menteri bidang Polhukam (politik, hukum, dan keamanan) dengan Komisi I DPR, di awal tahun 2007 lalu, disebutkan terdapat sejumlah permasalahan yang menyangkut wilayah perbatasan dan pulau terluar yang berpotensi pada hilangnya sejumlah pulau di daerah perbatasan. Diantaranya yakni hilang secara fisik, hilang secara kepemilikan, hilang secara pengawasan dan hilang secara sosial ekonomi.

Keempat penyebab tersebut dapat diantisipasi dengan mengambil sejumlah langkah yakni pertama, pemberian nama atas pulau-pulau yang belum punya nama; kedua, pendaftaran ke PBB atas pulau-pulau yang telah diberikan nama; ketiga pendudukan efektif atas pulau-pulau dengan pembangunan marka/tugu; keempat, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan wilayah perbatasan agar tidak menjadi daerah tertinggal secara sosial ekonomi.

Selain dapat kehilangan sejumlah pulau, permasalahan perbatasan sangat terkait dengan penyelundupan manusia, barang komoditas (kayu, ikan, dll), penyelundupan senjata, dan soal sengketa perbatasan. Fenomena ini tidak bisa diatasi dengan melakukan pendekatan keamanan semata apalagi pendekatan militer. Fenomena diatas lebih cocok diatasi dengan pendekatan kesejahteraan dan penegakan hukum melalui komitmen politik yang serius.

Problematika Wilayah perbatasan

Sebuah surat kabar nasional, terbitan 9 April 2007, menampilkan berita berjudul "Orang Asing banyak kuasai Pulau Nias".⁴¹ Berita tentang penguasaan pulau oleh asing (jika memang benar), selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak di Indonesia terutama pihak-pihak yang berwenang. Dilihat secara sepintas mungkin tidak ada yang aneh, tapi hal ini mengganggu rasa kepemilikan atas pulau-pulau itu. Bahkan kalau lebih ekstrem, bisa saja orang asing itu menggunakan pulau-pulau itu untuk kepentingan tertentu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kepemilikan tanah dan pulau di Indonesia sudah begitu bebas. Sehingga kepemilikan oleh orang asing bisa membahayakan integritas wilayah kita. Karena hingga saat ini belum ada ketentuan yang memperbolehkan orang asing memiliki pulau di Indonesia.⁴² Selain itu, nelayan disana menjual hasil tangkapan lautnya kepada nelayan asing. Memang mereka tidak bisa disalahkan untuk menjual komoditasnya kepada nelayan asing, tapi yang patut ditanya adalah bagaimana nelayan asing bisa ke sana.

⁴⁰ Koordinator Program LESPERSI (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia).

⁴¹ Koran Tempo, Senin, 9 April 2007.

⁴² *Ibid.*

Dengan terbuka perbatasan laut Indonesia, tentunya arus orang ataupun barang/jasa lintas tidak dapat dipantau secara terus menerus. Terbuka perbatasan laut akhirnya terkait pula dengan ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia.. Selama ini nelayan asing seperti Cina, Thailand dan Filipina yang menikmati hasil dari sumber daya laut Indonesia dan justru sebagian besar aktivitas tersebut adalah *illegal fishing*. Menurut perhitungan tahun 2005 saja diperkirakan kerugian dari *illegal fishing* mencapai Rp 4 trilyun.⁴³ Dilihat dari sisi kepentingan nasional kita, jelaslah hal ini merugikan ekonomi nasional.

Dari berbagai berita dan fakta yang ada, sebagian besar wilayah perbatasan baik darat dan laut merupakan daerah tertinggal. Contoh yang nyata yakni masyarakat kepulauan Miangas, Sulawesi Utara, yang tidak menganggap dirinya bagian dari Indonesia. Penduduk Miangas dan Marore sebagian besar bekerja di wilayah Filipina dan tentunya mengantongi devisa Filipina. Bahkan ketika terjadi insiden yang melibatkan aparat keamanan dan penduduk Miangas pada tahun 2005 lalu, penduduk Miangas secara emosional mengibarkan bendera Filipina. Jelas insiden ini tidak bisa dianggap remeh dan harus ditanggapi secara serius.

Selain itu sejumlah penyelundupan senjata dan amunisi marak terjadi di perairan Sulawesi dan Kalimantan ketika pecah konflik di Ambon dan Poso beberapa tahun lalu. Menurut studi dan informasi dari media massa, penyelundupan dilakukan lewat jalur Philipina Selatan. Rute penyelundupan senjata bisa melalui Sabah (Malaysia) atau Tahuna (Sulut). Kalau melewati Sabah, senjata selundupan dibawa ke Nunukan, Kaltim kemudian diangkut dengan kapal menuju Poso.⁴⁴ Dari contoh ini, masuk akal bila problem penyelundupan ini makin memperkeruh situasi konflik di wilayah tersebut. Tampaknya aparat keamanan tidak berdaya untuk mengatasi penyelundupan di wilayah ini. Apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi berbagai fenomena diatas, itu yang menjadi pertanyaan dari publik berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan dan pulau terluar. Dalam buku rencana induk pengelolaan perbatasan negara yang dikeluarkan Bappenas tahun 2006, dijelaskan bahwa pemerintah sudah memasukkan persoalan perbatasan menjadi prioritas pembangunan. Dalam dokumen itu menekankan bahwa pengembangan daerah perbatasan membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari segi kebijakan yang sudah ada, terutama telah dikeluarkannya Perpres No. 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan Perpres No. 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2006. Namun, semua itu masih dalam bentuk kebijakan umum, sehingga perlu dikeluarkannya peraturan pemerintah yang lebih konkret (*down to earth*). Dengan demikian pengelolaan atau pembangunan wilayah perbatasan dan pulau terluar tidak parsial.

⁴³ Informasi yang didapat dari sumber di Dephan, 2006

⁴⁴ Hal. 29, Majalah Tempo, 11 Februari 2007, "Bisnis Senjata Di Jantung Poso".

Salah satu yang diprioritaskan pemerintah adalah pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan dan pulau terluar, dan yang kedua adalah pengembangan ekonomi. Sarana dan prasarana berupa transportasi dan telekomunikasi di Pulau-pulau terluar, menjadi signifikan dan relevan untuk dibangun. Karena hal ini berkaitan dengan kemudahan untuk melakukan pergerakan orang dan berkomunikasi bagi penduduk lokal ataupun koordinasi antara pemerintah setempat dengan pemerintah lokal. Selain itu pentingnya jalur transportasi laut dibangun agar hubungan antara pulau-pulau terluar dengan wilayah kabupaten atau propinsi setempat tetap terjaga. Pengembangan jalur transportasi laut antar daerah merupakan upaya dari mempertahankan jalur komunikasi dan sekaligus pergerakan orang. Walaupun dilihat dari sisi bisnis pasti tidak untung – maka jika pemerintah yang turun tangan, hal ini menunjukkan eksistensi atau penguasaan *de facto* terhadap wilayah itu. Mempertahankan wilayah dan pulau-pulau terluar adalah bagian dari kepentingan nasional kita, sehingga pengembangan transportasi laut adalah pilihan yang masuk akal.

Kemudian pembangunan sarana telekomunikasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar patut diprioritaskan ke depan. Contoh nyata adalah mengenai Pulau Sebatik – terletak di sebelah utara Kaltim - yang terbelah antara wilayah Indonesia dan Malaysia. Penduduk Pulau Sebatik yang masuk wilayah Indonesia lebih banyak jumlahnya dari Malaysia, namun penduduk Indonesia lebih banyak menikmati siaran TV Malaysia daripada televisi Indonesia. Karena, antena biasa tidak bisa menangkap siaran TV Indonesia (red: siaran TVRI bisa namun kurang jelas), hal ini mungkin karena tidak ada stasiun relai televisi Indonesia dipulau itu. Hanya penduduk yang memiliki antena parabola yang bisa menikmati siaran televisi Indonesia lainnya.

Ilustrasi ini merupakan fakta yang terjadi di berbagai wilayah perbatasan. Hal itu telah berlangsung lama dan dapat mengganggu kesatuan dan keterikatan emosional dengan masyarakat Indonesia lainnya. Yang pada akhirnya dapat meruntuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Artinya secara hukum mereka bagian dari Indonesia, tapi disisi lain secara emosional merasa lebih dekat dengan negara tetangga. Hal lain yang cukup mengganggu yakni bagaimana dengan pulau-pulau lain yang tidak berpenduduk.

Di seluruh Indonesia terdapat 92 pulau-pulau terluar dan sebagian pulau tersebut tidak berpenduduk. Setidaknya ada 12 pulau - dari pulau terluar itu - yang rawan konflik dengan negara tetangga dan juga rawan penyelundupan. Tentunya perlu ada tindakan konkret dan segera untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul seperti dugaan penguasaan beberapa pulau di Nias oleh pihak asing, pelanggaran wilayah di Blok Ambalat oleh Malaysia, dan lain-lainnya.

Aspek multi dimensi dalam isu perbatasan wilayah

Dengan paparan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan atau pulau terluar berpotensi jadi sumber gangguan. Persoalan-

persoalan itu terkait sekali dengan kepentingan nasional Indonesia, yang secara langsung dan tidak langsung memiliki keterpengaruhannya, yakni :

1. Mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara.
2. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
3. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara.
4. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.⁴⁵

Keempat hal diatas berkaitan satu dengan yang lain, namun dari keempat dampak itu yang paling menonjol justru adalah aspek sosial ekonomi. Berbagai masalah tersebut karena adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi antara negara Indonesia dengan negara tetangga. Persoalan ketiadaan lapangan pekerjaan, ketidakpastian politik dan ketidakpastian ekonomi mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai upaya untuk bertahan hidup. Cara untuk bertahan hidup salah satunya dengan mencari pekerjaan di Malaysia dengan menyelundup atau tanpa dokumen yang sah. Dari laporan Sebuah LSM Malaysia, tahun 2002 saja setidaknya 600.0000 orang Indonesia menjadi pekerja ilegal.⁴⁶ Besarnya jumlah pekerja ilegal tersebut makin memperkuat argumen bahwa Indonesia tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan menjamin keberlangsungan hidup.

Persoalan kedua yang bisa didapat dari masalah itu bahwa dengan perbatasan Indonesia sedemikian luas dan panjang, berarti aparat keamanan Indonesia tidak sanggup mencegah warganya menyeberang ke negara lain secara tidak sah. Perbatasan darat Indonesia dan Malaysia yang ada di Kalimantan panjangnya sekitar 1.900 km, dimana TNI hanya memiliki 25 pos penjagaan. Ditambah lagi tidak semua pos itu dijaga aparat TNI dan kadang-kadang pos jaga hanya dikunjungi beberapa minggu sekali oleh patroli TNI.⁴⁷ Jadi bisa dimaklumi jika kasus penyelundupan barang (kayu) ataupun penyelundupan orang (misalnya, TKI ilegal) ke Malaysia kerap terjadi di wilayah perbatasan ini.

Keberadaan pos-pos TNI tersebut secara hukum tidak dipermasalahkan karena menurut UU TNI tahun 2004, TNI ditugaskan melakukan pengamanan wilayah perbatasan.⁴⁸ Tetapi, di lain sisi TNI yang bertugas di wilayah perbatasan sebenarnya melakukan tugas-tugas diluar tugas pokoknya yaitu pertahanan negara. Tugas pengamanan wilayah sebenarnya adalah tugas pengawasan lalu lintas manusia dan barang, sehingga sangat jelas bahwa tugas pengawasan manusia dan barang tidak ada kaitannya dengan pertahanan

⁴⁵ Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Kedaulatan RI, Eddy Sianturi dan Nafsiah. Balitbang Dephan, 2003.

⁴⁶ 8 Sep 2002, *Print E-mail Save Indonesia: Displaced migrant workers are stranded*

⁴⁷ Informasi didapat dari satu sumber penulis yakni perwira TNI AD dari Kodam setempat.

⁴⁸ Lihat UU TNI/2004 Pasal 7 ayat 2 (b) poin (4)

negara. Artinya tugas pengawasan arus manusia dan barang merupakan bagian dari tugas penegakan hukum.

Dalam dimensi lebih luas tugas penegakan hukum di wilayah perbatasan termasuk Bandara Internasional dan pelabuhan-sebagai pintu masuk orang dan barang-dikerjakan oleh imigrasi, bea cukai dan kepolisian.⁴⁹ Sehingga tugas TNI dalam kaitan pengamanan wilayah perbatasan adalah menjalankan peran penegakan hukum. Disini peran TNI adalah lebih dalam peran perbantuan terhadap aparat penegakan hukum tersebut. Jadi bisa dilihat peran TNI hanya tugas temporer. Kalau memang TNI melakukan tugas temporer, lalu pertanyaannya siapakah sebenarnya yang paling berwenang dalam melakukan tugas pengamanan wilayah perbatasan. Kalau di wilayah laut kita sudah memiliki Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Sifat badan ini koordinatif, sehingga saat ini efektivitas organisasinya masih dipertanyakan. Badan ini ada dibawah koordinasi Menkopolkam yang fungsinya koordinatif.

Penjaga Perbatasan masa depan ?

Dalam perkembangan lain, petinggi dan purnawirawan TNI AL sudah bersepakat akan membentuk suatu Penjaga Pantai (*coast guard*) di masa mendatang.⁵⁰ Artinya jika nantinya penjaga pantai resmi dibentuk, tugas Bakorkamla menjadi tidak relevan lagi. Tugas pengamanan wilayah laut dan pelayaran serta penegakan hukum di laut akan menjadi tugas dari penjaga pantai ini. Tetapi yang patut dipikirkan lebih lanjut bagaimana misi dan yurisdiksi penjaga pantai ini dan siapa otoritas politik yang membawahinya, dan apakah pekerjaannya tidak tumpang tindih dengan TNI AL atau polri. Kalau praktek di negara-negara demokratis, penjaga pantai melakukan tugas penjagaan wilayah perbatasan di laut sebagai bagian penegakan hukum di laut.

Sementara di darat hal ini dilakukan oleh beberapa batalyon infantri/kavaleri dibawah Kodam ataupun Kostrad. Seperti yang telah disebutkan diatas TNI melakukan tugas pengawasan lalu lintas manusia dan barang, sehingga bisa dikategorikan TNI memberikan peran perbantuan dengan kapasitasnya sebagai tentara. Melihat kemajuan pemikiran yang terjadi dalam penanganan keamanan di laut terutama dengan ide pembentukan *coast guard*. Sebenarnya cukup relevan jika dibentuk suatu kesatuan keamanan tersendiri yang menangani persoalan keamanan atau penegakan hukum di wilayah perbatasan darat. Sampai saat ini belum ada pihak di Indonesia yang berani mengemukakan ide ini secara terbuka, namun melihat misi dari penjagaan wilayah darat yang terfokus pada persoalan kriminalitas antarnegara (*transnational crime*), dimana hal ini merupakan tugas dan pekerjaan penegakan hukum. Tugas penegakan hukum lebih condong merupakan tugas yang dilakukan oleh kepolisian, imigrasi, dan kejaksaan. Dilain pihak petugas kepolisian secara tradisional melakukan tugas dalam penanganan kamtibmas (*public order*).

⁴⁹ Lihat makalah Pierre Aepli dalam seminar DCAF-Lesperssi di Bandung dalam Bab I Buku ini.

⁵⁰ Informasi lebih lanjut lihat artikel Alman Helvas Ali, *Bakorkamla, Coast Guard, dan Keamanan Maritim*, harian Sinar Harapan, Desember 2006.

Tugas-tugas penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah kriminal lintas batas yang berbentuk penyelundupan manusia (*human trafficking*), narkotika (*drug trafficking*), *illegal logging* dan illegal fishing memerlukan suatu penanganan khusus. Dengan begitu perlu dibentuk suatu badan keamanan khusus yang menangani persoalan khusus di wilayah perbatasan darat. Artinya penjaga perbatasan darat (*border guard*) bisa saja dibentuk, namun tentunya memiliki konsekuensi anggaran dan konsekuensi lainnya. Pembentukan suatu badan keamanan tersendiri yang melakukan penjagaan perbatasan di darat tentu memerlukan suatu komitmen khusus. Hambatan dari aspek sosial politik dan sosial mungkin tidak terhindarkan, tetapi jika semua pihak sadar bahwa keamanan perbatasan ataupun persoalan perbatasan menjadi kekhawatiran kita semua, maka perwujudan penjaga perbatasan tidak menjadi suatu yang mustahil.

Penutup

Ada beberapa langkah-langkah yang menurut penulis cukup relevan untuk ditindaklanjuti dalam melihat permasalahan perbatasan baik di wilayah laut dan darat. Dengan situasi sosial dan ekonomi masih ada ketidakpastian, maka perlu ada tindakan cepat untuk mendalami dan menindaklanjuti penanganan masalah perbatasan. Untuk itu sejumlah kesimpulan sementara yang bisa disampaikan.

Pertama, persoalan-persoalan di wilayah perbatasan lebih merupakan persoalan penegakan hukum dan persoalan kesejahteraan.

Kedua, persoalan perbatasan tidak bisa ditangani oleh aparat keamanan semata, namun semestinya ditangani secara multisektoral dan melibatkan berbagai aktor (sipil dan militer).

Ketiga, melihat kemajuan pemikiran di kalangan TNI AL berkaitan dengan ide pembentukan satuan penjaga pantai, maka di wilayah perbatasan darat bisa juga dipikirkan pembentukan satuan tersendiri (misal: *border guard*). Tugas utama *border guard* adalah melakukan tugas-tugas penegakan hukum.

Keempat, pembentukan penjaga perbatasan bukanlah satu-satunya jalan keluar (*remedy*), namun demikian perlu dilihat manfaat yang akan dihasilkan dari tugas satuan ini di masa mendatang. Sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui berbagai keuntungan dan kerugian dari kesatuan ini.

**Program Keamanan Perbatasan DCAF
di Uni Eropa****Pelajaran yang Diperoleh dari Pembentukan Sistem Keamanan
Perbatasan : Informasi Masa Lalu, Sekarang, dan
Aktifitas di Masa Mendatang⁵¹*****Dewan Penasehat Internasional untuk Keamanan Perbatasan
DCAF***

Perubahan akhir-akhir ini dalam persepsi dan pemahaman akan keamanan telah menjadikan sistem keamanan perbatasan yang efisien dan efektif sebagai syarat dasar bagi semua negara di dunia. Dalam kebanyakan kasus, meningkatkan kontrol terdepan sebuah negara dalam konteks ini memerlukan perubahan struktural dan organisasional yang besar.

Dengan tujuan untuk membantu pemerintahan negara-negara Balkan Barat (*Western Balkans*) dalam pembentukan sistem keamanan perbatasan baru, *Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces* (DCAF-Swiss) telah mengembangkan sebuah program yang bertujuan untuk menangani kebutuhan strategis dan isu-isu yang dilibatkan dalam proses tersebut. Negara-negara yang berpartisipasi antara lain: Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia, dan Montenegro, dengan aktifitas-aktifitas yang ditujukan secara khusus pada Kementerian Dalam Negeri dari tiap-tiap negara, yang bertanggung jawab dalam keamanan perbatasan. DCAF menyambut baik Kroasia, yang telah diundang dalam pembicaraan negosiasi dengan Uni Eropa, yang menginginkan dan mampu untuk membantu tetangga-tetangganya dengan berbagi pengalaman yang terjadi di negaranya.

Melalui serangkaian lokakarya yang bertemakan "Pelajaran yang Diperoleh dari Pembentukan Sistem Keamanan Perbatasan," DCAF (bersama dengan 7 negara donor) menawarkan sebuah ulasan internal mengenai bagaimana Estonia, Finlandia, Jerman, Hongaria, Rusia, Slovenia, dan Swiss mengembangkan sistem keamanan perbatasan mereka sendiri, dan pelajaran apa yang mereka peroleh dalam proses tersebut. Diawali pada November 2001, program tersebut akan terus berlanjut setidaknya hingga tahun 2007. Keseluruhan rencana aktifitas, didesain untuk menciptakan dan mengembangkan sistem keamanan perbatasan terpercaya yang akan sejalan dengan persyaratan Uni Eropa, dan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan khusus dari negara-negara Eropa Timur Selatan.

⁵¹ Diterjemahkan dari artikel *Lessons Learned from the Establishment of Border Security Systems: General Information on Past, Present, and Future Activities*, dalam *Connections: The Quarterly Journal*, Vol. V, No.2, Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institute, Fall 2006.

Dibalik hasil yang telah dicapai dalam membentuk sistem keamanan perbatasan yang terpercaya selama ini di negara-negara yang sedang mengalami transisi, ada sebuah kebutuhan dari forum diskusi ini untuk diorganisir, karena masih ada sebuah kekosongan akan norma-norma operasional yang diakui serta konsep-konsep dalam wilayah tersebut. Hal ini dapat disebut sebagai bagian tambahan dari usaha-usaha sebelumnya. Halaman berikutnya akan menjelaskan mengenai gambaran dari program, yang terdiri dari 2 tahap, dan ditujukan pada 4 tingkatan berbeda.

Tahapan pertama, yang dilaksanakan pada tahun 2001-2003, melibatkan sebuah pandangan umum mengenai badan-badan penjaga perbatasan di Eropa dan elaborasi dari prinsip-prinsip umum dalam keamanan perbatasan. Tahapan kedua, yang dimulai pada bulan Juni 2003, mewakili sebuah transisi dari pandangan umum ke sebuah fokus terhadap topik tertentu, mulai dari reformasi hukum hingga pelatihan, pendidikan, dan evaluasi resiko. Sebuah Program Penjaga Pantai dimasukkan sebagai bagian dari tahapan kedua. Dalam tahapan ini, proyek-proyek khusus telah didesain untuk mencapai 4 tingkatan dari petugas keamanan perbatasan di lapangan, yaitu:

- Tingkat 1-Kepala badan polisi perbatasan dan staf-staf senior
- Tingkat 2-tingkatan komandan regional
- Tingkat 3-tingkatan komandan pos
- Tingkat 4-pemimpin masa depan

Gambaran tahapan ketiga dari program ditujukan untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam dua tahapan sebelumnya di proyek-proyek khusus yang akan disesuaikan untuk komandan regional, komandan pos, dan kadet-kadet muda. Proyek ini termasuk sebuah Kursus Jarak Jauh (*Advance Distance Learning/ADL*), petunjuk operasional dan deskripsi pekerjaan, dan konferensi tahunan dari para pemimpin masa depan.

Untuk tingkatan pertama, seperangkat kelompok kerja permanen telah dibentuk yang terfokus pada wilayah kajian prioritas berikut ini:

- Reformasi hukum
- Struktur organisasional dan strategis, kepemimpinan, dan manajemen
- Dukungan logistik
- Pendidikan dan pelatihan
- Analisa resiko, intelijen kriminal, dan investigasi
- Pengawasan perbatasan perairan

Kelompok kerja ini melibatkan sekelompok ahli-ahli dari negara donor dan negara yang bersangkutan untuk bekerja bersama ke arah realisasi dari sejumlah tujuan nyata. Dengan fokus praktikal mereka, kelompok kerja memberikan kesempatan bagi negara peserta/partisipan untuk menganalisa dan mendiskusikan topik-topik khusus yang penting dan mendesak untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen perbatasan yang terintegrasi, atau dengan kata lain membiarkan mereka menganalisa mengenai strategi-strategi yang terkait dengan elemen khusus dari struktur organisasi mereka. Dewan Penasehat Internasional DCAF membantu mereka dalam mengembangkan strategi-strategi tersebut jika kebutuhannya muncul. Setiap pertemuan

kelompok kerja memiliki sebuah tujuan yang nyata, dan dibangun melalui kerja keras yang dicapai selama dan setelah pertemuan sebelumnya. Mereka berusaha untuk mengarahkan bantuan bukan kepada para pemimpin dari badan polisi perbatasan, tetapi lebih kepada orang yang secara langsung bertanggung jawab atas topik yang diberikan. Sebagai contoh, dalam reformasi legal misalnya, tujuan akhirnya adalah pengembangan sebuah Undang-Undang Keamanan Perbatasan, semua peraturan pendukung lainnya, dan sebuah buku peraturan dari badan keamanan perbatasan. Para peserta adalah para hakim ketua dari badan polisi perbatasan, dengan bantuan yang disediakan oleh ahli hukum dari berbagai negara Uni Eropa.

Untuk tingkatan kedua yang merupakan komandan regional dari badan keamanan perbatasan-sebuah Kursus (*Advance Distance Learning/ADL*) telah dikembangkan, yang dapat dilihat sebagai batu loncatan bagi Akademi Penjaga Perbatasan Maya di masa depan. Kursus ini dipersiapkan selama tahun 2004-2005 dan mulai diperkenalkan pada Januari 2006. Tujuan dari kursus ini adalah untuk menyediakan dasar Kursus bagi komandan regional agar mampu untuk berkomunikasi secara efektif dan berbagi informasi dengan semua kolega dalam menjamin keamanan bagi warga negaranya melalui manajemen perbatasan yang efektif, dan untuk menjamin bahwa praktek umum yang terbaik dibentuk melalui interaksi yang langsung dan permanen.

Disusun sebagai sebuah proyek pendidikan dan pelatihan selama dua tahun, kursus jarak jauh (ADL) ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan manajerial serta kepemimpinan dari sekitar 35 komandan polisi perbatasan regional. Kursus diberikan dalam bahasa Inggris; dengan sebuah asumsi bahwa semua peserta memiliki kemampuan berbahasa yang dibutuhkan saat memulai kursus ADL, DCAF sebelumnya mengatur kursus bahasa Inggris selama 3-4 minggu bagi mereka. Diantara kursus bahasa formal, pelatihan bahasa diimplementasikan dengan jarak jauh (*e-learning*), yang dapat dilakukan di kantor atau di rumah. Setelah menyelesaikan pelatihan bahasa, kursus keamanan perbatasan yang profesional kemudian dimulai selama 18 bulan, sejak bulan Februari 2006.

Kursus ADL dipisahkan menjadi tiga modul inti, yang diperluas kedalam lima bagian aktifitas selama tahun 2006 dan tahun 2007. Bagian dasar dari kursus akan memakan waktu dua bulan (periode *e-learning*). Selama periode ini, para peserta akan menerima pendidikan umum mengenai topik berikut: perubahan dalam situasi keamanan, kepemimpinan dan manajemen, dan manajemen perbatasan. Kemudian dilanjutkan dengan aktifitas kursus di kelas, dilaksanakan di Swiss, Slovenia, Estonia/Finlandia, Jerman/Hongaria, dan di daerah Balkan Barat, termasuk juga kunjungan belajar. Porsi dari kursus ini ditujukan untuk memperkuat pengetahuan yang diperoleh selama periode *e-learning* dua bulan. Kursus ini kemudian diikuti oleh program khusus selama empat minggu, yang akan menawarkan analisis mendalam dari keamanan perbatasan dalam daerah-daerah tujuan khusus, dan akan terdiri dari proposisi khusus untuk pengaturan nasional.

Pada tingkatan komandan pos, dan terkait dengan respon terhadap negara-negara peserta, sebuah program khusus bertemakan "Petunjuk Operasional dan Deskripsi Pekerjaan" telah diorganisir. Program ini melengkapi modul ADL untuk komandan regional yang dijelaskan sebelumnya, dan bertujuan untuk menyediakan pelatihan praktikal bagi komandan pos pada konteks melakukan pemeriksaan dan pengawasan perbatasan pada petugas pos perbatasan. Para peserta pada tingkatan ini adalah komandan yang telah memimpin pos perbatasan. Program ini dilaksanakan dalam kunjungan belajar selama dua minggu, dimana selama periode itu para peserta melakukan sebuah latihan praktek, yang didesain untuk menghasilkan situasi yang sama yang mereka temui di negara asalnya.

Untuk tingkatan keempat, DCAF melakukan sebuah Konferensi Pelatihan Musim Panas tahunan bagi sekitar 50 orang calon pemimpin masa depan. Tujuan dari pertemuan ini untuk mempertemukan sekelompok profesional yang potensial dalam keamanan perbatasan, ditemani oleh akademisi muda, penggiat LSM, jurnalis, dan pejabat pemerintah dari Albania, Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Estonia, Finlandia, Jerman, Hongaria, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia, dan Swiss dengan tujuan untuk memberikan mereka sebuah kesempatan bertemu dengan para ahli internasional dalam sebuah debat komprehensif mengenai isu-isu keamanan perbatasan kontemporer dan di masa depan. Acara seperti ini akan melatih dan mendidik pemimpin keamanan perbatasan di masa depan, berkontribusi dalam usaha DCAF kearah penjaminan keberlanjutan penyebaran praktek yang baik. Selain itu, dengan berbagi pengalaman profesional mereka dan berpartisipasi dalam aktifitas kelompok, maka para peserta akan mampu membangun dasar bagi kerjasama dimasa depan berdasarkan hubungan baik antar profesional muda diseluruh negara.

Tahapan Pertama Program

Lokakarya eksploratif awal dilakukan pada 21-24 November 2001 di Lucinges, Perancis. Acara ini terfokus pada pelajaran awal yang diterima dari pembentukan badan keamanan perbatasan di Estonia, Jerman, Finlandia, dan Hongaria, karena mereka mewakili contoh sukses. Keberhasilan dan kegagalan dari negara-negara ini dalam membentuk sistem keamanan perbatasan mereka sendiri, dibandingkan dengan studi kasus yang berbeda di Rusia dan Swiss.

Selama lokakarya kedua, yang dilaksanakan 20-24 Februari 2002 di Jenewa, kami memberikan, mengumpulkan, dan mensistemisasi informasi dan masukan kepada peserta dari Yugoslavia. FRY diwakili oleh 15 ahli: lima orang dari Kementerian Dalam Negeri Federal; lima orang dari Kementerian Dalam Negeri Serbia; dan lima orang dari daerah Montenegro mereka. Pada acara ini, temuan dalam lokakarya kemudian dievaluasi lebih lanjut, dan beberapa aspek khusus (misi, tujuan, dan manfaat) dari isu kemudian didiskusikan secara menyeluruh.

Pertemuan ketiga dilakukan di Helsinki pada 12-18 April 2002, dengan tema "Penjaga Garis Terdepan (*Frontier Guards*) sebagai Sebuah Sistem Keamanan Perbatasan yang Terpercaya dan Mencukupi." Pengalaman Finlandia

menunjukkan bahwa tidak lagi mungkin bagi negara untuk memerangi organisasi kejahatan transnasional sendirian dan dengan mekanisme garis perbatasan yang kaku. Lokakarya tersebut menyimpulkan bahwa sistem keamanan perbatasan harus bersifat kompleks dan fleksibel pada saat yang bersamaan. Kerjasama nasional dan internasional pada semua tingkatan kemudian menjadi sangatlah penting, dan salah satu elemen yang paling penting dari hal tersebut adalah berfungsinya kerjasama antar negara bertetangga. Ini adalah sebuah isu yang dapat signifikan secara khusus dalam kasus di Eropa Timur Selatan. Dalam acara tersebut, pihak-pihak yang hadir adalah para kepala badan keamanan perbatasan, ditemani oleh tiga ahli yang mewakili Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Macedonia, Serbia dan Montenegro, dan Slovenia. Keputusan mengikutsertakan Slovenia sebagai salah satu negara donor dihasilkan dalam lokakarya ini.

Lokakarya keempat, bertema "Prinsip yang Mengarah pada Keberhasilan dalam Pengembangan Organisasi Keamanan Perbatasan yang Paling Kuat di Eropa-*bundesgrenzschutz*," dilaksanakan pada 8-14 Juni 2002 di Jerman. Acara ini terdiri dari pertukaran pandangan mengenai teknik kontrol paspor, metode menangani ilegal imigrasi, dan pendekatan untuk berhadapan dengan pencari suaka. Para peserta diperkenalkan pada bagaimana *Bundesgrenzschutz* beroperasi di perbatasan internal Schengen/batas darat, dan bagaimana sistem pendidikan dan pelatihan mereka dikonstruksikan. Selain itu, para undangan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi singkat dalam proses kerja dari batalyon penjaga perbatasan *Bundesgrenzschutz*.

Lokakarya kelima dilakukan di Estonia pada 16-21 Agustus 2002. Acara ini terfokus pada aktifitas dan rencana aksi untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa terkait kesepakatan Schengen dan penggunaan sumber daya terbatas untuk memenuhi tujuan yang direncanakan. Pengalaman Estonia dalam delimitasi dan demarkasi perbatasan-dalam kekosongan niat politis pada "tetangga terhormat"-didiskusikan. Metode pengumpulan dan investigasi intelijen kriminal sebagai mekanisme penting dalam menjamin kontrol perbatasan efektif kemudian dianalisa. Akhirnya para peserta ditunjukkan demonstrasi dari sistem elektronik pengawasan pada perbatasan darat dan air.

Lokakarya keenam dilaksanakan di Slovenia pada 4-8 November 2002 dan dilanjutkan pada fokus mengenai kesesuaian Uni Eropa yang telah dimulai pada lokakarya kelima di Estonia. Para pesertanya adalah wakil dari komisi-komisi Uni Eropa, yang menjelaskan kepada para perwakilan negara-negara Balkan Barat mengenai kewajiban saat ini bagi mereka sebagai negara kandidat Uni Eropa dimasa depan. Pada saat yang bersamaan, sebuah fokus ditujukan pada konsep keamanan perbatasan Slovenia, dan aplikasinya terhadap permasalahan imigrasi ilegal. Acara ini memberikan keuntungan khusus pada peserta, dimana mereka berbagi dengan Slovenia dalam konteks praktikal yang sama. Terlepas dari fakta bahwa model keamanan perbatasan Slovenia berbeda dibandingkan yang pernah didiskusikan dalam lokakarya sebelumnya, cara dimana sistem keamanan perbatasan mereka dikembangkan menjadi sejumlah tahapan yang sama adalah inti dari pengelolaan kapasitas keamanan

perbatasan apapun. Untuk itulah, lokakarya menyediakan sebuah analisa penting kedalam persyaratan masa depan yang akan dihadapi negara Eropa Timur Selatan (SEE).

Lokakarya ketujuh dilaksanakan di Jenewa pada 11-14 Maret 2003, dengan tema "Mengelola Perubahan-Sebuah Pandangan dari Balkan Barat." Lokakarya tersebut terdiri dari dua elemen utama. Pada bagian pertama, ada diskusi dan pengembangan lanjut dari makalah-makalah strategi para peserta dan rencana implementasi. Dokumen ini untuk membentuk presentasi dasar yang dibuat ke Uni Eropa pada April 2003, dan lokakarya Jenewa adalah kesempatan bagi mereka untuk melengkapinya dan mengakurasikannya sebisa mungkin. Acara ini juga sebuah kesempatan untuk mendiskusikan secara detil mengenai aktifitas DCAF di masa mendatang, dan untuk menentukan sebaik apa mereka memenuhi kebutuhan dan prioritas negara. Bagian kedua dari lokakarya didedikasikan untuk diskusi proses Ohrid, konferensi Ohrid sendiri dilaksanakan pada Mei 2003, dan topik terkonsentrasi mengenai kerjasama sipil-militer dalam bidang keamanan perbatasan. Dengan presentasi yang dibuat oleh perwakilan Uni Eropa dan NATO (North Atlantic Treaty Organization), kerjasama seperti itu digambarkan sebagai sebuah cara untuk mempertemukan kebutuhan dari periode transisi yang dikarakterisasikan oleh kehadiran otoritas berbeda. Dinyatakan bahwa cara tersebut hanya akan bersifat sementara, dilaksanakan hingga otoritas sipil telah mengembangkan kompetensi beragam yang dibutuhkan dalam mengambil alih wewenang keamanan perbatasan secara menyeluruh. Terkait pentingnya isu ini, kontribusi dan dukungan masa depan dari Uni Eropa dan komunitas donor sangat dibutuhkan, dengan tujuan akhir bahwa otoritas perbatasan sipil akan diperkuat oleh kerjasama-kerjasama seperti itu, dan akan memproduksi sebuah sistem keamanan perbatasan yang lebih lengkap dan mampu.

Lokakarya kedelapan, yang dilakukan di Brussel pada 7-9 April 2003, adalah kelanjutan dari lokakarya Maret sebelumnya. Bertemakan "Persiapan bagi Pencalonan Uni Eropa: Kriteria Schengen dan Pelajaran yang Diperoleh dari Pengalaman Schengen," makalah-makalah strategi dan rencana implementasi, yang merupakan titik puncak dari proses selama delapan bulan, dipresentasikan kepada Uni Eropa. Presentasi ini muncul selama paruh kedua lokakarya. Bagian pertama didedikasikan untuk presentasi dari perwakilan Uni Eropa pada aspek standar dan persyaratan Uni Eropa dalam bidang keamanan perbatasan. Topik yang disampaikan bervariasi mulai dari detil sistem Schengen hingga konsep proyek kembar. Terkait dengan konferensi Ohrid pada bulan Mei, Uni Eropa, bersama dengan mitranya seperti NATO dan Pakta Stabilitas, mempresentasikan secara detil pandangan mereka mengenai kerjasama sipil-militer di Balkan Barat. Kebutuhan akan bentuk kerjasama sementara yang dipimpin oleh sipil juga dinyatakan dari berbagai sudut pandang.

Sebagai sebuah kesimpulan dari tahapan pertama, dapat dinyatakan bahwa makalah-makalah strategi yang dipresentasikan kepada komisi Uni Eropa di Brusel menunjukkan bahwa negara-negara Balkan Barat memiliki ide dan visi yang jelas terkait dengan pengembangan sistem keamanan perbatasan mereka.

Pandangan ini adalah salah satu bentuk peningkatan harmonisasi dengan persyaratan Uni Eropa. Tujuan utama bagi harmonisasi tersebut kemudian tidak pada tingkatan pemikiran strategis, tetapi lebih kepada kesulitan praktikal yang muncul dalam proses implementasi.

Dari keseluruhan pertemuan-pertemuan ini, sebuah pengaruh telah muncul pada komponen interaktif, dimana para peserta diminta untuk mempresentasikan sebuah kesempatan berbagi pengalaman dengan para ahli penjagaan perbatasan dari negara-negara donor.

Untuk itu, DCAF telah, dan tetap, berusaha membangun berdasarkan pengalamannya pada pengalaman sekarang dalam wilayah keamanan perbatasan, dan akan terus mencari informasi mendalam dan pengalaman dari individu atau organisasi yang telah aktif dalam pembentukan dan/atau proses reformasi struktur penjaga perbatasan. Tujuan DCAF masih seputar desain dan promosi dari model yang telah berhasil, dan, spesifikasi dari asistensi dalam implementasi nyatanya. Untuk mencapai tujuan ini, DCAF akan tetap melanjutkan pembentukan program-program yang sesuai, dan dengan pertimbangan serta bimbingan dari negara-negara yang tertarik dalam membangun atau mereformasi sistem keamanan perbatasan mereka.

Untuk membantu membimbing DCAF dalam proses ini, Dewan Penasehat Internasional (IAB) yang terdiri atas pejabat senior keamanan perbatasan dari Estonia, Finlandia, Jerman, Hongaria, Rusia, Slovenia, dan Swiss telah dibentuk. Dimasa mendatang, kemungkinan untuk menunjuk anggota baru kedalam Dewan Penasehat Internasional masih dapat terjadi, dengan ketertarikan yang telah ditunjukkan oleh Bulgaria, Perancis, Belanda, Polandia, Rumania, Spanyol, dan Swedia (yang sudah terlibat dalam beberapa kegiatan). Tujuan dari IAB adalah untuk meningkatkan standar keamanan bagi warga negara di Balkan Barat, dan untuk Eropa secara keseluruhan, melalui pengembangan sistem keamanan perbatasan berbasis-masyarakat yang efektif, dan mencapai tujuan ini dalam konteks aliansi keamanan nasional dan internasional.

Tahapan Kedua Program

Dalam tahapan kedua ini, program yang dilakukan mengambil pendekatan yang berbeda. Pandangan umum mengenai sistem keamanan perbatasan telah digantikan dengan analisis dan diskusi dari topik-topik khusus yang penting dan mendesak dalam manajemen perbatasan moderen yang terintegrasi. DCAF telah mengundang spesialis senior dalam bidang diskusi tersebut untuk turut serta dalam semua acara.

Semua negara donor telah diminta untuk mempresentasikan analisis dan rekomendasi detil bagi para peserta dalam topik-topik tertentu. Sebuah inovasi yang diperkenalkan dalam tahapan kedua merupakan kreasi kelompok kerja dalam mengikuti setiap lokakarya. Sejak tahun 2003, kelompok kerja telah dibentuk untuk reformasi hukum, kepemimpinan dan manajemen, pendidikan dan pelatihan, dukungan logistik, analisis resiko, investigasi dan intelijen kriminal, serta pengawasan perbatasan laut.

Tahapan kedua, dengan fokus praktikalnya seperti yang direfleksikan dalam kelompok kerja dan aktifitas lainnya, berperan dalam memperkuat pencapaian dari tahapan pertama proyek. Setelah melaksanakan pembentukan kerangka umum sistem keamanan perbatasan mereka, maka mereka dipersilahkan untuk mengerjakan strategi yang terkait dengan elemen khusus dari struktur organisasi mereka. Dewan Penasehat Internasional memberikan bantuan dalam mengembangkan strategi ini jika ada permintaan.

Dalam usaha untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan-pekerjaan diatas, Program Keamanan Perbatasan DCAF melakukan seminar ulasan/evaluasi pada level kementerian, dilakukan setiap tahun di bulan Februari. Seminar evaluasi pertama dilakukan di Slovenia pada tahun 2004; seminar evaluasi 2005 di Skopje, Macedonia, dan dihadiri oleh semua Kementerian dalam negeri, hukum, dan keamanan dari negara-negara peserta. Dukungan para menteri terhadap program DCAF diwujudkan dalam penandatanganan deklarasi menteri bersama. Seminar ini mempersilahkan negara-negara peserta mempresentasikan hasil kerja mereka, dengan para anggota IAB yang memberikan tanggapan dan evaluasi. Sebagai tambahan, para peserta memiliki kesempatan untuk menerima sebuah ulasan mengenai aktifitas yang dilakukan mereka dan aktifitas masa depan dari badan polisi perbatasan di negara-negara lainnya. Para undangan termasuk pada praktisi dalam keamanan perbatasan, ditemani oleh para politikus, analis, akademisi, dan badan atau organisasi lainnya yang terlibat dalam menjalankan program keamanan perbatasan. Seminar evaluasi kementerian tahunan yang ketiga dilaksanakan di Sarajevo, pada 23-25 November 2006, dimana sebuah deklarasi menteri selanjutnya ditandatangani terkait dengan kerjasama regional.

Keseluruhan rencana aktifitas, didesain untuk mendukung pembentukan dan pengembangan sistem keamanan perbatasan yang terpercaya dan sejalan dengan kebutuhan Uni Eropa, dan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan negara-negara Eropa Timur Selatan. Rencana seperti ini merefleksikan kebutuhan mereka seperti yang dinyatakan dalam respon mereka terhadap kuesioner IAB-DCAF yang disebarkan pada Desember 2002. Sebagai tambahan, jurang antara tujuan negara-negara anggota direfleksikan dalam makalah strategi dan kemampuan mereka untuk mengimplementasikan tujuan ini dilakukan melalui program yang diorganisir oleh IAB-DCAF, melalui kolaborasi yang erat dengan Penjaga Perbatasan Finlandia, Penjaga Perbatasan Estonia, *Bundesgrenzschutz* Jerman, Penjaga Perbatasan Hongaria, dan Polisi Perbatasan Slovenia. Sebagai tambahan atas pelatihan kepemimpinan, lokakarya ini terfokus pada pelatihan manajemen menengah dan individu-individu spesialis, dengan program khusus yang dipersiapkan untuk pemimpin masa depan, komandan unit penjaga perbatasan terkecil, dan individu-individu spesialis yang baru memasuki bidang keamanan perbatasan.

Organisasi Tahapan Kedua Proyek

Tingkat I:

Kelompok Kerja bagi Kepala Badan Polisi Perbatasan dan Staf Senior

Reformasi hukum (lokakarya pertama yang dilaksanakan pada 25-28 Juni 2003 di Brusel). Tujuan dari lokakarya reformasi hukum adalah untuk memperkenalkan kebutuhan Uni Eropa terkait peraturan keamanan perbatasan dan legislasi lainnya yang berhubungan yang mempengaruhi aktifitas keamanan perbatasan. Signifikansi dari sebuah kerangka hukum adalah sebagai dasar/landasan bagi tindakan organisasi, dengan memperhatikan batasan wewenangnya, dan menjadikan tugas serta tanggung jawabnya transparan bagi organisasi dan aktor luar. Sistem keamanan perbatasan dapat berfungsi tanpa sebuah kerangka hukum, tetapi akan selalu ada ambiguitas mengenai peranan dan fungsi mereka dalam struktur keamanan nasional. Lokakarya I ini bertujuan untuk mengkarifikasi isu kerangka hukum tersebut, dan menanamkan pada para peserta mengenai pentingnya mengembangkan sebuah struktur hukum yang jelas dimana sistem keamanan perbatasan dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Akhirnya, sebuah wilayah dimana kerangka kerja hukum secara khusus menjadi penting adalah kerjasama. Lebih dari sebuah pertemuan pribadi atau biasa, kerjasama internasional melibatkan kesepakatan persetujuan yang mengikat.

Para peserta lokakarya termasuk para pemimpin dari polisi perbatasan di negara-negara peserta, dengan mitra kerja terdekat mereka di tingkat-direktur dalam pengambilan keputusan, dan spesialis-spesialis tingkat atas dalam organisasi yang membidangi reformasi hukum. Sebagai sebuah lanjutan dari lokakarya reformasi hukum, sebuah kelompok kerja dibentuk yang terdiri dari para ahli di bidang isu-isu hukum terkait keamanan perbatasan. Tujuan dari kelompok kerja ini adalah untuk mempertimbangkan isu-isu terkait untuk penyusunan sebuah rancangan peraturan keamanan perbatasan yang modern. Pertemuan-pertemuan dari kelompok kerja tersebut dijelaskan berikut ini.

Kelompok Kerja Landasan Hukum I, 10-13 September 2003, Valbandon, Kroasia. Pertemuan kelompok kerja ini berfokus pada kerjasama antara badan-badan negara yang berbeda, yang berperan dalam sistem keamanan perbatasan. Pertemuan ini juga membicarakan beberapa aspek teoritis disamping aspek praktikal. Presentasi dilakukan oleh para ahli hukum dari Kroasia, Estonia, Jerman, dan Slovenia, yang berbagi pengalaman mereka dalam mereformasi sistem hukum di negara mereka masing-masing.

Kelompok Kerja Landasan Hukum II, 26-28 Oktober 2003, Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Kelompok kerja ini adalah kesempatan bagi negara-negara Balkan Barat yang menjadi peserta untuk mendapatkan pandangan dari proses reformasi hukum yang berbeda. Untuk itulah, contoh kasus reformasi hukum di Slovenia, Kroasia, Hongaria, dan Estonia didiskusikan dari sudut pandang baru. Hasil utama yang diperoleh adalah bagaimana cara menciptakan sebuah dasar hukum yang kuat bagi penjagaan perbatasan yang baik, kesulitan-kesulitan apa saja yang muncul, dan bagaimana mengatasinya. Hasil puncak dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah perancangan peraturan/UU keamanan perbatasan moderen oleh semua negara-negara Balkan Barat sesuai dengan kebutuhan Uni Eropa.

Para peserta dalam kelompok kerja ini termasuk para pemimpin departemen hukum, diikuti oleh para mitra kerja terdekat mereka, dan para spesialis dari departemen lain yang mampu berkontribusi bagi perancangan legislasi yang terkait dengan keamanan perbatasan. Secara bersamaan, ketiga acara diatas meliputi kebutuhan, praktek, dan metodologi dalam merancang sebuah peraturan/UU keamanan perbatasan yang baru. Negara peserta mempresentasikan hasil rancangan mereka mengenai UU keamanan perbatasan yang baru dalam Pertemuan Evaluasi pada bulan Februari 2004.

Pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Reformasi Hukum juga dilaksanakan sepanjang 2005 dan 2006, dan akan mengelaborasi peraturan dan instruksi pemerintah atau kementerian sama halnya dengan peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh direktur jenderal polisi perbatasan. Pertemuan kelompok kerja ini adalah sebagai berikut:

Kelompok Kerja Reformasi Hukum III, 31 Januari-2 Februari 2005, Logarska Dolina, Slovenia. Diorganisir oleh kepolisian nasional Slovenia, pertemuan ini berperan sebagai sebuah kesempatan untuk menginvestigasi dan mendiskusikan peran dari 'peraturan dan regulasi' dalam keamanan perbatasan. Pertemuan kelompok kerja ini didesain untuk memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mempelajari kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang telah dihadapi, dan kemudian diatasi, oleh negara-negara yang memiliki pengalaman terkait dengan persiapan 'Buku Peraturan.' Pertemuan ini sendiri dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama, para peserta terfokus pada dasar mempersiapkan petunjuk dan aturan-aturan subordinat (petunjuk pelaksanaan/arahan) yang mencukupi. Selama hari pertama, para peserta dibiasakan dengan legislasi Uni Eropa (khususnya petunjuk Schengen), kemudian relasi antara hukum utama dan subordinat, dan peran serta signifikansi petunjuk dan instruksi di Slovenia, Jerman, dan Estonia. Para peserta mendiskusikan relasi antara hukum utama dan subordinat di negara-negara asing dan memahami signifikansi dan peranan dari petunjuk atau instruksi. Secara khusus, bagian ini juga menandai aktifitas seperti apa yang harus didukung oleh hukum subordinat dan petunjuk/instruksi di negara-negara Eropa Timur Selatan.

Kedua, para peserta mendiskusikan sudah sejauh mana mereka berada (dalam tahapan apa) dalam proses pembentukan seperangkat Undang-Undang yang mengatur badan perbatasan negara mereka. Mereka juga mendiskusikan pengaruh dari legislasi paralel di negara-negara Eropa Timur Selatan, dan mempresentasikan pandangan mereka mengenai langkah berikutnya serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai harmonisasi dengan legislasi Uni Eropa.

Sebagai penutup, para peserta mendiskusikan manfaat dari pembangunan pusat data *on-line* yang memenuhi kebutuhan dan rekomendasi Uni Eropa sama halnya dengan kehadiran hukum utama dan subordinat di negara-negara Eropa Timur Selatan dengan keamanan perbatasan. Selama lokakarya ini, para peserta diberikan presentasi mengenai status negara mereka terkait:

- Hukum utama yang mengatur keamanan perbatasan
- Hukum-hukum yang terkait dengan hukum utama (misal, hukum mengenai orang asing, hukum pengungsi, dsb)
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Menteri
- Instruksi dan Perintah Direktur

Para peserta yang diundang untuk hadir dalam kelompok kerja ini adalah para ahli hukum dengan pengalaman dalam bidang keamanan perbatasan dan terlibat dalam pengembangan legislasi, sama halnya juga para komandan operasional dengan pengalaman substansial dari kebutuhan praktis.

Kelompok Kerja Reformasi Hukum IV, 1-4 Juni 2005, Mostar, Bosnia dan Herzegovina. Diorganisir oleh Badan Perbatasan Negara (SBS) Bosnia-Herzegovina, kelompok kerja ini melanjutkan fokus pada peraturan tambahan/hukum subordinat (termasuk petunjuk peraturan dan arahan) dan petunjuk serta instruksi yang terkait dengan keamanan perbatasan dan polisi perbatasan, dengan perhatian khusus pada hukum utama dan subordinat yang mengatur keamanan perbatasan di Bosnia-Herzegovina. Pertemuan ini dimulai dengan presentasi ahli dari Hongaria, yang berbicara mengenai pengalaman Hongaria dalam mensinergiskan peraturan tambahan yang mengatur keamanan perbatasan dengan kebutuhan Uni Eropa.

Presentasi kemudian dilakukan oleh semua delegasi mengenai pengembangan dan kemajuan yang diperoleh dalam bidang reformasi legal selama 6 bulan terakhir, sama halnya juga dengan rencana negara mereka di masa depan. Ini adalah sebuah cara yang berguna untuk pertukaran informasi antar negara dalam satu wilayah, dan menjamin bahwa semua orang secara rutin mendapatkan informasi mengenai perkembangan terbaru diseluruh kawasan Balkan Barat. Delegasi Bosnia-Herzegovina memberikan sebuah presentasi mengenai kerangka kerja legal di Bosnia-Herzegovina (BiH) yang berhubungan dengan hukum subordinat yang mengatur aktifitas polisi perbatasan.

Setelah membicarakan mengenai hukum utama di Bosnia-Herzegovina, para peserta dibagikan dokumen mengenai beragam hukum subordinat yang berkaitan dengan hukum utama, dan mereka dibedakan kedalam empat kelompok kerja. Kelompok-kelompok ini merupakan campuran dari setiap peserta dari setiap negara; setiap kelompok dipimpin oleh seorang ahli, seperti yang disebutkan sebelumnya. Kelompok kerja tersebut kemudian diberikan topik khusus untuk dibahas yang terkait dengan *Hukum Utama Pengawasan dan Kontrol Pelintasan Batas Negara* Bosnia-Herzegovina, dan ditugaskan untuk menciptakan sebuah rancangan mengenai peraturan pelaksana yang harus disahkan oleh pemimpin badan perbatasan negara BiH terkait dengan hukum utama diatas (Pasal 64). Setelah berdiskusi dan bekerja selama satu setengah hari, kelompok kerja yang beragam ini kemudian mempresentasikan rancangan usulan mereka terhadap peraturan tersebut. Hal ini kemudian diikuti oleh sebuah presentasi yang dibuat oleh salah seorang ahli dari Kroasia yang membicarakan mengenai pengalaman Kroasia dalam menciptakan sebuah buku petunjuk

mengenai pengawasan batas negara. Buku petunjuk ini diciptakan sebagai alat praktikal untuk membantu petugas polisi perbatasan dalam pekerjaan sehari-hari mereka; sebuah rancangan akan buku petunjuk telah diusulkan ke Direktorat Perbatasan dalam Kementerian Dalam Negeri, dan bentuk akhirnya akan ditandatangani oleh Direktur Polisi Perbatasan dalam Musim Gugur tahun ini.

Dalam pertemuan ini juga termasuk sebuah presentasi terkait pembentukan sebuah situs internet khusus yang memasukkan semua informasi mengenai legislasi keamanan perbatasan. Dalam situs internet ini, akan dimasukkan legislasi Uni Eropa dan legislasi nasional (dari semua negara di Eropa), dan akan tersedia melalui Situs utama DCAF. Semua peserta sepakat bahwa hal ini akan menjadi alat bantu yang sangat berguna, dan Slovenia telah menyepakati untuk memimpin pembentukan situs ini. Setiap negara peserta sepakat untuk menyediakan sebuah alamat kontak yang akan bertanggung jawab dalam mengirimkan informasi terbaru mengenai hukum utama dan subordinat kepada Slovenia selaku pihak yang mengatur situs. Direncanakan bahwa situs ini akan diselesaikan dan diluncurkan pada bulan Januari 2006.

Para peserta dalam kelompok kerja ini termasuk perwakilan-perwakilan dari Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Macedonia, Montenegro, dan Serbia. Para undangan adalah campuran dari para ahli hukum yang terlibat dalam pengembangan legislasi dengan pengalaman di bidang keamanan perbatasan, sama halnya juga para komandan operasional dengan pengalaman substansial akan kebutuhan praktikal. Para pengajar disediakan dan kelompok kerja dipimpin oleh para ahli dalam pengembangan legislasi terkait dengan polisi perbatasan dan pengawasan perbatasan serta pengawasan perbatasan di negara mereka.

Kelompok kerja diusulkan untuk melaksanakan dua kali pertemuan pada tahun 2006, dengan tujuan mengidentifikasi tantangan dalam legislasi nasional yang harus dihadapi dalam rangka menciptakan fleksibilitas mekanisme seperti yang dinyatakan dalam deklarasi kementerian, sama halnya dengan menyediakan petunjuk dalam perancangan perjanjian internasional dalam rangka menciptakan kapasitas mengimplementasikan mekanisme tersebut. Para peserta dalam pertemuan-pertemuan ini harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Latar belakang pendidikan hukum
- Pengalaman operasional dalam bidang keamanan perbatasan, termasuk pengalaman praktikal khusus dalam pengembangan legislasi
- Para komandan operasional dengan pengalaman substansial akan kebutuhan praktikal.
- Pengetahuan mendasar akan salah satu bahasa asing.

Kelompok Kerja Reformasi Legal V, 15-18 Januari 2006, Moravske Toplice, Slovenia. Diorganisir oleh Kepolisian Slovenia, kelompok kerja ini ditujukan untuk pengembangan 'perjanjian internasional antar badan dalam rangka menciptakan jaminan legal/hukum untuk mengelola mekanisme kerjasama". Selama pertemuan, para peserta melihat lebih detil pada wilayah kerjasama

antar perbatasan, termasuk mengenai patroli bersama, pertukaran petugas, dan pertukaran serta aliran informasi. Sebagai tambahan, beberapa kebutuhan pembentukan dasar hukum akan hal tersebut juga didiskusikan, diantaranya:

- Prosedur dan kemampuan negosiasi
- Kontrol satu tempat
- Patroli bersama
- Pertukaran data, aliran data, dan sebuah pusat data bersama
- Jaringan petugas lapangan/terdepan
- Kerjasama langsung dan berbagi pengalaman baik
- Wewenang dalam wilayah asing
- Tanggung jawab sipil/tenaga kerja
- Pusat data dalam *server* DCAF

Para delegasi kemudian diundang untuk berdiskusi pada sebuah diskusi meja bundar mengenai perkembangan terakhir dalam reformasi legal di negara masing-masing dengan tujuan agar para kolega selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan aktual yang terjadi sejak pertemuan di Mostar. Selain itu, para peserta juga diajak mengunjungi titik pemeriksaan perbatasan Dolga Vas di perbatasan Slovenia-Hongaria. Para peserta dapat menyaksikan secara langsung bagaimana para petugas profesional terlibat secara fisik mengelola aliran informasi antara dua negara, dengan tujuan menjamin "kontrol satu tempat" yang efisien. Keuntungan dan kerugian kontrol satu tempat juga didiskusikan selama kunjungan tersebut.

Kelompok Kerja Reformasi Hukum VI, 7-10 Juni 2006, Kroasia. Diorganisir oleh DCAF dan Polisi Perbatasan Kroasia, tujuan dari kelompok kerja ini adalah untuk memfokuskan pada penyediaan petunjuk bagi, dan untuk memulai pekerjaan merancang perjanjian internasional dalam rangka menciptakan prakondisi bagi implementasi tujuan kerjasama regional seperti yang disepakati dalam deklarasi kementerian yang ditandatangani di Sarajevo pada bulan Februari 2006. Berikut ini tujuan-tujuan kerjasama regional tersebut:

- Pengelolaan kontak antar pemimpin polisi perbatasan pada tingkatan lokal, regional dan nasional untuk membantu dalam operasional yang efektif.
- Menunjuk titik/pusat kontak nasional bagi kerjasama dan kegiatan lapangan regional atau lintas batas, termasuk:
 - o Membentuk sebuah jaringan petugas lapangan/terdepan
 - o Membentuk titik lintas batas terintegrasi, termasuk kantor lokal untuk pertukaran informasi dan pesan peringatan awal
 - o Mempromosikan patroli bersama
 - o Mengatur prosedur analisis resiko bersama
 - o Meningkatkan operasi bersama
 - o Membentuk metode manajemen informasi bersama
 - o Mengkoordinasikan investigasi

Para peserta dipisahkan menjadi subkelompok-subkelompok, dan para ahli dialokasikan untuk membantu mereka dalam diskusi mengenai beberapa isu sebagai berikut (yang merupakan sembilan tujuan yang disebutkan dalam deklarasi kementerian yang disepakati di Sarajevo).

- Sub-kelompok I: melaksanakan pertemuan rutin para pemimpin polisi perbatasan pada tingkat lokal, regional, dan nasional untuk membantu dalam operasi yang lebih efektif; menunjuk titik/pusat kontak nasional bagi kerjasama dan kegiatan lapangan regional dan lintas batas; membentuk sebuah jaringan petugas lapangan/depan.
- Sub-kelompok II: Membentuk titik lintas batas terintegrasi, termasuk kantor lokal untuk pertukaran informasi dan peringatan dini.
- Sub-kelompok III: Mempromosikan patroli bersama
- Sub-kelompok IV: Mengatur prosedur analisis resiko bersama; meningkatkan operasi bersama; mengkoordinasikan unit-unit investigasi bersama; membentuk metode manajemen informasi bersama.

Dengan menggunakan Konvensi Kerjasama Kepolisian dalam SEE sebagai landasan hukum pekerjaan mereka, subkelompok-subkelompok ini ditugaskan untuk bekerja dalam merancang kesepakatan tertulis yang disetujui antara dua negara, dalam usahanya mengimplementasikan mekanisme yang sudah dinyatakan sebelumnya. Subkelompok ini bekerja selama satu setengah hari, dan pada hari terakhir dari lokakarya, setiap subkelompok mempresentasikan pekerjaan mereka masing-masing. Dalam waktu yang sedikit ini, setiap kelompok harus dapat menyelesaikan rancangan teks perjanjian/MOU yang meliputi sembilan tujuan diatas.

Tanggapan para peserta yang menghadiri acara ini sangatlah positif. Mereka merasa bahwa isu yang didiskusikan sangatlah relevan; mereka mempelajari sejumlah besar hal dan menerima masukan berguna dari para ahli; dan menyadari bahwa kelompok kerja ini sangat menantang, menstimulasi, dan sangat membantu mereka. Dari sisi DCAF, kelompok kerja ini telah mencapai lebih dari yang diharapkan, dan sangatlah menakjubkan dapat melihat jumlah pekerjaan dan standar tinggi yang dihasilkan dalam periode yang tidak panjang ini. Mayoritas dari peserta dalam lokakarya ini telah menjadi anggota tetap dari kelompok kerja ini, dan mereka sangat mengenal permasalahan yang dibahas, isu yang dilibatkan, dan para kolega mereka dari negara lainnya. Sebagai tambahan, para peserta membutuhkan para ahli yang dibutuhkan untuk menyempurnakan tugas mereka, dan kemampuan untuk mengaplikasikan hasil pekerjaan itu ketika mereka kembali ke kementerian masing-masing.

Para peserta dalam lokakarya antara lain para undangan dari Albania, Bosnia dan Herzegovina, Macedonia, Montenegro, dan Serbia, dan merupakan campuran dari para ahli hukum yang terlibat dalam pengembangan legislasi dengan pengalaman dibidang keamanan perbatasan, termasuk juga para komandan operasional dengan pengalaman substansial dalam kebutuhan praktikal di lapangan. Kelompok kerja dipimpin oleh para ahli dari Slovenia, Kroasia, dan Hongaria yang mampu menularkan keahlian dan pengalaman mereka dalam pengembangan kerjasama nasional/bilateral terkait kerjasama regional/lintas perbatasan. Para penasihat hukum-reformasi pertahanan dari Markas Besar NATO, Sarajevo, diundang sebagai pengamat.

Tujuan akhir dari kelompok kerja ini adalah perancangan sebuah UU Keamanan Perbatasan yang akan meliputi ide utama dan prinsip-prinsip dari misi keamanan perbatasan, dan sejalan dengan kebutuhan Uni Eropa. Semua

isu-isu terkait dengan keamanan perbatasan yang tidak dimasukkan dalam UU baru ini harus diidentifikasi, sehingga mereka dapat dimasukkan dalam peraturan-peraturan tambahan lainnya. Seperangkat regulasi internal juga harus dirancang, dalam bentuk sebuah buku peraturan yang digunakan oleh setiap petugas penjaga perbatasan.

Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi Internal dalam Badan Keamanan Perbatasan

Lokakarya pertama, 27-30 Agustus 2003, Dobogoko, Hongaria. Untuk mendapatkan manajemen perbatasan yang sukses, maka ia harus mengikuti empat prinsip utama: perencanaan, organisasi, motivasi, dan kontrol. Bagaimana cara menerapkan keempat prinsip utama tersebut dalam konteks keamanan perbatasan adalah fokus pertama dari lokakarya ini. Kedua, aspek lainnya diletakkan pada signifikansi dari struktur internal yang baik dari organisasi. Diantara isu-isu yang diinvestigasi antara lain, bagaimana manajemen tingkat atas bekerja sama dengan para komandan regional, dan bagaimana pos-pos lokal diintegrasikan ke pusat regional. Kejelasan atas pertanyaan tersebut akan memfasilitasi komunikasi, dan menjamin setiap penjaga perbatasan memiliki posisi di organisasi dan mengetahui apa yang diharapkan darinya.

Para peserta dalam lokakarya termasuk para pemimpin polisi perbatasan dari negara-negara peserta, dan mitra kerja terdekat mereka yang berpartisipasi di tingkatan pembuatan keputusan-setara direktur, dan para spesialis tingkat atas di organisasi dalam bidang perencanaan, organisasi, motivasi, dan pengawasan/kontrol. Lokakarya kepemimpinan kemudian diikuti oleh dua pertemuan kelompok kerja yang ditujukan pada pengembangan lanjutan dari tema yang dibahas. Pertemuan-pertemuan tersebut dijelaskan berikut ini.

Kelompok Kerja Kepemimpinan dan Manajemen I, 30 November-5 Desember 2003, Budva, Montenegro. Pertemuan ini difokuskan secara khusus pada perencanaan dan kontrol badan perbatasan. Para peserta diperkenalkan dengan sistem kontrol/pengawasan yang dikembangkan oleh Penjaga Perbatasan Hongaria, dan diperkenalkan juga dengan pendekatan "manajemen berdasarkan hasil" yang dikembangkan oleh Penjaga Perbatasan Finlandia pada dekade 90-an. Para peserta diberikan kesempatan untuk menerapkan pendekatan ini kedalam organisasi mereka, melalui latihan praktikal yang diberikan kepada para delegasi. Para peserta dalam kelompok kerja ini termasuk para pemimpin dari departemen yang bertanggungjawab bagi perencanaan dan organisasi sehari-hari di badan kontrol perbatasan negara mereka masing-masing.

Kelompok Kerja Kepemimpinan dan Manajemen II, 24-29 Januari 2004, Mavrovo, Macedonia. Kelompok kerja ini berfokus pada motivasi dan kontrol. Secara khusus, tujuannya diletakkan pada signifikansi dari kerjasama tim. Sinergi yang dapat dicapai melalui kerjasama tim dijelaskan dalam presentasi-presentation, dan diuji dalam aktifitas kelompok yang beragam. Penjelasan juga diberikan mengenai bagaimana mengkalkulasikan prioritas staf, sebuah

pertimbangan kunci ketika berusaha memotivasi petugas. Sistem kontrol dari Penjaga Perbatasan Hongaria juga ditampilkan, dengan harapan para peserta mempertimbangkan relevansi prinsip-prinsip kontrol utama tersebut dengan sistem domestik mereka. Peserta kelompok kerja diantaranya para pemimpin departemen sumber daya manusia dan operasi yang bertanggungjawab dalam memotivasi dan mengontrol, disertai dengan mitra kerja terdekat mereka.

Tujuan utama dari kelompok kerja kepemimpinan dan manajemen, yang juga melaksanakan pertemuan pada 2005 dan 2006, adalah pengembangan sistem perencanaan tiga tingkat. Hal ini ditujukan untuk meliputi markas besar nasional (rencana strategis, taktis, dan operasional), pusat regional (rencana taktis dan operasional), dan pos lokal (rencana operasional). Pertemuan kelompok kerja ini antara lain sebagai berikut:

Kelompok Kerja Kepemimpinan dan Manajemen III, 22-24 Mei 2005, Frankfurt, Jerman. Pertemuan ini ditujukan bagi para menteri negara-negara peserta. Mereka mengevaluasi Konferensi Evaluasi Tahunan Kedua, yang dilaksanakan di Skopje pada Februari 2005, dan juga mendiskusikan usulan untuk dibahas dalam Konferensi Evaluasi Tahunan Ketiga, yang dilaksanakan di Bosnia dan Herzegovina pada Februari 2006.

Kelompok Kerja Kepemimpinan dan Manajemen IV, 22-24 September 2005, Kopaonik, Serbia. Lokakarya ini mengumpulkan para pemimpin organisasi polisi perbatasan dari semua negara yang terlibat dalam program Keamanan Perbatasan DCAF, termasuk juga para pemimpin kabinet atau orang-orang yang bertanggung jawab lainnya dari BiH, Macedonia, Albania, Kroasia, dan Serbia. Selama pertemuan ini, presentasi dilakukan oleh perwakilan dari Jerman, Slovenia, Finlandia, dan Kroasia mengenai signifikansi dan model berbeda dari kerjasama lintas-batas. Pertemuan ini juga termasuk diskusi mengenai rancangan program, substansial, dan tujuan dari Konferensi Kementerian Ketiga, yang dilaksanakan di Sarajevo pada 22-24 Februari 2006. Para pemimpin badan polisi perbatasan juga menyepakati tujuan bersama untuk tahun 2006, sbb:

- Untuk meningkatkan usaha dalam wilayah reformasi hukum
- Untuk menggambarkan tujuan dan substansi dari operasi lapangan bersama di masa mendatang, seperti prosedur dan koordinasi dari aktifitas di semua wilayah operasional
- Untuk mengelola dan memperbaharui fasilitas teknis (infrastruktur) dan kemampuan kerjasama lintas-batas untuk mendukung kemampuan operasional bersama dengan dukungan polisi perbatasan.

Kelompok Kerja Kepemimpinan dan Manajemen V, 4-5 Desember 2005, Budva, Montenegro. Pemimpin dari semua badan perbatasan dari semua negara Balkan Barat dilibatkan dalam Program Keamanan Perbatasan DCAF, termasuk juga para menteri dari kementerian dalam negeri atau keamanan (atau perwakilannya) dipertemukan di Budva. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi aktifitas program tahunan DCAF selama tahun 2005, mendiskusikan Konferensi Evaluasi Kementerian Ketiga di Februari 2006, dan mendiskusikan serta menyepakati rencana tahunan aktifitas keamanan perbatasan untuk tahun 2006. Secara keseluruhan para pemimpin badan perbatasan memuji

program tersebut, dan seringkali menyatakan program tersebut sebagai salah satu pengaruh utama dalam kemajuan-kemajuan yang diperoleh selama setahun terakhir dibidang keamanan perbatasan. Konferensi Kementerian kemudian didiskusikan secara mendalam, dan program-programnya disetujui; sebagai tambahan, para delegasi menyepakati aktifitas program untuk tahun 2006, dengan sebuah tujuan utama mengelola lebih lanjut kerjasama regional dan implementasi fleksibilitas mekanisme regional.

Kelompok kerja ini bertujuan untuk melakukan dua acara di tahun 2006, yang ditargetkan pada para pemimpin badan perbatasan, untuk membahas langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mencapai fleksibilitas mekanisme seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Kementerian. Para peserta dalam lokakarya ini diantaranya para delegasi yang dipimpin baik itu oleh pemimpin atau staf pemimpin operasi dari badan perbatasan negara (atau perwakilan dari tingkat manajemen yang setara), dengan tiga hingga empat orang pejabat yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan petunjuk kerja dan petunjuk lainnya bagi organisasi polisi perbatasan nasional yang terlibat dalam program ini.

Kelompok Kerja Kepemimpinan dan Manajemen VI, 5-8 April 2006, Jahorina, Bosnia dan Herzegovina (BiH). Lokakarya ini pada intinya adalah sebuah lanjutan dari Konferensi Kementerian di Sarajevo pada 24-25 Februari 2006, dimana kerjasama lintas-batas intensif telah disepakati di awal, seperti yang diatur dalam deklarasi yang ditandatangani oleh para menteri dalam negeri atau keamanan dari negara-negara Balkan Barat (dengan pengecualian Kroasia). Tujuan dari Kelompok Kerja Kepemimpinan dan Manajemen adalah untuk mempersiapkan buku petunjuk bagi polisi perbatasan/badan penjaga perbatasan dari negara-negara SEE (Prosedur Standar Operasional Bersama) untuk implementasi dimasa mendatang dari tujuan-tujuan berikut ini:

- Pertemuan rutin dalam usaha mengelola kontak antara pemimpin polisi perbatasan pada tingkatan lokal, regional, dan nasional.
- Pusat/titik kontak nasional bagi pekerja lapangan regional atau lintas-batas
- Titik lintas batas terintegrasi (semisal, pemeriksaan perbatasan bersama)
- Patroli bersama
- Jaringan petugas lapangan/terdepan
- Analisis resiko dan metode investigasi bersama
- Operasi bersama
- Prosedur manajemen informasi bersama

Pertemuan pertama meliputi empat isu pertama dari daftar diatas. Para ahli dari Estonia, Finlandia, Jerman, Hongaria, dan Slovenia mengkontribusikan pengalaman organisasi mereka serta regulasi nasional. Presentasi mereka berperan sebagai dasar bagi diskusi lanjutan dan rancangan awal dari beragam bagian buku petunjuk. Tiga subkelompok dibentuk, untuk membahas seperangkat topik berikut:

- Pusat kontak nasional dan pertemuan rutin lintas-batas (negara koordinator: Montenegro dan Macedonia; para ahli dari Finlandia dan Slovenia)
- Patroli bersama (negara koordinator: Serbia; para ahli dari Jerman)
- Pembagian tanggung jawab dalam pemeriksaan di perbatasan (negara koordinator: Bosnia dan Herzegovina; para ahli dari Estonia dan Hongaria).

Presentasi dari para ahli kemudian didiskusikan secara luas. Hasilnya dipresentasikan ke sidang umum dan dikirimkan ke negara koordinator untuk dikerjakan lebih lanjut. Dalam permulaan presentasi ini, para praktisi dari garis terdepan badan perbatasan di setiap negara akan menyelesaikan rancangan wal dengan rekomendasi mereka. Pertemuan dengan kelompok kerja DCAF lainnya dengan tujuan mengkoordinasikan kontribusi mereka terhadap pertanyaan terbuka dan masalah-masalah yang harus diselesaikan berdasarkan kasus per kasus. Negara penyelenggara, Bosnia-Herzegovina (BiH), yang pada saat bersamaan adalah negara koordinator bagi kelompok kerja kepemimpinan dan manajemen, akan mengumpulkan semua kontribusi dan mengoreksinya bersama DCAF. Untuk persiapan lanjutan, BiH telah menyediakan sekretariat khusus untuk melaksanakan tugas editorial. Notulensi dari lokakarya ini akan dikirimkan ke setiap negara peserta. Para peserta dari lokakarya ini adalah para petugas yang berperan dalam fungsi kunci operasi dan organisasi, dan, dalam satu kasus, seorang kepala polisi perbatasan (Macedonia).

Kelompok Kerja Kepemimpinan dan Manajemen VII, 11-14 Oktober 2006, Jahorina, BiH. Lokakarya lanjutan ini akan membahas lima isu terkait dengan kerjasama lintas-batas berikut ini:

- Membentuk sebuah jaringan petugas lapangan/terdepan
- Metode analisis resiko bersama
- Operasi bersama
- Prosedur manajemen informasi bersama
- Koordinasi investigasi

Dukungan Logistik

Lokakarya, 8-12 Oktober 2003, Kalvi-Narva, Estonia. Adalah bukti nyata bahwa organisasi keamanan perbatasan harus bertujuan memenuhi misi mereka dan mencapai tujuan mereka berdasarkan kemampuan terbaiknya. Bagaimanapun juga, keberhasilan misi keamanan yang dimaksud bergantung pada aspek yang luas akan kepemilikan sistem dukungan logistik yang berfungsi pada tempatnya. Kesimpulan dari lokakarya ini adalah bahwa logistik memberikan makna dan arah mengenai pengenalan peralatan dan teknologi. Logistik kemudian merupakan relasi antara strategi, kebutuhan operasional, dan peralatan teknis. Berdasarkan pengalaman beragam organisasi keamanan perbatasan di Eropa, beberapa prinsip utama untuk menjamin sebuah sistem dukungan logistik melibatkan pengawasan, efisiensi, fleksibilitas, kepraktisan, kerjasama, dan kemampuan antar operasi. Topik utama lainnya yang dibahas dalam lokakarya adalah prosedur yang digunakan dalam perancangan usulan bagi pendanaan Uni Eropa, dan langkah-langkah bervariasi yang harus diikuti ketika

mengembangkan sebuah daftar kebutuhan teknis bagi proyek keamanan perbatasan tertentu. Melalui lokakarya, pengalaman penjaga perbatasan Estonia (dan organisasi keamanan perbatasan Eropa lainnya) disajikan sebagai ilustrasi dari isu dan kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara Balkan Barat dalam proses reformasi mereka.

Para peserta dalam lokakarya ini diantaranya para pemimpin polisi perbatasan dari negara peserta, dan mitra kerja terdekat mereka dalam tingkat pengambilan keputusan setara-direktur, dan spesialis tingkat atas dalam organisasi dalam bidang dukungan logistik. Untuk mengevaluasi secara lanjut isu yang dibahas dalam lokakarya logistik, dua kelompok kerja kemudian dibentuk. Salah satunya akan memfokuskan pada pengembangan "Proyek Perbatasan Pintar" dan yang lainnya akan mempelajari secara rinci mengenai perancangan proposal/usulan untuk pendanaan Uni Eropa. Kelompok Proyek Perbatasan Pintar akan bertujuan mengklarifikasi kebutuhan peralatan dari otoritas perbatasan Balkan Barat, melalui spesifikasi akan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh otoritas ini dari peralatan mereka, dalam konteks keluaran dan hasil. Untuk aspek ini, kelompok kerja pendanaan Uni Eropa akan melibatkan pengembangan unit manajemen asistensi proyek teknis (TAP-Mus), yang akan memberikan kompetensi bagi otoritas keamanan Balkan Barat untuk berhadapan dengan badan donor internasional dan secara khusus dengan badan pendanaan Uni Eropa. Kelompok kerja ini diorganisir berdasarkan jadwal berikut ini.

Kelompok Kerja TAPMU I, 24-29 Januari 2004, Mavrovo, Macedonia.

Kelompok kerja ini adalah usaha pertama untuk menjelaskan kepada para peserta mengenai prosedur yang digunakan dalam memperoleh pendanaan dari donor eksternal-khususnya Uni Eropa-dan mengimplementasikan serta mengelola proyek itu. Para peserta yang dilibatkan ini mempelajari tahapan khusus dari proses pendanaan, termasuk topik seperti identifikasi program dan proyek; elaborasi keuangan proyek, matriks kerangka kerja logikal; merancang persyaratan kontrak; dan menguji aspek-aspek dari prosedur manajemen proyek Uni Eropa. Tujuan dari kelompok kerja ini adalah untuk mengembangkan unit asistensi teknis manajemen kecil (TAMPUs) dalam badan penjaga perbatasan, yang dilatih sehingga mampu bernegosiasi dengan donor asistensi teknis internasional secara efektif disemua tingkatan yang relevan dari proses pendanaan. Selain itu, unit ini akan dilatih secara sesuai sehingga dapat memberikan keahlian korps kepada organisasi mereka dalam kebanyakan manajemen proyek dan tenderisasi. Pada bagian kesimpulan dari pertemuan kelompok kerja, para peserta diinformasikan mengenai sebuah skema untuk menyediakan Kursus jarak-jauh perjanjian yang akan dievaluasi dan dibagikan terkait dengan pertemuan lanjutan.

Kelompok Kerja Proyek Perbatasan Pintar I, dan Kelompok Kerja TAPMU II, 26-30 April 2004, RACVIAC, Bestovje, Kroasia. Sebuah kursus pelatihan yang khusus didesain untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan-proyek dari para spesialis pilihan dari cabang teknis dan logistik badan perbatasan negara dari negara yang berpartisipasi. Para pemimpin ini kemudian diinstruksikan kedalam prosedur-prosedur penting dalam melakukan analisis kebutuhan teknis

yang dibutuhkan ketika merespon permintaan operasional. Sebuah perhatian khusus ditekankan pada sistem komunikasi dan pengawasan, dan para peserta ditunjukkan cara melakukan proses analisa yang benar-seperti studi kelayakan-yang esensial ketika menyediakan solusi teknis bagi permasalahan operasional.

Sebagai tambahan, mereka menjadi terbiasa dengan proses elaborasi spesifikasi teknis, khususnya yang terkait dengan prosedur tender internasional. Para pemimpin ini diharapkan dapat mengelaborasi justifikasi operasional-teknis secara menyeluruh bagi kebutuhan peralatan dan mampu untuk menilai peralatan teknis apa yang tersedia dan masih layak pakai. Solusi ini harus menekankan pada pertanyaan penting terkait belanja peralatan, termasuk lisensi, suku cadang, jaminan perawatan, dan keberlangsungan operasional (termasuk keberlangsungan finansial).

Sebuah kuesioner dibagikan kepada para peserta sebelum pertemuan kelompok kerja terkait dengan sistem dukungan logistik dan peralatan mereka untuk teknologi informasi (TI), komunikasi, serta sistem pengawasan perbatasan darat dan air yang sedang digunakan. Kuesioner ini memberikan pandangan yang jelas mengenai kepemilikan peralatan terbaru dari badan-badan tersebut. Sebagai tambahan, para responden juga diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan peralatan baru dan memberikan alasan jelas mengapa peralatan tersebut dibutuhkan. Bagian pertanyaan ini dilaksanakan selama pertemuan kelompok kerja. Sebagai tambahan, negara yang berpartisipasi diminta untuk membuat presentasi berdasarkan respon mereka terkait kuesioner. Rekomendasi umum mengenai pembentukan sistem teknologi informasi oleh para ahli dari Finlandia, Estonia, Slovenia, dan Hongaria dilakukan pada saat pertemuan. Selain itu, sebuah presentasi mengenai desain spesifikasi teknis bagi sistem TETRA beserta cara mempersiapkannya untuk tender internasional juga dilakukan. Presentasi mengenai sistem teknologi informasi negara-negara peserta juga dilakukan.

Dalam pertemuan kelompok kerja TAPMU kedua, yang dilaksanakan secara bersamaan dengan acara ini, para peserta mendiskusikan tugas mereka dan mengevaluasi sebaik apa (atau sebaliknya) mereka telah berhasil dalam merancang dokumentasi kualitas. Sisa waktu dari pertemuan kelompok kerja mengevaluasi dalam detail yang besar mengenai kualitas yang dibutuhkan untuk mengelaborasi dokumen seperti itu. Kemudian, sebuah buku saku, yang digunakan sebagai *aide-memoire* bagi semua peserta yang dijadwalkan akan bekerja dalam TAPMU, diulas kembali.

Kelompok Kerja Proyek Perbatasan Pintar II, 17-21 Oktober 2004, Rovinj, Kroasia. Dalam pertemuan ini, para ahli menampilkan secara detail sistem pengawasan perbatasan darat yang digunakan oleh organisasi penjaga perbatasan mereka dan memperkenalkan kebutuhan mereka di masa mendatang. Delegasi dari Balkan Barat menjelaskan pencapaian mereka dalam bidang TI dan komunikasi selama 6 bulan terakhir. Pemaparan singkat dari para spesialis yang memiliki desain spesifikasi teknis untuk sebuah cakupan luas akan sistem pengawasan dan persiapan dokumen tender juga diberikan. Para peserta mendapatkan keuntungan dengan mendengarkan pengalaman

negara lain terkait pembentukan badan polisi perbatasan mereka, dan secara khusus pengalaman mereka terkait dengan:

- Persiapan prosedur tender
- Definisi karakteristik teknis dari peralatan pengawasan yang dibutuhkan
- Membuat rancangan biaya dan kemungkinan pengiriman peralatan.

Lokakarya ini juga melibatkan kerjasama tim dan latihan praktikal dimana, para ahli dan peserta secara bersama berusaha untuk menemukan solusi fungsional untuk membangun sebuah sistem pengawasan teknis pada sebuah perbatasan khusus dalam kondisi tertentu. Pada tahun 2005, kelompok kerja ini melanjutkan aktifitas mereka, dengan tujuan akhir untuk menjamin para pemimpin logistik berada dalam posisi yang benar untuk memahami dan merespon kebutuhan operasional melalui penggunaan komunikasi, TI dan sistem pengawasan.

Kelompok Kerja Dukungan Logistik III, 10-12 Februari 2005, Belgrade, Serbia. Pertemuan ini dilanjutkan dengan aspek-aspek teoritis dari dukungan logistik; topik utama dari kelompok kerja diantaranya adalah penjelasan prosedur yang digunakan dalam pengaturan tender, evaluasi hasil, pengaturan dan penandatanganan kontrak, prosedur finansial, dan bagaimana mengimplementasikan serta menggunakan peralatan teknis. Lokakarya ini juga memasukkan pendidikan dan pelatihan orang-orang yang bekerja dengan perlengkapan teknis dan pengelolaannya. Para ahli dari Estonia dan Bulgaria memberikan presentasi mengenai desain sistem komunikasi operasional. Sebuah hari khusus diberikan untuk presentasi pengalaman Serbia dalam penciptaan Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi dalam bidang keamanan perbatasan, yang melibatkan sebuah kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Serbia untuk melihat penggunaan peralatan mereka.

Para peserta dalam lokakarya ini adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan teknik, termasuk TI, dan kemampuan operasional dalam bidang keamanan perbatasan, termasuk yang berpengalaman khusus dalam komunikasi, TI, dan pengawasan. Selain itu, para peserta diharapkan setidaknya mengetahui satu bahasa asing. Mereka ditunjuk sebagai anggota tim atau ketua tim dalam organisasi penjaga perbatasan, yang bertanggung jawab dalam pembentukan komunikasi nasional. Para peserta ditemani oleh para petugas yang kompeten dalam berbahasa Inggris dengan pengetahuan dalam keamanan perbatasan yang mau belajar dan yang akan memberikan kompetensi di masa mendatang bagi organisasi keamanan perbatasan negara-negara Eropa Timur Selatan untuk bernegosiasi dengan badan donor internasional, dan secara khusus dengan badan donor Uni Eropa.

Kelompok Kerja Dukungan Logistik IV, 8-13 September 2005, Toila, Estonia. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk membiasakan para peserta dengan sisi praktis dari logistik, infrastruktur, dan struktur dari titik perlintasan batas dan pos pengawasan batas, serta memperkenalkan kepada mereka beragam sistem peralatan pengawasan perbatasan. Para ahli dari Penjaga Perbatasan Estonia menggambarkan proses pengembangan sistem dan

menunjukkan kepada para peserta mengenai pemasangan sistem pengawasan pantai yang baru. Para ahli dari Penjaga Garis Finlandia dan *Guardia Civil* Spanyol membandingkan perkembangan terbaru dengan pengalaman mereka dan memberikan saran kepada negara-negara peserta. Sebuah analisis komparatif dari peralatan teknis yang dibutuhkan oleh pengawasan perbatasan darat juga diberikan, dan kebutuhan untuk beragam proyek pembangunan dan konstruksi bagi fungsi penjaga perbatasan kemudian didiskusikan.

Setiap negara mengirimkan seorang delegasi yang merupakan petugas dari organisasi polisi perbatasan atau dari departemen/sektor yang relevan lainnya dalam kementerian yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan proyek untuk pengawasan perbatasan darat dan air, termasuk juga departemen yang bertanggung jawab dalam membangun atau renovasi fasilitas tersebut. Para delegasi pada dasarnya terdiri dari satu orang arsitek atau teknisi, dan dua orang yang bertanggung jawab untuk pengawasan perbatasan.

Pada tahun 2006, kelompok kerja ini akan melaksanakan dua pertemuan lanjutan, dengan dua tema utama: komunikasi dan Teknologi Informasi (TI). Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi proyek dalam tahapan persiapan, dengan tujuan menjamin bahwa sistem yang akan dibeli dapat dijalankan.

Para peserta dalam pertemuan ini harus memiliki kualifikasi sebagai berikut

- Latar belakang teknis, termasuk TI
- Kemampuan operasional di bidang keamanan perbatasan termasuk pengalaman praktikal dibidang komunikasi, TI, dan pengawasan
- Pengetahuan dasar akan salah satu bahasa asing

Sebagai tambahan, para peserta harus ditunjuk dalam organisasi penjaga perbatasan sebagai ketua tim atau anggota tim yang bertanggung jawab dalam penciptaan sistem komunikasi, TI, dan pengawasan nasional.

Kelompok Kerja Dukungan Logistik V, 22-25 Maret 2006, Serbia.

Kemampuan kerjasama antara pelayanan komunikasi dan TI serta peralatan dari badan perbatasan yang berbeda di negara-negara yang berbatasan adalah salah satu kunci dari manajemen perbatasan terintegrasi yang efisien. Dengan melihat kembali pada tahun 1985, Perjanjian Schengen menginginkan sebuah pendekatan yang lebih kooperatif, terkoordinasi antar otoritas publik di seluruh Eropa. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk mengeksplorasi perbedaan peralatan teknis dan fasilitas untuk pertukaran semua jenis informasi antar badan perbatasan di negara yang berbatasan. Hal ini termasuk pengaturan-khususnya di wilayah perbatasan-telepon, radio, dan sambungan fax, serta jaringan langsung lainnya untuk memfasilitasi transmisi informasi. Pengenalan akan sistem telepon-radio digital yang dapat dijalankan bersama juga dipertimbangkan untuk mendukung operasi lapangan dari unit gerak cepat; isu penting akan standarisasi peralatan dan prosedur pembelian peralatan juga diinvestigasi.

Melalui presentasi para ahli dan seperangkat contoh praktikal, dan juga diskusi panel, para peserta diberikan kesempatan untuk mengumpulkan

pengetahuan mengenai teknologi baru serta tren di Eropa mengenai hal ini. Sebagai tambahan, sebuah analisis dilakukan untuk menemukan aktifitas gabungan yang memungkinkan, dan kemudian disepakati untuk membentuk komisi koordinasi yang akan melaksanakan tindakan selanjutnya. Komisi ini akan terdiri dari para kepala badan telekomunikasi (atau wakil-wakilnya) dari kementerian dalam negeri Albania, Kroasia, Macedonia, Montenegro dan Serbia, dan Badan Perbatasan Negara Bosnia Herzegovina. Mandat bagi komisi ini adalah:

- Mengkoordinasikan semua aktifitas terkait telekomunikasi lintas-batas di negara-negara mereka
- Melaksanakan pertemuan rutin dan pertukaran informasi mengenai kondisi dan rencana pengembangan dalam bidang telekomunikasi di negara-negara mereka
- Mengevaluasi kemungkinan solusi teknis terkait telekomunikasi lintas-batas dan mempersiapkan proposal/usulan untuk proyek gabungan untuk kepentingan bersama
- Berurusan dengan keamanan informasi dan perlindungan dalam komunikasi lintas-batas.

Pertemuan Kelompok Kerja Dukungan Logistik selanjutnya akan dilaksanakan pada 6-9 September 2006 di Kroasia.

Konferensi Evaluasi Tahunan

Konferensi Evaluasi Tahunan Pertama, 27-28 Februari 2004, Lake Bled, Slovenia.

Seri konferensi evaluasi tahunan ditujukan untuk menyediakan sebuah acara bagi para peserta untuk mempresentasikan hasil yang diperoleh dari aktifitas mereka setiap tahunnya, baik itu dalam lokakarya maupun dalam kelompok kerja. Konferensi Evaluasi Tahunan Pertama meliputi pencapaian utama selama tahun 2002-2003 dan gambaran rencana untuk tahun 2004-2005. Untuk mengakomodasi aspirasi dari negara-negara peserta, sebuah rencana tahunan untuk asistensi tahun 2004-2005 didiskusikan dan kemudian ditandatangani. Untuk menjamin keberlangsungan bantuan finansial, sehingga di masa mendatang diharapkan dapat memasukkan juga bantuan material dari Kementerian Pertahanan Swiss, maka sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) didiskusikan, dievaluasi, dan kemudian ditandatangani. Semua pemimpin badan dan perwakilan kementerian pun hadir, bersama dengan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Slovenia, yang menjadi tuan rumah acara tersebut.

Konferensi Evaluasi Tahunan Kedua, 24-26 Februari 2006, Skopje, Macedonia. Konferensi Evaluasi Tahunan Kedua ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi para peserta untuk memperoleh sebuah pandangan/ulasan mengenai aktifitas yang dilakukan di Eropa dan negara-negara peserta dalam bidang keamanan perbatasan, dimana program DCAF berkontribusi didalamnya. Perdana Menteri Macedonia membuka konferensi tersebut dengan pidato mengenai reformasi sektor keamanan dan para pimpinan Uni Eropa, OSCE,

NATO serta delegasi Pakta Stabilitas memberikan presentasi mengenai kebutuhan keamanan internal di SEE.

Selama hari kedua, menteri dalam negeri dari negara-negara Balkan Barat menyampaikan mengenai pentingnya keamanan perbatasan di negara mereka dalam usaha menjamin keamanan warga negaranya, dan menandai pentingnya kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam hal tersebut. Konferensi ini mengevaluasi kemajuan yang telah dibuat oleh badan keamanan perbatasan di negara-negara Balkan Barat; keseluruhan pencapaian dalam periode 2003-2004 disampaikan oleh kepala badan perbatasan di negara-negara tersebut. Para menteri dalam negeri kemudian menandatangani pernyataan yang mengakui pentingnya tugas badan keamanan perbatasan negara dalam menyediakan sebuah lingkungan yang aman bagi warga negaranya, dan secara formal menyetujui kelanjutan Program Keamanan Perbatasan. Rencana aktifitas tahunan bersama untuk 2005-2006 kemudian juga didiskusikan, dan secara formal ditandatangani oleh para pimpinan badan perbatasan di negara-negara tersebut.

Para peserta dalam konferensi ini termasuk para menteri dalam negeri di semua negara Balkan Barat (dengan pengecualian Menteri Dalam Negeri dari Montenegro), pimpinan badan perbatasan dari semua negara-negara Balkan Barat, termasuk juga bada lainnya yang terlibat dalam membantu program keamanan perbatasan: Uni Eropa, NATO, OSCE, EUPOL PROXIMA, dan Pakta Stabilitas.

Konferensi Evaluasi Tahunan Ketiga, 23-25 Februari 2006 di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Konferensi Evaluasi Tahunan Ketiga bertujuan untuk memberikan pandangan menyeluruh kepada para peserta mengenai semua aktifitas di Eropa dan negara-negara peserta dalam bidang keamanan perbatasan, dimana program DCAF dikontribusikan didalamnya. Direktur Dewan Menteri BiH, Adnan Terzic, membuka konferensi ini. Ia dan Menteri Keamanan, Barisa Colak, merefleksikan pencapaian yang diperoleh dalam reformasi internal keamanan dan integrasi Eropa, selain itu Wakil Menlu Hongaria urusan hubungan luar negeri Hongaria dan seorang anggota Dewan Kerjasama Pakta Stabilitas III juga membuat pernyataan mengenai perkembangan terakhir dari perspektif mereka.

Selama hari kedua, para undangan mengulas mengenai kemajuan yang diperoleh hingga 2006 oleh badan keamanan perbatasan negara-negara Balkan Barat dan keseluruhan pencapaian selama tahun 2005. Strategi implementasi untuk masa depan dipresentasikan oleh para pemimpin badan perbatasan di Balkan Barat. Pejabat senior penjaga perbatasan dari Hongaria dan Slovenia memberikan presentasi mengenai peran negara mereka dalam mendukung negara-negara di Balkan Barat. Kementerian dalam negeri atau keamanan dari Balkan Barat menyampaikan pentingnya keamanan perbatasan antar negara dalam usaha menjamin keamanan warga negaranya, dan menekankan akan pentingnya kerjasama nasional, regional, dan internasional serta perlunya bekerja sama dalam melawan kejahatan perbatasan, dan kebutuhan untuk

mengharmoniskan regulasi secara lebih lanjut agar sesuai dengan standar Uni Eropa.

Tidak terbantahkan, aspek yang menonjol dari acara ini adalah penandatanganan deklarasi yang dilakukan oleh semua menteri dalam negeri atau keamanan dari negara-negara Balkan Barat (dengan pengecualian Kroasia). Deklarasi ini menyebutkan akan signifikansi serta kebutuhan untuk secara formal mengatur mekanisme yang mempromosikan, memperkuat, dan mempererat kerjasama regional, dalam hal ini berbagi tanggung jawab yang sama bagi permasalahan kejahatan lintas-batas, termasuk pula didalamnya mengatur langkah-langkah untuk memerangi kejahatan lintas-batas tersebut. Dengan menandatangani deklarasi ini, para menteri dengan ini telah mengkonfirmasi persetujuan mereka untuk mengharmonisasikan kerangka kerja legal, mengembangkan mekanisme dan prosedur operasional yang terkoordinasi, dan bergerak kearah penggunaan alat-alat teknis yang mampu bekerja sama. Dengan komitmen yang dikeluarkan oleh para menteri ini, kerjasama regional yang valid dan disepakati dapat dimulai. Para menteri juga kemudian secara formal menyepakati dan menandatangani rencana tahunan untuk kegiatan bersama di tahun 2006.

Pada hari terakhir dari konferensi, sebuah diskusi tutorial dilakukan mengenai perkembangan Uni Eropa terbaru dalam bidang keamanan perbatasan, dimana Dewan Penasehat Internasional DCAF untuk Keamanan Perbatasan dan negara-negara lain (Estonia, Finlandia, Slovenia, Yunani) memberikan presentasi dan berita terbaru mengenai beragam isu yang relevan. Para peserta dalam konferensi tersebut termasuk para menteri dalam negeri atau keamanan dari negara-negara Balkan Barat (terkecuali menteri dalam negeri Serbia, yang diwakili oleh sekretaris kabinetnya); para pemimpin badan perbatasan negara disemua negara-negara Balkan Barat; dan perwakilan dari negara-negara donor seperti: Estonia, Finlandia, Jerman, Hongaria, Slovenia, Swiss, Yunani, Polandia, dan Rumania. Para perwakilan yang hadir juga mewakili badan-badan yang terlibat dalam membantu program keamanan perbatasan diantaranya: Uni Eropa, NATO, OSCE, ICMPD, EUPM, FRONTEX, Danish Centre for Human Rights, PSOTC di Bosnia Herzegovina, PAMECA, SIPRI, Pakta Stabilitas, dan perwakilan staf kedutaan Austria, Swiss, serta Amerika Serikat. Sekitar 90 orang hadir dalam pembukaan konferensi yang dilaksanakan 23 Februari ini. Konferensi Evaluasi Tahunan Keempat akan dilaksanakan di bulan Februari atau Maret 2006, dan akan bertempat di Republik Kroasia.

Pendidikan dan Pelatihan Sebagai Alat Utama Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Keamanan Perbatasan di Negara Demokratis

Lokakarya 1, 7-10 Maret 2004, Lubeck, Jerman. Perubahan ekonomi dan sosial yang cepat selama beberapa tahun terakhir ini telah membuat fleksibilitas-atau kemampuan untuk belajar, tidak belajar, dan belajar kembali-menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya. Sangatlah penting untuk menemukan cara baru dalam berkomunikasi dan bekerja sama, dengan tujuan memfasilitasi pembagian informasi dan ide-ide. Perubahan ini juga telah mempengaruhi bidang

keamanan perbatasan, kebanyakan diantaranya perubahan misioner dasar penjaga perbatasan dari menjaga perbatasan menjadi perlindungan warga negara. Perubahan ini telah meningkatkan kebutuhan akan petugas-petugas yang terlatih secara profesional. Singkatnya, satu-satunya cara bagi organisasi kepolisian untuk menghadapi semua tantangan dunia modern adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang baik. Kita harus belajar secara terus menerus untuk tetap bisa berpacu searah dengan lingkungan yang terus berubah.

Sementara itu, meskipun pendidikan dan pelatihan berhubungan namun pada dasarnya mereka adalah konsep yang berbeda. Pelatihan ditujukan untuk memberikan pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Sementara pendidikan biasanya memberikan kerangka teoritis dan konseptual yang didesain untuk menstimulasi kemampuan analitis dan kritis. Tetapi dengan belajar dari pengalaman dengan mencoba mengatasi permasalahan aktual yang ada akan dapat mengarah kepada pembelajaran dan pengembangan. Oleh karena itu, pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang direncanakan adalah saling keterkaitan. Perbedaan harus juga digunakan ketika membicarakan pelatihan berpusat-pelatih dan pembelajaran berpusat-pengajar, dimana aspek yang kedua lebih memungkinkan untuk transfer efektif pembelajaran menjadi kenyataan. Melalui presentasi dari beragam sistem pendidikan dan pelatihan berbeda yang dilakukan oleh badan keamanan perbatasan di Eropa, maka lokakarya ini mengeksplorasi nilai-nilai dan kemampuan yang dibutuhkan diseluruh tahapan berbeda dari pengembangan karir, dan berusaha mencoba menjawab pertanyaan peran apakah yang ada untuk pendidikan dan pelatihan bagi organisasi keamanan perbatasan di abad 21.

Para peserta lokakarya diantaranya adalah para pimpinan polisi perbatasan negara-negara peserta dan mitra kerja mereka yang terlibat dalam tingkat pengambilan keputusan-setara direktur, dan spesialis tingkat atas dalam organisasi mereka yang berperan dalam bidang pendidikan dan pelatihan.

Sebuah kelompok kerja mengenai pelatihan yang terdiri dari para ahli di bidangnya dibentuk selama lokakarya di Jerman ini. Mereka melakukan pertemuan hingga tiga kali selama periode 2004-2005, dan tujuan mereka adalah mendiskusikan kualitas program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk kinerja sehari-hari penjaga perbatasan yang efektif dan berhasil. Dalam dua pertemuan pertama (lihat dibawah), pilihan-pilihan model pendidikan dan program-program pelatihan terbaik ditampilkan. Penekanan dilakukan pada pelatihan sebagai sebuah proses, yang memasukkan analisis kebutuhan, pengembangan program, pelaksanaan program dan evaluasi, program pelatihan pelatih, dan bagaimana pelatihan dapat memainkan peran penting dalam membantu sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Kelompok ini telah melakukan pertemuan sesuai dengan jadwal berikut.

Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan I, 26-29 Mei 2004, Hongaria.

Pada pertemuan kelompok kerja ini, semua negara-negara donor diminta mempresentasikan usulan/proposal mengenai bagaimanapun menciptakan sistem pelatihan bagi penjaga perbatasan di lapangan dan pemimpin pos perbatasan.

Terkait dengan kebutuhan mendesak akan tenaga manusia untuk mengisi tanggung jawab perbatasan dari militer, maka siklus pelatihan ini tidak boleh lebih dari 3 bulan. Pertanyaan mengenai bagaimana kelanjutan dari langkah awal ini kearah program pelatihan 1 hingga 2 tahun yang komprehensif dan menjadi batu loncatan bagi keberhasilan dimasa depan, juga dibicarakan dalam lokakarya tersebut.

Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan II, 17-20 Juni 2004, Bosnia-Herzegovina. Dalam pertemuan kelompok kerja ini, para peserta diminta untuk mempresentasikan apa yang telah dilaksanakan dan dikembangkan selama ini dalam pendidikan dan pelatihan di organisasi mereka. Pada saat yang bersamaan, negara-negara donor mempresentasikan apa saja yang menjadi kunci utama dalam sistem pendidikan dan pelatihan mereka, dan elemen esensial dalam keberhasilannya. Para peserta dalam pertemuan ini adalah para pimpinan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, serta mitra kerja terdekat mereka.

Pertemuan Ahli Mengenai Pendidikan dan Pelatihan, 25-27 November 2004, Frankfurt, Jerman. Pertemuan dewan penasehat pendidikan dan pelatihan ini mengumpulkan semua perwakilan senior sistem pendidikan dari Estonia, Finlandia, Slovenia, dan Hongaria. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengklarifikasi dan menjelaskan isu-isu yang tidak terselesaikan terkait kemungkinan penerbitan sebuah buku mengenai pendidikan dan pelatihan. Pembicaraan utama dalam lokakarya ini adalah mengenai kebutuhan publikasi sebuah buku pendidikan dan pelatihan, isi serta substansi buku, waktu yang dibutuhkan, aktifitas lanjutan yang akan muncul selanjutnya, dan program untuk pertemuan selanjutnya, serta pembagian tanggung jawab antara orang-orang yang terlibat dalam kelompok kerja.

Para perwakilan dari semua negara yang diundang menyatakan sepakat dan menunjukkan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam proses mempersiapkan sebuah buku mengenai pendidikan dan pelatihan. Diputuskan bahwa buku tersebut harus menjadi kombinasi pengalaman praktikal yang dialami oleh negara-negara yang terlibat termasuk juga gambaran teoritis mengenai metodologi luas dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Buku ini harus menyediakan informasi yang menguntungkan negara lain mengenai bagaimana mereka mengembangkan konsep pendidikan dan pelatihan mereka dalam bidang keamanan perbatasan, tetapi mereka harus mampu, berdasarkan materi yang diberikan, untuk membuat keputusan dan kesimpulan tersendiri mengenai struktur serta pengembangan lanjutan dari kapabilitas pendidikan dan pelatihan mereka. Disepakati pula bahwa sangat penting untuk menekankan bahwa proses bimbingan internal dari pendidikan dan pelatihan tidak hanya tanggung jawab pusat pelatihan dan akademi, tetapi juga badan perbatasan di setiap negara.

Pertemuan Ahli Mengenai Pendidikan dan Pelatihan, 7-9 Februari 2005, Frankfurt, Jerman. Terkait dengan aktifitas yang dilaksanakan dalam Program Keamanan Perbatasan di bidang pendidikan dan pelatihan sepanjang 2004, maka tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memulai pengerjaan buku saku

bagi petugas polisi perbatasan, yang menawarkan langkah praktis dan sebuah pendekatan komprehensif terhadap proses pembelajaran penjaga perbatasan. Pertemuan ini mengumpulkan para ahli dari Bulgaria, Estonia, Finlandia, Hongaria, dan Slovenia yang bekerja di atau berhubungan dengan aspek pendidikan dan pelatihan penjaga perbatasan di negaranya masing-masing dan mampu berkontribusi serta secara kualitatif mengevaluasi nilai dari publikasi yang direncanakan, berjudul *Mengembangkan Sebuah Sistem Pendidikan dan Pelatihan Penjaga Perbatasan/Polisi Perbatasan*.

Pertemuan ini kemudian didominasi oleh perancangan isi dari buku tersebut yang disepakati sebelumnya dalam pertemuan pendidikan dan pelatihan di bulan November 2004, tetapi kemudian beberapa perubahan dilakukan. Buku saku ini akan ditujukan bagi anggota kelompok kerja, kolega mereka, dan para petugas yang bertanggung jawab bagi pengembangan dan implementasi sistem pendidikan dan pelatihan dalam badan penjaga perbatasan di negara mereka masing-masing.

Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan II, 31 Maret-2 April 2005, Sofia, Bulgaria. Selama tahun 2005, pertemuan para ahli dalam bidang pendidikan dan pelatihan didedikasikan untuk kurikulum pengawasan dan pemeriksaan perbatasan. Tujuan utama dari acara pertama di tahun 2005 ini adalah untuk mengklarifikasi pengetahuan, keahlian, dan sikap apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas penjagaan perbatasan yang spesifik, bagaimana mengevaluasi kebutuhan pelatihan, dan bagaimana menentukan kompetensi yang dibutuhkan-misalnya, kemampuan menggunakan pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai untuk melaksanakan tugas yang merefleksikan ruang lingkup praktek profesional. Selama pertemuan ini, para ahli mengelaborasi kurikulum yang dibutuhkan untuk pengajaran pengontrol paspor. Setiap negara mempersiapkan sebuah presentasi detil mengenai subtopik khusus dalam kurikulum pelatihan mereka bagi polisi perbatasan mereka seperti pengenalan, dokumen perjalanan, melakukan pemeriksaan perbatasan, menolak pelintas, bernegosiasi dengan pencari suaka, dsb. Presentasi ini meliputi semua aspek dari topik yang disepakati yang telah dimasukkan kedalam program pelatihan nasional dari setiap badan perbatasan negara.

Pertemuan Ahli Mengenai Pendidikan dan Pelatihan, 29-31 Mei 2005, Vienna, Austria. Tujuan dari pertemuan dewan penasehat internasional (IAB) ini adalah untuk mendiskusikan kelanjutan dari peluncuran buku saku bagi petugas polisi perbatasan, menawarkan sebuah petunjuk praktis dan pendekatan komprehensif terhadap proses pembelajaran penjaga perbatasan. Selama pertemuan ini, IAB berkonsentrasi pada topik-topik berikut ini: pendidikan akademik dan kejuruan, proses pendidikan, kebutuhan pelatihan, dan kurikulum pelatihan kepemimpinan. Tujuan dari pertemuan dewan penasihat adalah untuk mengulas dan mengevaluasi kontribusi yang diterima bagi buku saku *Mengembangkan Sebuah Sistem Pendidikan dan Pelatihan Penjaga Perbatasan/Polisi Perbatasan*. Para ahli pendidikan dan pelatihan dari Bulgaria, Estonia, Finlandia, Jerman, Hongaria, dan Slovenia dilibatkan dalam evaluasi beragam topik yang dimasukkan dalam rancangan buku tersebut.

Pertemuan Ahli Mengenai Pendidikan dan Pelatihan, 28-30 Juli 2005, Frankfurt, Jerman. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengulas dan mengevaluasi secara lanjut kontribusi yang ditermima bagi bukusaku *Mengembangkan Sebuah Sistem Pendidikan dan Pelatihan Penjaga Perbatasan/Polisi Perbatasan*. Selama pertemuan, para ahli berfokus pada topik-topik seperti: prinsip penuntun bagi pengembangan sistem pendidikan polisi perbatasan/penjaga perbatasan; sistem kepemimpinan kooperatif; contoh-contoh pelaksanaan yang baik; penilaian dan evaluasi; serta kontrol kualitas. Para ahli dari Bulgaria, Estonia, Jerman, Hongaria, Finlandia, dan Slovenia juga mengulas, memperbaiki, dan menyempurnakan artikel-artikel yang ada.

Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan IV, 2-5 November 2005, Montenegro. Acara ini diorganisir oleh Polisi Perbatasan Montenegro, pertemuan ini membicarakan kurikulum mengenai pengawasan perbatasan dan menimbang prinsip-prinsip teoritis dari pendidikan usia dewasa, sementara itu Montenegro menjelaskan pencapaian mereka dalam pendidikan dan pelatihan petugas polisi perbatasan dan jalur ke arah pengembangan dimasa mendatang. Agenda acara ini juga memasukkan sebuah kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Danilovgrad. Kunjungan ini ditujukan untuk meningkatkan kepedulian atas kemajuan yang telah dibuat oleh Polisi Perbatasan Montenegro dalam bidang pendidikan dan pelatihan petugas polisi perbatasannya.

Sebagai bagian dari program, para delegasi yang ikut serta memberikan presentasi detil mengenai subtopik pra-rancangan terkait pengawasan perbatasan dan mendiskusikan bagaimana pengajaran teoritis direfleksikan dalam praktek di individu-individu badan perbatasan mereka. Setiap negara peserta memilih subtopik yang dibahas selama pertemuan. Diantaranya:

- Metode pengawasan
- Perbedaan antar wilayah pengawasan
- Kegiatan patroli
- Tindakan yang dilakukan ketika terjadi insiden di perbatasan
- Sistem perencanaan
- Analisis resiko pada tingkatan pos perbatasan

Pertemuan ini ditujukan untuk para ahli pendidikan dan pelatihan dengan pengalaman di bidang keamanan perbatasan, termasuk juga perwakilan dari akademi kepolisian dan markas besar kepolisian. Tahun berikutnya akan didedikasikan pada isu mengenai pelatihan permanen/tetap dalam badan perbatasan negara, desain program pelatihan, dan pembelajaran seumur hidup.

Pertemuan Ahli Mengenai Pendidikan dan Pelatihan, 15-18 Desember 2005, Frankfurt, Jerman. Pertemuan ini merupakan seri pertemuan di tahun 2005, dan ditujukan untuk membahas dan mengevaluasi kontribusi bagi publikasi yang telah disebutkan diatas. Konsep dari buku saku yang direncanakan juga dibahas, dengan tujuan menyediakan gambaran komprehensif mengenai sistem pendidikan dan pelatihan di negara-negara donor. Mulai dari laporan negara mengenai sejarah dan pengalaman dalam pengembangan polisi perbatasan mereka, hingga artikel-artikel teoritis yang dibuat seuniversal mungkin, buku ini akan melihat pada isu-isu spesifik, seperti nilai-nilai dalam pendidikan dan

pelatihan polisi, strategi pembelajaran seumur hidup, manajemen kualitas dari pelatihan polisi perbatasan, kompetensi dasar, analisis kebutuhan, dsb. Mereka yang terlibat dalam publikasi ini diantaranya para ahli pendidikan dan pelatihan dari Bulgaria, Estonia, Finlandia, Jerman, Hongaria, dan Slovenia.

Untuk tahun 2006, direncanakan akan diadakan dua pertemuan untuk mengevaluasi apa yang harus diajarkan kepada polisi perbatasan dalam melaksanakan tugasnya. Pertemuan kelompok kerja pertama akan berfokus pada kurikulum pemeriksaan perbatasan dan harmonisasi kurikulum, baik itu untuk kursus pelatihan dasar dan bagi petugas yang telah bertugas dalam patroli perbatasan. Kelompok kerja yang kedua akan berfokus pada kurikulum pengawasan perbatasan. Semua negara dilibatkan untuk menyatakan defisiensi dalam kompetensi pengajar-pengajar mereka untuk melakukan sebuah persyaratan pelatihan yang baru. Pertemuan di tahun 2006 juga akan melihat hal ini sebagai titik awal pembahasan. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan program pelatihan bersama dan mempersiapkan pengajar, pelatih, atau instruktur dalam melaksanakan tugasnya. Delegasi para peserta dalam pertemuan ini adalah 1 orang dalam posisi manajerial yang bertanggung jawab bagi pelatihan permanen dalam organisasi penjaga perbatasan, dan 2 atau 3 orang yang ahli dalam bidang penjagaan perbatasan, satu diantaranya harus bertugas sebagai pengajar atau pelatih.

Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan V, 15-18 Maret 2006, Macedonia. Diselenggarakan oleh Kepolisian Macedonia, kelompok kerja ini bertujuan untuk mempersiapkan dasar pengembangan kurikulum program pendidikan dan pelatihan bersama yang komprehensif mengenai pemeriksaan, kontrol, dan pengawasan perbatasan. Apabila program ini telah didesain dan disepakati, maka akan menjadi penyesuaian bagi semua negara dalam konteks mengharmonisasikan pelatihan penjaga perbatasan, menjamin kapabilitas untuk tindakan bersama, mengelola kerjasama regional, dan meningkatkan pemberantasan kejahatan lintas-batas.

Pada hari pertama pertemuan ini, para delegasi memberikan presentasi mengenai organisasi pelatihan penjaga perbatasan mereka-misalnya, bagaimana mereka menentukan kebutuhan, siapa yang mengembangkan program tersebut, bagaimana mereka mengelola acara-acara pelatihan, bagaimana mereka mengevaluasi program, dan permasalahan yang mereka hadapi. Presentasi ini kemudian ditambah dengan presentasi oleh para ahli dari Akademi Kepolisian Slovenia, yang berbicara mengenai desain program; presentasi dari Akademi Penjaga Perbatasan Finlandia mengenai perencanaan dan pengawasan administratif serta pelatihan pemeriksaan dan pengawasan perbatasan; dan presentasi dari Estonia mengenai mengelola dan memimpin pendidikan dan pelatihan.

Selama hari kedua, para delegasi dipisahkan menjadi tiga tim. Dua tim (tim 'program') ditugaskan dalam desain program pelatihan/kurikulum bersama bagi pemeriksaan dan pengawasan perbatasan, dan satu tim (yang menjadi tim 'manajer') ditugaskan merencanakan negosiasi dan implementasi program pelatihan dalam badan perbatasan. Pada hari terakhir, ketiga tim tersebut

mempresentasikan hasil kerjanya, dan secara khusus, dua tim program ditugaskan menghasilkan sebuah kerangka desain dari:

- Deskripsi pekerjaan-misalnya, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh penjaga perbatasan: memeriksa dan mengawasi perbatasan
- Apa yang diketahui penjaga perbatasan mengenai aspek diatas (sebagai hasil dari pelatihan dasar/pengalaman selama bekerja)
- Apa yang harus diketahui penjaga perbatasan dimasa mendatang.

Para peserta pertemuan ini adalah para delegasi dari negara-negara Balkan Barat (kecuali Kroasia), yang terdiri dari para manajer, instruktur dari akademi kepolisian, dan petugas operator di lapangan. Para ahli datang dari Akademi Kepolisian Slovenia, Akademi Penjaga Perbatasan Finlandia, dan Universitas Tallinn di Estonia.

Pertemuan kelompok kerja keenam dijadwalkan pada 12-15 November di Serbia. Sementara itu, sebuah pertemuan tambahan bagi anggota dua tim program direncanakan 27-30 Agustus di Kroasia untuk persiapan lanjutan dari program bersama.

Pandangan Umum Terhadap Isu Perbatasan Maritim dan Mengintegrasikan Penjaga Pantai kedalam Sistem Keamanan Perbatasan: Kasus Penjaga Perbatasan Finlandia

Lokakarya pertama, 25-29 Agustus 2004 di Helsinki.

Proyek khusus ini ditujukan untuk menyediakan materi-materi latar belakang yang berguna dan pengalaman para anggota Uni Eropa dalam membantu negara-negara Balkan Barat membentuk sistem penjagaan pantai mereka. Latar belakangnya adalah kebutuhan Uni Eropa akan manajemen perbatasan pantai. Hal ini termasuk pengawasan perairan dan pemeriksaan perbatasan di pelabuhan. Selama proyek ini, para peserta diperkenalkan dengan kondisi organisasional, operasional dan teknis di Finlandia, Spanyol, dan Yunani.

Meskipun prinsip utama untuk kontrol dan pengawasan perbatasan darat dan air secara esensial adalah sama, perhatian lebih harus ditujukan pada hubungan antara badan penjaga pantai dan badan keamanan perbatasan. Dalam konteks manajemen perbatasan Uni Eropa, adalah sesuatu yang esensial bahwa fungsi penjaga pantai harus secara penuh berhubungan dengan polisi perbatasan. Beberapa negara telah memberikan sebuah contoh dimana badan perbatasan mengelola penjaga pantai, dan melakukan sejumlah tugas-tugas maritim lainnya.

Tujuan dari tahapan ketiga adalah untuk membangun pemahaman bersama mengenai bagaimana membentuk fungsi penjaga pantai di negara-negara Balkan Barat; melakukan analisis ancaman bersama di Laut Adriatik; mengembangkan rancangan nasional mengenai konsep, struktur, dan sumber daya penjaga pantai nasional; dan pada akhirnya mengembangkan sebuah model kerjasama kontrol Perbatasan Laut Adriatik yang didasarkan pada pengalaman di wilayah Laut Baltik. Langkah awalnya adalah kebutuhan Uni

Eropa akan manajemen perbatasan maritim, yang meliputi pengawasan perbatasan perairan dan pemeriksaan perbatasan di pelabuhan. Para peserta diperkenalkan dengan kondisi organisasional, operasional dan teknis di Finlandia, Spanyol, dan Yunani/Italia. Bentuk dari tahapan ini akan dibicarakan dibawah ini.

Tujuan dari 'proyek perbatasan laut' adalah untuk membangun sebuah pemahaman bersama mengenai bagaimana cara menggunakan praktek-praktek penjagaan pantai terbaik Uni Eropa di negara-negara Balkan Barat. Model bagi analisis ancaman bersama di Laut Adriatik; mengembangkan rancangan nasional mengenai konsep, struktur, dan sumber daya penjaga pantai nasional; dan pada akhirnya mengembangkan sebuah model kerjasama kontrol Perbatasan Laut Adriatik yang didasarkan pada pengalaman di wilayah Laut Baltik akan menjadi agenda dari pertemuan ini. Latar belakang dari 'proyek perbatasan laut' terkait dengan kebutuhan Uni Eropa akan manajemen perbatasan maritim dan pelaksanaan dari standar-standar itu pada perbatasan maritim, termasuk pengawasan perbatasan laut dan pemeriksaan perbatasan di pelabuhan.

Pertemuan di Helsinki bertujuan memberikan pandangan umum mengenai isu-isu perbatasan maritim dengan menekankan pada kasus wilayah Laut Baltik. Manajemen perbatasan adalah salah satu fungsi kunci dalam keamanan sipil bagi negara manapun di lautan, tetapi ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya. Akanlah berguna apabila menjadikan sebuah tanggung jawab otoritas untuk sejumlah fungsi berbeda. Pembagian yang memungkinkan antar otoritas dievaluasi, dengan menggunakan Finlandia sebagai sebuah contoh organisasi perbatasan yang dengan sukses melakukan beberapa fungsi penjaga pantai. Sebagai tambahan, studi kasus diberikan oleh Swedia dan Estonia untuk menggambarkan aspek berbeda dari penjaga pantai yang 'independen' dan 'terintegrasi'.

Pencegahan imigrasi ilegal dan penyelundupan orang dapat dikelola melalui kerjasama dengan negara lain yang berbatasan pada daerah pesisir. Kawasan Laut Baltik adalah salah satu contoh dimana kerjasama dalam penjagaan pantai telah membantu mempersempit ruang gerak kejahatan maritim; para peserta kemudian mampu mengevaluasi pengaturan dari contoh kerjasama kontrol perbatasan internasional ini. Sebagai tambahan, pengalaman besar yang diperoleh dari pengamanan di perbatasan sungai di Sungai Oder juga dipresentasikan oleh perwakilan dari Jerman, dan juga presentasi dari Rumania dan Bulgaria mengenai strategi yang dipersiapkan dalam perspektif Uni Eropa untuk mencegah pelintasan perbatasan ilegal dalam kasus Sungai Danube. Lokakarya ini dilaksanakan di Finlandia untuk menekankan pada keahlian Penjaga Perbatasan Finlandia dalam wilayahnya dan memaksimalkan sinergi yang muncul dari pembahasan bagaimana operasi perbatasan darat dan air dapat diintegrasikan kedalam satu organisasi perbatasan efektif. Sejumlah pertemuan kelompok kerja kemudian diikuti dalam lokakarya ini, yang dijelaskan berikut ini.

Kelompok Kerja Pertama Pengawasan Perbatasan laut, 24-28 Oktober 2004, Malaga, Spanyol. Spanyol telah membentuk sebuah pusat ad hoc Uni

Eropa untuk pengawasan perbatasan maritim, dengan sebuah pandangan untuk menyediakan wawasan penting dalam kerjasama internasional pada tingkat operasional. Selain itu, Spanyol bertanggung jawab untuk mengelaborasi sebuah strategi bersama Uni Eropa terkait penjagaan perbatasan laut. Bagi negara-negara Balkan Barat, hal ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk diamati, bagaimana Uni Eropa berusaha mencapai kemajuan dalam isu tersebut.

Atas kerjasama DCAF dan *Guardia Civil* Spanyol, acara ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang telah dilakukan pada lokakarya awal mengenai pengawasan perbatasan laut yang dilaksanakan di Finlandia pada bulan Agustus 2004. Pertemuan di Malaga adalah keuntungan bagi semua pihak yang mencoba mengeksplorasi kemungkinan perbedaan yang muncul terkait pengawasan perbatasan laut, dan peran serta posisi penjaga pantai dalam keamanan perbatasan. *Guardia Civil* Spanyol mempresentasikan sistem mereka, dan para peserta diharapkan mampu melakukan perbandingan dengan sistem yang dipresentasikan kepada mereka di Finlandia, terutama yang dipresentasikan oleh Penjaga Perbatasan Finlandia, Penjaga Perbatasan Estonia, dan Penjaga Pantai Swedia.

Delegasi yang hadir membentuk tim bersama, dan melibatkan semua aktor-aktor yang relevan dalam bidang ini, termasuk perwakilan polisi perbatasan, penjaga pantai, dan marinir, tergantung pada dimana tanggung jawab pengawasan perbatasan laut diletakkan di setiap negara. Topik utama dari lokakarya melibatkan presentasi dari sistem kontrol perbatasan laut Spanyol. Hal ini meliputi, secara terkait, pembahasan mengenai manajemen imigrasi ilegal, SIVE (Sistem Pengawasan Eksternal terintegrasi milik *Guardia Civil* Spanyol yang diterapkan sepanjang kawasan pantai Spanyol), dan pusat koordinasi perbatasan maritim Uni Eropa. Studi kunjungan juga dilakukan ke pelabuhan Malaga, termasuk juga instalasi manajemen imigrasi ilegal di Ceuta.

Kelompok Kerja Penjaga Perbatasan Kedua, 17-20 April 2005, Athena dan Corfu, Yunani. Acara ini adalah kelanjutan dari pekerjaan yang telah diselesaikan di tahun 2004 selama acara-acara yang telah disebutkan sebelumnya. Dilaksanakan atas kerjasama DCAF dan Penjaga Pantai Yunani, pertemuan ini diawali dengan presentasi dari semua delegasi mengenai perkembangan yang telah dilakukan dalam bidang pengawasan perbatasan laut selama 6 bulan terakhir dan rencana mereka di masa mendatang. Penjaga Pantai Swedia memberikan presentasi mengenai Strategi Uni Eropa untuk Perbatasan Laut, dan Penjaga Pantai Yunani mempresentasikan sistem kontrol perbatasan laut mereka, dengan menandai cara mereka mengimplementasikan strategi Uni Eropa. Para peserta kemudian diharapkan mampu melakukan perbandingan antara beragam sistem yang dipresentasikan pada mereka di Finlandia dan Spanyol serta sistem pengawasan perbatasan laut Yunani, termasuk juga membahas peran dan posisi penjaga perbatasan dalam keamanan perbatasan.

Selama pertemuan ini, para peserta mendapatkan kesempatan untuk mengamati tugas-tugas yang telah dilakukan Markas Besar Penjaga Perbatasan Yunani dan Pusat Perbatasan Laut Timur Uni Eropa. Hal ini termasuk juga

sebuah kunjungan ke pusat operasional Penjaga Pantai Yunani, Pusat Komando Penyelamatan Bersama, dan presentasi sistem pengawasan VTMS (Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Kapal). Para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk berada di laut melalui kapal pengawas pantai untuk mengamati secara langsung beragam peralatan operasional yang tersedia bagi Penjaga Pantai Yunani untuk melaksanakan tugas mereka, dan melihat secara langsung model Yunani dalam melakukan pengawasan perbatasan laut mereka.

Pada hari terakhir lokakarya, para peserta diajak mengarungi lautan dengan kapal patroli kecil dan ditunjukkan proses patroli perbatasan laut di perbatasan Yunani-Albania. Kemudian ditutup dengan sebuah kunjungan ke Otoritas Pelabuhan, dimana mereka diberikan sebuah demonstrasi pengawasan dalam Sistem Lalu Lintas Kapal (VTS), sebuah tingkatan bawah dari sistem pengawasan VTMS. Pertemuan ini sendiri secara keseluruhan ditutup dengan kesepakatan mengenai program bagi pertemuan kelompok kerja ketiga tentang pengawasan perbatasan laut, yang dilaksanakan di Kroasia, dengan detail acaranya dibawah ini.

Kelompok Kerja Ketiga Penjaga Pantai, 26-29 Oktober 2005, Trogir, Kroasia. Dilaksanakan atas kerjasama DCAF, OSCE, dan Kepolisian Kroasia, kebanyakan materi dari pertemuan ini didedikasikan untuk rancangan pertama strategi dan rencana aksi bagi pengawasan perbatasan laut yang telah dibentuk oleh setiap negara peserta. Hari pertama pertemuan dimulai dengan membahas kebutuhan dan permintaan Uni Eropa bagi strategi perbatasan maritim, diikuti oleh presentasi dari Finlandia, Estonia, Swedia, Spanyol, Yunani, dan Siprus, seperti yang ditunjukkan dalam acuan Uni Eropa telah diimplementasikan secara nyata di Eropa Utara dan Selatan.

Aspek praktikal dari perancangan sebuah strategi perbatasan maritim terkait dengan kebutuhan dan permintaan Uni Eropa kemudian dipresentasikan. Hal ini kemudian diikuti oleh presentasi tambahan yang membahas fokus dan perhatian yang harus diambil ketika menyusun sebuah strategi.

Pada hari kedua pertemuan, Kroasia mempresentasikan pengalaman mereka dalam bidang pengawasan perbatasan laut, yang dilakukan oleh Kepolisian Maritim Kroasia; Kementerian Kelautan, Turisme, Transport, dan Pembangunan; serta Kementerian Pertahanan (marinir). Acara ini kemudian diikuti dengan sebuah kunjungan ke pelabuhan di Split dan ke pusat operasional laut untuk melihat lalu lintas laut dan sistem radar GEMS yang sedang beroperasi.

Para peserta kemudian dipisahkan menjadi beberapa kelompok kerja untuk membahas secara detail mengenai strategi yang dibutuhkan untuk mengontrol perbatasan laut, danau, dan sungai secara bersamaan. Setiap kelompok kerja kemudian memberikan presentasi hasil diskusi dan temuan mereka, dan setiap delegasi mendapatkan catatan-catatan komprehensif yang dapat digunakan oleh mereka untuk mengembangkan secara lebih lanjut rancangan strategi perbatasan laut mereka.

Pertemuan ini ditutup dengan menyepakati bahwa selama 2 bulan berikutnya, semua peserta akan mempersiapkan rancangan strategi pengawasan perbatasan laut, yang dibuat dalam bentuk berdasarkan diskusi

dan pembahasan selama pertemuan kelompok kerja. Hal ini akan memberikan mereka kesempatan untuk menciptakan sebuah dokumen yang memasukkan ide, harapan, dan pilihan mereka bagi organisasi yang ingin mereka bentuk di negaranya yang bertanggung jawab dalam menjaga perbatasan di laut.

Di tahun 2006, kelompok ini memiliki rencana untuk melaksanakan sebuah acara lagi, untuk mengelaborasi rancangan strategi final yang dipersiapkan bagi negaranya dan pembahasan mengenai bagaimana strategi ini dapat diimplementasikan. Delegasi yang terlibat dalam pertemuan ini merupakan para aktor yang relevan dalam bidang pengawasan perbatasan laut, termasuk perwakilan dari polisi perbatasan, penjaga perbatasan, dan marinir (tergantung dimana tanggung jawab pengawasan perbatasan laut diletakkan di setiap negara).

Kelompok Kerja Penjaga Pantai Keempat, 25-28 Oktober 2006, Albania.

Tujuan utama dari kelompok kerja ini adalah menciptakan sebuah strategi bagi sistem keamanan perbatasan bersama, termasuk fungsi SAR (*Search and Rescue*/Pencarian dan Penyelamatan), dimana mekanisme pengawasan perbatasan darat dan laut terintegrasi dibawah sebuah garis kontrol dan komando yang jelas. Strategi tertulis sendiri akan dipresentasikan pada Konferensi Evaluasi Tahunan Ketiga di tahun 2006.

Analisis Resiko dan Investigasi & Intelijen Kriminal

Lokakarya pertama, 30 November-4 Desember 2004, Frankfurt, Jerman.

Lebih dari sekedar membahas mengenai kontrol keluar-masuk orang asing dan warga negara, keamanan perbatasan adalah sebuah konsep yang memasukkan pencegahan akses ilegal, memberantas perdagangan orang dan penyelundupan barang, serta berkontribusi dalam perlawanan terhadap terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. Semua aktifitas ini membutuhkan tiga elemen penting-analisis resiko, intelijen kriminal, dan fungsi investigasi-yang secara erat berhubungan dengan tugas-tugas penjaga perbatasan lainnya.

Penjagaan perbatasan yang modern tidak dapat dilaksanakan tanpa ketiga elemen ini. Lokakarya ini ditujukan untuk membahas pentingnya analisis resiko dalam keamanan perbatasan; termasuk didalamnya presentasi dari sejumlah model analisis resiko yang berbeda, dan membiasakan para peserta dengan praktek-praktek yang baik. Presentasi ini juga menggambarkan bagaimana model-model tersebut diorganisir oleh badan berbeda, dan memfokuskan secara khusus pada model yang digunakan Penjaga Perbatasan Finlandia. Intelijen dan investigasi kriminal juga termasuk dalam presentasi yang dilakukan oleh badan keamanan perbatasan lainnya yang telah berhasil mengintegrasikan kapasitas intelijen dan investigasinya kedalam konsep operasional mereka. Negara peserta juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pendekatan yang mereka gunakan saat ini atau dimasa mendatang.

Selama lokakarya, penekanan utama diberikan pada model analisis resiko komprehensif yang dikembangkan oleh Penjaga Perbatasan Finlandia. Model

ini dibentuk atas dua asumsi: bahwa kontribusi efektif terhadap pencegahan kejahatan membutuhkan aktifitas operasional berbasis intelijen; dan bahwa informasi yang dikumpulkan dalam aktifitas manajemen perbatasan harus dimanfaatkan secara sistematis bagi tujuan analisis dan intelije. Pendekatan berbasis intelijen mengadung pengertian bahwa pekerjaan-lapangan praktikal didasarkan pada pendataan konstan, dan bahwa perencanaan didukung oleh analisis statistikal. Pendataan berarti bahwa setiap penjaga perbatasan mampu memberikan perhatian khusus terhadap subjek yang mewakili ancaman besar dengan metode lapangan yang dapat diterapkan dan telah dikembangkan hingga sekarang.

Dalam bidang perencanaan, perlu diingat bahwa jurang perbedaan dalam sistem dapat mengarah pada ketidakaturan. Dalam konteks ini, manajemen perbatasan hanya dapat dikatakan kuat pada hubungan terlemahnya. Sistem manajemen perbatasan harus dianalisa untuk menentukan dampaknya pada kejahatan di wilayah berbeda, dan menemukan alasan mengapa timbul jurang perbedaan dalam sistem tersebut. Untuk tujuan ini, metode statistikal dan pragmatis yang sederhana telah dikembangkan, bagian dari evaluasi resiko operasi. Dasar bagi usaha pendataan dan evaluasi resiko adalah sebuah pemahaman valid akan ancaman yang muncul. Untuk mencapai hal ini, sebuah fungsi intelijen harus diorganisir untuk mendukung analisis resiko dalam aktifitas manajemen perbatasan.

Sebagai tambahan untuk analisis resiko, ruang lingkup dari misi penjaga perbatasan membutuhkan organisasi yang juga mengembangkan sebuah mekanisme dalam melaksanakan aktifitas intelijen dan investigasi kriminal. Hal ini dapat dilakukan melalui bentuk koordinasi dengan badan kepolisian dan aktor lainnya diluar organisasi perbatasan negara, atau kemampuan ini dapat diintegrasikan kedalam aktifitas penjaga perbatasan itu sendiri. Pilihan yang dibuat atas kedua hal tersebut akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk posisi keamanan perbatasan dalam kerangka kerja legal nasional yang ada dan konsep organisasi dimana otoritas penjaga perbatasan dibentuk.

Lokakarya ini juga memasukkan presentasi dari *Bundesgrenzschutz* Jerman (BGS), Penjaga Perbatasan Finlandia, dan Penjaga Perbatasan Estonia, termasuk juga perwakilan dari badan keamanan perbatasan lainnya yang telah berhasil mengintegrasikan kapabilitas intelijen dan investigasi kriminal kedalam konsep operasional mereka dalam berbagai cara. Negara peserta juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pendekatan yang mereka gunakan atau rencanakan dalam investigasi kriminal.

Para peserta dalam lokakarya ini adalah para pimpinan polisi perbatasan dari negara-negara peserta, dan mitra kerja terdekat mereka yang berperan dalam tingkat pengambilan keputusan setara direktur dan para spesialis tingkat atas dari organisasi dalam bidang investigasi dan intelijen kriminal, termasuk juga evaluasi/penilaian resiko. Selama tahun 2005-2006, tiga kelompok kerja telah dibentuk untuk membahas ketiga elemen yang terkait ini. Tujuan dari kelompok kerja ini adalah untuk membantu negara-negara di wilayah Eropa dalam mengembangkan mekanisme dalam sistem keamanan perbatasan mereka

untuk melaksanakan aktifitas investigasi dan intelijen kriminal serta kapasitas intelijen kedalam konsep operasional mereka. Sebagai tambahan, kelompok ini berusaha untuk mengembangkan sebuah pemahaman bersama akan peran dari tugas penjaga perbatasan dalam sistem investigasi kriminal secara nasional, dan memberikan acuan operasional mengenai organisasi investigasi dalam penjaga perbatasan, dan mengembangkan secara lebih lanjut metode analisis resiko strategi dan operasional yang digunakan dalam jenis-jenis perbatasan berbeda.

Para ahli yang dilibatkan memiliki latar belakang investigasi, intelijen, dan penjaga perbatasan, dan akan membahas secara detil koordinasi isu dalam pembagian informasi intelijen dan investigasi, termasuk juga tugas nyatanya dan kompetensi penting yang dibutuhkan dalam melaksanakan analisis resiko yang berhasil. Untuk kelompok analisis resiko, para ahli akan mencoba mengharmonisasikan metode evaluasi/penilaian resiko berbeda yang digunakan saat ini. Kelompok kerja *Investigasi* akan membahas identifikasi dan analisis sistem investigasi kriminal di Eropa dan peran polisi perbatasan. Mereka akan mencoba mengembangkan konsepsi bersama mengenai peran polisi perbatasan dalam sistem investigasi kriminal secara nasional, termasuk juga mempersiapkan usulan untuk legislasi nasional. Struktur dan isi dari acuan operasional juga akan disiapkan oleh kelompok ini.

Para peserta dalam kelompok kerja Investigasi adalah para ahli hukum dengan pendidikan hukum kriminal, manajer nasional dan/atau regional atau pelatih dengan pengalaman dalam bidang proses kriminal, dan petugas yang akan menduduki posisi manajemen dalam sebuah unit polisi perbatasan yang berperan dalam proses kriminal. Kelompok kerja *Analisis Resiko* akan dibedakan kedalam kelompok-kelompok yang memfokuskan pada analisis strategis dan operasional serta analisis resiko taktis. Terkait analisis strategis dan operasional, kelompok kerja akan diberikan sebuah pengantar menyeluruh mengenai metode analisis strategis dan operasional melalui perkuliahan dan studi kasus. Metode analisis operasional juga akan dikembangkan secara lebih lanjut, karena mereka terkait dengan jenis perbatasan yang berbeda-beda. Sebisa mungkin, material yang ada dari negara-negara peserta akan dimanfaatkan dalam latihan materi. Para peserta dari kelompok kerja ini termasuk pada manajer nasional dan/atau regional serta pelatih dengan pengalaman dan pengetahuan akan aktifitas kontrol dan manajemen perbatasan.

Kelompok kerja analisis resiko taktis akan memperkenalkan beragam metode analisis resiko taktis (dan terkait intelijen) kepada peserta. Para peserta akan diminta untuk menyediakan data asli mengenai insiden terbaru, dan jika mungkin, untuk membantu menggambarkan profil resiko bersama, indikator-indikator resiko, serta model operasi terbaru. Para peserta dalam kelompok kerja ini adalah para praktisi intelijen berorientasi-komunikasi, atau para ahli yang berpengalaman akan kontrol perbatasan dan pemeriksaan dokumen. Berikut ini pertemuan kelompok kerja yang telah dilaksanakan.

Kelompok Kerja Analisis Resiko, Investigasi dan Intelijen Kriminal I, 11-13 Mei 2005, Budva, Montenegro. DCAF mengorganisir kelompok kerja ini

sebagai kelanjutan dari lokakarya yang dilaksanakan di Frankfurt pada bulan Desember 2004. Tujuannya adalah untuk membentuk kelompok kerja yang berurusan dengan ketiga elemen penting yang saling terkait in selama tahun 2005 dan 2006 dengan tujuan membantu badan perbatasan di wilayah Eropa untuk:

- Mengembangkan mekanisme bagi polisi perbatasan untuk melaksanakan aktifitas investigasi dan intelijen kriminal
- Integrasi kapasitas investigasi dan intelijen kriminal kedalam konsep operasional polisi perbatasan
- Mengembangkan sebuah acuan operasional mengenai organisasi intelijen dan investigasi dalam polisi perbatasan.
- Mengembangkan secara lebih lanjut, metode analisis resiko taktis, strategis dan operasional terkait dengan jenis perbatasan yang berbeda.

Presentasi dilakukan oleh negara-negara peserta mengenai metode analisis resiko taktis, strategi dan operasional yang digunakan dalam badan kepolisian, atau dalam kerjasama erat dengan polisi negara dan badan intelijen negara. Selama presentasi ini, para peserta memperoleh sebuah pandangan yang jelas mengenai situasi aktual di negara-negara lain di wilayah Eropa terkait topik ini.

Setelah presentasi dari beragam ahli Uni Eropa, tim ini kemudian bekerja dalam 4 kelompok kerja dengan tujuan menemukan cara 'ideal' dalam menjalankan fungsi investigasi dan intelijen termasuk juga untuk memperkenalkan sebuah model analisis resiko kedalam praktek harian dari badan polisi perbatasan di Eropa. Tim kerja ini difasilitasi oleh para ahli dari Jerman, Swiss, Estonia, dan Finlandia. Selama pertemuan kelompok kerja, para ahli memiliki kesempatan untuk mendiskusikan secara detil koordinasi isu yang tercakup dalam pembagian informasi investigasi dan intelijen, termasuk juga tugas yang jelas serta kompetensi penting yang dibutuhkan dalam melaksanakan elemen-elemen diatas dan berhasil. Para peserta dalam lokakarya ini adalah para pemimpin otoritas polisi perbatasan dan para ahli dalam bidang investigasi dan intelijen kriminal serta evaluasi resiko.

Kelompok Kerja Analisis Resiko, Investigasi dan Intelijen Kriminal II, 1-4 Desember 2005, Budva, Montenegro. Pertemuan ini dilaksanakan untuk melanjutkan pekerjaan dari pertemuan kelompok kerja sebelumnya pada bulan Mei di Frankfurt. Kerangka kerja bagi kelompok kerja ini adalah sebagai berikut. Kelompok kerja ini memulai aktifitasnya dengan pemaparan singkat dari setiap delegasi mengenai:

- Bagaimana tanggung jawab terkait pengumpulan data intelijen, investigasi, dan analisis resiko dibedakan antar badan yang secara legal dilibatkan dalam urusan seperti ini.
- Bagaimana pekerjaan ini dilaksanakan di lapangan
- Bagaimana kerjasama antar beragam badan yang terlibat diorganisir.

Acara ini kemudian diikuti oleh sebuah diskusi mengenai presentasi deskripsi pekerjaan, tugas, dan implementasi proses dan prosedur yang dibutuhkan-

khususnya, pengumpulan informasi, investigasi, dan analisis resiko pada tingkatan markas nasional dan regional.

Selama pertemuan kelompok kerja, para ahli dari Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, dan Swiss membahas aspek administratif yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sebuah model analisis resiko, dan melihat kedalam praktikalitas melaksanakan analisis resiko operasional. Tahapan dan elemen berbeda dari proses investigasi dalam kasus imigrasi ilegal didiskusikan, dan sebuah studi kasus praktikal meliputi aspek intelijen dan pengambilan keputusan. Para peserta termasuk para pemimpin badan polisi perbatasan termasuk juga para ahli dengan latar belakang investigasi, intelijen, dan penjaga perbatasan.

Untuk tahun 2006, kelompok kerja ini mempunyai dua rencana kegiatan. Pertemuan kelompok analisis resiko memiliki tujuan membangun kapabilitas negara-negara peserta dalam melaksanakan analisis resiko pada tingkatan strategis di wilayahnya. Pertemuan kelompok kerja intelijen dan investigasi kriminal akan memfokuskan pada pembentukan kapabilitas pengumpulan dan analisis data, menguji siklus intelijen penuh; mengumpulkan, membentuk, menyimpan, dan mendistribusikan informasi ini; menciptakan profil-profil; dan meningkatkan kerjasama antar lembaga. Para peserta dalam pertemuan ini harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Para pimpinan polisi perbatasan negara-negara peserta, dan mitra kerja terdekat mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan-setara direktur dan spesialis tingkat atas dalam bidang intelijen dan investigasi kriminal, serta analisis resiko dalam organisasi.
- Para ahli hukum dengan latar belakang pendidikan hukum, manajer nasional/regional atau pelatih dengan pengalaman dibidang prosesi hukum, atau petugas yang akan mengambil alih posisi manajemen dalam polisis perbatasan dan terlibat dalam prosesi kriminal.
- Manajer nasional dan/atau regional atau pelatih yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam aktifitas dan manajemen kontrol perbatasan operasional.
- Para praktisi intelijen berorientasi-komunikasi, atau para ahli kontrol perbatasan dan pemeriksaan dokumen yang berpengalaman.

Kelompok Kerja Analisis Resiko, Investigasi dan Intelijen Kriminal III, 10-13 May 2006, Slovenia. Selama tahun 2006, kelompok kerja analisis resiko, intelijen dan investigasi kriminal bertujuan untuk membantu negara-negara Balkan Barat untuk mencapai tujuan berikut ini:

- Dalam bidang analisis resiko: mampu melaksanakan analisis resiko pada tingkatan strategis, operasional (termasuk taktis), nasional, dan regional.
- Dalam bidang Intelijen: memiliki kapabilitas dalam pengumpulan dan analisis data; dapat mengimplementasikan siklus intelijen penuh; dan melaksanakan kerjasama operasional antar lembaga dan badan yang bertanggung jawab dalam intelijen

- Dalam bidang Investigasi: membantu pengelolaan kapabilitas profesional untuk investigasi kriminal oleh otoritas polisi perbatasan nasional; dan mengidentifikasi serta menerapkan standar dan prosedur bersama dalam investigasi kejahatan terkait-perbatasan, dengan tujuan agar dapat melaksanakan investigasi bersama dalam kasus yang terjadi di negara berbeda.

Selama pertemuan pertama, kelompok kerja ini membuat sejumlah kesepakatan. Dalam bahasan analisis resiko, para peserta secara aktif mendiskusikan struktur dari sebuah model analisis resiko strategis (SRA) yang saat ini digunakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Model ini melibatkan elemen-elemen berikut ini dalam analisis lingkungan internal dan eksternalnya:

- Situasi operasional dalam konsulat-konsulat (kualitas, perlengkapan, efek dari pemberian visa tambahan); kemungkinan resiko dan ancaman, dan usulan-usulan untuk mengatasinya.
- Situasi di negara-negara tetangga, mencakup situasi keamanan perbatasan; tingkat lalu lintas; perubahan dalam sistem keamanan perbatasan; faktor-faktor sosial; kemungkinan resiko dan ancaman, serta usulan-usulan untuk mengatasinya.
- Situasi keamanan perbatasan di Uni Eropa, mencakup perubahan di perbatasan dan bagaimana mereka memberikan dampak bagi situasi nasional (perluasan), dan kemungkinan resiko dan ancaman serta usulan-usulan untuk mengatasinya.
- Jalur imigrasi ilegal, mencakup kemungkinan resiko dalam sistem nasional sendiri dan usulan-usulan untuk mengatasinya.
- Perbatasan darat (pengawasan dan pemeriksaan perbatasan); perbatasan laut; perbatasan udara; dan kemungkinan resiko dan ancaman beserta usulan-usulan untuk mengatasinya
- Kesimpulan umum dan usulan implementasi mekanisme, perbandingan resiko dan sumber daya yang ada (petugas, perlengkapan, mobilitas, sistem komando, struktur organisasi, kekuatan).

Negara peserta menyepakati untuk menciptakan aturan dan regulasi untuk melaksanakan analisis resiko nasional, yang mana akan mencakup bentuk dari semua laporan yang dibutuhkan yang dimasukkan dalam model mereka. Dokumen tersebut akan dikirimkan kepada DCAF pada 1 November 2006, dan akan dibahas serta dianalisa selama pertemuan kelompok kerja berikutnya, yang akan dilaksanakan 22-25 November 2006 di Macedonia. Sebagai tambahan, pada pertemuan ini, aktifitas akan diarahkan pada pengembangan metodologi analisis resiko operasional.

Dalam bidang intelijen, para peserta akan menerima informasi terlebih dahulu dari petugas pabean mengenai peran intelijen dalam kepabeanan. Pada saat yang bersamaan, signifikansi kerjasama antar lembaga dan badan yang berbeda dikemukakan kembali. Pada pertemuan kelompok kerja hari pertama, para peserta diminta untuk mengidentifikasi faktor utama yang dapat mempengaruhi organisasi mereka dan menyeleksi kemungkinan kesempatan dan ancaman. Kemudian, mereka mencatat kekuatan dan kelemahan

organisasinya, mereka juga diminta menandai sektor kritis dan kunci faktor efisiensi dengan tujuan mengidentifikasi prioritas dan menentukan cara yang harus diambil.

Sebuah model mengenai bagaimana melakukan analisis seperti itu disediakan, dan hasil dari tiga kelompok studi ditampilkan dalam sesi persidangan akbar. Model analisis seperti ini harus dianggap sebagai kontribusi terhadap persiapan laporan-laporan yang disebutkan sebelumnya. Model ini juga menawarkan sebuah alat bagi para peserta untuk menyelesaikan analisis di negara asalnya.

Pada pagi hari di hari kedua digunakan untuk presentasi dari beberapa teknik dan hasil dari analisis kriminal. Poin penting kedua kemudian dikemukakan, terkait dengan struktur dan pelaksanaan pertemuan dimana situasinya ditampilkan berdasarkan analisis intelijen dan keputusan dibuat. Contoh laporan yang menyebarkan informasi terkait dengan keputusan yang dibuat kemudian juga dipresentasikan. Sore harinya, sebuah latihan komprehensif dilaksanakan. Para peserta dibedakan kedalam tiga kelompok yang mewakili dua badan kepolisian di Perancis dan Jerman, dan sebuah badan kepabeamanan di Perancis, yang kemudian diminta menganalisa situasi berbeda, menggabungkan informasi yang diperoleh dari mitra mereka, meminta informasi baru, dan mempersiapkan pertemuan koordinasi serta pengambilan keputusan.

Dalam bidang investigasi, para peserta menyepakati beberapa rekomendasi. Pertama, negara-negara peserta diharuskan menerapkan metode FEMALE dalam investigasi kejahatan penyelundupan manusia. Mereka diminta untuk mengevaluasi metodologi ini dan mengirimkan usulan ke DCAF pada bulan November 2006. Metodologi ini akan kemudian akan dibahas dalam lokakarya selanjutnya, termasuk juga adopsi sebuah metodologi bersama bagi investigasi kasus penyelundupan manusia.

Kelompok Kerja Analisis Resiko, Investigasi dan Intelijen Kriminal IV, 22-25 November 2006, Macedonia. Tujuan utama dari kelompok kerja analisis resiko, intelijen dan investigasi kriminal akan disajikan kepada seluruh peserta dengan pengetahuan akan standar bersama Uni Eropa mengenai evaluasi resiko dengan tujuan menciptakan metodologi evaluasi resiko operasional di setiap negara peserta. Acuan operasional mengenai bagaimana mengatur kapasitas intelijen dan investigasi kriminal, termasuk juga deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan, juga harus dielaborasi.

Tingkat dua: Modul Kursus Jarak Jauh (ADL) bagi Komandan Regional

Sebagai tahapan baru pengembangan, sebuah modul ADL bagi komandan regional, yang bisa dilihat sebagai dasar bagi Akademi Penjaga Perbatasan Maya di masa mendatang, telah dipersiapkan selama tahun 2004-2005 dan diluncurkan pada bulan Februari 2006. Kursus ini ditujukan bagi para komandan regional, dengan tujuan memungkinkan sebuah pembagian informasi diantara negara-negara peserta dan untuk menjamin bahwa praktek bersama yang terbaik dibentuk melalui interaksi. Kursus interaktif yang melibatkan semua komandan regional dari negara-negara yang membentuk Proses Stabilisasi

dan Asosiasi (SAP) juga akan membentuk dasar bagi kerjasama regional di masa depan.

Untuk mempersiapkan isi dari modul ADL, sebuah dewan penasehat internasional kemudian diperluas dengan melibatkan para spesialis dibidang pendidikan dan pelatihan dari setiap negara peserta. Isi dari kurikulum dirancang berdasarkan kolaborasi antar anggota dewan penasehat. Tujuannya adalah untuk menentukan isi dari kurikulum keseluruhan mata kuliah dan modul khusus, menilai relevansi material yang diberikan, melakukan pembaharuan yang penting, dan mempersiapkan sebuah ujian akhir. Sebagai lanjutannya, para spesialis ADL di Zurich Federal Institute of Technology (ETHZ) bertanggung jawab untuk mengubah kurikulum kedalam sebuah modul ADL. Apabila material kurikulum telah diterjemahkan, seminar perkuliahan akan diberikan dalam bentuk bahasa Inggris. Dengan sebuah pandangan untuk menjamin hal itu, pada awal perkuliahan di bulan Februari 2006, semua peserta harus memiliki kemampuan bahasa. Kursus bahasa Inggris kemudian dilaksanakan bagi semua peserta di negara asal mereka selama tahun 2004 oleh otoritas nasional. Setelah seleksi awal kandidat pada akhir tahun 2004, kursus bahasa khusus dikombinasikan dengan modul di negara asal mereka dengan sebuah lingkungan bahasa asal di bulan Februari 2005.

Sebanyak empat kursus bahasa Inggris yang berdurasi padat selama satu bulan diorganisir oleh DCAF, dan kursus dua atau tiga bulan dilaksanakan oleh otoritas nasional. Negara yang bersangkutan menominasikan delapan peserta untuk kursus ini, dengan 5 peserta yang telah dipilih sebelumnya. DCAF menyediakan isi bagi segmen nasional kursus tersebut.

Dengan diorganisir oleh DCAF, tahapan kelas pertama dari Kursus Jarak Jauh bagi Komandan Regional dilaksanakan di York pada 4-30 April, di Leeds University Centre for International Studies. Ini adalah kursus pelatihan bahasa Inggris selama empat minggu bagi 34 peserta dari semua negara-negara Balkan Barat, termasuk juga dari Slovenia dan Estonia.

Para peserta, yang dipisahkan menjadi empat kelompok tergantung kemampuan mereka dan terkait dengan nilai akhir yang dicapai, semuanya mengalami kemajuan selama pelatihan empat minggu ini. Para peserta juga mendapatkan persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat secara aktif berpartisipasi dalam tahapan kursus bahasa berikutnya yang akan mencakup sebuah perkuliahan profesional mengenai keamanan perbatasan, dan direncanakan dimulai pada bulan Februari 2006 dan dilaksanakan selama delapan bulan.

Kursus bahasa Inggris kedua dilaksanakan di Lucerne, Swiss, pada 11 Juli-7 Agustus 2005. Sebanyak 36 komandan regional atau petugas kepolisian dari kementerian di markas besar dari delapan negara (Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Estonia, Macedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia) berpartisipasi. Selama hari pertama, sebuah ujian dilaksanakan untuk mengevaluasi kemampuan semua peserta. Para peserta kemudian dibedakan menjadi empat kelompok: satu kelompok tingkat dasar, dua kelompok tingkat pra-menengah, dan kelompok keempat pada tingkat menengah atas,

Kursus ini melibatkan aktifitas Kursus di kelas yang intensif dengan bidang-bidang berikut ini:

- Pemahaman menulis
- Pemahaman mendengar
- Akurasi tata bahasa
- Kontrol fonologikal
- Cakupan perbendaharaan kata
- Cakupan linguistik umum
- Dialek berbicara
- Pertukaran informasi
- Catatan, pesan, dan bentuk
- Korespondensi
- Laporan dan esai

Kursus ini ditutup dengan sebuah tes perkembangan yang menunjukkan peningkatan dalam semua bidang diatas.

Kursus bahasa Inggris ketiga dilaksanakan di Birmensdorf, Swiss dari tanggal 25 September-16 Oktober 2005. Para pesertanya adalah 38 komandan regional (atau petugas kepolisian dari kementerian di markas besar dalam jumlah yang sama) dari delapan negara yang mengirimka peserta ke kursus sebelumnya. Kursus ini diprogram mencakup proses belajar di kelas, dengan melanjutkan tema-tema yang disebutkan diatas. Sama seperti sebelumnya, kursus ditutup dengan sebuah tes perkembangan yang menunjukkan peningkatan dalam bidang-bidang yang telah disebutkan diatas.

Kursus bahasa Inggris keempat, dilaksanakan di Budva, Montenegro dari tanggal 12 November-5 Desember 2005. Sebanyak 36 peserta yang menyelesaikan kursus akhir ini dipersiapkan untuk perkuliahan ADL, yang akan dimulai pada bulan Januari 2006. Kursus ditutup dengan sebuah tes perkembangan yang menunjukkan peningkatan dalam bidang-bidang yang telah disebutkan diatas. Pencapaian mereka dan tingkat pengetahuan Inggris mereka sekarang kemudian dituangkan dalam sertifikat yang dibagikan kepada semua peserta.

Modul pertama dari perkuliahan ADL selama delapan bulan bagi komandan regional dijadwalkan untuk dilaksanakan di Jenewa pada awal tahun 2006. Tahap Kursus jarak jauh dari modul ini dilaksanakan mulai 12 Desember hingga 22 Januari, untuk mempersiapkan para peserta bagi tahap belajar di kelas.

Permulaan dari Kursus Utama ADL bagi komandan regional, berjudul "Perubahan Dalam Kondisi Keamanan" dilaksanakan pada 22 Januari hingga 11 Februari 2006 di Jenewa. Para peserta adalah 24 komandan regional atau petugas polisi dari kementerian di markas besar dengan jumlah berimbang, dari delapan negara (lima orang dari Albania, dua orang dari Bosnia dan Herzegovina, enam orang dari Kroasia, dua orang dari Estonia, dua orang dari Montenegro, enam orang dari Serbia, dan satu orang dari Slovenia).

Perkuliahan mencakup kegiatan belajar di kelas dengan tema-tema berikut:

- Bekerja dalam tim
- Permasalahan manajemen perbatasan di dunia yang global
- Akar konflik
- Globalisasi, regionalisme, dan integrasi
- Kejahatan transnasional dan keamanan internasional
- Mengatasi perdagangan manusia
- Kejahatan terorganisir di Balkan
- Rejim non-proliferasi dan tantangannya sekarang
- Perdagangan material nuklir
- Perdagangan senjata kecil dan senjata api
- Bentuk lama dan baru terorisme
- Mengatasi dukungan ideologis terorisme
- Kontraterorisme dan keamanan perbatasan
- Terorisme senjata pemusnah massal
- Kebijakan kontraterorisme Uni Eropa
- Hak Asasi Manusia
- Keamanan perbatasan di dunia modern
- Prinsip acuan kepemimpinan dan manajemen yang sukses dalam organisasi keamanan perbatasan modern
- Perkembangan terbaru dalam kerangka kerja Uni Eropa.

Para pengajar adalah ahli dari GCSP, DCAF, Universitas Oxford, Universitas Zurich, Universitas di Estonia, Kepolisian Swiss, dan diantaranya Kepolisian Slovenia. Sebagai bagian dari perkuliahan, beberapa kunjungan dilakukan ke beberapa organisasi internasional berikut ini yang terlibat dalam isu-isu diatas, diantaranya:

- Markas Besar PBB di Jenewa
- Markas Besar Palang Merah Internasional
- Kantor Komisi Hak Asasi Manusia PBB
- Kantor Komisi Pengungsi PBB
- Organisasi Migrasi Internasional
- Pusat Komunikasi Swiss-Perancis

Modul kedua ADL, yang berjudul "Kepemimpinan dan Manajemen", dilaksanakan dari tanggal 3-23 Mei 2006 di Slovenia. Tahap Kursus tingkat jauh dari modul ini dilaksanakan pada 10 Maret hingga 6 Mei, untuk mempersiapkan para peserta bagi tahap belajar di kelas di Slovenia. Modul ketiga, mengenai "Manajemen Perbatasan I", dilaksanakan di Estonia dan Finlandia pada 15 Agustus hingga 3 September 2006. Modul keempat, berjudul "Manajemen Perbatasan II" akan dilaksanakan di awal tahun 2007 di Hongaria dan Jerman.

Tingkat Tiga: Acuan Operasional dan Deskripsi Pekerjaan bagi Komandan Pos

Dalam respon terhadap permintaan negara-negara peserta, dan sebagai sebuah tambahan terhadap modul ADL bagi komandan regional yang dijelaskan diatas, sebuah program khusus akan dilaksanakan bagi komandan pos. Tujuan program ini adalah untuk memberikan pelatihan praktikal bagi komandan pos

mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan perbatasan pada tingkatan individual pos. Program ini ditujukan secara khusus bagi komandan yang telah memimpin pos perbatasan atau siapa saja yang telah memiliki pengalaman diatas 3 tahun. Program ini akan berbentuk studi kunjungan selama seminggu, dimana para peserta akan diperkenalkan dengan perencanaan dan pengorganisasian aktifitas sehari-hari dari pos polisi perbatasan, dan juga akan melakukan beragam latihan praktek yang semuanya didesain untuk mereproduksi situasi yang sama dengan yang mereka temukan di negara asalnya.

Kursus pertama bagi komandan pos dimulai di Kiskunhalas, Hongaria pada 16-23 Mei dan 7-14 Juni 2004. Setelah itu, dua kursus tambahan dilaksanakan di Gotenica, Slovenia, kursus pertama dilaksanakan pada 6-10 September dan yang kedua pada 20-24 September 2004. Secara keseluruhan, sebanyak 15 komandan pos dari setiap negara peserta diundang, dengan semua pembiayaan ditanggung oleh DCAF.

Di tahun 2005, sebuah seri pertama lokakarya komunikasi dan manajemen tekanan dilaksanakan di Akademi Kepolisian Slovenia di Ljubljana di bulan Maret dan April. Terkait dengan proposal yang dibuat oleh tuan rumah Slovenia, dua kelompok kerja yang sebelumnya dibentuk dalam bidang ini kemudian dipisahkan menjadi empat kelompok, dan setiap kelompok berpartisipasi dalam sebuah kursus empat hari sejak 28 Februari hingga 15 April 2005, berdasarkan jadwal berikut ini:

- Kelompok pertama pada 1-4 Maret 2005
- Kelompok kedua pada 22-25 Maret 2005
- Kelompok ketiga pada 5-8 April 2005
- Kelompok keempat dari 12-15 April 2005.

Seri lokakarya ini mengumpulkan sekitar 61 komandan pos polisi untuk kontrol perbatasan dari Kroasia, Bih, Montenegro, Serbia, dan Macedonia. Tujuan mereka adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi bagi tugas keseharian polisi dan strategi untuk berhadapan dengan tekanan dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan profesionalisme petugas. Pelatihan ini didesain agar bersifat interaktif, dengan keterlibatan penuh peserta dengan beragam instrumen mengenai pengenalan-diri, permainan peran, diskusi, pemecahan masalah, kerja kelompok, dan analisis perilaku mereka sendiri.

Lokakarya ini kemudian dipisahkan menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan pelatihan komunikasi dan didesain untuk memberikan pengetahuan mengenai aturan komunikasi efektif. Pelatihan ini dibangun dalam situasi eksperimental yang memperbolehkan para siswa untuk berimprovisasi dan menemukan solusi terbaik bagi mereka sendiri. Selama acara ini, petugas polisi belajar bagaimana cara menghargai dan melindungi orang lain dan harga diri mereka sendiri melalui komunikasi dan manajemen tekanan dan bagaimana menjadi lebih efektif. Bagian kedua lokakarya mencakup pelatihan dalam menghadapi tekanan, yang mana merupakan salah satu kompetensi personal penting dalam tugas polisi. Petugas polisi dilatih bagaimana menggunakan keuntungan dari situasi tekanan dan melindungi diri dari efek merusak tekanan.

Kursus kedua, mengenai kepemimpinan dan pengawasan perbatasan darat dan laut, dilaksanakan dalam satu minggu dengan dua sesi, yakni pada 21-30 Agustus dan 11-20 September di Estonia. Lokakarya ini adalah sebuah lanjutan dari lokakarya yang sama yang dilaksanakan di Hongaria (Mei/Juni 2004) dan Slovenia (September 2004 dan April/Mei 2005). Ada sekitar 39 peserta dari lima negara (Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Macedonia, Montenegro, dan Serbia) dalam setiap sesi. Mereka semua setingkat pemimpin pos polisi perbatasan. Lokakarya ini memberikan peserta kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai kepemimpinan, termasuk juga untuk mengamati bagaimana kolega mereka pada tingkatan komandan pos melaksanakan tugas harian secara praktek. Program lokakarya dibedakan menjadi dua bagian: aktifitas kelas dan kunjungan lapangan

Aktifitas kelas akan ditekankan pada topik-topik berikut ini:

- Pemimpin dan kepemimpinan
- Kompetensi pemimpin
- Tipologi pribadi pemimpin
- Gaya kepemimpinan
- Bagaimana membangun sebuah tim yang efektif
- Acuan kerjasama tim yang efektif
- Proses pembentukan tim
- Kepemimpinan yang memotivasi
- Kriteria efisiensi organisasional

Bagian dari kursus ini juga melibatkan sejumlah latihan pratikal, dimana para peserta dilihat menjadi sangat bermanfaat.

Bagian kedua dari program terdiri dari kunjungan ke pos penjaga perbatasan di perbatasan timur Estonia (dengan Federasi Rusia). Selama bagian kedua ini, para peserta diperkenalkan pada subjek-subjek berikut ini:

- Struktur organisasional penjaga perbatasan Estonia
- Bagaimana pekerjaan diorganisir pada titik perlintasan perbatasan
- Bagaimana penjagaan perbatasan dilaksanakan di danau, sungai, dan perbatasan laut
- Jenis dukungan teknis apa yang dimiliki penjaga perbatasan dan bagaimana fungsinya
- Bagaimana pekerjaan dilakukan sebelum penjaga perbatasan Estonia mendapatkan perlengkapan teknis pertama mereka
- Kerjasama dengan badan lain dan negara tetangga (penjaga perbatasan Estonia mengorganisir sebuah latihan bersama dengan kolega Rusia mereka, yang memberikan sebuah contoh bagaimana penjaga perbatasan Rusia dan Estonia mengatasi pelintasan perbatasan ilegal).

Kursus lanjutan mengenai acuan operasional dan deskripsi pekerjaan bagi komandan pos akan dilaksanakan pada bulan September di Hongaria dan Polandia.

Tingkat Empat: Pelatihan Tahunan Musim Panas bagi Pemimpin Masa Depan

Masih dalam ruang lingkup Program Keamanan Perbatasan, DCAF mengorganisir sebuah perkemahan musim panas yang mengumpulkan 58 calon pemimpin masa depan dalam keamanan perbatasan pada 15-24 Agustus 2004 di Sekolah Pegunungan Tentara Swiss di Andermatt, Swiss (para peserta termasuk tiga undangan dari setiap negara Balkan Barat, dan tiga dari negara donor). Tujuan dari konferensi ini adalah untuk mengumpulkan para akademisi muda, aktifis LSM, jurnalis, dan pegawai pemerintah dari Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Estonia, Finlandia, Jerman, Hongaria, Macedonia, Rusia, Serbia dan Montenegro, Slovenia, dan Swiss, dengan tujuan memberikan mereka sebuah kesempatan untuk berbaur dengan para ahli internasional terkemuka dalam sebuah debat komprehensif terkait isu keamanan perbatasan sekarang dan masa depan. Tujuan dari acara ini adalah untuk melatih dan mendidik pemimpin masa depan di bidang keamanan perbatasan, yang kemudian berkontribusi terhadap usaha DCAF kearah penjaminan keberlanjutan transfer praktek-praktek terbaik. Selain itu, dengan berbagi pengalaman profesional mereka dan berpartisipasi dalam aktifitas-aktifitas, para peserta akan mampu membangun dasar bagi kerjasama dimasa depan berdasarkan hubungan baik diantara profesional muda.

Konferensi Pelatihan Tahunan Musim Panas Pemimpin Masa Depan Kedua dilaksanakan lagi di Sekolah Pegunungan Tentara Swiss di Andermatt pada 14-21 Agustus 2005. Acara ini diorganisir melalui kerjasama dengan Pusat Pengetahuan Tentara Swiss di Pelatihan Pegunungan, dan mengumpulkan 45 peserta dari semua negara di Eropa Timur Selatan, termasuk juga Republik Ceko, Estonia, Finlandia, Jerman, Spanyol, Slovenia, dan Ukraina. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari acara ini adalah untuk mengumpulkan para akademisi muda, aktifis LSM, jurnalis, pegawai pemerintah dan penjaga perbatasan dalam sebuah situasi yang mendukung dengan tujuan memberikan mereka kesempatan untuk berbaur dengan para ahli internasional terkemuka dari Jerman, Estonia, Slovenia, dan Swiss dalam sebuah debat komprehensif terkait isu keamanan perbatasan saat ini dan dimasa depan.

Pada tiga hari pertama pelatihan musim panas ini dihabiskan didalam kelas dengan mendiskusikan topik-topik yang terkait dengan beragam isu, termasuk juga metode kepemimpinan dan manajemen. Bagian kedua program membawa para peserta ke pegunungan, dimana mereka mampu mempelajari dan mempraktekkan kemampuan pelatihan pegunungan yang diajarkan oleh tentara Swiss, dan mempraktekkan teknik kepemimpinan yang telah didiskusikan di kelas. Tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam aktifitas akademik dan latihan, bersama dengan standar tinggi dalam berbahasa Inggris yang diperlihatkan para petugas dan akademisi, telah mengarah kepada seminggu keberhasilan dan produktif. Diputuskan bahwa akan dibentuk Jaringan Alumni Pemimpin Masa Depan untuk mengkoordinasikan aktifitas alumni dan melaksanakan forum *on-line* mengenai isu-isu yang terkait dengan keamanan perbatasan dimasa depan.

Konferensi Pelatihan Tahunan Musim Panas Pemimpin Masa Depan Ketiga dilaksanakan lagi di Andermatt pada 13-20 Agustus 2006. Topik-topik yang dibahas diantaranya:

- Kepemimpinan dan manajemen
- Korupsi
- Kondisi keamanan baru
- Globalisasi dan konsep bersaing dari hukum perbatasan dan penjagaan perbatasan
- Intelijen dan analisis resiko
- Manajemen dan budaya korporat

Para peserta diharapkan memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Aktif bertugas sebagai penjaga perbatasan, tidak lebih dari 35 tahun pada saat konferensi
- Kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi yang baik dengan yang lain tanpa kesulitan
- Pengetahuan operasional dalam bidang keamanan perbatasan, termasuk pengalaman praktikal.

Kilas tahun 2006

Selama tahun 2006, sebuah program telah direncanakan yang melanjutkan pekerjaan dari kelompok kerja yang telah dibentuk dalam tujuh bidang. Adapun bidang-bidang tersebut adalah, reformasi hukum, kepemimpinan dan manajemen, dukungan logistik, pendidikan dan pelatihan, analisis resiko, intelijen dan investigasi kriminal, serta pengawasan perbatasan laut/penjaga pantai. Telah direncanakan bahwa kelompok kerja ini akan bertemu dua kali dalam setahun selama periode 2006-2007. Pada akhir periode ini, tujuan akhir dari kelompok kerja tersebut diharapkan telah dicapai.

Aktivitas Program Keamanan Perbatasan akan terkonsentrasi pada promosi dan penguatan kerjasama regional, dengan tujuan memberikan keuntungan bagi pembangunan negara-negara tersebut dan mengakselerasikan integrasi mereka kedalam Uni Eropa. Fokusnya akan mencakup beberapa hal berikut:

- Mengatasi perbedaan hukum dan membantu perkembangan perjanjian internasional mengenai kerjasama perbatasan
- Meningkatkan kapasitas operasional
- Meningkatkan kemampuan teknis yang dapat dioperasikan bersama
- Mengharmonisasikan proses pendidikan dan pelatihan.

Januari 2006. Kelompok kerja reformasi hukum bertemu selama lima kali di Slovenia. Modul pertama kursus ADL bagi komandan Regional mengenai "Kondisi Keamanan Baru" dimulai di Jenewa, Swiss.

Februari 2006. Di bulan Februari 2006, Konferensi Evaluasi Tahunan Ketiga dilaksanakan di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Pada acara ini, sebuah evaluasi dilakukan atas kemajuan yang diperoleh kearah mencapai tujuan akhir dari setiap kelompok kerja, dan dokumentasinya dipresentasikan. Selain itu, rencana bagi pengelolaan kerjasama regional dan implementasi

mekanisme fleksibilitas regional juga dibicarakan. Konferensi ini kemudian diikuti dengan pertemuan Dewan Penasehat Internasional untuk Keamanan Perbatasan.

Maret 2006. pertemuan kelompok kerja kelima mengenai pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di Macedonia. Pertemuan kelompok kerja mengenai dukungan logistik juga dilaksanakan pada bulan Maret di Serbia.

April 2006. Pertemuan keenam kelompok kerja kepemimpinan dan manajemen dilaksanakan di BiH. Kursus bagi komandan pos (Acuan Operasional dan Deskripsi Pekerjaan) dilaksanakan di Finlandia, memfokuskan pada topik komunikasi dan manajemen tekanan. Kursus yang sama dilaksanakan dua kali, setiap kalinya untuk 40 peserta, selama satu minggu.

Mei 2006. Modul kursus ADL kedua bagi para komandan regional, berjudul "Kepemimpinan dan Manajemen" dilaksanakan di Brdo, Slovenia. Pertemuan Dewan Penasehat Internasional DCAF (DCAF IAB) untuk Keamanan Perbatasan, pertemuan kelompok kerja analisis resiko, intelijen dan investigasi kriminal juga dilaksanakan. Sebuah pertemuan bagi para pimpinan badan perbatasan negara-negara Balkan Barat dilaksanakan, dengan tujuan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan selama paruh pertama tahun 2006 dan perubahan yang disarankan bagi program pada paruh kedua tahun 2006. Ketiga acara ini dilaksanakan di Slovenia.

Juni 2006. Pertemuan kelompok kerja reformasi hukum ketiga dilaksanakan di Kroasia.

Agustus 2006. Konferensi musim panas calon pemimpin masa depan ketiga dilaksanakan di Andermatt di lokasi Pelatihan Pegunungan Tentara Swiss. Modul ketiga kursus ADL bagi komandan regional, bertema "Manajemen Perbatasan 1", dilaksanakan di Estonia dan Finlandia.

September 2006. pertemuan keenam kelompok kerja dukungan logistik direncanakan pada bulan September di Kroasia. Kelanjutan kursus Acuan Operasional dan Deskripsi Pekerjaan bagi komandan pos, yang memfokuskan pada kepemimpinan dan pengawasan perbatasan darat dan laut, dilaksanakan selama dua minggu di Polandia dan Hongaria.

Oktober 2006. Pertemuan kelompok kerja ketujuh mengenai kepemimpinan dan manajemen akan dilaksanakan bulan Oktober di BiH. Pertemuan kelompok kerja penjaga pantai keempat dilaksanakan di Albania.

November 2006. Pertemuan kelompok kerja pendidikan dan pelatihan keenam dilaksanakan di Serbia. Pertemuan akhir IAB tahunan akan dilaksanakan di Bosnia dan Herzegovina. Sebagai tambahan, pertemuan kelompok kerja keempat mengenai analisis resiko, intelijen dan investigasi kriminal dilaksanakan juga di Bosnia-Herzegovina. Modul kursus ADL keempat bagi komandan regional, berjudul "Manajemen Perbatasan II" dilaksanakan di Hongaria dan Jerman. Akhirnya, para pimpinan badan perbatasan akan bertemu di Frankfurt untuk menyepakati rencana tahunan 2007.

Kursus ADL bagi Komandan Regional. Kursus ADL yang direncanakan untuk 2006-2007 dipisahkan menjadi lima modul. Bagian maya dari studi ini akan berlangsung selama dua bulan, dan selama periode ini para siswa

diharapkan menerima pendidikan umum mengenai subjek atau tema khusus. Aktifitas belajar di kelas akan berlangsung selama tiga hingga lima minggu, dan akan dilaksanakan di negara peserta. Hal ini ditujukan untuk memperkuat pengetahuan yang diperoleh selama periode *e-learning* dua bulan. Program khusus selama 4 minggu berikutnya akan memberikan analisis yang lebih dalam mengenai keamanan perbatasan di wilayah spesifik, dan mengandung proposisi khas bagi perancangan nasional.

Konferensi Evaluasi Tahunan Ketiga, 23-25 Februari 2006. Konferensi ini memberikan kesempatan kepada para peserta dari Balkan Barat untuk mengevaluasi aktifitas yang dilakukan selama tahun 2005. Beberapa topik yang dibahas adalah reformasi hukum, kepemimpinan dan manajemen, dukungan logistik, pendidikan dan pelatihan, pengawasan perbatasan laut, analisis resiko, dan pengembangan kapabilitas intelijen dan investigasi. Pada saat yang bersamaan, rencana tahunan aktifitas bersama untuk tahun 2006 dibahas. Para pemimpin dari beragam badan polisi perbatasan yang terlibat dalam program juga diminta untuk mempresentasikan evaluasi keseluruhan mengenai proyek penjaga perbatasan DCAF, termasuk keberhasilan dan manfaat mereka dalam pengembangan manajemen perbatasan yang efektif di wilayahnya.

Konferensi Pemimpin Masa Depan Ketiga, 13-20 Agustus 2006. Konferensi Musim Panas Pemimpin Masa Depan Ketiga dilaksanakan sekali lagi di Swiss pada bulan Agustus 2006. Konferensi ini bertujuan melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai di tahun 2004 dalam pengembangan hubungan personal dan profesional diantara kadet penjaga perbatasan dari semua wilayah Eropa. Pengalaman pembentukan tim praktikal dikombinasikan dengan pengajaran dari para ahli dibidang hubungan internasional, berbicara mengenai topik yang terkait dengan keamanan perbatasan.

Catatan dari Ruang Diskusi (Ringkasan)**Seminar*****Good Practices in Border Management and Border Security: Lessons Learned in New Democracies***

Hotel Grand Preanger
Bandung, 21 Maret 2007

Sesi Pembicara Kunci : Dr. Pierre Aepli (Konsultan senior DCAF)

Sesi tanya jawab :

T (Tanya) : Tri Yuswoyo (Bakorkamla)

Mengenai sistem keamanan di perbatasan, mengapa tidak memfokuskan perhatian pada penjaga pantai (coast guard). Karena kebanyakan negara sudah memiliki penjaga pantai?

J (Jawab) : Pierre Aepli

Pengendalian pantai adalah elemen kunci. Salah satu yang penting dalam perbatasan biru tidak hanya kapal-kapal yang diperlukan dan elemen-elemen lainnya. Salah satu elemen kunci adalah intelijen. Sebuah contoh Inggris dan Perancis. Inggris memiliki perbatasan laut lebih luas dari Perancis. Tapi Inggris hanya punya kapal lebih sedikit dari pada Perancis, namun mereka lebih banyak melakukan penangkapan terhadap barang narkotika lebih banyak dari Perancis. Kenapa begitu, karena Inggris memiliki intelijen lebih baik. Inggris bisa melakukan pengendalian trans border. Kalau dilihat Anda memiliki masalah karena Indonesia memiliki perbatasan ribuan kilometer, dan ribuan titik penyeberangan. Anda tahu beberapa yang memiliki narkotika dan imigran ilegal. Tapi, apa artinya apabila anda memiliki kontrol lintas batas (trans control).

Sistem intelijen yang handal dalam perbatasan laut adalah hal yang sangat penting.

T : Kolonel Sipahutar (Sesko TNI) :

Pertanyaan pertama, Kita memiliki masalah perbatasan dengan Malaysia (Ambalat). Masalah lainnya adalah ancaman yang nyata adalah kriminal lintas batas, migrasi ilegal, terorisme dan organisasi kriminal internasional, sehingga harus ada kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia.

Kedua, dalam slide anda diperlihatkan pada fokus-fokus perubahan perbatasan di dalam dua wilayah untuk isu non tradisional di laut. Contoh di Panmunjom, Korea. Bagaimana hal ini bisa diaplikasikan.

J : Pierre

Antara perbatasan perang dan perbatasan damai. Perbatasan damai harus berperang melawan kejahatan transnasional seperti terorisme, imigran ilegal, dan lain-lain.

Pada sisi lain, anda melawan musuh tertentu. Anda sedang dalam proses damai. Sebagai contoh, Azerbaijan sedang mempunyai konflik dengan Armenia, dipegunungan Kaukasus. Penjagaan perbatasan di negara lain seperti Rusia, Iran adalah elemen kunci dalam penjagaan perbatasan di Pegunungan Kaukasian. Dengan AD sebagai elemen utama. Namun, penjagaan perbatasan bisa didirikan ketika perbatasan telah menjadi perbatasan yang damai.

T. : Kalory Soos (Uni Eropa)

Saya mau memberikan komentar. Mendengar presentasi yang bagus dari kolega kami. Ada beberapa faktor kunci untuk sukses yaitu kemauan politik, dukungan publik serta komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi keamanan dan juga penjagaan perbatasan. Saya ingin tahu tentang komitmen para politisi tentang penjaga perbatasan untuk mereformasi dan mengimplementasikan struktur baru seperti ini.

J : Pierre

Jadi dalam proses ini penjaga perbatasan bisa memainkan peran ketika perdamaian telah dicapai. Anda bisa lihat model ditempat tertentu secara mendalam menurut situasi. Jadi pernyataan tentang komitmen politik adalah benar. Ketika saya bertanya tentang rangkaian manajemen, saya tidak berbicara mengenai kondisi fakta kunci dari manajemen sukses. Salah satunya adalah komitmen politik yang tinggi. Itu benar, bukan hanya itu, tapi komitmen manajemen juga diperlukan. Tanpa komitmen politik dan visi yang jelas, maka upaya reformasi manajemen tidak bisa jalan. Jadi kunci sukses dalam reformasi manajemen adalah dukungan politik dan dukungan manajemen.

T : ?

Tadi anda katakan ancaman berubah sejak Eropa menjadi satu. Ancaman utama saat ini adalah terorisme, perdanganan manusia, kejahatan transnasional, dan seterusnya. Saya baca disurat kabar, NATO akan membangun senjata modern, dalam melindungi misil antar benua. Saya pikir ini dalam situasi perbatasan damai. Kita akan tahu jika ada ancaman dari Timur. Apakah ini menjadi prioritasnya untuk membangun itu. Apa komentar anda.

J : Pierre

Saya pikir penjaga perbatasan tidak berperan dalam masalah ini. Saya melihatnya justru program ini penting dalam rangka melindungi diri dari ancaman. Ancaman berubah sesuai dengan geopolitik dan trend ancaman. Dan bagaimana kita menghadapi ancaman itu.

Peran dari berbagai mitra yang berbeda akan selalu berubah. Jadi misi militer semacam ini tidak bisa diubah. Perlu waktu yang lama berdasarkan analisis yang bagus dan berdasarkan analisis aktor tersebut, bagaimana memikirkan misi yang lain dari lembaganya. Bagi saya, misi yang jelas untuk militer sangat berkaitan dengan intelijen.

Untuk menghadapi berbagai macam ancaman, kita punya pikiran yang sama, tapi prioritas harus dibuat dan sumber daya harus dialokasikan sesuai dengan berbagai ancaman, baik saat ini ataupun masa depan. Tapi pada akhirnya, saya akan bertanya sedikit tentang masalah penjagaan perbatasan.

SESI I :

Pembicara : Kolonel Judi (Mabes TNI) dan Pak Kartiko Purnomo (Depdagri)

Sesi tanya jawab :

T : Reggy (LBH Bandung)

Untuk Pak Kartiko Purnomo, disebutkan mengenai UU tentang perbatasan wilayah dan pengelolaannya. Lebih dari itu juga banyak fakta menyebutkan bahwa ternyata penyelundupan dilakukan di level birokratis dan legal. Kalau kita bicara itu, maka saya pikir perlu disisipkan UU tentang keimigrasian No. 9/1992. Apakah mengenai *border management* ranahnya itu bisa dimasukkan ke dalam UU No. 9/1992?

J : Pak Kartiko

Exit entry point, di situ ada *CIQS*, custom, immigration, quarantine and security, pusat lintas batas yang ada aturan masing-masing. Jadi ada undang-undang imigrasi, UU perbatasan, ada aturan di tiap lintas batas. Tapi kalau cerita mengenai batas atau border line, itu yang perlu undang-undang sertifikasi nama. Ada dua anggapan, perlu dan tidak perlu. Ada yang menyatakan tidak perlu, karena ada beberapa titik yang masih bermasalah. Pada intinya saya setuju mengenai perlu dimasukkannya UU mengenai keimigrasian, *border agreement*, bea cukai, kewarganegaraan dan itu semua.

T : Mayor Agung (Mahasiswa S-2 ITB)

Disampaikan dalam pemaparan bahwa ada beberapa isu mengenai perbatasan dalam keamanan. Tetapi kalau saya perhatikan, isu-isu tersebut disebabkan oleh kesejahteraan di wilayah perbatasan. Sebagai contoh di pulau Miangas, ada kesejahteraan yang minim, banyak dari mereka yang menjadi kuli di Piliphina atau menjadi nelayan ilegal. Langkah apa yang pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah kesejahteraan di perbatasan?

J: Pak Kartiko

Programnya banyak banget. DPR udah dukung, tapi *internal management of government* yang perlu diperbaiki. Kita belum punya rencana induk pengembangan wilayah perbatasan, tapi kementerian desa tertinggal udah punya, kehutanan punya, perikanan punya, Depdagri punya melalui program-program, seperti pembangunan kecamatan seperti PPK itu sudah didukung juga oleh Bank Dunia.

Nah generasi kita, untuk melaksanakan komitmen untuk membangun masalah perbatasan dengan sungguh-sungguh, ingin menjadikan beranda terdepan, semua itu tergantung kita. Selama komitmen melaksanakan dilapangan itu sungguh-sungguh maka masyarakat akan sejahtera. Ini komitmen pemerintah dalam RPJMNAS No. 4 dan 9 menyatakan menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang perlu diperhatikan. Karena ini seminar, maka dipersilahkan untuk anda membuat inovasi-inovasi bagaimana untuk *manage* itu.

Sekarang sudah ada, pemerintah sudah *manage* sesuatu, disektor keamanan, sektor kesejahteraan udah semua. Nah untuk pulau Miangas, pulau ini adalah salah satu pulau terluar, *close to southern part of Phillipine*. Di sana rakyatnya miskin dan hidup mandiri memang paradigma yang baru saja. Paradigma untuk menjadikan pulau terluar sebagai kawasan yang perlu dibangun.

Tapi, implementasinya belum sepenuhnya berhasil. Lahir Perpres No. 78/2005. tahun lalu baru fokus ke koordinasi dan sosialisasi. Tahun ini sudah mulai ada rencana aksi dalam Perpres tentang pulau-pulau kecil terluar itu, koordinatornya adalah Menkopolkam, pelaksana hariannya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan dan dibantu oleh dua bidang. bidang kerja satu Menteri Kesejahteraan dan sumber daya alam Lingkungan Hidup peningkatan kesejahteraan. Bidang kerja dua menteri kesejahteraan wilayah, pertahanan dan keamanan. Itu juga masih dalam tahap konsolidasi. Nah ini menunjukkan bahwa usaha untuk maju itu ada.

Dan baru-baru ini contohnya saja, Direktorat kami baru membeli dua kapal untuk Kabupaten Sangihe dan Talaud untuk membantu bupati disana mengontrol rakyatnya yang tersebar di pulau-pulau itu, kalau kita lihat di peta Sumatera Utara, di sekitar pulau Miangas itu ada pulau-pulau berpenduduk dan tidak berpenduduk. Nah yang berpenduduk kan perlu ditengok.

Bahwa sentuhan pemerintah itu harus ada. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum telah mempunyai program untuk (1). bagi pulau kecil yang berpenduduk akan dibantu sarana dan prasarana, dana dekosentrasi, untuk membangun dermaga, pos, kantor desa. Nah sekarang terserah dengan otonomi daerah ini, apakah uang yang kami berikan itu dibelanjakan dengan baik. Jadi kami sudah punya program. Apabila Pak Agung ingin

tahu programnya apa saja, kami punya daftarnya. Dan itu duit sudah disetujui oleh DPR.

T : Philip (DCAF)

Pertanyaan saya untuk Pak Purnomo, pertama saya ingin mendengar lagi anda bicara dan kedua agar anda memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lembaga yang menarik. Tadi anda katakan minggu lalu suatu unit koordinasi baru telah dibuat, tentunya berkaitan dengan manajemen perbatasan, bukan tentang manajemen perbatasan ad hoc. Jadi saya ingin tahu bagaimana lembaga koordinasi yang baru tersebut?

J: Pak Kartiko

Kami tidak punya satu lembaga koordinasi. Tapi kami bekerjasama erat dengan menteri terkait dan institusi terkait manajemen perbatasan, contoh ketika kami kita punya komite perbatasan bersama dengan Papua Nugini (PNG), kita minta pejabat-pejabat dari bea cukai, imigrasi, dan keamanan (english: CIQS) dan juga dari Dephan, Deplu dan Mabes Polri bekerjasama dalam masalah ini. Tak ada masalah.

Masalahnya muncul setelah rapat dan diskusi, setelah kita punya hasil rapat yang bagus. Kita mudah lupa. Jadi penting sekali unit ini dalam koordinasi, jika Deplu minta kami melakukan sesuatu, maka akan saya lakukan tugas saya. Sebenarnya pemerintah sadar akan kelemahan dari mekanisme adhoc komite semacam ini, sehingga Menkopolhukam mendirikan unit ini, namanya *border desk*.

Bagaimana masa depan *desk* ini, akan didalam Menkopolhukam. Masalahnya adalah koordinasi dengan Departemen Pertahanan. Persoalan manajemen perbatasan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga masalah kesejahteraan. Langkah selanjutnya, adalah mungkin desk ini dapat membuat RUU ataupun peraturan pemerintah untuk membentuk suatu lembaga koordinasi yang permanen dalam pemerintah pusat.

Tapi anda harus ingat, beberapa orang dalam pemerintah ini tidak setuju dengan ide ini. Jika lembaga permanen telah terbentuk. Artinya, banyak fungsi dari sejumlah departemen akan diambilalih oleh lembaga ini.

T : Letkol. Janos

Saya punya tiga pertanyaan singkat. Yang pertama, berapa banyak jumlah pulau di Indonesia, saya dengar ada 8600 pulau tidak punya nama?

Dalam slide ke 7, saya ingin tahu pasti berapa jumlah titik penyeberangan perbatasan di Indonesia. Anda sebut 73 buah, apakah hal ini termasuk bandara internasional, pelabuhan, jalan raya dan lainnya. Apakah termasuk semua itu atau hanya bandara internasional saja?

Ketiga, siapakah pihak paling berwenang dalam menangani masalah perbatasan di Indonesia. Apakah Dephan atau Depdagri?

J: Pak Kartiko

Tentang pulau tidak bernama, mungkin jumlahnya ada 8653. Kami akan membuat panitia yang akan memberikan nama-nama pulau tersebut. Hal ini merupakan rekomendasi dari PBB dalam standar pemberian nama geografis pulau.

Dengan pembentukan panitia permanen seperti ini, maka rencana pemberian nama pulau akan lebih sistematis. Sebab pemerintah bukanlah yang pihak memberikan nama, tapi penduduk setempat yang memberikan nama. Paling tidak nama pulau tertentu dapat diberikan, jika dua orang setempat menyebutnya atau ada di dalam catatan, dan kita verifikasi ejaannya pada sejarawan, kemudian dikirim kepada pemerintah pusat yang kemudian mendaftarkan namanya dalam suatu daftar resmi.

Kedua, Menhan adalah satu tingkat dengan Mendagri. Mereka merupakan pembantu presiden. Tapi ada Menteri koordinasi yang memimpin para menteri sektoral. Menko biasanya lebih senior.

Tidak ada masalah diantara mereka dalam urusan negosiasi dengan negara tetangga. Karena kami mau berkoordinasi, ketika Menhan menjadi ketua tim dalam negosiasi dengan pemerintah Malaysia. Jadi nggak masalah.

P : Kolonel Susilo (Sesko AL)

Kontrol perbatasan adalah penting bagi keamanan negara. Kuncinya untuk menciptakan border control perlu diwujudkan salah satunya melalui border management. melihat konteks atau kemungkinan yang bisa di apply di Indonesia, ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan. Terutama tentang memahami konstelasi geografi kita.

Untuk diketahui, di Indonesia ada 17.499 pulau. Dan kita sekarang memiliki 10 buah maritime borders, 3 land borders, nah ini yang perlu diperhatikan. Dari beberapa kajian ilmiah perlu diperhatikan bahwa untuk membentuk suatu border management system, hal yang paling pokok adalah adanya keterkaitan atau kerjasama dari beberapa sub system.

Katakanlah bagaimana personnel yang terlatih, *Audit capability, interagency and international cooperation, strategic partnership with.....*(tidak jelas) and industry dan sebagainya, banyak sekali. Belum lagi kalau kita mempertimbangkan bagaimana karakteristik dari beberapa border itu sendiri. Ada beberapa titik-titik yang sangat mudah untuk diterobos oleh para imigran. Belum lagi kita berfikir mengenai relationship with immediate state neighbors.

Belum lagi kita berfikir mengenai komitmen dan *capacity of neighbor states* dan sebagainya. Permasalahannya adalah demikian, kalau kita menerapkan

border management tersebut, apakah hanya sebatas wacana atau kapan bisa kita mulai? Karena batas yang kita miliki ada dua macam. Batas maritime dan daratan. Kalau batas daratan jelas. Pasang post selesai. Tapi kalau lautan beda, karena tidak bisa diduduki. Lautan adalah dikuasai. Jadi pertanyaannya adalah kapan kita bisa terapkan hal ini di Indonesia?

J: Pak Kartiko

Bangsa ini harus banyak berterima kasih dengan Hidros TNI AL, karena untuk diketahui oleh khalayak karena unit ini yang sudah berhasil menyusun profil 92 pulau terluar Indonesia, sebagai dasar dari Depdagri nanti dengan survei-survei untuk menyempurnakan profil dari kepulauan tersebut dengan pemberian informasi mengenai keadaan fisik dari pulau-pulau tersebut.

Dari uraian bapak, tampak sangat memaklumi lingkungan strategis di sekitar bapak mengenai perbatasan kita. Dan bapak menanyakan apakah *border management* tersebut bisa diterapkan di Indonesia?

Saat ini sudah dipraktekkan *border management*. buletan tadi itu saya bikin setelah saya dilantik oleh menteri wilayah bagian perbatasan. Saya nggak punya latar belakang geografis, atau perjanjian internasional. Justru latar belakang saya mengenai conflict management atau masalah ketahanan bangsa dan lain-lain.

There is always room for improvement. Jadi border management ini memang harus kita benahi. Di Sesko TNI kalau perlu menghasilkan suatu rekomendasi ke pemerintah mengenai baiknya border management itu seperti apa. Untuk Timor Leste yang border land ini, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum sebagai penanggungjawab.

Yang perbatasan maritime, Menlu jalan sendiri. Kadang-kadang dengan Phillipin, Pangdam Wirabuana. Itu Depdagri tidak ikut. Kita sudah usul untuk diajak. Border land gampang ada *exit-entry point* ada tugu, prasasti, jelas semuanya meskipun masih perlu sosialisasi. Tapi untuk laut ini adalah imajiner. Meskipun imajiner itu kita bisa tahu dari PP 38/2002 tadi. penarikan titik-titik koordinat tersebut.

Di situ sudah bisa kan pak. Inilah yang PP itu disusulkan untuk disempurnakan berkaitan dengan masalah yang lalu. Sipadan-Ligitan misalnya, menjadi lampiran dalam Undang-Undang Wilayah Negara. Intinya seperti itu.

P : Kolonel Iskandar, Mabes TNI

Pertama, manajemen perbatasan ini dibuat atau diberdayakan untuk perbatasan yang sudah ada penetapannya saja, yang belum ada penetapan juga bisa?

Kedua, bagaimana sebenarnya *border management* ini bisa dilakukan sebagai salah satu cara negosiasi dengan negara tetangga? Karena kita melihat delegasi RI selama ini anggotanya relatif tidak tetap. Berganti jabatan dan orang-orang. Sedangkan di Negara lain cenderung anggota delegasinya tetap. Kalau kita lihat, dokumentasi itu relatif lebih lemah dibandingkan mereka. Karena masalah arsip atau yang lain atau penyimpanan dan lain-lain. Atau kita mungkin tidak punya dokumen-dokumen itu.

J: Pak Kartiko

Dokumentasi MOU memang sangat penting, tapi beberapa memang masih tersebar di beberapa departemen. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri sudah meminta membuat surat edaran kepada departemen-departemen teknis terkait dengan batas negara ini supaya menyerahkan MOU itu.

Dengan Malaysia ada 24 MOU, baru ketemu 14. Dan sekarang masih di cari. Implikasi politik ada apabila MOU itu tidak disetujui. Karena semua ini harus diratifikasi. Jangan sembrono langsung mengusulkan UU batas wilayah kalau yang kecil itu belum dikuasai.

Tapi kalau mau unit *mendecclare* batas Negara, itu adalah hak setiap Negara. Cuma, deklarasi batas negara itu meskipun boleh-boleh saja, tapi harus mengingat hukum internasional. Jadi mudah-mudahan dengan kita ketemu kesini dan komunitas perbatasan yang sering ketemu dalam forum lembaga dapurnya JBC itu, keinginan bapak agar *border management* ini tertata dengan baik itu akan terkabul.

Kita sendiri baru memperoleh tugas dari Mabes TNI berkaitan mengenai Ketua KK Malindo. Itu semua kan dilakukan dengan pendekatan baru *security approach* yang berbarengan dengan *prosperity approach*, maka Malindo tidak pantas di *Armed Forces*. Sekarang ada di Dirjen Pemerintahan Umum. Ini bisa dibayangkan betapa direktorat saya itu harus mengurus batas antar Negara, itu batas darat dengan tiga Negara, even international, batas antar daerah, topomoni dan pemetaan wilayah administrasi, sarana perbatasan dan tugu2, prasasti, dll.

Kalau ingin *border management* bagus, maka dapurnya juga harus diperbagus terlebih dahulu. Dan ini harus dibenahi. Rekomendasi dari seminar ini harus diberikan ke presiden dan salah satunya mengusulkan untuk membentuk direktorat jenderal for *border affairs*.

P : Kolonel Naibaho (Sesko TNI)

Kita tahu ke depan bahwa masalah perbatasan ini menjadi sesuatu yang sangat kritis mengingat kebutuhan lingkungan, mungkin Negara-negara

akan terus meningkatkan kemampuannya dalam mencari sumber daya alam yang dimiliki dalam meningkatkan kelanjutan kehidupan negaranya.

Dan dengan demikian apabila ada celah atau ruang untuk memanfaatkan termasuk memasuki wilayah Indonesia dan sumber daya alam itu hanya terdapat di Indonesia.

Saran saya adalah mungkin perlu ada suatu institusi untuk meningkatkan pembangunan perbatasan dan pulau terluar. Itu sekaligus sebagai pengembangan perbatasan. Mungkin semacam menteri pembangunan perbatasan atau yang lainnya untuk fokus pada masalah ini.

J : Pak Kartiko

Usul adanya menteri itu diluar wewenang saya, itu wewenang Presiden. Menteri pulau-pulau terluar dan perbatasan itu lumayan repot karena seringkali perbatasan itu masuk ke dalam kecamatan. Tapi koordinasinya nanti yang jadi masalah. Institusi yang mengkoordinasikannya itu siapa? Misalnya border RI-Malaysia itu Menteri Pertahanan. Itu ada suborgan namanya JIM (Joint Indonesia-Malaysia), panitia nasional survei penegasan batas wilayah diketuai oleh Sekjen Depdagri. Aneh kan? Karena melihat dari riwayatnya, ternyata Sekjen dulu adalah menteri lingkungan hidup.

Jadi harus setara Sekjen-Sekjen. Padahal operasionalnya ada di Direktorat Jenderal PUM, wakil khusus ada di Direktorat Wilayah dan Perbatasan. Untuk survei pemetaan, pelaksanaannya Pak Frans Warkala, Dirwilhan Dephan. Co-projectnya TNI. Ada join mapping along the international border, Bakosurtanal. Semuanya sudah dilakoni, tapi ya begitulah.

Kadang orang bingung kalau belajar tentang management perbatasan Indonesia karena dokumennya tersebar di mana-mana. *Join Border Committee* PNG itu Depdagri. Sekretarisnya Dirjen PUM. *Join technical of subcommittee demarcation of border join mapping* itu Pak Dirwilhan.

Tingkat pelaksana Bakosurtanal. *Join committee on security* itu TNI. *Join border committee* Timor Leste itu Sub Dirjen PUM. Semua itu dapurnya di Ditwilhas. Jadi begitulah keadaannya. Jangan hanya mencela mengenai border management, wong internalnya kita aja begini.

Technical sub committee on border demarcation regulation bakosurtanal dengan Timor Leste. *Technical sub committee on across border movement of personal good and closing* itu Departemen Perdagangan. *Technical sub committee on police cooperation* itu Mabes Polri, sedangkan *on Border Security* itu Mabes TNI. Pengamanan perbatasan Timor Leste. Di Papua ada border relation meeting itu oleh Gubernur badan kerjasama perbatasan daerah. Di Papua itu daerahnya udah aktif.

In Papua province, we had already good mechanism in dealing with PNG Government. Kita sudah punya BPKD. Di NTT, *border relation committee* kurang aktif tapi sudah ada. Cuma *geographical awareness* and also *awareness about the important to manage border* ini yang harus ditingkatkan.

Kalbar kita punya badan koordinasi. Untuk laut join commission meeting. Seperti itulah situasinya. Kalau ingin disempurnakan silahkan usul lewat Sesko atau Panglima TNI. Border management is not only the authority but also include many elements.

Pak Yudi:

Begitu besar permasalahan yang kita hadapi dalam rangka memmanage border. Badan sudah ada. Yang menjadi inti kelemahan kita adalah koordinasi. Seperti contohnya struktur kerjasama RI-Malaysia itu sudah ada dan dipimpin oleh Menhan, dsb. Tentunya dengan koordinasi ini diharapkan kedepannya dalam mengelola masalah perbatasan akan lebih cermat.

Pas tadi ada pertanyaan kapan border management itu dimulai, jawabannya adalah semenjak kita kehilangan pulau Sipadan-Ligitan. Itu merupakan *shock therapy* bagi Indonesia dimana kita kalah dalam diplomasi.

Mengenai ada daerah yang sudah ditetapkan dan yang belum, tentunya sudah dilengkapi dengan semacam *agreement*. Bagi yang belum ditetapkan, ada yang namanya *Grey Area*, yaitu klaim kepemilikan antara dua pulau tadi namun penyelesaiannya tetap dengan hukum internasional.

Kemudian tentang keimigrasian, tegaknya suatu Negara ada 3 pilar, polisi, jaksa dan *custom*. Apabila 3 ini berjalan dengan baik, maka keadaan Negara juga baik. Namun bukan berarti salah satu menonjol. Tiga-tiganya harus berjalan secara bersama-sama.

Masalah daerah tertinggal, menteri daerah tertinggal sudah ada. Jadi memang mungkin pelaksanaannya saja yang belum bisa terealisasi. Mungkin ada keterbatasan dana. Dan bagaimana mengatasi pulau Miangas? Adalah nasionalisme. Namun kita jangan menjual Negara. Karena kalau sudah menjual hutan atau pasir ke Negara lain itu sama saja dengan menjual Negara.

Intinya cuma satu. Kita tidak bisa mengukur baju kita dengan ukuran orang lain. Oleh karenanya kita tidak bisa menyamakan kebutuhan kita dengan orang lain, namun kita tetap perlu memahami konstelasi negara kita, dengan melihat secara spesifik bahwa kita memiliki lebih kurang 17 ribu pulau kemudian lebih kurang 3.653 ribu yang belum dikasih nama. 92

pulau terluar dan 12 pulau tidak ada penduduknya dan infrastruktur. Saat ini sedang diemban oleh Sesko TNI supaya pulau-pulau tersebut bisa dikelola untuk kesejahteraan bangsa. Terima kasih.

SESI I Bagian II

Pembicara Anak Agung Banyu Perwita, Phd.

Sesi Tanya jawab :

P: Emil Wahyudin (Mahasiswa HI Unpad)

Berkaitan dengan isu perbatasan, bagaimana TNI maupun Indonesia sebagai Negara membuat suatu manajemen keamanan yang bisa tanggap dalam isu tradisional dan ancaman baru yang penyebabnya adalah karena *the lack of resources*. Dan kemudian penyebab lainnya adalah *economic instability*. Kaitannya dengan lemahnya perbatasan, masalah yang timbul adalah *irregural immigration* atau *international terrorism* dan *transnational crime*.

Kalau kita berbicara tentang TNI dan perbatasan, pertanyaannya adalah bagaimana TNI menyikapi ancaman yang datang dari militer dan non militer dan bukan hanya datang *state* dan *non state actors*? Karena kita lihat selama ini TNI difungsikan untuk menghadapi *state actor* dan ancaman militer dan non militer yang datangnya dari *non state actor*. Kaitan dengan globalisasi dan perbatasan, masalah yang seringkali timbul adalah bukan cuma ancaman terhadap negara, tapi pada individu dan *human security*.

Kaitannya dengan RUU Kamnas yang masih menjadi perdebatan, kembali lagi kepada fungsi TNI, sprektum TNI dan fokusnya lebih besar kepada individu dan *human security*. Kalau kita berbicara mengenai perbatasan, bagaimana fungsi TNI dalam hal ini.

J: AA Banyu

Harus ada pembagian peran militer atau non militer. Jadi saya pikir kita harus berfikir comprehensive.

Sehingga apabila kita bisa berfikir ala matriks sebetulnya kita akan lebih mudah. Ini termasuk juga ketika kita berbicara mengenai persoalan management. karena pada dasarnya secara sederhana management itu adalah *to use any instrument of national power in order to coordinate or to achieve national interest*. Terus secara sederhana kurang lebih seperti itu apabila berbicara mengenai konteks keamanan. Sehingga dengan demikian, kita kemudian baru akan bisa memetakan peran-peran mana itu TNI dan non TNI.

Dalam konteks ini ada 3 hal yakni, 1. sebuah negara bisa melakukan itu secara Unilateral. Ini persoalan internal, domestic internal problems, dimana mereka akan bekerja, si negara tadi, memilahnya menjadi *agency* atau *interagency*. 2. Bilateral: ketika kita berbicara mengenai management perbatasan itu bukan hanya masalah Indonesia saja tetapi juga dengan negara tetangga., Singapura, Malaysia, dsb. So in order to do so, we have to collaborate with them. 3. Multilateral *as a whole nation state in the region, Southeast-Asia*. Nah kalau kita bisa membuat matriks dengan tiga pola ini, maka kita akan bisa memetakan masalah menjadi lebih detail mana TNI dan non TNI.

Persoalan kita adalah persoalan koordinasi. Masalah di Indonesia adalah mengenai koordinasi. Jadi misalnya begini, singkat kata bahwa kita akan menghadapi persoalan ini secara unilateral ketika kita berbicara mengenai *border* langsung konteksnya maka kita akan berbicara mengenai TNI di situ. Tapi, TNI tidak bisa sendirian karena di situ ada imigrasi, bea cukai, departemen luar negeri.

P: Kol. Susilo (Sesko AL)

Bagaimana pemahaman bangsa kita tentang geopolitik dan geostrategis. Saya melihat kebanyakan dari aktor Negara kita yang belum memahami mengenai geopolitiknya.

Tahukah kita bahwa dengan telah resminya UNCLOS yang lalu ditekankan bahwa sebenarnya-kita biasa menangani *security*- tidak bisa hanya perbatasan daratan dan perbatasan lautan. Harus komprehensif dan tidak bisa dikotomi. Khusus mengenai lautan, kita bisa bayangkan bahwa Negara kita memiliki 10 batas laut dengan negara tetangga. Kita memiliki 5,8 juta km² laut.

Disana kita memiliki *sovereign* dan *sovereignty*. 5,8 juta ada 2,7 ZEE kemudian 2,1 laut dalam, dan laut teritorial, dan kita hanya memiliki 1,9 daratan. Dari pemahaman tentang bentuk geografi kita sebenarnya disitulah awalnya kita membuat strategi. Nah pokok masalahnya sebenarnya di situ. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa kami memahami bahwa untuk melaksanakan *national security* maka tidak bisa terlepas dari *monitoring, controlling and surveillance* (MCS). Itu sama sekali belum kita miliki. Jadi bagaimana mungkin kita melaksanakan *national security* terutama di border kalau kita tidak memiliki kemampuan MCS. Itu tanggapan saya. Jadi menurut saya berbicara tentang perbatasan tidak bisa dikotomi hanya berbicara mengenai darat dan laut. Harus secara komprehensif.

J: Banyu

Terima kasih Pak. Saya tidak punya masalah dengan itu. Saya termasuk orang yang mencita-citakan untuk memiliki Angkatan Laut yang kuat. Saya

punya sebuah laporan bagaimana kekuatan Angkatan Laut kita dan disana kita lebih banyak mengambang. Jadi saya tidak punya persoalan sama sekali dengan itu dan kalimat pertama dalam defence white paper kita adalah *Indonesia is an archipelagic states*.

Kita memang sudah salah kaprah apabila nanti berbicara mengenai *national security strategy*, *national security policy* dan sebagainya. Dan saya mencita-citakan kapan yah Indonesia memiliki kapal induk? Perlu atau tidak kita punya kapal induk?

Dan satu hal yang perlu kita ketahui apa yang dilakukan kemarin oleh pesawat Singapura ketika membantu Adam Air. Mereka bukan hanya membantu, tetapi memotret habis seluruh apa yang ada di Indonesia. Lautan kita, dsb. Itu karena kita memang tidak mampu.

Persoalan tsunami kemarin kita meminta bantuan banyak pihak semata-mata karena ketidakmampuan kita. Jadi sebetulnya apakah kita tidak mampu atau tidak mau itu adalah persoalan berbeda. *National air power* kita sangat lemah. Kalau kita banyak dengar tentang pelanggaran batas wilayah, disekitar Batam, perairan Selat Phillips, itu udah ratusan kali Singapura melanggar kita. But, *we cant do anything*.

T : Al Araf (Mahasiswa S2 ITB)

Ada dilemma, keinginan dan realitas sekarang yang tidak seperti itu. Apa yang harus kita lakukan, apakah harus melakukan *strategic review* terlebih dahulu untuk mereview pembangunan kekuatan pertahanan kita dan kemudian perlahan demi perlahan diarahkan untuk membangun dan memperkuat manajemen perbatasan.

Kedua, ada *problem authority*, lintas antar departemen yang terlibat dalam penanganan *border security*. Dan juga ada pencampuradukan dalam penanganan *border security* yang juga aktor pelaksana dan penanggungjawab operasional.

Kadang aktor pelaksana juga menjadi penanggungjawab operasional begitu juga sebaliknya. Mungkin kalau penanggungjawab lebih berbicara mengenai *policy*. Dalam problematika struktur antar penanggungjawab operasional dengan pelaksana kebijakan, dan juga problematika banyaknya departemen yang terlibat, dalam konteks authority siapa yang paling baik untuk mengelola manajemen daerah perbatasan. Apakah menteri pertahanan, atau kita buat sendiri atau memang tepat di letakkan dalam Menteri Dalam Negeri seperti yang tadi dibicarakan.

J: Banyu

Kalau kita lihat dari paradigma pemikirannya, kalau boleh saya lari ke sana terlebih dahulu; dan karena ini memang betul persoalan yang comprehensive. ada dua pilihan, melihat ancaman *threats based assessment* (scope the level of threats and the nature) atau *capability based assessment*.

Memang antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Tapi cobalah kita memilih dan memilah. Kalau kita lihat pada *threat based assessment*, penilaian itu kita lihat pada tipe ancaman, karakteristik dan sebagainya, semua ancaman itu ada ditempat kita. Baik yang tradisional, non tradisional, national, international, transnational, dsb.

Tapi satu hal yang perlu kita ketahui juga, akan terjadi perubahan dan pergeseran pada *threat based assessment* tadi. nah persoalan yang seringkali masuk di dalam decision making process adalah ini dulu atau *capability* dulu. Jadi kita menilai dulu kapabilitas kita dengan konteks geografis tadi yang sudah diungkapkan.

Terus terang ini bukan pilihan yang mudah. Saya cenderung orang yang agak holistic ketika mencoba menggabungkan antara dua pendekatan ini. Jadi tidak bermain antara ekstrim kiri dengan ekstrim kanan. Kita akan bisa menghitung threat based assessment untuk menghitung capability. Tapi capability sekarang mungkin tidak cukup karena threat assessment kita begitu besar. Itu yang pertama.

Jadi perhitungan ini akan cukup mengambil energi banyak dan akan melibatkan banyak pihak juga, karena ancaman buat seseorang mungkin bukan ancaman buat orang lain.

Itu persoalan kan. Kemudian adalah, akan sangat dibutuhkan sekali political will. Ini akan berbicara pada konteks pengambilan kebijakan yang paling tinggi. Ini yang harus kita pahami.

Kemudian ketika berbicara mengenai *political will* dari pemerintah, maka kita juga harus melihat bagaimana the *role of parliament*. Seberapa banyak atau paham anggota dewan tentang masalah ini. Karena ini juga akan memunculkan legislasi-legislasi. Dalam konteks misalnya salah satu, karena kemarin juga saya terlibat cukup banyak, legislasi kita juga saya tidak tahu apakah ini sudah termasuk dalam konteks Prolegnas (program legislasi nasional), tetapi saya duga iya, DPR akan mendorong munculnya Undang-undang Perbatasan Wilayah Negara.

Tetapi terus terang saya tidak tahu sampai dimana pembahasannya. Karena saya hanya bisa mengomentari pada draft 1. Komentar dalam draft 1 ketika saya di minta untuk memberikan input mengenai RUU tersebut. DPR tidak terlalu paham bagaimana wilayah negeri ini, *Indonesia as a nation state*.

Karena ketika berbicara mengenai apa yang harus diatur, dan apa yang harus tidak diatur, itu *overlappingnya* muncul disana. Itulah sebabnya saya berbicara bahwa *the role of parliament is very crucial in order to help the management of our border* misalnya. Itu ketika berbicara mengenai hal tersebut. Semoga menjadi lebih bagus karena banyaknya masukan dari kalangan kampus atau akademisi yang memang pada waktu itu diminta.

Begitu juga dengan persoalan otoritas pusat dan daerah, mengenai siapa yang harus melaksanakan dan siapa yang harus membuat sebuah legislasi. Termasuk juga di kita adalah persoalan di DPRD. Terutama ketika wilayah mereka itu memiliki perbatasan dengan pihak luar. Itu juga menjadi persoalan masalah. Jadi itu adalah suatu persoalan yang saya pikir apabila diangkat ke dalam sebuah payung yang besar, terlepas dari kontroversi yang muncul, itu ketika berbicara mengenai *national security council*.

Saya pikir Dewan Keamanan Nasional, kalau dibentuk; tapi bagaimana bisa menggagas semua masukan kepada Presiden untuk memperhatikan masalah, salah satunya mengenai *management of border*. Karena ini yang bisa menjadi the main actor terutama ketika mencoba menuangkannya ke bawah. Tapi saya paham bahwa terlalu banyak persoalan-persoalan dari atas sampai ke bawah.

Bagaimana peran Menkopolhukam dan sebagainya ketika seharusnya menjadi koordinator justru menunjukkan koordinasi yang sangat lemah. Jadi kalau pertanyaan anda, secara sederhananya adalah where do we start? Saya pikir mungkin bisa dimulai dari atas terlebih dahulu. Sehingga kemudian sampai pada pihak yang bawah. Dalam konteks ini lebih menginginkan ada *authority* yang kuat dan tegas, *decisive* dari Negara ketika mencoba menggariskan kebijakan-kebijakan di bawah. Karena *national interest* bisa berubah, *national security system* bisa berubah, *national security* bisa berubah, tapi dibawah doktrin dan sebagainya tidak jalan; itu yang menjadi persoalan kan.

P : Anggarajati (Mahasiswa Unpad)

Sudah sejauh mana yang dilakukan oleh TNI menanggapi Indonesia security problem berkaitan dengan profesionalisme tubuh TNI itu sendiri? Apakah internal problem TNI itu belum berubah sama sekali, tidak diurus, atau justru terseret kepada arena politik, apakah sudah dilakukan ketika dituntut untuk profesional ditubuh TNI itu sendiri. Dan terakhir, mungkin Mas Banyu punya saran yang berkaitan dengan hal ini harap tolong disampaikan kepada forum ini.

J : Banyu

Saya tidak tahu sejauh mana, tetapi ini informasi yang saya peroleh, untuk mencoba katakanlah melihat perbatasan kita, Dephan yang saya

tahu ketika terlibat dalam Papua mengenai perbatasan, itu akan membuat pos baru disini dan itu termasuk juga sistem radar yang paling baru untuk melihat konteks Australia. Itu disekitar kecamatan yang langsung berhadapan dengan Laut Arafura untuk menghadapi konteks wilayah Australia.

Kemudian di Kupang, di Biak dan sekitar kabupaten Raja Ampat, itu yang saya dengar ketika berbicara mengenai perencanaan-perencanaan. Dalam konteks tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai perbatasan. Kemudian juga penguatan di Manado, Balikpapan ketika menghadapi konteks apa yang akan kita hadapi dari Sulawesi Utara, Mindanao bagian Selatan, Philipina. Kemudian di Natuna akan diperbaiki lagi, di Pontianak dan Kepulauan Riau, dan perencanaan berikutnya ada di Aceh ketika berbicara mengenai utara.

Di daerah pada peta, akan berbicara mengenai penguatan dari daerah Bali, dsb. Ini berbicara mengenai sistem radar yang bisa kita tangkap. Dan itu adalah upaya *non military* dan bisa juga menjadi data-data yang bisa kita gunakan untuk military tapi bagaimana kemampuan sergap dan lain sebagainya, Angkatan Laut dan Udara itu memang masih menjadi perhitungan lain karena kita memang kita berbicara mengenai alutista (alat utama sistem persenjataan), maka kita berbicara mengenai *policy* nya. Itu barangkali apabila berbicara mengenai apa yang sedang dan akan dilakukan.

T : Bakorkamla

Dalam upaya menuju kepada keamanan laut yang lebih kondusif, kami menginformasikan sejak tanggal 20 desember 2006 telah berdiri badan koordiansi laut jilid 2. karena jilid pertamanya itu tahun 1972. berdasarkan SKB 5 menteri. Yang 20 desember 2006 itu perdasarkan Perpres 81/2005 dimana Bakorkamla itu atau Indonesia Maritime Security Coordinating Board, diketuai oleh Menkopolhukam yang anggotanya terdiri dari 12 departemen, yang didalamnya ada Menlu, Mendagri, Menteri Kehutanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Dibawah anggota bakorkamla itu ada Timkorkana yang anggotanya ada 12 stake holder dimana satu bulan sekali mereka bertemu dan membahas dan memaparkan pertemuan-pertemuan di lapangan.

Carut marut yang tadi kita bahas tersebut beberapa kali sudah dipaparkan di depan tim korkamla dan bakorkamla. Jadi dari paparan tersebut ditemukan solusi, walaupun sifatnya koordinasi, tetapi menuju kepada strong recommendation untuk institusi yang terkait untuk membenahi dirinya masing-masing.

Bakorkamla memang tidak melakukan intervensi kepada pihak manapun. Dia lebih kepada koordinatif tetapi *strong accomodation*. Barangkali ke depan itu akan menjadi lembaga yang lebih kuat itu kita serangkan kepada penilaian pemimpin dan rakyatnya. Tapi yang jelas mungkin ini solusi sementara.

Untuk *contact point* dari pihak-pihak luar negeri, kemudian teman dialog bagi mereka yang merasa deadlock untuk berbicara kepada siapa, ada di jalan Dr. Sutomo no 11. dengan Ketua Bakorkamla, Menkopolkam dan Pelaksana Harian adalah Laksamana Madya Joko Sumaryono dan sudah beberapa kali membahas beberapa permasalahan, termasuk diantaranya adalah munculnya peraturan menteri perdagangan mengenai impor pasir.

Itu adalah hasil dari pembicaraan yang comprehensive menuju kepada apa yang terbaik yang bisa dibuat untuk negeri ini dengan pasir. Juga kemarin ada tanggapan, dan itu tidak lepas dari fungsi koordinasi yang telah berjalan; menuju kepada *strong recommendation* dan ada pemikiran untuk mulai ada instropeksi dari masing-masing pihak.

Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu awal yang kondusif ke depannya. Mau sementara atau dilanjutkan menjadi badan permanent itu permasalahan lain. Demikian sekedar informasi.

J : Banyu

Terimakasih informasinya. Semoga jilid 2 bisa berjalan dengan lebih baik daripada jilid 1, dan itu saya pikir adalah sebuah *awareness* baru. Dan itulah yang tadi kita lihat bahwa *high ranking officials* kita bahwa memang merasa perlu, butuh dan harus (it is a must for us) in order to keep our territorial border more secure, more safe.

Tetapi poin nya sekali lagi ketika berbicara mengenai penanggungjawabnya yang ada di menkopolkam. Ini nanti bisa menjadi persoalan baru, apakah memang seperti ini atau mungkin nanti ketika kita bisa menggagas dewan keamanan nasional itu ada di sana, karena presiden langsung dibawah, termasuk juga Ketua Dewan Keamanan Nasional.

Lalu model Ketua dewan keamanan yang seperti apa yang ingin kita buat karena persoalan di kita adalah selalu berbicara mengenai koordinasi keamanan laut.

Persoalan yang selama ini kita hadapi mudah-mudahan menjadi pelajaran yang lebih baik. Sehingga kita kemudian sampai pada rekomendasi.

Harapan kita semua, ini bisa berbicara juga mengenai *capability assessment*. Sejauh mana kapabilitas yang kita miliki untuk bisa menggagas koordinasi

keamanan laut yang bisa lebih baik lagi. Itu harapan kebanyakan diantara kita ketika bakorkamla jilid 2 yang baru 3 bulan, ke depannya bisa tertata menjadi lebih baik. Karena ini nanti kaitannya dengan Dephan ketika berbicara mengenai pertahanan.

Itu barangkali beberapa masukan ketika baru melihatnya dari sisi dimensi militer saja. Sementara dari tadi pagi, persoalan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan tradisional saja, melainkan juga dengan isu non tradisional, katakanlah *illegal logging* dan perdagangan gelap lainnya. Itu juga harus bisa kita atasi. Maka Bakorkamla sudah bisa menyiapkan konteks aparat yang relatif lebih baik termasuk juga di *custom* karena begitu *custom* menjadi persoalan, maka akan menjadi persoalan di negara lain. Kalau lautnya oke dan *custom*nya tidak oke, juga akan menjadi persoalan. Sehingga bakorkamla ini nantinya tidak harus ditutup dan menjadi bakorkamla jilid 3. Itu harapannya.

SESI II

Pembicara

Letkol. Janos Hegedus dan Zoltan Nagy (Hungaria)

Sesi Tanya jawab :

T: Kolonel Rahman (Sesko AU)

Pertama, jika terjadi situasi seperti di Yugoslavia (konflik etnis), bagaimana penjaga perbatasan anda menghadapinya?

Kedua, dengan kompleksitas penjaga perbatasan di Hungaria, bagaimana posisi dinas bea cukai untuk dua dan tiga tahun kedepan?

J : Janos

Terima kasih atas pertanyaannya. Kami pernah mengalami hal seperti ini. Apa yang terjadi di Balkan, Yugoslavia dan perang di Kosovo. Periode itu kami mengubah struktur lembaga kami dari tipe militer menjadi tipe polisi.

Penjaga perbatasan Hungaria punya rencana yang ketat dalam mengamankan perbatasan, yakni mengkonsentrasi kekuatan pada asal ancaman, dalam hal ini kami bekerja sama dengan militer Hungaria. Kami juga bekerja sama dengan Polisi udara Hungaria. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya penjaga perbatasan Hungaria merupakan badan independen, bukan bagian dari polisi.

Tapi saat ketegangan memuncak dan konstitusi kami menyebutkan tentang situasi tersebut (darurat), maka kami harus menyiapkan sejumlah rencana. Rencana persiapan seperti konsentrasi kekuatan dan konsentrasi teknikal dan persiapan lainnya bekerjasama dengan negara lainnya untuk melindungi rakyat Hungaria dan harta bendanya.

Tentang bea cukai Hungaria, merupakan bagian dari Departemen Keuangan. Sedangkan penjaga perbatasan Hungaria adalah bagian dari Departemen Hukum dan Kehakiman. Jadi kami bekerja lintas departemen. Tugas dari bea cukai adalah berkaitan dengan pajak barang. Kami punya kontrol bea cukai di perbatasan dekat Kroasia, Serbia dan Ukraina. Perbatasan kami dengan negara-negara itu adalah bagian dari perbatasan luar dari Uni Eropa.

Sementara perbatasan dengan Slovakia, Austria dan Rumania, kami tidak punya kontrol bea cukai yang permanen karena dalam konstitusi Uni Eropa dinyatakan perbatasan internal tidak perlu ada kontrol bea cukai, kecuali kasus yang spesial. Di daerah ini dinas bea cukai Hungaria menggunakan kontrol yang bergerak (*mobile*). Tapi mereka tetap melakukan kontrol yang ketat.

P : Sri Yunanto (IDSPS)

Kami ingin tahu bagaimana penjaga perbatasan Hungaria mengalami reformasi yang sukses itu. Pasti ada tarik menarik antara yang konservatif dan reformis dalam tingkat politik. Menurut saya soalnya ada ditingkat politik. Detail yang penting dari Hungaria adalah transformasi dari tipe militer menjadi tipe demokratis? Bisakah anda jelaskan lebih lanjut? Apa alasan dibalik reformasi tersebut?

J: Zoltan dan Janos

Zoltan : Saya akan serahkan pertanyaan ini pada Janos untuk menjawab

Janos : Terima kasih atas pertanyaan yang bagus.

Awalnya, kami punya 19.000 pasukan penjaga perbatasan, sekarang kami punya 10.500 personel termasuk diantara 1.000 pegawai sipil. Dalam proses itu, personel dari unsur wajib militer dikurangi dan banyak yang keluar. Selain itu tempat penahanan (red; sel) dikurangi yang berakibat berkurangnya staf. Sementara itu, terutama setelah bergabung dalam Uni Eropa, kami harus berkonsentrasi pada perbatasan internal yaitu di Austria, Slowakia. Dan pengurangan juga terjadi.

Pertanyaan kedua soal kualitas dan kuantitas. Kita punya 10 wilayah direktorat, dan satu markas besar. Hungaria memiliki 19 propinsi, bisa dikatakan satu direktorat penjaga perbatasan menjaga 2 propinsi. Kami memiliki 51 kantor penjaga perbatasan diseluruh Hungaria. Sebagai contoh, daerah yang menjadi tanggungjawab saya ada 40 wilayah.

Kami juga punya 15 unit *mobile forces*, dimana dapat digerakkan ke berbagai lokasi dengan cepat. Mereka memiliki banyak kendaraan, sehingga bisa bergerak cepat. Selain itu kami juga punya unit investigasi kriminal dan unit intelijen. Kasus kriminal yang ada kaitannya dengan persoalan

imigrasi ilegal ditangani oleh unit investigasi ini. Mereka memiliki fasilitas penahanan. Jadi imigran ilegal yang ditangkap biasanya ditahan di pusat penahanan orang asing.

T: Kolonel Sipahutar (Sesko TNI)

Anda sebutkan pada 1989, Hungaria membiarkan 62.000 rakyat Jerman timur, menyeberang ke Austria melalui perbatasan anda. Apakah alasannya. Dan ketika Uni Sovyet menginvasi Hungaria tahun 1956, apakah tindakan penjaga perbatasan Hungaria saat itu?

J: Janos

Alasan sederhana, karena alasan kemanusiaan. Mereka bagian dari pengungsi politik dari Jerman Timur, awalnya mereka minta visa ke Jerman barat di Hungaria. Namun, mereka tidak dapat memperolehnya. Karena makin lama terlalu banyak pengungsi yang terdiri dari anak-anak, wanita, orang tua, maka pemerintah Hungaria terpaksa berunding dengan pihak Austria dan akhirnya disepakati bahwa Austria akan membuka perbatasan, Kepala negara Jerman Barat juga setuju untuk menerima para pengungsi. Ketika itu, upaya yang dilakukan pemerintah Hungaria kurang disetujui oleh pimpinan partai komunis Uni Sovyet, namun Sovyet tidak melakukan tindakan militer apapun pada Hungaria. Artinya Sovyet pun sebenarnya dapat menerima alasan-alasannya.

Pertanyaan kedua, saat itu situasi sangat menyedihkan dalam sejarah Hungaria. Mahasiswa protes atas kehadiran pasukan Sovyet. Tapi ketika pemerintah Hungaria melunak terhadap tuntutan mahasiswa untuk melakukan reformasi di Hungaria. Maka Uni Sovyet melakukan invasi. Apa yang dilakukan penjaga perbatasan Hungaria, tidak ada karena persenjataan mereka sangat lemah dibandingkan kekuatan tentara Uni Sovyet. Uni Sovyet punya berbagai macam tank, sedangkan penjaga perbatasan kami hanya punya senjata bedil. Jadi kekuatannya tidak seimbang. Jadi kami membiarkan pasukan Sovyet masuk ke wilayah kami.

T: Rangga (Mahasiswa S-2 ITB)

Berkaitan dengan tipe penjaga perbatasan, seperti di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh militer. Sedangkan melihat Hungaria, sekarang penjaga perbatasannya dilakukan dengan tipe polisi. Yang saya ketahui penjaga perbatasan di sejumlah negara dilakukan dengan tipe paramiliter. Tentu keputusan tentang tipe organisasi tergantung dengan politik ataupun kondisi geografis. Menurut anda apa keuntungan dari manajemen perbatasan dengan tipe polisi itu?

J: Janos

Jawabannya seperti ini, militer Hungaria tidak memiliki paramiliter. Kami hanya punya militer yang melakukan tugas pertahanan negara. Sedangkan

organisasi penegakan hukum terdiri dari polisi, penjaga perbatasan, bea cukai dan lembaga penanganan bencana alam.

Pertanyaan kedua, apa keuntungannya. Pagi tadi kita sudah lihat tipe dan dinamika keamanan, apalagi di Eropa tantangannya atau ancaman tradisional sudah berkurang sejak bubarnya Uni Sovyet dan munculnya sejumlah ancaman baru. Ancaman seperti, kriminal terorganisir, penyelundupan obat terlarang, penyelundupan senjata dan penyelundupan manusia. Dengan tantangan baru ini, maka organisasinya harus berubah pula.

Tidak ada suatu negarapun dapat menangani penyelundupan manusia dengan tank baja, sehingga pemerintah harus menyiapkan satuan polisi tangkas dan terlatih khusus untuk menghadapi upaya penyelundupan manusia tersebut. Ataupun dalam menghadapi penyelundupan barang atau obat-obatan terlarang, hal yang sama terjadi. Jadi kita tidak bisa menghadapi para penyelundup itu dengan pesawat jet tempur, namun kita dapat menghadapinya dengan orang-orang terlatih ataupun pasukan khusus. Artinya tantangan baru perlu dibentuk struktur baru.

PROFIL INSTITUSI



Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSI) didirikan pada tahun 1996 dalam wadah forum diskusi yang mengkaji sejumlah isu yang seringkali terjadi atau menjadi masalah pada era tersebut, seperti; konflik horizontal dan vertikal, gerakan demokrasi, hubungan antara sipil-militer, serta isu-isu strategis dalam lingkup regional maupun internasional.

Dalam perkembangannya Lesperssi menempatkan posisi sebagai organisasi non-pemerintah (ornop/ngo) yang memfokuskan untuk melakukan kegiatan yang berada dalam lingkup kajian strategis, pertahanan dan keamanan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Lesperssi berupa; penelitian, pelatihan, penyelenggaraan seminar, lokakarya, serta mempublikasi sejumlah penelitian, yang diharapkan dapat mendukung atau meningkatkan akuntabilitas publik, tata pemerintahan yang baik, kendali politik yang demokratis, serta kualitas demokrasi.

LESPERSI

Jl. Petogogan I, No.30, Blok A, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12140
Indonesia

Telp. : (021) 7252725

Fax : (021) 7262305

E-mail : strategi@centrin.net.id

Website : www.lesperssi.or.id



The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces

The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) didirikan oleh pemerintah Swiss pada bulan Oktober 2000. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan yang searah dengan standar demokrasi. Lembaga ini melakukan penelitian mengenai contoh-contoh yang ideal, meningkatkan pengembangan norma-norma yang sesuai pada tingkatan nasional dan internasional, membuat rekomendasi kebijakan, dan menyediakan program konsultasi dan asistensi domestik. Para mitra DCAF diantaranya adalah pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan sejumlah aktor-aktor sektor keamanan seperti polisi, kehakiman, badan intelijen, badan penjaga perbatasan dan militer. Lembaga ini bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong dan memperkuat kontrol sipil yang demokratis terhadap organisasi-organisasi sektor keamanan.

DCAF adalah sebuah yayasan internasional dengan anggota sebanyak 48 negara (termasuk Distrik Jenewa). Perwakilan negara-negara ini kemudian dikelompokkan dalam Dewan Yayasan. Badan penasehat utama dari lembaga ini, yakni Dewan Penasehat Internasional DCAF, terdiri dari para ahli dari berbagai bidang yang terkait dengan aktifitas lembaga. Jumlah staf di lembaga ini berjumlah lebih dari 70 orang yang berasal lebih dari 30 negara. Divisi utama DCAF adalah Operasi dan Penelitian yang saling bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program-program DCAF sebagai berikut:

- Melaksanakan penelitian untuk mengidentifikasi tantangan utama yang muncul dari sektor keamanan dalam pemerintahan demokratik, dan mengumpulkan contoh-contoh yang ideal untuk mengatasi tantangan tersebut.
- Memberikan dukungan melalui program konsultasi dan asistensi praktek kerja ke semua pihak, pada umumnya kepada pemerintah, parlemen, pejabat militer, dan organisasi internasional.

Saat ini DCAF dipimpin oleh Duta Besar Dr. Theodor H. Winkler. Kantor utama DCAF terletak di Jenewa, Swiss dan memiliki sebuah kantor perwakilan di Brusells, Belgia.

The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

Rue de Chantepoulet 11, P.O.Box 1360, CH-1211 Geneva I, Switzerland.

Tel : +41 (22) 741 77 00

Fax : +41 (22) 741 77 05

E mail : info@dcaf.ch

Situs : www.dcaf.ch